

RKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2026

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengmbilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
(2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.
(3) RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud:
    a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
    b. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
    c. pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
(4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

BAB II
PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan melalui proses sebagai berikut:
    a. pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum Perangkat

Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai pada tingkat musyawarah rencana pembangunan kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD Tahun 2026; dan

b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.

(2) Naskah RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
g. BAB VII PENUTUP.

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 438

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat diselesaikan. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana program, kegiatan, serta pagu indikatif yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Proses penyusunan dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan bottom-up–top-down, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, serta forum perangkat daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keterpaduan, sinergi, dan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. RKPD Tahun 2026 juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Natuna secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan kerja sama dalam proses penyusunan RKPD ini, khususnya kepada seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Natuna. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Ranai, 4 September 2025
BUPATI NATUNA

(Cen Sui Lan)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- **ii**
DAFTAR ISI ---------- **iii**
DAFTAR TABEL ---------- **v**
DAFTAR GAMBAR ---------- **xv**
BAB 1 PENDAHULUAN ---------- **I-1**
1.1 Latar Belakang ---------- I-1
1.2 Dasar Hukum ---------- I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ---------- I-6
1.4 Maksud dan Tujuan ---------- I-8
1.4.1 Maksud ---------- I-8
1.4.2 Tujuan ---------- I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ---------- I-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ---------- **II-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah ---------- II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ---------- II-3
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II-9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ---------- II-28
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ---------- II-97
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ---------- II-110
2.2.1 Rincian Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 ----- 113
B2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ---------- 509
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu Strategis) ---------- 509
2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah --- 512
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH --------- **III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi ---------- III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional ---------- III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ---------- III-12
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna ---------- III-15
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ---------- III-22
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah ---------- III-24
3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ---------- III-36
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ---------- **IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ---------- IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ---------- IV-11
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- IV-11
4.2.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Riau ---------- IV-29

4.2.3 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Dengan Prioritas Nasional-------- IV-47
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial---------- IV-78
4.3.1 Aspek Tematik---------- IV-78
4.3.2 Aspek Holistik ---------- IV-81
4.3.3 Aspek Integratif ---------- IV-82
4.3.4 Aspek Spasial ---------- IV-83
4.4 Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) ---------- IV-84
4.5 Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)---------- IV-96
4.6 Tindaklanjut Terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah ---------- IV-101
4.7 Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD---------- IV-111
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH---------- V-1
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH---------- VI-1
BAB 7 PENUTUP ---------- VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Daftar Nama Kecamatan, Jumlah dan Nama Desa, serta Jumlah dan Nama Kelurahan di Kabupaten Natuna Tahun 2024 ---------- II-2

Tabel 2.2: Luas Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan---------- II-4

Tabel 2.3: Jumlah Pulau di Kabupaten Natuna Menurut kecamatan ------- II-5

Tabel 2.4: Jarak Lurus Dari Pusat Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten ---- II-6

Tabel 2.5: Jumlah Penduduk, Distibusi Penduduk, dan Laju Perumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2025 ---------- II-7

Tabel 2.6: Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan Tahun 2025 ---------- II-8

Tabel 2. 7: Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Kelomppok Umur Tahun 2025 ---------- II-8

Tabel 2. 8: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku ---------- II-9

Tabel 2. 9: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (Miliar Rupiah) ---------- II-10

Tabel 2.10: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (Miliar Rupiah) ---------- II-11

Tabel 2.11: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku ---------- II-12

Tabel 2.12: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024 (Tanpa Migas) ---------- II-13

Tabel 2. 13: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024---------- II-14

Tabel 2.14: Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year (YoY) ---------- II-15

Tabel 2. 15: Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional ---------- II-20

Tabel 2. 16: Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional ---------- II-20

Tabel 2. 17: Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020-2024)---------- II-21

Tabel 2.18: Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna, 2020 – 2024 ------- II-22

Tabel 2.19: Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Komoditas Non Makanan di Kabupaten Natuna, 2020 – 2024 ---------- II-22

Tabel 2. 20: Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020– 2024 ---------- II-23

Tabel 2. 21: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna 2020-2024 (persen) ---------- II-24

Tabel 2. 22: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (per Agustus)---------- II-25

Tabel 2. 23: Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna---------- II-26

Tabel 2.24: Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ---------- II-26

Tabel 2. 25: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020–2024 ---------- II-26

Tabel 2. 26: Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional---------- II-27

Tabel 2. 27: Perbandingan Umur harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ---------- II-27

Tabel 2.28: Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024-------- II-29

Tabel 2.29: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan---------- II-30

Tabel 2.30: Banyaknya Sekolah di Kabupaten Natuna, 2020-2024 (Dalam Unit) ---------- II-32

Tabel 2.31: Rasio Guru-Murid di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 --- II-32

Tabel 2.32: Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) ---------- II-33
Tabel 2.33: Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 --------- II-33
Tabel 2.34: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 ---------- II-34
Tabel 2.35: Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Natuna ---------- II-36
Tabel 2.36: Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna ---------- II-36
Tabel 2.37: Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024---------- II-37
Tabel 2.38: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-39
Tabel 2.39: Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Dan Jenis Permukaan di Kabupaten Natuna, Tahun 2024 (Km) ---------- II-41
Tabel 2. 40 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan,---------- II-41
Tabel 2.41: Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024---------- II-42
Tabel 2.42: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman II-42
Tabel 2.43 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak---------- II-43
Tabel 2.44: Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak ---------- II-44
Tabel 2.45: Capaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja 2024 ------ II-44
Tabel 2.46: Capaian Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 ---------- II-46
Tabel 2.47: Capaian Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024 ---------- II-48
Tabel 2. 48: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat---------- II-50
Tabel 2.49: Capaian Indikator SPM Bidang Sosial ---------- II-53
Tabel 2.50: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan---------- II-54
Tabel 2.51: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ---------- II-57

Tabel 2. 52 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024 ---------- II-60

Tabel 2.53: Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional ---------- II-61

Tabel 2. 54: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024---------- II-62

Tabel 2.55: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ---------- II-64

Tabel 2.56: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024 ---------- II-65

Tabel 2.57: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 --------- II-66

Tabel 2.58: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024---------- II-67

Tabel 2.59: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan---------- II-68

Tabel 2.60: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024---------- II-69

Tabel 2.61: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024 ---------- II-71

Tabel 2.62: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ---------- II-72

Tabel 2.63: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2024 ---------- II-73

Tabel 2. 64: Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2021-2024---------- II-76

Tabel 2. 65: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024---------- II-77

Tabel 2.66: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 II-78

Tabel 2. 67: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 ---------- II-78

Tabel 2.68: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024 ---------- II-79

Tabel 2.69: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024 ---------- II-79

Tabel 2.70: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ---------- II-80

Tabel 2.71: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ---------- II-81

Tabel 2.72: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ---------- II-82

Tabel 2.73: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024 ---------- II-83

Tabel 2.74: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024 ---------- II-83

Tabel 2.75: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024 ---------- II-84

Tabel 2.76: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 ---------- II-85

Tabel 2. 77: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024 ---------- II-87

Tabel 2.78: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 ---------- II-88

Tabel 2.79: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ---------- II-90

Tabel 2.80: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2024 ---------- II-91

Tabel 2.81: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ---------- II-92

Tabel 2.82: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 ---------- II-93

Tabel 2.83: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 ---------- II-94

Tabel 2.84: Evaluasi Pencapaian Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024 ---------- II-94

Tabel 2. 85: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Natuna ---------- II-95

Tabel 2. 86: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2024 ---------- II-95

Tabel 2. 87: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024 ------ II-96

Tabel 2.88: Evaluasi Pencapaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2024 ---------- II-96

Tabel 2.89: Evaluasi Pencapaian Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ---------- II-97

Tabel 2.90: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024 (Milyar Rupiah) ---------- II-98

Tabel 2.91: Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ---------- II-100

Tabel 2.92: PDRB per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (Juta Rupiah) ---------- II-100

Tabel 2.93: Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024---------- II-102

Tabel 2. 94: Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024---------- II-103

Tabel 2.95: Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Natuna 2022-2024---------- II-106

Tabel 2. 96: Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Natuna ---------- II-106

Tabel 2.97: Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Natuna---------- II-107

Tabel 2.98: Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024---------- II-110

Tabel 2. 99: Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi Hasil terhadap Renja/RKPD Triwulan IV Tahun 2024---------- II-110

Tabel 2.100: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2024 ---------- II-113

Tabel 2.101: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 Bidang Kesehatan---------- II-121

Tabel 2.102: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- II-167

Tabel 2.103: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman---------- II-177

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat --------- II-188

Tabel 2.105: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ---------- II-205

Tabel 2.106: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ------- II-212

Tabel 2.107: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ---------- II-219

Tabel 2.108: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ---------- II-230

Tabel 2.109: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan --------- II-237

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ---------- II-240

Tabel 2.111: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- II-248

Tabel 2.112: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa---------- II-253

Tabel 2.113: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana---------- II-261

Tabel 2.114: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ------ II-268

Tabel 2. 115: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika---------- II-275

Tabel 2. 116: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ---------- II-281

Tabel 2. 117: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ---------- II-285

Tabel 2.118: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ---------- II-292

Tabel 2.119: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ---------- II-301

Tabel 2. 120: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Persandian --------- II-302

Tabel 2.121: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan -------- II-303

Tabel 2.122: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ------ II-306

Tabel 2. 123: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ---------- II-312

Tabel 2.124: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan PErikanan---------- II-315

Tabel 2. 125: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ---------- II-322

Tabel 2. 126: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ---------- II-331

Tabel 2. 127: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ------- II-336

Tabel 2. 128: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ------ II-341

Tabel 2.129: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pemerintahan Bidang Transmigrasi -------- II-348

Tabel 2. 130: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) ---------- II-349

Tabel 2. 131: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) ---------- II-358

Tabel 2. 132: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) ---------- II-364

Tabel 2. 133: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD-P tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) ---------- II-374

Tabel 2. 134: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) ---------- II-389

Tabel 2. 135: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)---------- II-392

Tabel 2. 136: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)---------- II-393

Tabel 2. 137: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)---------- II-395

Tabel 2. 138: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)---------- II-399

Tabel 2. 139: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Kewillayahan (Kecamatan) ---------- II-403

Tabel 2.140: Permsalahan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan :-------- II-513

Tabel 3.1: Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 -- III-8

Tabel 3.2: Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026---------- III-10

Tabel 3.3 Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau-------- III-11

Tabel 3. 4 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau---------- III-13

Tabel 3.5: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024--------- III-16

Tabel 3. 6: PDRB Per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 -------- III-17

Tabel 3. 7: Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna---------- III-20

Tabel 3. 8: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-Triwulan I 2025 (Juta Rupiah) ---------- III-26

Tabel 3. 9: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- III-28

Tabel 3.10: Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – Triwulan 1 2025 (Juta Rupiah)---------- III-30

Tabel 3. 11: Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026------ III-31

Tabel 3. 12: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021- Triwulan 1 2025 (Juta Rupiah)---------- III-34

Tabel 3.13: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- III-35

Tabel 3. 14: Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Natuna Tahun 2026------- III-39

Tabel 3. 15: Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- III-40

Tabel 4.1: Keterkaitan Antara Unsur Utama Visi dengan Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ---------- IV-5

Tabel 4. 2: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- IV-7

Tabel 4.3: Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- IV-12

Tabel 4. 4: Sasaran Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026 ---------- IV-20

Tabel 4. 5: Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026 ---------- IV-20

Tabel 4. 6: Fokus Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ---------- IV-27

Tabel 4. 7: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ---------- IV-35

Tabel 4.8: Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ---------- IV-39

Tabel 4. 9: Dukungan Program RKPD Terhadap Asta Cita ---------- IV-51

Tabel 4.10: Dukungan Program RKPD Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026 ---------- IV-69

Tabel 4.11: Dukungan Program Rkpd Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional Tahun 2026 ---------- IV-72

Tabel 4.12: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) ---------- IV-85

Tabel 4.13: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ---------- IV-96

Tabel 4.14: Tindaklanjut Terhadap Permsalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ---------- IV-101

Tabel 4.15: Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ---------- IV-112

Tabel 5. 1: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dan Pakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Natuna ---------- V-1

Tabel 6. 1: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ---------- VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah---------- I-6

Gambar 2.1: Peta Wilayah Kabupaten Natuna ---------- II-4

Gambar 2. 2 Inflasi Tahunan Provinsi Kepulauan Riau Juni 2025 (y-oy) - II-19

Gambar 2. 3: Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya, Tahun 2024---------- II-98

Gambar 2. 4: Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Natuna ---------- II-103

Gambar 2. 5: Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024---------- II-104

Gambar 2. 6: Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna 2020-2025 (2025=proyeksi) ---------- II-104

Gambar 2. 7: Grafik Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024---------- II-105

Gambar 3.1: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Global (2023-2026) ---------- III-1

Gambar 3. 2: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2020-2025) ------- III-2

Gambar 3.3: Perkembangan Inflasi Indonesia (2021-2024)---------- III-2

Gambar 3. 4: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna ---------- III-18

Gambar 3. 5: Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah ---------- III-25

Gambar 3. 6: Realisasi Belanja Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 ------ III-29

Gambar 3. 7: Realisasi Pembiayaan Kabupaten Natuna Tahun 2020-2025 III-33

Gambar 4. 1: Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026---------- IV-39

Gambar 4. 2: Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026---------- 50

Gambar 4.3: Keterkaitan Tematik Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026 --------- 80



BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan bagian integral dari siklus sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah. RKPD ini disusun untuk menjembatani rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sebagai dokumen strategis, RKPD memiliki peran penting dalam mengarahkan prioritas pembangunan tahunan berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, dengan tetap memastikan keselarasan terhadap arah pembangunan nasional dan regional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna berpedoman pada arah kebijakan nasional dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penjabaran visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita menjadi landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, yang menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri tersebut, RKPD Tahun 2026 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana

kerja, pendanaan, serta kegiatan strategis nasional yang relevan. Penyusunan RKPD dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra Perangkat Daerah dan KUA-PPAS, sehingga tercipta konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Natuna memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang strategis namun dihadapkan pada tantangan khas, seperti keterbatasan infrastruktur konektivitas, keterpencilan wilayah, serta pentingnya penguatan ketahanan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah melalui penyelenggaraan pembangunan yang berbasis potensi lokal, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 turut mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2025 juga dijadikan acuan dalam merumuskan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, aplikatif, dan mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan tahunan secara efektif untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif dan yuridis dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dasar hukum tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);

21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

23) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1053;

24) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

25) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

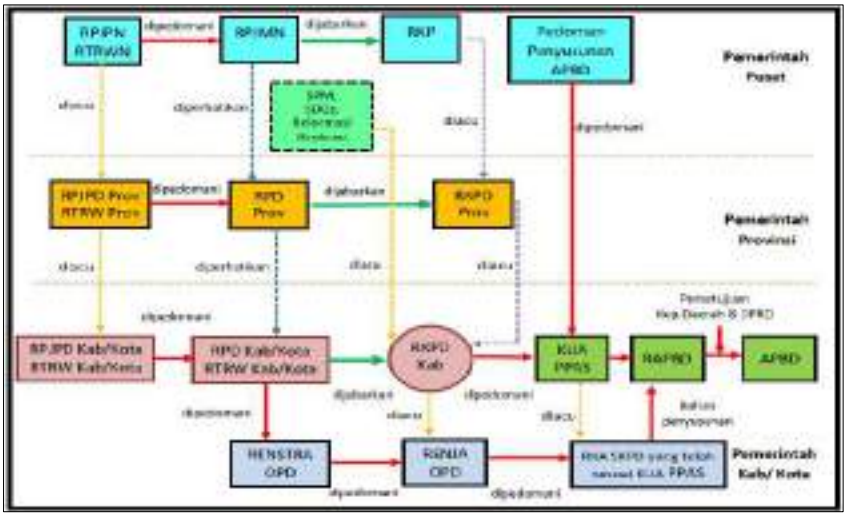
26) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);

27) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. RKPD menjadi penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD), serta menjadi dasar dalam proses penganggaran melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, hubungan RKPD dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya bersifat integral dan saling menguatkan.

Gambaran umum keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 1.1: Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Adapun hubungan antar dokumen dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

1) Hubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
   RKPD Tahun 2026 mengacu pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2045. Dengan memegang prinsip kesinambungan, RKPD diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan, melalui tahapan sasaran dan strategi yang lebih operasional.
2) Hubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
   RKPD Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Program, kegiatan, indikator kinerja, serta target dalam RKPD harus sejalan dan konsisten dengan kerangka kerja

RPJMD. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam jalur pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3) Hubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
   RKPD harus selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban mengintegrasikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran nasional, termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah kabupaten.
4) Hubungan dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
   RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan. Arah kebijakan, prioritas, dan target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD harus diadopsi oleh setiap perangkat daerah dalam dokumen perencanaannya masing-masing.
5) Hubungan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
   RKPD menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKPD dituangkan dalam kebijakan anggaran dan batasan plafon yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai dasar penyusunan R-APBD.
6) Hubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Perda APBD);
   RKPD berperan penting dalam memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Seluruh muatan dalam RKPD, terutama program, kegiatan, pagu indikatif, dan indikator kinerja, menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, RKPD memiliki keterkaitan langsung dan normatif dengan dokumen hukum penganggaran daerah.
7) Hubungan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   Proses penyusunan RKPD, KUA-PPAS, Renja, hingga R-APBD dilakukan melalui SIPD. Hal ini memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dapat diakses secara terintegrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan keterkaitan yang erat antar dokumen tersebut, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen utama yang menjamin keselarasan arah pembangunan daerah dengan target nasional, serta menjamin keterpaduan antara rencana dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, serta sinkronisasi dengan Program Strategis Nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional lainnya.

RKPD juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah:

1) **Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah** sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 ke dalam rencana tahunan yang terukur dan operasional.
2) **Menjamin konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran,** baik secara vertikal (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) maupun horizontal antar Perangkat Daerah.
3) **Mengidentifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah** tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, usulan masyarakat melalui Musrenbang, serta arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026.
4) **Menjadi acuan utama dalam proses penyusunan KUA, PPAS, dan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026,** sehingga alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.
5) **Memastikan sinergi antara prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN)** dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.
6) **Mendorong akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan daerah,** dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengelolaan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2026 secara tepat dan sistematis, diharapkan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna dapat lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sistematika ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal, serta menjadi acuan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan.

Adapun sistematika penulisan dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Substansi dalam bab ini mencakup:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi umum daerah sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan, yang terdiri dari:

2.1. Kondisi Umum Daerah
    2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
    2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
    2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
    2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
    2.3.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
    2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan arah dan kondisi ekonomi serta arah kebijakan keuangan daerah, meliputi:
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi, RPJMD, dan analisis isu strategis, meliputi:
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan analisis dan evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dicapai dalam tahun rencana, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Memuat simpulan umum serta arahan dan tindak lanjut dari penyusunan RKPD, termasuk keterkaitan dengan penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Struktur sistematika ini juga akan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berisi tabel, grafik, matriks program dan kegiatan, serta data dukung lainnya yang diperlukan dalam perumusan RKPD secara lengkap dan menyeluruh.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah merupakan bagian penting dalam dokumen RKPD yang berfungsi sebagai dasar analisis dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan tahunan. Pada bagian ini disajikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik geografis dan demografis Kabupaten Natuna, disertai dengan perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Informasi ini memberikan kerangka kontekstual yang utuh terhadap dinamika pembangunan daerah serta menjadi pijakan dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam rencana kerja pembangunan tahun 2026. Penyajian kondisi umum daerah dalam subbab ini diharapkan dapat menggambarkan realitas objektif pembangunan daerah dan mendukung proses pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah kepulauan terluar di wilayah barat laut Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam konteks geo-ekonomi dan geo-politik. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang pada awal pembentukannya terdiri dari enam kecamatan, yaitu Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, dan Serasan.

Dengan adanya kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna terus melakukan pemekaran wilayah administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pada tahun 2004, jumlah kecamatan bertambah menjadi sepuluh melalui pembentukan Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut. Pemekaran wilayah ini terus berlanjut, dan pada tahun 2007 Kabupaten Natuna terdiri dari 17 kecamatan. Namun, dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008**,** enam kecamatan yang berada di gugusan Pulau Anambas menjadi bagian dari kabupaten baru tersebut.

Setelah pemekaran tersebut, Kabupaten Natuna mengalami penyesuaian wilayah dengan memiliki 12 kecamatan. Pemekaran berikutnya dilakukan pada tahun 2014 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014**,** yang menambah tiga kecamatan baru, yaitu Bunguran

Batubi, Pulau Tiga Barat, dan Suak Midai. Pada tahun 2022, dua kecamatan tambahan kembali dibentuk, yakni Kecamatan Pulau Seluan dan Kecamatan Pulau Panjang, sehingga saat ini Kabupaten Natuna terdiri dari 17 kecamatan, 70 desa, dan 7 kelurahan**.**

Informasi selengkapnya mengenai jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Natuna Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Daftar Nama Kecamatan, Jumlah dan Nama Desa, serta Jumlah dan Nama Kelurahan di Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah dan Nama Desa		Jumlah dan Nama Kelurahan	
1	Bunguran Timur	3	Sepempang Sungai Ulu Batu Gajah	4	Ranai Kota Bandarsyah Ranai Darat Batu Hitam
2	Bunguran Barat	4	Binjai Mekar Jaya Pian Tengah Selaut	1	Sedanau
3	Bunguran Timur Laut	7	Ceruk Kelanga Tanjung Limau Manis Pengadah Selemam Sebadai Hulu	0	-
4	Bunguran Selatan	4	Cemaga Cemaga Utara Cemaga Selatan Cemaga Tengah	0	-
5	Bunguran Tengah	3	Harapan Jaya Air Lengit Tapau	0	-
6	Bunguran Utara	6	Kelarik Kelarik Utara Kelarik Air Mali Gunung Durian Teluk Buton Belakang Gunung	0	-
7	Pulau Tiga	6	Tanjung Batang Sabang Mawang Serantas Sabang Mawang Barat Teluk Labuh Sededap	0	-
8	Serasan	6	Batu Berian Tanjung Setelung Pangkalan Kampung Hilir Tanjung Balau Jermalik	1	Serasan

No	Kecamatan	Jumlah dan Nama Desa		Jumlah dan Nama Kelurahan	
9	Serasan Timur	4	Arung Ayam Air Nusa Air Ringau Payak	0	-
10	Midai	2	Sebelat Air putih	1	Sabang barat
11	Kecamatan Subi	6	Subi Terayak Meliah Subi besar Subi Besar Timur Meliah Selatan	0	-
12	Pulau Laut	3	Air Payang Tanjung Pala Kadur	0	-
13	Bunguran Batubi	5	Batubi Jaya Gunung Putri Sedarat Baru Sedanau Timur Semedang	0	-
14	Suak Midai	3	Gunung Jambat Batu Belanak Air Kumpai	0	-
15	Pulau Tiga Barat	4	Pulau Tiga Kumbik Utara Selading Setumuk	0	-
16	Pulau Seluan	2	Kelarik Barat Seluan Barat	0	-
17	Pulau Panjang	2	Pulau Panjang Pulau Kerdau	0	-
Jumlah Desa/Kelurahan		70 Desa		7 Kelurahan	

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

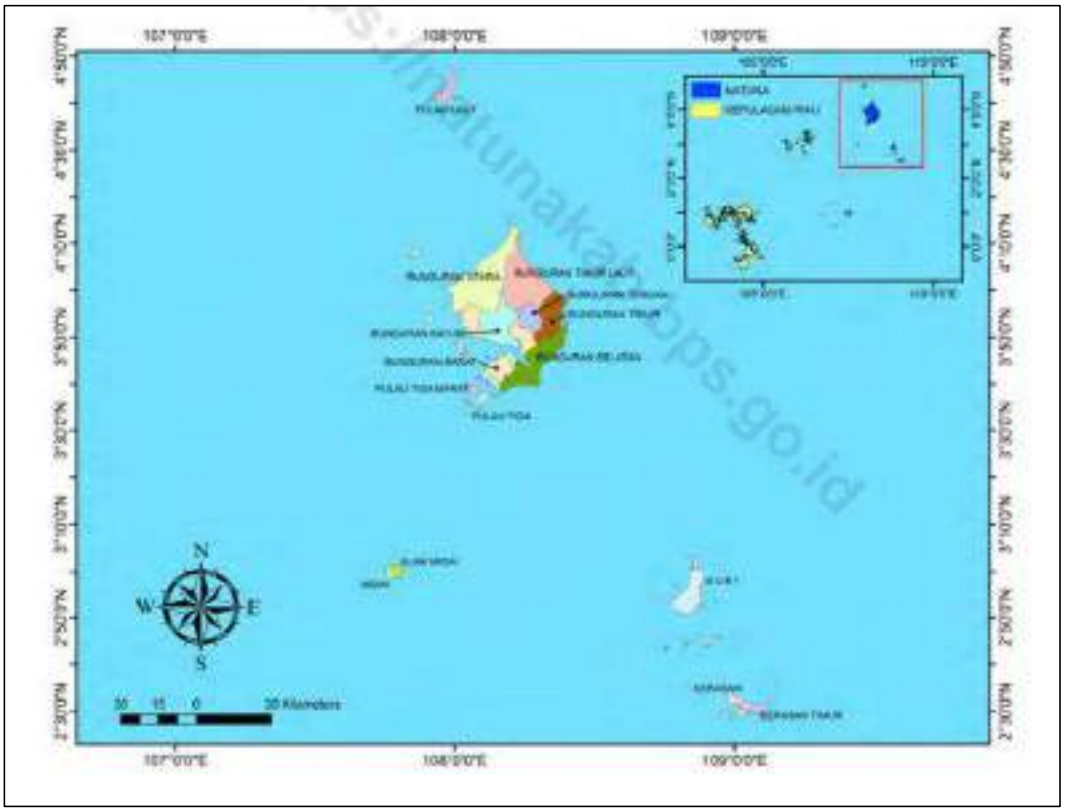
Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat $01^{0}18'00"$ - $06^{0}50'15"$ LU (Lintang Utara) dan $104^{0}48'30"$ -$110^{0}02'00"$BT (Bujur Timur).

Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 224.684,59 km^2 dengan luas daratan sebesar 2.000,85 km^2 dan luas lautan sebesar 222.683,74 km^2. Kabupaten Natuna Ber-Ibu Kota di Ranai (Kecamatan Bunguran Timur) Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia,
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna Utara.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Bunguran Utara, yaitu 398,09 km^2 atau 20,12 persen dari seluruh wilayah daratan

Kabupaten Natuna. Kecamatan ini terdiri atas 6 (enam) desa yaitu Desa Kelarik, Desa Kelarik Utara, Desa Kelarik Air Mali, Desa Gunung Durian, Desa Teluk Buton, dan Desa Belakang Gunung.



Gambar 2.1: Peta Wilayah Kabupaten Natuna

Tabel 2.2: Luas Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km²)	Persentase
1	Midai	Sabang Barat	13,77	0,70
2	Suak Midai	Batu Belanak	12,42	0,63
3	Bunguran Barat	Sedanau	247,95	12,53
4	Bunguran Utara	Kelarik	398,09	20,12
5	Pulau Laut	Air Payang	37,58	1,90
6	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	41,68	2,11
7	Bunguran Batubi	Batubi Jaya	214,45	10,84
8	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	17,38	0,88
9	Pulau Seluan	Seluan	7,08	0,36
10	Bunguran Timur	Ranai	148,77	7,52
11	Bunguran Timur Laut	Tanjung	298,97	15,11
12	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	85,83	4,34
13	Bugnuran Selatan	Cemaga	234,23	11,84
14	Serasan	Serasan	44,72	2,26
15	Subi	Subi	139,12	7,03
16	Serasan Timur	Arung Ayam	29,36	1,48
17	Pulau Panjang	Pulau Panjang	7,12	0,36
	Kabupaten Natuna	-	**1.978,49**	**100,00**

Wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari pulau-pulau. Dari data yang diperoleh terdapat 157 pulau di Kabupaten ini, dengan 27 pulau (17,20 persen) yang berpenghuni dan 130 pulau (82,80 persen) tidak berpenghuni.

Tabel 2.3: Jumlah Pulau di Kabupaten Natuna Menurut kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Pulau
1	Midai	Sabang Barat	2
2	Suak Midai	Batu Belanak	-
3	Bunguran Barat	Sedanau	15
4	Bunguran Utara	Kelarik	14
5	Pulau Laut	Air Payang	8
6	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	14
7	Bunguran Batubi	Batubi Jaya	2
8	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	4
9	Pulau Seluan	Seluan	2
10	Bunguran Timur	Ranai	8
11	Bunguran Timur Laut	Tanjung	10
12	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	-
13	Bugnuran Selatan	Cemaga	12
14	Serasan	Serasan	33
15	Subi	Subi	11
16	Serasan Timur	Arung Ayam	10
17	Pulau Panjang	Pulau Panjang	2
Kabupaten Natuna		-	**157**

Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Natuna dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) gugusan pulau yaitu:

1) Gugusan Pulau Natuna, terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga.
2) Gugusan Pulau Serasan, terdiri atas pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil

Tercatat ada sekitar 7 pulau terluar di Kabupaten Natuna yaitu Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, Pulau Senoa, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun dan Pulau Tokong Boro. Diantara ketujuh pulau tersebut, Pulau Subi Kecil merupakan satu-satunya Pulau yang berpenghuni. Sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan tanaman kelapa, karet, cengkeh dan lainnya.

Jarak lurus dari pusat kecamatan, yang ditandai dengan kantor kecamatan masing-masing, menuju ibu kota Kabupaten Natuna yang ditandai dengan tiang bendera di Kantor Bappeda, cukup bervariasi dan relatif jauh. Kecamatan Bunguran Timur memiliki jarak terdekat ke ibu kota kabupaten, yaitu sekitar 6,79 km, sedangkan kecamatan yang paling jauh adalah Serasan Timur dengan jarak 175,85 km. Pada tahun 2023, konsep pengukuran jarak ke ibu kota mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dimana jarak dihitung dari pusat kecamatan ke ibu kota Kabupaten Natuna di

tiang bendera Kantor Bappeda, bukan lagi dari pusat kecamatan ke Pasar Lama Ranai.

Tabel 2.4: Jarak Lurus Dari Pusat Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Lurus Ke Ibu Kota Kabupaten (km)
1	Midai	Sabang Barat	120,64
2	Suak Midai	Batu Belanak	118,82
3	Bunguran Barat	Sedanau	37,63
4	Bunguran Utara	Kelarik	38,66
5	Pulau Laut	Air Payang	94,42
6	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	41,66
7	Bunguran Batubi	Batubi Jaya	20,91
8	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	42,55
9	Pulau Seluan	Seluan	58,73
10	Bunguran Timur	Ranai	6,79
11	Bunguran Timur Laut	Tanjung	11,24
12	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	7,93
13	Bugnuran Selatan	Cemaga	16,76
14	Serasan	Serasan	174,18
15	Subi	Subi	115,60
16	Serasan Timur	Arung Ayam	178,85
17	Pulau Panjang	Pulau Panjang	144,53

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020–2035 yang bersumber dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada pertengahan tahun 2025 diperkirakan mencapai 86,76 ribu jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,71. Artinya, terdapat sekitar 105 hingga 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025), laju pertumbuhan penduduk rata-rata tercatat sebesar 1,35 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi berbasis SP2020, data kependudukan yang tersedia hanya mencakup 15 kecamatan, karena Kecamatan Pulau Seluan masih tergabung dengan Bunguran Utara, dan Pulau Panjang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 29,98 ribu jiwa, atau setara dengan 34,56 persen dari total penduduk Kabupaten Natuna. Kondisi ini selaras dengan peran Kecamatan Bunguran Timur sebagai pusat pemerintahan daerah.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2025 diperkirakan mencapai **0**,04 ribu jiwa per kilometer persegi. Meskipun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Midai, yakni 0,27 ribu jiwa/km^2. Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bunguran Utara, yang

hanya mencapai 0,01 ribu jiwa/km^2, mencerminkan karakteristik geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata.

Ditinjau dari struktur umur, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh kelompok usia muda. Penduduk usia 0–4 tahun berjumlah sekitar 7,69 ribu jiwa, usia 5–9 tahun sebanyak 7,77 ribu jiwa, usia 10–14 tahun sebanyak 7,85 ribu jiwa, usia 15–19 tahun sebanyak 7,42 ribu jiwa, dan usia 20–24 tahun sebanyak 7,63 ribu jiwa. Sementara itu, kelompok usia tertua, yaitu usia 75 tahun ke atas, merupakan yang paling sedikit jumlahnya, yakni hanya 1,40 ribu jiwa.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 44,58 ribu jiwa (51,38 persen) dari total populasi. Rasio ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2025 berada di angka 48,70, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia non-produktif (anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.5: Jumlah Penduduk, Distibusi Penduduk, dan Laju Perumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2025 (%)
1	Midai	3,68	4,74	0,53
2	Suak Midai	1,72	1,98	-0,15
3	Bunguran Barat	8,23	9,49	1,03
4	Bunguran Utara	4,81	5,54	1,33
5	Pulau Laut	2,35	2,71	0,33
6	Pulau Tiga	4,10	4,73	2,00
7	Bunguran Batubi	3,80	4,38	-0,32
8	Pulau Tiga Barat	2,18	2,51	0,74
9	Pulau Seluan	...[1]	...[1]	...[1]
10	Bunguran Timur	29,98	34,56	1,61
11	Bunguran Timur Laut	5,86	6,75	1,83
12	Bunguran Tengah	4,09	4,71	2,22
13	Bugnuran Selatan	3,75	4,32	2,39
14	Serasan	5,56	6,41	1,19
15	Subi	3,26	3,76	1,36
16	Serasan Timur	3,39	3,91	1,22
17	Pulau Panjang	...[1]	...[1]	...[1]
Kabupaten Natuna		**86,76**	**100,00**	**1,35**

Tabel 2.6: Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Ribu Jiwa Per Km^2)
1	Midai	0,27
2	Suak Midai	0,14
3	Bunguran Barat	0,03
4	Bunguran Utara	0,01
5	Pulau Laut	0,06
6	Pulau Tiga	0,10
7	Bunguran Batubi	0,02
8	Pulau Tiga Barat	0,13
9	Pulau Seluan	...[1]
10	Bunguran Timur	0,20
11	Bunguran Timur Laut	0,02
12	Bunguran Tengah	0,05
13	Bugnuran Selatan	0,02
14	Serasan	0,12
15	Subi	0,02
16	Serasan Timur	0,12
17	Pulau Panjang	...[1]
Kabupaten Natuna		**0,04**

Tabel 2. 7: Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Kelomppok Umur Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)
1	0 – 4	3,92	3,77	7,69
2	5 – 9	3,95	3,82	7,77
3	10 – 14	3,91	3,94	7,85
4	15 – 19	3,81	3,61	7,42
5	20 – 24	3,88	3,74	7,63
6	25 – 29	3,37	3,22	6,59
7	30 – 34	3,17	2,99	6,16
8	35 – 39	3,21	3,33	6,55
9	40 – 44	3,27	3,05	6,31
10	45 – 49	3,05	2,64	5,69
11	50 – 54	2,65	2,27	4,92
12	55 – 59	2,03	1,79	3,82
13	60 – 64	1,63	1,60	3,23
14	65 – 69	1,23	1,07	2,30
15	70 – 74	0,79	0,65	1,44
16	75+	0,71	0,68	1,40
Kabupaten Natuna		**44,58**	**42,18**	**86,76**

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan).

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2024 mencapai 22,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 827,21 milyar rupiah atau sekitar 3,5%-nya dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 23,252 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan dari 14,80 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 14,29 triliun rupiah pada tahun 2024.

Tabel 2. 8: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2455.46	2571.67	2789.3	3013.4	3094,54
B)	Pertambangan dan Penggalian	12287.84	14613.86	17578.94	16352.3	15232,6
C)	Industri Pengolahan	166.7	171.8	178.45	184.39	195,35
D)	Pengadaan Listrik dan Gas	17.27	17.37	18.02	19.16	21,06
E)	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.17	1.28	1.34	1.4	1,35
F)	Konstruksi	1664.05	1624.56	1685.34	1824.59	1849,86
G)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	716.83	747.51	813.64	890.22	992,28
H)	Transportasi dan Pergudangan	126.28	128.16	155.4	171.3	161,92
I)	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101.04	105.92	111.92	117.97	130,13
J)	Informasi dan Komunikasi	147.41	157.75	165.13	168.97	170,58
K)	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.75	30.2	31.92	33.16	34,59
L)	Real Estate	139.15	147.07	155.65	166.99	181,23

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
M)	Jasa Perusahaan	0.04	0.04	0.05	0.05	0,05
N)	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.2	421.26	441.37	432.02	473,69
O)	Jasa Pendidikan	43.12	45.65	47.79	49.11	51,7
P)	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.25	71.38	75.4	77.93	83,48
Q)	Jasa lainnya	14.35	14.68	15.76	16.91	18,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**18405.91**	**20870.16**	**23519.88**	**23519.88**	**22692,67**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		**6145.67**	**6285.25**	**6716.39**	**7199.72**	**7494,09**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 14,29 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Natuna telah mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 3,57 persen.

Tabel 2. 9: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1684.27	1711.79	1768.01	1838.44	1860,38
B)	Pertambangan dan Penggalian	10488.44	10486.6	10385.84	10362.92	9728,94
C)	Industri Pengolahan	114.67	115.98	117.37	117.4	120,96
D)	Pengadaan Listrik dan Gas	11.5	11.55	11.91	12.65	13,45
E)	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.98	1.06	1.1	1.13	1,13
F)	Konstruksi	1115.27	1064.91	1070.33	1128.72	1122,33
G)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	448.48	456.69	478.21	496.47	525,96
H)	Transportasi dan Pergudangan	78.48	79.36	88.67	93.29	90,78
I)	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.12	72.09	74.8	77.55	79,69

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
J)	Informasi dan Komunikasi	130.68	140.38	146.32	146.44	146,46
K)	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.98	21.08	21.43	22.04	22,55
L)	Real Estate	105.77	110.52	114.41	118.1	126,17
M)	Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0,03
N)	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	293.62	289	296.07	298.23	327,07
O)	Jasa Pendidikan	24.82	25.92	26.73	26.89	28,07
P)	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.86	48.62	50.37	50.89	53,64
Q)	Jasa lainnya	9.79	9.82	10.17	10.67	11,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**14642.75**	**14645.4**	**14661.78**	**14801.85**	**14258,64**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)	**4172.56**	**4177.77**	**4294.85**	**4458.67**	**4450,42**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Tabel 2.10: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.34	12.32	11.49	12.81	13,64
B.	Pertambangan dan Penggalian	66.76	70.02	72.44	69.53	67,13
C.	Industri Pengolahan	0.91	0.82	0.74	0.78	0,86
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.08	0.07	0.08	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0,01
F.	Konstruksi	9.04	7.78	6.95	7.76	8,15
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.89	3.58	3.35	3.78	4,37
H.	Transportasi dan Pergudangan	0.69	0.61	0.64	0.73	0,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.55	0.51	0.46	0.5	0,57
J.	Informasi dan Komunikasi	0.8	0.76	0.68	0.72	0,75

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17	0.14	0.13	0.14	0,15
L.	Real Estate	0.76	0.7	0.64	0.71	0,8
M.	Jasa Perusahaan	-	-	-	-	0
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.33	2.02	1.82	1.84	2,09
O.	Jasa Pendidikan	0.23	0.22	0.2	0.21	0,23
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.36	0.34	0.31	0.33	0,37
Q.	Jasa lainnya	0.08	0.07	0.06	0.07	0,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian, berikutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Sepeda Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sumbangsih sektor lainnya berperan rata-rata di bawah 1 persen.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2024, sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Natuna telah mengalami kelanjutan kontraksi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya menurut sektor pengeluaran, andil paling utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna selama periode 2020-2024 didominasi oleh Ekspor Neto barang dan jasa, disusul kemudian Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan perbelanjaan pemerintah.

Tabel 2.11: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21,6	19,51	18,06	20,68	23,38	20,65
B.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,07	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,86	9,34	8,12	8,79	9,2	9,26
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,15	16,39	15,34	17,17	19,68	17,55
E.	Perubahan Inventori	0,05	0,18	0,87	0,07	0,08	0,25
F.	Net Ekspor Barang dan Jasa	48,27	54,52	57,55	53,23	47,59	52,23

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

Tabel 2.12: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024 (Tanpa Migas)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.38	1.63	3.28	3.98	1,18
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4.82	-0.02	-0.96	-0.22	-6,12
C.	Industri Pengolahan	1.68	1.14	1.2	0.02	3,04
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.49	0.39	3.17	6.16	6,34
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.75	8.43	3.32	3.43	0,05
F.	Konstruksi	-5.06	-4.52	0.51	5.46	0,8
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.75	1.83	4.71	3.82	5,94
H.	Transportasi dan Pergudangan	-22.09	1.12	11.74	5.21	-2,24
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5.05	4.31	3.75	3.67	3,01
J.	Informasi dan Komunikasi	8.34	7.42	4.23	0.08	0,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.31	0.48	1.67	2.82	2,33
L.	Real Estate	3.5	4.5	3.52	3.22	6,83
M.	Jasa Perusahaan	-8.13	1.19	8.23	1.99	-1,13
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.49	-1.58	2.45	0.73	9,67
O.	Jasa Pendidikan	-0.36	4.46	3.11	0.61	4,38
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.95	6.01	3.61	1.02	5,4
Q.	Jasa lainnya	-0.4	0.31	3.6	4.91	3,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**-4.29**	**0.02**	**0.11**	**0.96**	**-3,57**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2. 13: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Kab./Kota/ Provinsi /Nasional	Pertumbuhan Ekonomi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Karimun	-3.59	2.37	4.38	5.5	6,45
2.	Bintan	-4.2	0.23	4.44	6.14	8,89
3.	Natuna	-4.29	0.02	0.11	0.96	-3,57
4.	Lingga	-0.68	1.95	3.74	4.3	4,42
5.	Kepulauan Anambas	-7.83	0.04	0.09	0.62	-5,67
6.	Batam	-2.55	4.75	6.84	7.04	6,69
7.	Tanjungpinang	-3.45	0.59	4.12	4.92	3,78
8.	Kepulauan Riau	-3.8	3.43	5.09	5.2	5,02
9.	Nasional	-2.07	3.7	5.31	5.05	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Kinerja ekonomi Kabupaten Natuna sepanjang 2024 secara umum dapat dikatakan mengalami kelanjutan perlambatan yang dipengaruhi oleh turunnya kinerja sektoral di lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor lainnya yang mengalami perlambatan di antaranya Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Konstruksi. Sedangkan sektor PDRB lainnya secara umum meningkat dalam hal volume produksi. Melambatnya kinerja perekonomian Kabupaten Natuna yang dipicu oleh turunnya nilai output pertambangan dan penggalian menunjukkan faktor eksternal dan global dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna.

2. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,53, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya Kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok

barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel 2.14: Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year (YoY)

Bulan (1)	IHK (2)	Inflasi (3)
Januari	104.53	0.37
Februari	104.61	0.08
Maret	104.98	0.35
April	105.02	0.04
Mei	105.36	0.32
Juni	105.53	0.16
Juli	104.85	-0.64
Agustus	104.79	-0.06
September	104.74	-0.05
Oktober	104.77	0.03
November	105	0.22
Desember	105.73	0.7
Januari-Desember 2024		1,53

Sumber: IHK dan Inflasi Kota Tanjungpinang, 2025 (olahan)

Inflasi (y-to-d) tertinggi terjadi di bulan Desember sebesar 1,53 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di bulan Januari sebesar 0,37 persen. Inflasi (y-to-d) merupakan angka yang biasanya dipakai pemerintah untuk mengukur perkembangan inflasi dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengendalian inflasi yang ditargetkan sebesar 2,50 persen plus minus 1. Pada akhir tahun, nilai inflasi Kota Tanjungpinang cukup bisa dikendalikan sesuai dengan target.

Pada tahun 2024, dari sebelas kelompok yang menyusun IHK Kota Tanjungpinang, tercatat 8 kelompok mengalami inflasi (y-on-y) dan 3 kelompok lainnya mengalami deflasi (yon-y). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 6,71 persen dengan andil sebesar 0,1611 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,33 persen dengan andil sebesar 0,3788 persen. Namun, andil inflasi tertinggi justru diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 1,0070 persen terhadap pembentukan inflasi di Kota Tanjungpinang meskipun inflasi pada kelompok ini ada di posisi ketiga sebesar 3,60 persen. Sementara indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi terendah selama tahun 2024 yaitu sebesar

0,10 persen dengan andil inflasi sebesar 0,0141 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2023 antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bayam, kangkung, bawang merah, angkutan laut, emas perhiasan, sawi hijau, akademi/perguruan tinggi, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar/ikan tude, udang basah, cabai rawit, ikan mata besar, sabun cair/ cuci piring, ikan bulat, bahan bakar rumah tangga, dan sabun mandi cair.

Komoditas barang/jasa yang dominan memberikan andil inflasi (y-on-y) selama tahun 2024 yaitu: emas perhiasan sebesar 0,3668 persen; beras sebesar 0,2077 persen; Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,1923 persen; minyak goreng sebesar 0,1007 persen; santan segar sebesar 0,0970 persen; ikan tongkol/ikan ambu-ambu sebesar 0,0766 persen; kopi bubuk sebesar 0,0688 persen; Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 0,0670 persen; ikan selar/ikan tude sebesar 0,0626 persen; dan biaya pemeliharaan/service sebesar 0,0582.

Sebaliknya, beberapa komoditas barang/jasa yang dominan memberikan andil deflasi (y-on-y), antara lain: cabai merah sebesar 0,3263 persen; biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 0,2334 persen; sepatu pria sebesar 0,0675 persen; cabai rawit sebesar 0,0632 persen; bayam sebesar 0,0481 persen; kemeja pendek katun pria sebesar 0,0444 persen; tarif angkutan udara sebesar 0,0402 persen; bensin sebesar 0,0399 persen; sepatu wanita sebesar 0,0331 persen; dan tomat sebesar 0,0243 persen.

Inflasi bulanan merupakan inflasi yang terjadi selama satu bulan tertentu. Inflasi ini merupakan persentase perubahan IHK bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Secara month-to-month (m-to-m), sepanjang tahun 2024 di Kota Tanjungpinang terjadi dalam 9 bulan dan 3 bulan lainnya terjadi deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 0,70 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 0,64 persen. Tingginya inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan karena puncak curah hujan yang tinggi dan menyebabkan tingginya kenaikan beberapa komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, cabai merah, sawi hijau, cabai rawit, dan ketimun. Inflasi tertinggi kedua selama tahun 2024 terjadi pada bulan Januari sebesar 0,37 persen yang disebabkan karena kenaikan beberapa komoditas sayuran dan tarif rumah sakit serta tarif dokter.

Inflasi tertinggi ketiga selama tahun 2024 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 0,35 persen disebabkan kenaikan harga komoditas saat bulan Ramadhan dan menjelang lebaran. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Juli

sebesar 0,64 persen, bulan Agustus sebesar 0,06 persen, dan bulan September sebesar 0,05 persen disebabkan karena penyesuaian tarif angkutan udara, subsidi biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), dan penurunan harga beberapa komoditas sayuran.

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan tingkat tertinggi ke-7 inflasi di Indonesia pada tahun 2024 yakni sebesar 2,09 persen. Inflasi di provinsi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor geografis sebagai wilayah kepulauan, yang menyebabkan biaya distribusi barang menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan utama. Selain itu, aktivitas perdagangan dan industri di Kepulauan Riau yang cukup tinggi juga turut memengaruhi harga barang dan jasa di daerah tersebut.

Inflasi kumulatif kelompok pengeluaran untuk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menunjukkan bahwa inflasi kumulatif kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,43 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan BBRT sebesar 2,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 4,93 persen; kelompok kesehatan 0,31 persen; kelompok transportasi 16,93 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 2,22 persen; kelompok pendidikan inflasi kumulatif 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,81 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,32 persen.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Kepulauan Riau, inflasi kumulatif per kelompok pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan tren yang beragam. Secara umum, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,09 persen, mencerminkan adanya kenaikan harga secara keseluruhan di berbagai sektor pengeluaran. Kategori dengan inflasi tertinggi adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencapai 7,53 persen, diikuti oleh sektor Kesehatan sebesar 4,24 persen, serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang naik 2,65 persen. Sektor lain yang juga mengalami kenaikan harga adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,46 persen, serta Transportasi sebesar 2,13 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku dan tarif transportasi. Pakaian dan Alas Kaki juga mencatat inflasi sebesar 2,11 persen, menunjukkan peningkatan harga pada kebutuhan sandang. Sementara itu, Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran mengalami inflasi sebesar 1,42 persen, yang disebabkan oleh meningkatnya harga bahan makanan dan operasional restoran.

Di sisi lain, terdapat sektor yang mengalami deflasi, seperti Pendidikan yang turun 1,84 persen, akibat kebijakan subsidi atau program

pendidikan gratis, serta Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mengalami penurunan harga sebesar 0,22 persen. Selain itu, sektor Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan relatif stabil dengan perubahan harga yang hampir tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa konsumsi sehari-hari, kebutuhan dasar seperti kesehatan dan perumahan, serta faktor eksternal seperti harga bahan baku dan kebijakan ekonomi.

Pada Tahun 2024, inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai komoditas dari kelompok pengeluaran yang beragam. Komoditas dengan andil tertinggi terhadap inflasi bulan ini adalah emas perhiasan, dengan kontribusi sebesar 0,4029 persen. Kenaikan harga emas ini kemungkinan besar dipicu oleh peningkatan permintaan masyarakat menjelang akhir tahun, baik untuk konsumsi maupun investasi, seiring dengan tren harga emas global. Selain itu, tarif listrik memberikan andil sebesar 0,2554 persen, yang mengindikasikan adanya penyesuaian tarif atau meningkatnya konsumsi listrik selama bulan Desember. Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi cukup besar adalah tarif parkir (0,1776 persen) dan beras (0,1512 persen), yang mencerminkan adanya tekanan dari sisi transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih mendominasi sebagai penyumbang inflasi, tercermin dari naiknya harga beras, minyak goreng (0,0947 persen), bawang merah (0,0767 persen), daging ayam ras (0,0622 persen), telur ayam ras (0,0512 persen), hingga ayam hidup (0,0484 persen). Kenaikan harga bahan pangan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta potensi gangguan pasokan akibat cuaca atau distribusi. Di sisi lain, komoditas rokok seperti sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin juga mengalami kenaikan harga, yang turut mendorong inflasi, masing-masing dengan andil sebesar 0,1021 persen dan 0,0441 persen.

Sektor perumahan dan jasa lainnya pun tidak luput dari tekanan inflasi. Sewa rumah menyumbang inflasi sebesar 0,0832 persen, sementara tarif rumah sakit, biaya pendidikan (akademi/perguruan tinggi), serta angkutan laut juga mengalami kenaikan harga. Komoditas bahan bakar rumah tangga dan mobil menunjukkan tren inflasi meskipun dengan andil yang lebih kecil, mengindikasikan adanya tekanan biaya dari sektor transportasi dan energi.

Pada Juni 2025, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 1,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,10. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 1,68 persen dengan IHK sebesar 108,74 dan terendah terjadi di Kota

Tanjungpinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,60. Sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi *y-on-y* sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,92.

Inflasi *y-on-y* Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,84 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 1,07 persen; kelompok transportasi naik sebesar 1,25 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 2,45 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 11,06 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau turun sebesar 0,48 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,03 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,12 persen; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,84 persen.

Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* Provinsi Kepulauan Riau bulan Juni 2025 sebesar 0,12 persen, deflasi terjadi karena penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,23 pada Mei 2025 menjadi 108,10 pada Juni 2025. Sedangkan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 0,70 persen.



Gambar 2. 2 Inflasi Tahunan Provinsi Kepulauan Riau Juni 2025 (y-oy)
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan RI, 2025 (olahan)

3. Kemiskinan

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan.

Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp501.927. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Di samping itu, pada tahun 2024, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 4.1700orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,25 persen menjadi 5,04 persen.

Tabel 2. 15: Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	15.99	16.28	16.44	14.33	13.99
Bintan	10.21	10.54	10.67	9.86	9.17
Natuna	**3.47**	**3.98**	**4.32**	**4.3**	**4.17**
Lingga	12.45	12.58	12.7	10.18	9.02
Kepulauan Anambas	2.8	3.08	3.29	3.08	2.98
Kota Batam	67.06	77.17	82.59	83.09	83.57
Kota Tanjung Pinang	19.98	20.85	21.67	17.67	15.39
Kepulauan Riau	131.97	144.46	151.68	142.5	138.3
Indonesia (juta)	26.42	27.54	26.16	25.90	25.22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (olahan)

Tabel 2. 16: Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kepulauan Riau	5,92	6,12	6,24	5,69	5,37
Kabupaten Karimun	6,83	6,85	6,87	5,95	5,78
Kabupaten Bintan	6,36	6,42	6,44	5,9	5,44
Kabupaten Natuna	**4,43**	**4,95**	**5,32**	**5,25**	**5,04**
Kabupaten Lingga	13,85	13,93	14,05	11,26	9,99
Kabupaten Kepulauan Anambas	6,56	7,09	7,51	6,95	6,67

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Batam	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
Kota Tanjungpinang	9,37	9,57	9,85	7,95	6,86

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (olahan)

4. Ketimpangan

Ketimpangan antar penduduk mencerminkan sejauh mana perbedaan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar perbedaan pengeluaran konsumsi tersebut, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang tercermin dalam nilai Indeks Gini. Sebaliknya, semakin merata pengeluaran konsumsi antar penduduk, maka ketimpangannya semakin rendah.Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan "sedang" bila indeks Gini di antara 0,3 – 0,4 dan ketimpangan tinggi apabila indeks Gini menunjukkan angka di atas 0,4. Indeks Gini Natuna pada tahun 2024 sebesar 0,285.

Tabel 2. 17: Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020-2024)

Kabupaten/Kota/Provinsi/ Nasional	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	0,315	0,307	0,288	0,271	0,286
Bintan	0,305	0,272	0,288	0,279	0,29
Natuna	**0,337**	**0,3**	**0,291**	**0,309**	**0,285**
Lingga	0,281	0,289	0,277	0,326	0,309
Kepulauan Anambas	0,296	0,304	0,313	0,328	0,296
Batam	0,323	0,334	0,336	0,338	0,348
Tanjungpinang	0,345	0,347	0,347	0,339	0,347
Kepulauan Riau	0,334	0,339	0,325	0,34	0,357
Indonesia					

Sumber: BPS, 2025 (olahan)

5. Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan jelas dari besarnya pendapatan yang diterima. Namun mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendekatan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga. Secara empiris, indikator pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai Indikator kesejahteraan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun

produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Jika dilihat dari kurun waktu 2020-2024, pengeluaran rata-rata per kapita kelompok makanan setiap bulan terus mengalami tren kenaikan. Tahun 2024, kenaikan pengeluaran rata-rata per kapita bertambah sebanyak Rp. 12.677 dari Rp. 778.422 di tahun 2023 menjadi Rp. 791.099. Makanan dan minuman jadi dan rokok menjadi penyumbang komponen terbesar dalam pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya.

Tabel 2.18: Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna, 2020 – 2024

Kelompok Komoditas Makanan	Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	71764	71218	62203	77942	77763
Umbi-umbian	6399	9570	8449	9290	9294
Ikan/udang/cumi/ kerang	75927	81614	85364	97243	87175
Daging	16670	18074	24368	34169	39152
Telur dan susu	41586	48073	47584	55349	45020
Sayur-sayuran	53261	59620	59102	71165	69788
Kacang-kacangan	8957	9545	7079	11117	10994
Buah-buahan	25644	23227	33305	26170	45146
Minyak dan kelapa	17628	19738	24894	21624	23687
Bahan minuman	24614	27232	23568	28176	29804
Bumbu-bumbuan	18158	22712	18689	22241	19483
Konsumsi lainnya	14599	22816	18801	22824	20967
Makanan dan minuman jadi	178410	150908	178276	207466	211796
Rokok	98284	94749	79873	93645	101030
TOTAL MAKANAN	651.901	659.096	671.555	778.422	791.099

Sumber: BPS, 2025 (olahan)

Tabel 2. 19: Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Komoditas Non Makanan di Kabupaten Natuna, 2020 – 2024

Kelompok Komoditas Makanan	Rata-rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	324.033	373.980	354.184	417.492	409.247
Aneka komoditas dan jasa	158.801	158.401	155.262	166.527	177.829
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	38.241	39.621	36.256	46.447	38.806

Kelompok Komoditas Makanan	Rata-rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Komoditas tahan lama	38.370	65.251	24.528	55.134	46.335
Pajak, pungutan, dan asuransi	49.883	55.005	56.427	62.893	70.074
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	9.270	12.546	7.119	38.573	16.277
Jumlah Non Makanan	**618.598**	**704.443**	**633.775**	**787.066**	**754.968**

Sumber: BPS, 2025 (olahan)

Tabel 2. 20: Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020– 2024

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	1.272.446	1.387.154	1.307.875	1.507.365	1.543.980
Bintan	1.231.160	1.211.579	1.428.749	1.392.146	1.516.935
Natuna	1.270.498	1.363.540	1.305.329	1.565.488	1.546.067
Lingga	1.124.471	1.255.939	1.260.029	1.387.373	1.362.448
Kepulauan Anambas	1.481.523	1.486.441	1.623.388	1.772.998	1.824.484
Kota Batam	1.988.534	2.067.955	2.056.461	2.163.679	2.344.955
Kota Tanjung Pinang	1.826.706	1.863.506	1.550.593	2.110.383	1.917.889
Kepulauan Riau	1.773.521	1.855.296	1.831.700	1.989.703	2.109.071
Indonesia (juta)	1.225.684	1.264.589	1.327.782	1.451.870	1.500.556

Sumber: BPS Kepri dan BPS RI, 2025 (olahan)

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Secara umum, pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2024 dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Rata-rata pengeluaran untuk makanan penduduk Kabupaten Natuna sebesar Rp 791.099, sementara pengeluaran untuk bukan makanan mencapai Rp. 754.968.

Porsi terbesar pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok makanan dan minuman jadi. Kemudian porsi terbesar selanjutnya adalah dari kelompok makanan laut, rokok, dan padi-padian. Sedangkan porsi terkecil pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan. Kemudian, jika dilihat dari pengeluaran untuk non makanan, porsi terbesar adalah dari kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, sedangkan porsi terkecil adalah dari kelompok keperluan pesta dan upacara. Secara total, pengeluaran kelompok 40 persen terbawah penduduk Natuna sebesar Rp 867.019, sementara pengeluaran kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas mencapai Rp 1.459.714 dan Rp 3.183.821.

6. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna sebesar 44,72 ribu orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17,02 ribu orang. Angkatan kerja terdiri atas bekerja sebanyak 42,91 ribu orang dan pengangguran terbuka sebanyak 1,8 ribu orang.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 72,43 persen atau meningkat sebesar 4,54 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan yaitu sebesar 82,69 persen.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, TPT Kabupaten Natuna sebesar 4,05 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun 2022. TPT laki-laki pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen yang merupakan TPT laki-laki terendah dalam lima tahun terakhir.

Penduduk dengan pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/ pegawai merupakan yang terbanyak di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 20,10 ribu orang. Sementara itu, penduduk dengan pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar adalah yang terendah yaitu sebesar 0,99 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja tertinggi adalah sektor Jasa sebanyak 26,37 ribu orang, sedangkan sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terendah yaitu sebesar 7,3 ribu orang.

Tabel 2. 21: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna 2020-2024 (persen)

Rincian	Pengangguran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69.39	72.31	67.89	72.43	72.85
Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	4.1	5.15	4.15	4.05	3.89

Sumber: BPS Kepri dan BPS RI, 2025 (olahan)

Tabel 2. 22: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (per Agustus)

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	8.36	7.2	6.87	6.02	5.52
Bintan	8.86	8.62	6.91	5.43	4.53
Natuna	4.1	5.15	4.15	4.05	3.89
Lingga	4.41	4.23	3.09	3.52	3.38
Kepulauan Anambas	3.44	1.27	2.15	2.55	2.38
Batam	11.79	11.64	9.56	8.14	7.68
Tanjungpinang	9.3	6.31	5.27	4.76	4.69
Kepulauan Riau	10.34	9.91	8.23	6.8	6.39
Indonesia	6.49	7.07	5.86	5.86	4.91

Sumber: BPS Kepri dan BPS RI, 2025 (olahan)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Natuna diukur dengan sejumlah indikator yang terkait pada urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pengeluaran per kapita riil per tahun yang disesuaikan merupakan indikator yang BPS gunakan untuk mengukur standar hidup layak penduduk. Pada tahun 2024, angka ini telah mencapai sebesar 15.560.000 rupiah, naik sebanyak Rp. 151.000 atau tumbuh 0,98 persen dibandingkan tahun 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), yang diukur oleh angka harapan hidup,
2) Dimensi pengetahuan (knowledge), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
3) Dimensi standar hidup layak (a decent standard of living), yang diukur dengan paritas daya beli.

Tabel 2. 23: Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,57	73,65	73,90	74,15	74.38
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.9	13.91	13.92	13.93	13.94
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.73	8.92	8.96	9.08	9.2
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	14.705	14.711	14.834	15.409	15.560

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (olahan)

Tabel 2.24: Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	71.44	71.7	72.65	73.51	74.28
Bintan	74.13	74.57	74.99	75.7	76.18
Natuna	77,03	77,33	77,59	78,23	78,60
Lingga	65.29	65.83	66.57	67.44	68.19
Kepulauan Anambas	68.8	69.23	69.61	70.26	70.93
Batam	81.11	81.12	81.67	82.11	82.86
Tanjungpinang	78.91	78.93	79.64	80.23	80.63
Kepulauan Riau	75.59	75.79	76.46	77.11	77.97
Indonesia	71.94	72.29	72.91	73.55	74.2

Sumber: BPS Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau-RI, 2025 (olahan)

Tabel 2. 25: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	8.17	8.18	8.48	8.69	8.91
Bintan	8.44	8.67	8.7	8.92	9.15
Natuna	8.73	8.92	8.96	9.08	9.2
Lingga	6.67	6.88	7.12	7.35	7.6
Kepulauan Anambas	7.17	7.34	7.38	7.4	7.53
Batam	11.14	11.15	11.17	11.19	11.21
Tanjungpinang	10.25	10.26	10.49	10.65	10.67
Kepulauan Riau	10.12	10.18	10.37	10.41	10.5
INDONESIA	8.48	8.54	8.69	8.77	8.85

Sumber: BPS Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau-RI, 2025 (olahan)

Tabel 2. 26: Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Harapan Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	12.42	12.57	12.59	12.61	12.62
Bintan	13.1	13.26	13.27	13.44	13.45
Natuna	13.9	13.91	13.92	13.93	13.94
Lingga	12.45	12.59	12.61	12.63	12.65
Kepulauan Anambas	12.81	12.88	12.89	13.05	13.06
Batam	13.16	13.17	13.32	13.34	13.56
Tanjungpinang	14.12	14.13	14.14	14.15	14.18
Kepulauan Riau	12.87	12.98	12.99	13.05	13.27
INDONESIA	12.98	13.08	13.1	13.15	13.21

Sumber: BPS Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau-RI, 2025 (olahan)

Tabel 2. 27: Perbandingan Umur harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional	Umur harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	70.91	71.11	71.53	72.01	72.2
Bintan	70.38	70.46	70.76	71.09	71.21
Natuna	73,57	73,65	73,90	74,15	74.38
Lingga	62.06	62.39	62.92	63.5	63.73
Kepulauan Anambas	67.21	67.36	67.73	68.1	68.37
Batam	73.33	73.36	73.62	73.94	74.28
Tanjungpinang	72.1	72.18	72.49	72.85	73.02
Kepulauan Riau	69.96	70.12	70.5	70.91	71.24
INDONESIA	71.47	71.57	71.85	72.13	72.39

Sumber: BPS Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau-RI, 2025 (olahan)

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai UHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah 66,41 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 66,41 tahun atau kurang lebih sekitar 66 tahun 4 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 13,94 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,94 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna telah memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 9,2 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.560.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 74,56. Angka ini meningkat 1,84 poin dari capaian tahun 2020 dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 72,72. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna berdampak terhadap stabilnya kenaikan IPM dalam kuruan 5 tahun terakhir.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Natuna masih perlu ditingkatkan.

1.1 Urusan Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau

pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada bidang pendidikan, sudah mencantumkan muatan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Minimal Pendidikan. Capaian indikator SPM bidang pendidikan pada Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.28: Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**				**83,28%**
01.00	Pendidikan Dasar Usia Dini					63,46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	50,37%
	A.Jumlah yang Harus Dilayani:		3,010	1895	1115	62,96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13,09%
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM		Jumlah Mutu yang harus dilayani	Jumlah Mutu yang terlayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	65,47%
	Angka Partisipasi Sekolah	%	88,18	88,18	0	100%
	Angka partisipasi murni		82,31	82,31	0	100%
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	123	26	97	21,14%
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)		191	91	100	47,64%
	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD		1	1	0	100%
	Kecukupan formasi guru ASN	%	10	10	0	100%
	Indeks distribusi guru	%	0,4	0,4	0	100%
	Proporsi PTK bersertifikat	%	191	33	158	17,28%
	Proporsi PTK penggerak	%	191	6	185	3,14%
	JUMLAH					
02.00	Pendidikan Dasar					95,72%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	78,08%
	A.Jumlah yang Harus Dilayani:		12,053	11,764	289	97,60%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17,64%
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	88,20%
	SD					
	Angka Partisipasi Kasar	%	84,21	84,21	0	100,00%
	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,87	99,87	0	100,00%
	Kemampuan Literasi	Nilai	62,8	62,8	0	100,00%
	Kemampuan Numerasi	Nilai	51,27	51,27	0	100,00%
	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	53,46	53,46	0	100,00%
	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	40,46	40,46	0	100,00%
	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	70,51	70,51	0	100,00%
	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	70,4	70,4		
	Indeks Iklim Inklusivitas	%	53,33	53,33	0	100,00%
	Kecukupan formasi guru ASN		93,72	93,72		
	11. Indeks distribusi guru	%	0,89	0,89	0	100,00%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	913	348	565	38,12%
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	913	34	879	3,72%
	SMP					
	Angka Partisipasi Kasar	%	85,16	85,16	0	100,00%
	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,59	99,59	0	100,00%
	Kemampuan Literasi	%	66,24	66,24	0	100,00%
	Kemampuan Numerasi	%	66,58	66,58	0	100,00%
	Perbedaan Skor Literasi	%	64,79	64,79	0	100,00%
	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	56,71	56,71	0	100,00%
	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	71,88	71,88	0	100,00%
	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	73,59	73,59	0	100,00%
	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	56,25	56,25	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
	Kecukupan formasi guru ASN	Nilai	87,72	87,72	0	100,00%
	Indeks distribusi guru	%	0,81	0,81	0	100,00%
	Proporsi PTK Bersertifikat	%	400	179	221	44,75%
	Proporsi PTK Penggerak	%	400	26	374	6,50%
	JUMLAH					
03.00	Pendidikan Kesetaraan					90,66%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80,00%
	A.Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	367	367	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10,66%
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM		Jumlah Mutu yang harus dilayani	Jumlah Mutu yang terlayani	Mutu yang belum terlayani	53,30%
	Angka Partisipasi Kasar	%	41,29	41,29	0	100,00%
	Angka Partisipasi Sekolah	%	1,43	1,43	0	100,00%
	Kemampuan Literasi	%	18	17	1	94,44%
	Kemampuan Numerasi	Nilai	1	1	0	100,00%
	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	59,74	59,74	0	100,00%
	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	64,97	64	0,97	98,51%
	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	1	1	0	100,00%
	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	0	0	0	100,00%
	Indeks Iklim Inklusivitas	%	0	0	0	0,00%
	Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0,00%
	Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0,00%
	Proporsi PTK Bersertifikat	%	11	0	11	0,00%
	Proporsi PTK Penggerak	%	11	0	11	0,00%
	JUMLAH					

Sumber : Setdakab, 2025 (diolah).

Jika dilihat dari target SPM diatas, maka kinerja SPM bidang Pendidikan masih belum mencerminkan pemenuhan SPM Pendidikan. Dengan merujuk pada gagasan pokok bahwa pelayanan dasar yang diatur dengan kebijakan SPM harus menjangkau seluruh warga negara, maka target kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM, disebutkan bahwa untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerimaan layanan setiap tahun. Evaluasi pencapaian aspek pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah ditetapkan di RPJMD meliputi:

Tabel 2.29: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1.	Angka Kelulusan SD/Mi	Persen	99,79	100	99,29	99,29	Sangat Tinggi
2.	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	99,00	100	100	99,63	Sangat Tinggi
3.	Angka Melek Huruf	Persen	n.a	99,89	98,40	98,51	Sangat Tinggi
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	75,94	83,49	87,51	100,00	Sangat Tinggi
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	55,45	60,00	62,27	100,00	Sangat Tinggi
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Persen	78,02	105,65	78,29	74,10	Sedang
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Persen	94,36	96,38	96,74	100,00	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
8.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	71,24	97,38	73,24	75,21	Tinggi
9.	Persentase Guru yang bersertifikat Pendidik (TK,SD, SMP)	Persen	45,00	28,79	55,37	100,00	Sangat Tinggi
10.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	71,76	79,12	77,38	97,80	Sangat Tinggi
11.	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	55,00	60,50	77,96	100,00	Sangat Tinggi
12.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	34,15	56,26	60,71	100,00	Sangat Tinggi
13.	Persentase Warganegara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	55,45	100	80	80,20	Tinggi
14.	Persentase Warganegara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen	99,37	100	100	99,76	Sangat Tinggi
15.	Persentase Warganegara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	91,36	100	99	99,44	Sangat Tinggi
16.	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SIswa berdasarkan Hasil Assesmen Nasional	Nilai	55,00	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi
17.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	83,38	96	75,41	78,55	Tinggi
18.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Persen	59,01	64	23,55	36,80	Sangat Rendah
19.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,87	97	71,06	73,26	Sedang
20.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	91,36	97	8,49	8,75	Sangat Rendah

Sumber : Setdakab, 2025 (diolah).

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Natuna secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan.

Namun demikian dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;

2) Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum memenuhi standar, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar.
3) Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualisifikasi pendidikan D4/S1.
4) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.
5) Standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar nasional.

Tabel 2.30: Banyaknya Sekolah di Kabupaten Natuna, 2020-2024 (Dalam Unit)

Tahun	TK/RA	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2024	122	87	42	24
2023	75	86	41	24
2022	82	85	41	26
2021	76	85	40	26
2020	77	85	40	27

Sumber : BPS Natuna, 2025 (diolah).

Tabel 2.31: Rasio Guru-Murid di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Tahun	TK/RA	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2024	1 : 6	1 : 10	1 : 8	1 : 9
2023	1 : 7	1 : 10	1 : 8	1 : 8
2022	1 : 7	1 : 10	1 : 8	1 : 7
2021	1 : 7	1 : 9	1 : 7	1 : 7
2020	1 : 7	1 : 9	1 : 7	1 : 7

Sumber : BPS Natuna, 2025 (diolah).

Kabupaten Natuna memiliki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta. Pada Tahun 2024 terdapat Taman Kanak-kanak berjumlah 75 sekolah, 2.070 murid dan 300 guru dengan rasio guru terhadap murid adalah 1 : 6, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 86 buah, dengan 9.220 murid dan 963 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 10. Pada tahun 2024 terdapat 41 SMP/MTs dengan 4.296 murid dan 559 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 8, dan 24 SMA/MA/SMK dengan 4.140 murid dan 543 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 9.

Setiap jenjang pendidikan telah pula menyediakan prasarana yang cukup berkualitas dengan kuantitas yang memadai guna memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas keilmuan peserta didik. Prasarana tersebut mencakup peralatan laboratorium, alat peraga, sarana prasarana olah raga dan kesenian, termasuk pula peralatan audio visual yang

dapat menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dengan harapan bahwa kaidah ilmu yang dipelajari akan lebih mudah dipahami. Hal inilah yang mendorong nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna kedepan untuk dapat melebihi 100 persen.

Tabel 2.32: Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SD/Mi	99,08	99,87	98,38	105,52	105,11	108,10
SMP/MTs	91,83	83,38	81,91	95,69	98,37	92,87
SMA/SMK/MA	72,08	61,49	63,62	89,13	75,80	93,38

Sumber : BPS Natuna, 2025 (diolah).

1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana sarana pendidikan, sarana merata diseluruh kesehatan juga telah tersebar diseluruh wilayah Natuna. Pada tahun 2023 terdapat 2 rumah sakit, 15 puskesmas, dan 41 puskesmas pembantu. Selain itu, data sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2023 terdapat 7 balai kesehatan, 127 posyandu, dan 14 polindes. Di beberapa tempat, meskipun hanya Puskesmas Pembantu, sarana kesehatan tersebut telah mampu membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yaitu :

Tabel 2.33: Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Layanan Dasar (80%)			Penyediaan Mutu Layanan Dasar (20%)			Capaian SPM	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	95,52	76,42	100	100	20	96,42	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	97,61	78,09	100	100	20	98,09	
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	100	85,90	68,72	100	100	20	88,72	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	85,64	68,51	100	85,71	17,14	85,66	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	100	100	80,00	100	83,23	16,65	96,65	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif	100	80,78%	64,63	100	88,46	17,69	82,32	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Layanan Dasar (80%)			Penyediaan Mutu Layanan Dasar (20%)			Capaian SPM	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	75,43	60,35	100	86,20	17,24	77,59	
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	80,41	64,33	100	98,37	19,67	84,00	
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100	97,45	77,96	100	99,57	19,91	97,87	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	82,89	66,31	100	77,78	15,56	81,87	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	17,99	14,39	100	100	20,00	34,39	
12.	Pelayanan Kesehatan orang resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	92,03	73,62	100	99,20	19,84	93,46	

Sumber : Setdakab, 2025 (diolah).

Jika dilihat dari capaian SPM diatas, maka capaian kinerja SPM bidang Kesehatan masih belum sepenuhnya tercapai sesuai target, namun demikian ada yang sudah mendekati target yang ditetapkan dan ada juga indikator yang telah mencapai target nasional.

Tabel 2.34: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	80,31	11,02	14,92	100,00	Sangat Tinggi
2.	Angka Kematian Ibu	Kasus	2	2	2	100	Sangat Tinggi
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persen	73,43	100	85,66	85,66	Tinggi
4.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,84	100	96,65	96,65	Sangat Tinggi
5.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,84	100	96,65	96,65	Sangat Tinggi
6.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	100,00	0,70	0,40	100,00	Sangat Tinggi
7.	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	73,43	100	85,66	85,66	Tinggi
8.	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	97,87	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
9.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,87	100	88,72	88,72	Tinggi
10.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	93,13	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	93,13	100	98,09	98,09	Sangat Tinggi
12.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	96,75	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
13.	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	96,75	100	96,42	96,42	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
14.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,48	100	100	100,00	Sangat Tinggi
15.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Jiwa Sesuai Standar	Persen	97,14	100	81,87	81,87	Tinggi
16.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	Persen	97,87	100	93,46	93,46	Sangat Tinggi
17.	Persentase orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	Persen	64,13	100	34,39	34,39	Sangat Rendah
18.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	71,86	100	82,32	82,32	Tinggi
19.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	89,76	100	97,87	97,87	Sangat Tinggi
20.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	89,76	100	97,87	97,87	Sangat Tinggi
21.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	48,24	100	84	84,00	Tinggi
22.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,14	100	82	81,87	Tinggi
23.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	64,13	100	99	99,02	Sangat Tinggi
24.	Persentase Prevalensi Stunting	Persen	16,1	10,30	18,5	100,00	Sangat Tinggi
25.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
26.	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	97,87	100	93,46	93,46	Sangat Tinggi
27.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	73,33	100	77,59	77,59	Tinggi
28.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,33	100	89,350	89,35	Tinggi
29.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	97,14	0,137	0,120	87,59	Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Pencapaian aspek pelayanan umum urusan kesehatan masih belum seluruhnya dapat tercapai disebabkan oleh berbagai permasalahan berikut :

1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kehamilannya (jika tidak ada keluhan pasien hanya memeriksakan di awal dan di akhir kehamilan);
2) Ketersediaan kebutuhan dasar pemeriksaan ANC terpadu ibu hamil masih kurang seperti stik pemeriksaan HB, reagen gluko protein, Hbsag, dll;
3) Ketersediaan prasarana/alat untuk bersalin belum merata di setiap kecamatan khususnya Puskesmas Pulau Tiga Barat, sejumlah sarana dalam keadaan rusak, dan tidak semua tenaga dokter dan bidan di Puskesmas sudah mempunyai Pelatihan APN;

4) Beberapa bayi tidak mendapat kunjungan neonatal lengkap;
5) Beberapa puskesmas tidak melakukan pelayanan SDID TK di Posyandu (hanya di TK dan PAUD) dan tidak adanya tenaga yang terlatih SDID TK;
6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan di Posbindu/faskes lainnya;
7) Gejala hipertensi jarang dianggap masalah kesehatan sehingga kesadaran penderitanya untuk berobat masih rendah, dikarenakan kurangnya edukasi yang efektif;
8) Masih rendahnya akses terhadap deteksi kasus diabetes melitus;
9) Pelaksanaan investigasi kontak erat belum berjalan maksimal pada terduga penderita tuberculosis.

Tabel 2.35: Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Natuna

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Balai Kesehatan
2024	2	15	41	n.a	7
2023	2	15	41	n.a	7
2022	2	14	41	n.a	7
2021	2	13	43	n.a	6
2020	2	13	43	n.a	4

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025, (diolah).

Tabel 2. 36: Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Tahun	Dokter		Paramedis			
	Spesialis/Umum	Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
2024	70		370	249	62	41
2023	58	9	371	249	54	38
2022	69	9	368	260	59	44
2021	44	n.a	221	191	44	31
2020	38	n.a	208	167	37	24

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025

Selain itu, tenaga kesehatan yang berkualitas juga sangat memegang peranan penting karena dengan bantuan mereka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Jumlah dokter spesialis dan dokter umum tercatat 58 orang, dokter gigi 9 orang, jumlah perawat sebanyak 371 orang, dan bidan sebanyak 249 orang, dan 92 orang tenaga kesehatan lainnya terdiri dari 54 orang tenaga farmasi dan 38 orang ahli gizi.

1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas

dan kualitas layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi, dan infrastruktur keciptakaryaan.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.37: Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM						96,93%
01.00	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					93,87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	78,93%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	3000	2960	40	98,67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14,96%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	74,67%
	Ukuran kuantitas air minum, jumlah, Rumah Tangga yarg mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungj sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	750	740	10	98,67%
	Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yarg mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungj sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	Rumah Tangga	0	0	0	100%
	Ukuran kuantitas air minum, jumlah rumah tangga yarg mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungj sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari sama dengan 4 galon SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100%
	Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yarg mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungj sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	Rumah Tangga	0	0	0	100%
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik					100,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	768	768	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
		Satuan	Jumlah Mutu yang harus dilayani	Jumlah Mutu yang terlayani	Jumlah Mutu yang belum terlayani	100%
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.	Rumah Tangga	192	192	0	100%
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan perduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.	Rumah Tangga	0	0	0	100%
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.	Rumah Tangga	192	912	0	100%
	JUMLAH		**79,128**	**44,866**	**34,262**	**185,43%**

Sumber : Setdakab, 2025 (diolah).

Jika melihat capaian SPM di atas, kinerja pemenuhan SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikatakan baik, namun masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, mencakup:

1) Sulitnya mendapatkan data akses air minum dan air limbah di mendapatkan data akses air minum dan air limbah di desa dan kecamatan desa dan kecamatan.
2) Ada fasilitas yang sudah di bangun PUPR tetapi tidak dimanfaatkan oleh pengelola (PDAM/KPSPAM/BUMDES).
3) Penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah ini tidak didukung oleh Anggaran yang sesuai sehingga pencapaian dan Peningkatan tidak signifikan termasuk terbatasnya anggaran.
4) Lokasi Pembangunan yang jauh sehingga Material terlambat dan biaya transportasi, pengangkutan lebih tinggi berakibat lambatnya penyelesaian kegiatan bahkan pada triwulan ke 3 dan ke 4 pekerjaan belom selesai.

5) Tidak ada adanya kontribusi dari pihak provinsi dalam peningkatan akses air minum dan air limbah di karenakan persepsi dari provinsi untuk membangun SPAM regional sehingga kabupaten Natuna yang pulau terpisah tidak ada SPAM regional.

Tabel 2.38: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman	Persen	5.99	78	6,23	7,99	Sangat Rendah
2.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Persen	14.76	90.35	15,46	17,11	Sangat Rendah
3.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan /Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
4.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan	0.00	1	1	100	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1.00	1	1	100	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lai	Kerjasama	0.00	1	1	100	Sangat Tinggi
8.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Jiwa	852.00	1200	996	83,00	Tinggi
9.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Rumah Tangga	89,17	80	87,59	100,00	Sangat Tinggi
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jiwa	627.00	1600	2960	100,00	Sangat Tinggi
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Jiwa	852.00	1000	996	99,6	Sangat Tinggi
12.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jiwa	0.00	20	0	0	Sangat Rendah
13.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	0,64	48.57	1.81	0.037	Sangat Tinggi
14.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Persen	14.84	60.39	19,68	32,59	Sangat Rendah
15.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Persen	85.24	82.03	84,54	100,00	Sangat Tinggi
16.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Persen	5.88	70	25	35,71	Sangat Rendah
17.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	50.00	93	50	53,76	Rendah
18.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Persen	14.57	88	18,02	20,48	Sangat Rendah

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
19.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	ada	Ada	100	Sangat Tinggi
20.	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	10.61	257.2	10.54		
21.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit	0.00	1	7	100	Sangat Tinggi
22.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	ada	ada	100	Sangat Tinggi
23.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	ada	tidak ada	0	Sangat Rendah
24.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Persen	70.00	90			Sangat Rendah
25.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	73.00	69.87	6.85	9,80	Sangat Rendah
26.	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	53,66	56,23	57,61	100	Sangat Tinggi
27.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Persen	74,54	100	74,54	74,54	Sedang
28.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	44,73	100	44,73	44,73	Sangat Rendah
29.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Persen	86,17	86,1	87,59	100	Sangat Tinggi
30.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	72,10	70,4	65,49	93,03	Sangat Tinggi
31.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	79,27	70	64	86,49	Tinggi
32.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Jiwa	0,00	13.785	0	0	Sangat Rendah
33.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga	51,00	287	51	17,77	Sangat Rendah
34.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	68,00	7500	479,00	6,39	Sangat Rendah
35.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Rasio	1:1.5	1:3	1:1.16	38,67	Sangat Rendah
36.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	1:38	1:23	1:1	100	Sangat Tinggi
37.	Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui	Ada/Tidak	Tidak ada	ada			Sangat Rendah
38.	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun BerJalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Tidak	ada	tidak	0	Sangat Rendah
39.	Tersusun dan Ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Tidak	ada	tidak	0	Sangat Rendah
40.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	53,66	56,23	57,61	100	Sangat Tinggi

Beberapa indikator bidang Pekerjaan Umum yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya untuk indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota belum bisa memenuhi target disebabkan oleh pendataan kepatuhan IMB hanya dilakukan pada gedung pemerintahan, sedangkan data kepatuhan IMB untuk bangunan lainnya belum terdata. Untuk

indikator Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun BerJalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, permasalahan yang dihadapi karena masa berlaku sertifikat jasa trampil konstruksi di Kabupaten Natuna telah habis masa berlakunya.

Pada tahun 2024, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna.

Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km.

Tabel 2.39: Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Dan Jenis Permukaan di Kabupaten Natuna, Tahun 2024 (Km)

Jenis Permukaan	Negara	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
1. Asphalt	114,73	100,13	128,42	343,28
2. Beton	0,00	21,61	129,15	150,76
3. Kerikil	0,00	8,19	48,60	56,79
4. Tanah	0,00	13,40	157,91	171,32
2023	**114,73**	**143,33**	**464,08**	**722,14**
2024	**114,73**	**143,33**	**491, 00**	**749,06**

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2025, diolah.

Tabel 2. 40
Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan, Tahun 2024 (Km)

Jenis Permukaan (Surface Type)	Nasional	Propinsi	Kabupaten	Jumlah Total
Baik / Good	94,42	99,05	209,9	402,56
Sedang / Moderate	20,21	9,27	73,79	103,27
Rusak Ringan Damaged	0,1	5,70	36,91	42,71
Rusak Berat /Severely Damaged	-	29,31	171,21	200,52
2024	**114,73**	**143,33**	**491,00**	**749,06**

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2025, diolah.

1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Selanjutnya dalam Pasal 3 ditegaskan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Tabel 2.41: Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Target	Indeks Capaian / Output			Capaian
			Jumlah yang dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
Kategori Indek Capaian SPM			Tuntas Madya			47,50%
Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar			Jumlah yang terlayani			95%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Rehabilitasi rumah korban bencana	Unit	3 Unit	3 Unit	0	80%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota					
	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah dan atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0%
	Bantuan atas Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	0%

Capaian indikator SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator standar pelayanan minimal yang ditargetkan pada tahun 2024 sudah tercapai dengan capaian 100 persen.

Tabel 2.42: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	2002,00	2000	1989	99,45	Sangat Tinggi
2.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kawasan	45,00	5	49	100,00	Sangat Tinggi
3.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Kawasan	45,00	5	49	100,00	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Unit	98,00	50	11	100,00	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Unit	100,00	4	3	75,00	Sedang

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
6.	kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1,00	1	1	100	Sangat Tinggi
7.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	12,60	38	35	91,29	Sangat Tinggi
8.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persen	92,40	94,2	92,5	98,20	Sangat Tinggi
9.	Rasio Rumah dan KK	Rasio	1:8	1:4	1:3	75,00	Sedang

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah layak huni; peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; serta penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh.

Permasalahan pembangunan daerah pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman :

1) Untuk indikator Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU, Kawasan Perumahan terbangun oleh pemerintah pusat belum di lakukan serah terima (status pinjam pakai), sehingga daerah tidak ada kewenangan untuk memfasilitasi/pemeliharaan PSU Perumahan.
2) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani belum tercapai disebabkan oleh Kurang maksimalnya sinkoronisasi program kegiatan yang berkontribusi pengurangan di kawasan kumuh di bawah 10 ha.

Tabel 2.43 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Tahun	RumahTangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak
2020	82,72
2021	81,26
2022	87,23
2023	86,17
2024	91,53

Sumber: BPS, 2025 (diolah).

Tabel 2.44: Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun	RumahTangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak
2019	63,41
2020	70,71
2021	70,71
2022	76,45
2023	79,27
2024	78,81

Sumber: BPS, 2025 (diolah).

1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keadaan masyarakat yang tentram, damai, kondusif merupakan harapan dari pemerintah dan masyarakat, sehingga segala kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Tabel 2.45: Capaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indeks Capaian SPM Trantibum		Tuntas Utama				86,67%
01.00	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					86,67,%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		250	250	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6,67%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	33,33%
	1. Standar sarana prasarana satpol PP dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	6	6	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada (SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan peabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	5	5	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda/Perkada, PNS yang telah lulus Diklatsar Satpol PP dan salinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (jumlah dan satuan kualitas personil/SDM Satpol PP/PPNS, Satlinmas)	Orang	85	85	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0%
	5. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	0%
	6. Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0%

Capaian indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tahun 2023 untuk bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencapai 86,67% namun terdapat beberapa permasalahan:

1) Jumlah personil dalam melaksanakan Pelayanan masih dinilai kurang memadai.
2) Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang pelaksanan kegiatan di lapangan.
3) Keamanan layanan belum sesuai keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan minimal.
4) Terjadinya refokusing (pemangkasan anggaran) sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.46: Capaian Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indek Capaian SPM Kebencanaan			Tuntas Utama			33,79%
01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					5,04%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		400	0	400	0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5,04%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	25,19%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	2	2	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	Orang	600	4451	595.549	0,74%
	3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	400	771	-371	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	12	0	12	0,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					8,33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		100	0	100	0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8,33%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	41,67%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	6	5	1	83,33%
	2. Peningkatan kapasitas personil /Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	40	0	40	0,00%
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					88,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		200	226	-26	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	40,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	0	2	0,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	Orang	10	55	-45	100%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	3	-1	100%
	4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	0	0	0	0%

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.47: Capaian Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indek Capaian SPM Damkar			Tuntas Utama			86,80%
01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					86,80%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		81	81	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6,80%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	34,02%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	13	13	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman Pemukima, .. dst)	Dokumen	5	5	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket, ...dll)	Unit	8	0	8	100%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	97	4	93	4,12%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	0%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	0%

Tabel 2. 48: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	0,00	1	0	0	Sangat Rendah
2.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	5,00	5	3	60	Rendah
3.	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Persen	1,00	25	100	100	Sangat Tinggi
4.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Kasus	165,00	95	286	100,00	Sangat Tinggi
5.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	5,00	10	18	100,00	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Kali	3,00	3	3	100,00	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	92,00	93	61	65,12	Sedang
8.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda	3,00	9	9	100,00	Sangat Tinggi
9.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	18,00	18	0	0	Sangat Rendah
10.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Perda	3,00	9	9	100,00	Sangat Tinggi
11.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Orang	2,00	5	2	40,00	Sangat Rendah
12.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	115,00	400	160	40,00	Sangat Rendah
13.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Jenis	5,00	33	18	55	Rendah
14.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Unit	5,00	6	6	100,00	Sangat Tinggi
15.	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Orang	484,00	454	484	100,00	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
16.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Persen	11,90	90	16	17,77	Sangat Rendah
17.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	92,00	93	61	65,60	Sedang
18.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	2,00				Sangat Rendah
19.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	93,00	80	100	100	Sangat Tinggi
20.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
21.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	67,00	70	70	100	Sangat Tinggi
22.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
23.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
24.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00				Sangat Rendah
25.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Persen	75,00	75	75	100	Sangat Tinggi
26.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
27	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	0,00	100	0	0	Sangat Rendah
28.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	0,00	100	0	0	Sangat Rendah
29.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Persen	37,50	93	80	86	Tinggi
30.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	143,00				Sangat Rendah
31.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	0,00	100	0	0	Sangat Rendah
32.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
33.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	26775,00	54500	8313	15,25	Sangat Rendah
34.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	55,00	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
35.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	92,59	100	100	100	Sangat Tinggi
36.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
37.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
38.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	Persen	100,00				Sangat Rendah
39.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa	Unit	1,00	3	0	0	Sangat Rendah
40.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Orang	0,00				Sangat Rendah
41.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Unit	1,00	3	0	0	Sangat Rendah
42.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Jenis	5,00	2	18	100	Sangat Tinggi
43.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum	SOP	13,58	6	14	100	Sangat Tinggi
44.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit/ Kejadian	13,58	13	15	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Sepanjang tahun 2024 terdapat 74 kejadian tindak pidana di Kabupaten Natuna. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 76 tindak pidana. Dari 74 tindak pidana yang terjadi pada tahun 2024, sebanyak 84 persen tindak pidana berhasil diselesaikan, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan penyelesaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79 persen.

Selain itu, pada tahun 2024 terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Natuna dari 4.837 menjadi tidak ada pelanggaran. Selama tahun 2024, terdapat 76 kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Natuna. Dari total kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat 5 orang korban meninggal dunia, sedangkan korban dengan luka berat sebanyak 47 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang.

1.6 Urusan Sosial

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp501.927. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin .

Di samping itu, pada tahun 2024, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 4.170 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,25 persen menjadi 5,04 persen.

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.49: Capaian Indikator SPM Bidang Sosial

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
3	Jumlah lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
4	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
5	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Setiap Tahun

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah 100%

Tabel 2.50: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
1.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Keluarga	22,00	90	29	32,22	Sangat Rendah
2.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Jiwa	3127,00	1851	2288	100,00	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	0,00	1	0	100,00	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Orang	2018,00	20	51	100,00	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Paket	1849,00	20	51	100,00	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki	Layanan	1,00	1	1	100,00	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Orang	52,00	35	53	100,00	Sangat Tinggi
8.	Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	52,00	14	53	100,00	Sangat Tinggi
9.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	1,00	5	1	20,00	Sangat Rendah
10.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Orang	3128,00	84	2293	100,00	Sangat Tinggi
11.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Orang	7,00	2	11	100,00	Sangat Tinggi
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Orang	6,00	5	10	100,00	Sangat Tinggi
13.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	75,00	30	281	100,00	Sangat Tinggi
14.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	1940,00	90	1082	100,00	Sangat Tinggi
15.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	Orang	22,00	50	29	58,00	Rendah

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
16.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	1,00	5	5	100,00	Sangat Tinggi
17.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi	Paket	124,00	100	264	100,00	Sangat Tinggi
18.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Paket	124,00	10	264	100,00	Sangat Tinggi
19.	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Panti/ Rumah Singgah	0,00	0	0	100,00	Sangat Tinggi
20.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Orang	0,00	0	0	100,00	Sangat Tinggi
21.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Tim	0,00	0	0	100,00	Sangat Tinggi
22.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
23.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
24.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50,00	50	50	100,00	Sangat Tinggi
25.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persen	75,44	51,13	77,70	100,00	Sangat Tinggi
26.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
27.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	87,80	59,84	92,90	100,00	Sangat Tinggi
28.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	0,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
29.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
30.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi
31.	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Beberapa indikator kinerja bidang sosial yang belum tercapai diantaranya adalah Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar, Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah, dan Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk.

Indikator-indikator tersebut belum bisa memenuhi target karena belum dibangunnya rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, disamping sudah dilaksanakan berbagai program pemberantasan kemiskinan oleh SKPD terkait, juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai lembaga yang mengelola pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna secara terarah, terencana, terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dengan menggunakan database yang sama dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Namun demikian, secara umum, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala antara lain:

1) Banyaknya sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di beberapa pulau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ada belum dapat tertangani secara maksimal;
2) Tidak ada Tenaga Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan terhadap PPKS dan Sarana-Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
3) Tidak adanya shelter/rumah singgah yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten sehingga Dinas Sosial Kabupaten Natuna tidak bisa memberdayakan penyandang disabilitas di dalam melaksanakan layanan kesejahteraan sosial sesuai Peeraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Sosial bagi Daerah, terkait dengan kewenangan kabupaten untuk pelayanan dasar PMKS di luar panti, harus memiliki memiliki shelter/rumah shelter/rumah;
4) Karena tidak adanya shelter bagi penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas yang meresahkan masyarakat harus dititipkan sementara di disabilitas yang meresahkan masyarakat hams dititipkan sementara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna;
5) Belum tersedianya fasilitas bangunan/ gedung logistic, mobilitas darat dan logistik, mobilitas darat dan laut serta peralatan lainnya dalam rangka penanganan korban bencana;
6) Belum terpenuhnya jumlah SDM baik dalam jabatan pengelolaan, administrasi maupun analisis dalam penanganan bencana alam;
7) Belum terpenuhinya kompetensi tenaga lapangan selaku yang menangani pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna sebesar 45.634 orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus

rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.007 orang. Angkatan kerja terdiri atas bekerja sebanyak 43.861 orang dan pengangguran terbuka sebanyak 1.773 orang.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 72,85 persen atau meningkat sebesar 0,42 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, TPT Kabupaten Natuna sebesar 3,89 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun 2023.

Penduduk dengan pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/ pegawai merupakan yang terbanyak di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 20,489 ribu orang. Sementara itu, penduduk dengan pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah yang terendah yaitu sebesar 1,050 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja tertinggi adalah sektor Jasa sebanyak 27,115 ribu orang, sedangkan sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terendah yaitu sebesar 7,270 ribu orang.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna.

Tabel 2.51: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
2.07.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
1.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	54,43	0,8	89,05	100,00	Sangat Tinggi
2.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	1	0	0	Sangat Rendah
3.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	0,00	15	0	0	Sangat Rendah
4.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	BKK	0,00	6	5	83,33	Tinggi
5.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Orang	0,00	15	0	0	Sangat Rendah
6.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Orang	0,00	15	0	0	Sangat Rendah

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
7.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Orang	0,00	15	0	0	Sangat Rendah
8.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	0,00	1	0	0	Sangat Rendah
9.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	6,00	5	15	300	Sangat Tinggi
10.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	0,00	1	1	100	Sangat Tinggi
11.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Orang	610,00	699	129	18,45	Sangat Rendah
12.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	0,00	10	0	0	Sangat Rendah
13.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Layanan	609,00	379	731	100,00	Sangat Tinggi
14.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Perjanjian	1,00	3	19	100,00	Sangat Tinggi
15.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Kasus	0,00	0	0	0	Sangat Rendah
16.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Kasus	0,00	0	0	0	Sangat Rendah
17.	Lulusan Bersertifikat Kompetens	Persen	74,10	80,41	80,33	99,90	Sangat Tinggi
18.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
19.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Persen	0,00	0	0	0	Sangat Rendah
20.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
21.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Persen	0,00	100	0	0	Sangat Rendah
22.	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	100,00	33,33	100,00	100,00	Sangat Tinggi
23.	Persentase Penyerapan Lulusan	Persen	19,28	39,19	26,23	66,93	Sedang
24.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	0,00	0	0	0	Sangat Rendah
25.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	26,92	4	33	100,00	Sangat Tinggi
26.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Persen	57,14	4	25	100,00	Sangat Tinggi
27.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	3,85	4	4	0	Sangat Rendah

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
28.	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	26,92	43	55,56	100,00	Sangat Tinggi
29.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,02	0,01	1,29	100,00	Sangat Tinggi
30.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	Persen	0,16	40	10,89	27,22	Sangat Rendah
31.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	67,35	96	2,33	2,42	Sangat Rendah
32.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Persen	1,81	0,01	3,28	32,80	Sangat Rendah
33.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,95	96	95,95	99,94	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Permasalahan/kendala pencapaian indikator urusan bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan CTKI
2. Belum terbentuknya BKK disekolah kejuruan
3. Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI sehingga belum ada pendaftar yag dapat dilatih
4. Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di kabupaten natuna
5. Kebutuhan tenaga kerja yang ada di SISNAKER tidak sesuai dengan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi di kabupaten natuna
6. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah kabupaten natuna

Tindak lanjut dari permasalahan diatas :

1. Mencari pasar tenaga kerja CTKI dan CPMI serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait di suatu wilayah lain atau dengan biro/lembaga yang menangani CTKI /CPMI
2. Pembentukan BKK di sekolah kejuruan
3. Mencari peluang pasar kerja dan memberikan dorongan kepada pihak swasta untuk membentuk lembaga penempatan tenaga kerja
4. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

Tabel 2. 52 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.476
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.270
3. Jasa (Services)	27.115
Jumlah	**43.861**

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025

2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya untuk terus melakukan pembangunan kualitas hidup manusia melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut; baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan dewasa ini seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi ini diperburuk oleh persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Perkembangan Capaian Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Pada tahun 2024, Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 IPG menunjukkan angka 92,07 lalu menjadi 91,82 di tahun 2024.

Tabel 2.53: Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional

No	Uraian	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Karimun	91,25	91,00	91,12	91,33	91,61
2	Kabupaten Bintan	93,12	93,53	93,78	93,93	94,05
3	Kabupaten Natuna	91,67	91,95	91,86	92,07	91,82
4	Kabupaten Lingga	89,25	89,73	90,48	90,75	91,12
5	Kab. Kep. Anambas	90,27	90,30	91,14	91,25	91,58
6	Kota Batam	94,43	94,51	94,75	94,95	95,72
7	Kota Tanjungpinang	96,79	97,14	97,14	96,96	97,02
8	Kepulauan Riau	93,31	93,49	93,50	93,96	94,20
9	Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber data : BPS, 2025 (diolah).

Perkembangan Capaian Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Natuna

Selain IPG, UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lain yang berkaitan dengan gender, yaitu Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (riil) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar 43,86. Capaian IDG Tahun 2024 ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak 6,27 poin dari angka capaian IDG di tahun 2023 sebesar 50,13.

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan juga disertai dengan perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi hal ini juga diupayakan bukan kepada perempuan saja namun juga kepada anak yang jumlahnya 1/3 dari jumlah penduduk sehingga dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan terwujud perlindungan khusus bagi anak dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak dan secara

menyeluruh hal tersebut diatas menjadi tanggungjawab seluruh OPD, lembaga masyarakat media, dunia usaha dan perguruan tinggi agar meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak bisa terwujud di Kabupaten Natuna.

Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi perempuan dan anak, rapat-rapat koordinasi lintas sekretural melalui Pokja PUG maupun gugus tugas KLA juga dapat dilakukan melalui penguatan program kegiatan resperensif perempuan dan anak pada setiap OPD serta penguatan lembaga pengaduan.

Tabel 2. 54: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	Kader	8,00	72	14	19,44	Sangat Rendah
2.	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah 1yang sudah Dievaluasi1	Kebijakan	1,00	1	1	100	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	2,00	1	2	100	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)	Lembaga	2,00	1	2	100	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal	Lembaga	2,00	1	2	100	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	2,00	1	1	100	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	Lembaga	20,00	30	30	100	Sangat Tinggi
8.	Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Media	6,00	8	6	75	Sedang
9.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	Ormas/ LSM	7,00	20	20	100	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
10.	Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	Program	41,00	45	51	100	Sangat Tinggi
11.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
12.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
13.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	8,65	2,50	10,23	100	Sangat Tinggi
14.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	0,50	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
15.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	2,00	9,12	2,00	21,92	Sangat Rendah
16.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
17.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayan	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
18.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
19.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	Nilai	0,00	0,05	0,00	0,00	Sangat Rendah
20.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Nilai	0.007	0,17	13,00	0,45	Sangat Rendah
21.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Nilai	0.046	34,55	26	0,26	Sangat Rendah

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Capaian indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 masih belum sepenuhnya memenuhi target. Salah satunya adalah indikator Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih belum tercapai karena permasalahan masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia perempuan di desa/kelurahan dan SDM perempuan yang ada di desa/kelurahan masih enggan untuk ikut aktif dalam pembangunan di segala bidang di masyarakat.

2.3 Urusan Pangan

Tabel 2.55: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	Persen	87,68	34,05	5,60	16,45	Sangat Rendah
2.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kkal/kap/hr	1868,00	2100	2132	100	Sangat Tinggi
3.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Sample	65,00	68	36	53	Sangat Rendah
4.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	6,40	16	2,472	15	Sangat Rendah
5.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	CV Rasio	CV≤5.3%	CV=10%	2,92	100	Sangat Tinggi
6.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	LPM	10,00	1	0	0	Sangat Rendah
7.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1,00	1	1	100	Sangat Tinggi
8.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Regulasi	1,00	1	0	0	Sangat Rendah
9.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Jiwa	500,00	835	186	22,28	Sangat Rendah

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Capaian indikator Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan belum tercapai dikarenakan penyaluran cadangan pangan tergantung pada terjadinya kondisi bencana. Sama halnya untuk indikator Tertanganinya Kerawanan Pangan yang belum tercapai karena penyaluran cadangan pangan pemerintah tergantung dari kejadian bencana yang ada. Sedangkan untuk indikator Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan belum tercapai karena Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan direncanakan akan dibangun menggunakan dana DAK, namun pada tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran DAK bidang pertanian di Kabupaten Natuna.

2.4 Urusan Pertanahan

Tabel 2.56: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Persen	Tidak ada	ada	Tidak ada	0	Sangat Rendah
2.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persen	ada	ada	ada	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Persen	0,00	14,93	19,97	100	Sangat Tinggi
4.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	36,00	88	52	59	Rendah
5.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100,00	80	99	100	Sangat Tinggi
6.	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Ada/Tidak	Tidak ada	ada	Tidak ada	0	Sangat Rendah
7.	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali Kota	Ada/Tidak	ada/12	ada	ada	100	Sangat Tinggi
8.	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Ada	Ada/12	ada	Tidak	0	Sangat Rendah
9.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Ada/Tidak	ada	ada	ada	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource baseeconomy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*lifesupport system*). Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sedangkan untuk ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbaharukan dan sumber daya alam tidak terbaharukan. Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas wilayah 224.684,59 km^2, dengan luas daratan 2.001,30 km^2 dan lautan 222.683,29 km^2.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Natuna terdiri dari air hujan, air permukaan dan air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari sumber

mata air yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum dilaksanakan secara efektif baik di hulu maupun di hilir, utamanya dalam proses pengangkutan. Masyarakat sebagai produsen sampah belum berpartisipasi optimal dalam pengelolaan persampahan, masih terbatas pada usaha konvensional seperti melakukan pembakaran dan penimbunan. Sementara untuk pengelolaan sampah dalam skala besar, dilakukan oleh masing-masing kecamatan yang bekerjasama dengan lembaga masyarakat, permasalahannya adalah keterbatasan sarana dan tenaga kerja sehingga belum mampu menjangkau seluruh pemukiman masyarakat.

Tabel 2.57: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	9,00	10	10	100,00	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	74,29	71,64	76,46	100,00	Sangat Tinggi
3.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	8,00	109	16	14,68	Sangat Rendah
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	5,00	5	5	100,00	Sangat Tinggi
5.	Peningkatan Baku Mutu Air	Persen	60,00	100	62,00	62,00	Rendah
6.	Peningkatan Baku Mutu Udara	Persen	89,37	100	93,01	93,01	Tinggi
7.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persen	35,49	55	44,29	80,53	Tinggi
8.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	32,09	36,23	34,39	94,92	Sangat Tinggi
9.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	41,87	45,98	39,96	86,91	Tinggi
10.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	1,00	1	1	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Berdasarkan hasil evalusi pencapaian pelayanan umum urusan lingkungan hidup diatas, indikator Peningkatan Baku Mutu Air yang belum maksimal dengan capaian kinerja sebesar 60% dari target 100%, disebabkan Karena faktor cuaca/Iklim. Tindak lanjut dalam Peningkatan Baku Mutu Air ini, Dinas Lingkungan Hidup akan menambah volume dalam pengambilan dan pengujian sampel air yang semula 2 kali dalam 1 tahun, menjadi 4 kali dalam 1 tahun. Untuk indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.58: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persen	23,00	30	23	76,67	Tinggi
2.	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100	99	99,28	Sangat Tinggi
3.	Penerbitan Akta Kematian	Persen	100,00	95	100	100,00	Sangat Tinggi
4.	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100,00	85	79	92,54	Sangat Tinggi
5.	Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100,00	90	78,26	86,96	Tinggi
6.	Penyajian Data Kependudukan	Persen	85,00	85	88	100,00	Sangat Tinggi
7.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	96,38	83	97	100,00	Sangat Tinggi
8.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	87,73	90	79	87,22	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Dari evaluasi pencapaian aspek pelayanan umum urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan beberapa indikator yang belum mencapai target. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya untuk indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, permasalahan yang dihadapi adalah beberapa Perangkat Daerah belum memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil. Solusi dan tindak lanjut dari permasalahan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk indikator Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran, permasalahannya adalah kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan keliling

di kecamatan dikarenakan akses Internet yang kurang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Tindak lanjut dengan cara optimalisasi pelayanan keliling di kecamatan untuk meningkatkan persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (Satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan Akta Kelahiran.

2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.59: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	5,00	6	6	100,00	Sangat Tinggi
2.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Persen	22,22	27,78	27,78	100,00	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	3,00	3	5	100,00	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	26,00	30	30	100,00	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	Lembaga	109,00	120	140	100,00	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	Lembaga	15,00	15	17	100,00	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Desa	45,00	50	54	100,00	Sangat Tinggi
8.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	54,28	50	51,43	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Keberhasilan kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari pemerintah desa dan kelembagaan yang ada di desa dalam mendukung program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Beberapa permasalahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusioner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten.

2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.60: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 20234			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	19,59	18,00	18,00	100,00	Sangat Tinggi
2.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Persen	66,01	28.4	25.5	89,25	Tinggi
3.	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Persen	100,00	1	1	100,00	Sangat Tinggi
4.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	Angka	100,00	22.1	22.3	100,00	Sangat Tinggi
5.	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Angka	100,00	1	2	100	Sangat Tinggi
6.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	Persen	75,00	100	100	100	Sangat Tinggi
7.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Persen	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
8.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	100,00	13,40	0,04	0,30	Sangat Rendah
9.	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah	Persen	100,00	67,82	0,00	69,56	Sangat Rendah
10.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen	0,00	99,53	90,00	99,97	Tinggi
11.	Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen	70,00	100	90	90	Tinggi
12.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	100,00	48,00	70,00	50,51	Rendah
13.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	74,72	79,89	61,70	77,23	Sedang
14.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	33,02	60,96	25.5	41,83	Sangat Rendah
15.	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	0,00	1	0	0	Sangat Rendah
16.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	100,83	2,35	2,11	89,79	Tinggi
17.	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Rasio	10,98	100	3,7	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Total Fertility Rate kabupaten Natuna tahun ke tahun mengalami penurunan yang baik, pada tahun 2023 TFR Kabupaten Natuna sebesar 2,43. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi capaian TFR diantaranya KB aktif (jumlah akseptor KB) atau mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) atau Jumlah Akseptor KB yang menggunakan Kontrasepsi modern atau MKJP atau jumlah pengguna Kontrasepsi Metode Jangka Panjang dan Unmet need atau jumlah PUS yang tidak mendapatkan pelayanan KB, ASFR 15-19 (Age

Spesific Fertility Rate 15-19).

Sedangkan untuk indikator Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan belum mencapai target karena Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dilaksanakan pada tahun 2022 diundangkan melalui Peraturan Bupati.

Beberapa permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

1) Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
2) Kurangnya kolaborasikan petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP-nya.
3) Kurangnya edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pasca salin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud, kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat.
4) Perlunya peningkatan peran dari Forum Generasi Berencana untuk pembinaan PIK-R.

2.9 Urusan Perhubungan

Geografis Kabupaten Natuna terdiri dari 99,11 persen berupa lautan. Keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut terlihat semakin baik dengan bertambahnya frekuensi pelayaran untuk menghubungkan Pulau-pulau Natuna yang dilayani oleh Kapal penumpang “KM Bukit Raya” (milik PELNI), KM. Sabuk Nusantara, KM. Bahtera Bahari (Roro) dan Kapal Tol Laut yang secara teratur melayani rute tersebut dan juga Kapal Tol Laut untuk kapal barang.

Sarana angkutan udara di Kabupaten Natuna tidak kalah pentingnya dengan angkutan lainnya. Sampai saat akhir tahun 2023 di daerah ini terdapat bandara yang disinggahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Raden Sadjad di Ranai Kecamatan Bunguran Timur.

Dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa pos dan telekomunikasi setiap tahunnya, perlu diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang serta pelayanan yang semakin baik. Di Kabupaten Natuna, terdapat lalu lintas surat, paket pos dan pengiriman uang dengan menggunakan jasa pos dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Berbagai jalur pelayaran laut telah berkembang dengan baik di Kabupaten Natuna, yang menghubungkan Kota Ranai dengan daerah lainnya. Hal ini tercermin dari semakin meningkatkan arus penumpang dan barang yang memanfaatkan jasa transportasi laut. Pada saat ini terdapat 2 (dua) model sistem perhubungan laut yaitu:

1) Sistem Transportasi Internal
   Sistem ini merupakan sistem transportasi yang menghubungkan antar pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis *speed boat* yang berupa perahu bermesin dengan kapasitas 20 orang penumpang yang disebut *pompong*. Selain itu juga dilayani dengan kapal-kapal perintis, dan juga ferry di beberapa pulau. Kebutuhan akan transportasi antar pulau yang cepat, aman, dan murah semakin meningkat untuk arus barang dan penumpang.

2) Sistem Tranportasi Eksternal
   Sistem transportasi eksternal adalah sistem transortasi yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau di Kabupaten tetangga lainnya. Moda tranportasi yang digunakan adalah jenis kapal perintis, kapal roro dan kapal pelni dengan rute yang telah terjadwal. Selain sarana tranportasi laut, Kabupaten Natuna juga mengandalkan sarana perhubungan udara yang menghubungkan Kabupaten Natuna dengan Kabupaten/Kota daerah lainnya. Di Kabupaten Natuna terdapat Bandara yang disinggahi oleh penerbangan komersial yaitu Bandara Raden Sadjad Ranai di Kecamatan Bunguran Timur. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya frekuensi penerbangan Bandara Ranai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.61: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	83,00	3,48	3,21	85	Sangat Tinggi
2.	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Persen	38,23	65	24,48	32,64	Rendah
3.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Persen	14,56	75	100	100,00	Sangat tinggi
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	90,00	75	60,4	80,53	Tinggi
5.	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	NA	40,00	0	NA	NA

Indikator bidang perhubungan pada tahun 2024 yang belum tercapai yaitu Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi.

2.10 Urusan Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.62: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	17.39	30	25	83.33	Sedang
2.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen	69.45	65	78	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	n.a	84,69	n.a	NA	NA
4.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100.00	14	100	100	Sangat Tinggi
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100.00	83	100	100	Sangat Tinggi
6.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	77.33	70,36	76,00	100,00	Sangat Tinggi
7.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Persen	100.00	60	100	100	Sangat Tinggi
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Persen	100.00	83	100	100	Sangat Tinggi
9.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	100.00	93,5	100,0	100,0	Sangat Tinggi
10.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100.00	83	100	100	Sangat Tinggi
11.	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100.00	6,5	100,0	100,0	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
12.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Tidak	0	Sangat Rendah
13.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Evaluasi indikator urusan komunikasi dan informatika pada aspek pelayanan umum di tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Kecuali untuk indikator Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government yang sampai saat ini belum ada.

2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah.

Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Tabel 2.63: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Persen	0,78	1	0,78	78,00	Tinggi
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	11,70	16,88	12,64	74,88	Sedang
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha	Persen	10,61	5,85	13,29	100,00	Sangat Tinggi
4.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	76,00	12,77	81,48	100,00	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen		78,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
6.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	11,70	26,30	12,07	45,89	Sangat Rendah
7.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	5,73	0,97	1,72	100,00	Sangat Tinggi
8.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Persen	2,87	1,17	0,31	26,50	Sangat Rendah
9.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran	Persen	1,14	2,74	0,31	11,31	Sangat Rendah
10.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Persen	2,59	13,63	10,65	78,14	Tinggi
11.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Persen	3,48	5,68	10,02	100,00	Sangat Tinggi
12.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Persen	69,46	85,00	94,65	100,00	Sangat Tinggi
13.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	3,61	3,75	7,04	100,00	Sangat Tinggi
14.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan	Persen	21,25	23,75	23,80	100,00	Sangat Tinggi
15.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	21,25	23,75	23,80	100,00	Sangat Tinggi
16.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	32,75	18,13	21,84	100,00	Sangat Tinggi
17.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25,73	13,75	42,53	100,00	Sangat Tinggi
18.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	12,87	16,88	14,94	88,51	Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
19.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	38,91	46,92	49,87	100,00	Sangat Tinggi
20.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25,71	55,10	81,48	100,00	Sangat Tinggi
21.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	2,00	5,63	7,04	100,00	Sangat Tinggi
22.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	3,10	2,84	3,29	100,00	Sangat Tinggi
23.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	5,51	7,92	8,41	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Permasalahan dan kendala pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan.
2) Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha sehingga dapat mengakibatkan tidak adanya inovasi produk
3) Rendahnya pemahaman dan kompetensi para pengurus koperasi terutama di bidang akuntansi
4) Minimnya pengawasan pengurus atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan diatas:

1) Rutin melaksanakan rapat tahunan agar terjalin komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota
2) Peningkatan pengawasan dan pemahaman pengurus koperasi
3) Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha secara reguler
4) Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan usaha ekonomi berbasis kerakyatan antara lain dengan mengarahkan dan meningkatkan peranan serta kemampuan usaha koperasi.

Jumlah koperasi di Kabupaten Natuna selama 2020 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023, yang mana jumlah koperasi menurun dari tahun sebelumnya berjumlah 70 koperasi menjadi 35 koperasi di tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan pada jumlah koperasi aktif di Kabupaten Natuna, yang sebelumnya hanya

berjumlah 35 unit menjadi 41 unit pada tahun 2024

Seiring dengan penambahan jumlah koperasi aktif pada tahun 2024, jumlah anggota koperasi yang ada di Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan yakni dari 4.224 anggota di tahun 2023 menjadi 4.330 anggota pada tahun 2024.

Tabel 2. 64: Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2021-2024

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi				Jumlah Anggota			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Midai	4	4	1	1	139	139	33	33
2.	Suak Midai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bunguran Barat	3	3	1	2	121	121	25	45
4.	Bunguran Utara	1	1	1	1	39	39	39	39
5.	Pulau Laut	2	2	1	1	146	146	56	56
6.	Pulau Tiga	5	5	3	2	121	121	75	55
7.	Bunguran Batubi	1	1	0	0	51	51	0	0
8.	Pulau Tiga Barat	3	3	1	2	128	128	78	98
9.	Pulau Seluan	-	-	0	0	-	-	0	0
10.	Bunguran Timur	24	31	20	22	2.353	2.779	3.239	3273
11.	Bunguran Timur Laut	5	5	1	1	150	150	56	33
12.	Bunguran Tengah	1	1	1	1	31	31	32	32
13.	Bunguran Selatan	4	4	1	1	129	129	34	34
14.	Serasan	5	5	4	4	515	515	547	542
15.	Subi	3	3	1	2	192	192	25	71
16.	Serasan Timur	2	2	1	1	90	90	29	19
17.	Pulau Panjang	-	-	0	0	-	-	0	0
Natuna		**63**	**70**	**37**	**41**	**4.205**	**4.631**	**4.268**	**4.330**

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, perkembangan Badan Usaha Koperasi di wilayah Kabupaten Natuna telah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Natuna. Kondisi seperti ini disamping membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu menjadi penyokong perekonomian rakyat dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di daerah.

2.12 Urusan Penanaman Modal

Sektor industri bukan merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Natuna, namun sektor tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi. Potensi sektor industri di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor industri kecil. Sehingga belum mampu secara optimal menyerap investasi di kabupaten Natuna. Beberapa kendala dan permasalahan di bidang investasi daerah adalah berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat seperti berikut; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna yang belum bisa menjadi magnet kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna; (2) Masih dijumpainya tumpang tindih

koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

Tabel 2. 65: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
1.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Promosi	2,00	1	1	100	Sangat Tinggi
2.	Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	38,11	12,44	22,63	100,00	Sangat Tinggi
3.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi	270,00	264	36	13,64	Sangat Rendah
4.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	0,00	1	1	100	Sangat Tinggi
5.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan	4,00	4	4	100	Sangat Tinggi
6.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	4,00	2	8	100	Sangat Tinggi
7.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	Perusahaan	316,00	55	320	100	Sangat Tinggi
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	2616,00	890	4356	100	Sangat Tinggi
9.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1,00	0	0	0	Sangat Rendah
10.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	41,70	12,38	24,87	100,00	Sangat Tinggi
11.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	SOP	1,00	0	0	0	Sangat Rendah
12.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Peizinan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00	12	12	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Indikator kinerja bidang Penanaman Modal yang belum tercapai pada tahun 2024 diantaranya adalah Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Tindak lanjut dari permasalahan ini adalah akan dilaksanakan koordinasi antar stakeholder terkait. Sedangkan untuk indikator PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum bisa tercapai disebabkan oleh banyaknya penambahan regulasi di bidang penanaman modal sehingga perlu dilakukan reviu terhadap Perda tersebut.

2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.66: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1.	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah	Event	3,00	2	4	100,00	Sangat Tinggi
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	18,00	5	48	100	Sangat Tinggi
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	13,72	50	14,88	29,76	Sangat Rendah

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Pencapaian kinerja pada urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2024 khususnya pada indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri masih rendah karena Penduduk usia 16 - 30 tahun (pemuda) di Kabupaten Natuna orientasinya bekerja di sektor formal seperti pegawai pemerintah dan kantor swasta, dan Program Wirausaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik.

Dalam menghadapi persaingan usaha dewasa ini, pemuda mengalami hambatan komunikasi dengan mitra usaha, perkembangan usaha belum menunjukkan kinerja yang baik, faktor penghambat kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kekurangan modal usaha, keterampilan berusaha pengusaha muda yang rendah, tingkat persaingan yang ketat, kualitas produk layanan, pemasaran dan tempat usaha. Untuk itu diperlukan program penumbuhan, pengembangan dan pembinaan wirausaha muda ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam dan budaya dilaksanakan melalui kegiatan penguatan kelembagaan. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan peningkatan aksesbilitas sumber permodalan dan pasar.

2.14 Urusan Statistik

Tabel 2. 67: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
1.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
2.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas, Indikator kinerja bidang statistik pada tahun 2024 secara keseluruhan tercapai dengan hasil kinerja sangat baik dengan capaian kinerja 100 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian indikator bidang statistik adalah terbatasnya SDM bidang persandian.

2.15 Urusan Persandian

Tabel 2.68: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
1.	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	100,0	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Indikator kinerja bidang persandian pada tahun 2024 secara keseluruhan tercapai dengan hasil kinerja sangat baik dengan capaian kinerja 100 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian indikator bidang persandian adalah terbatasnya SDM bidang persandian.

2.16 Urusan Kebudayaan

Tabel 2.69: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	0,00	3	2	66.67	Sedang
2.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)	OPK	20,00	1	1	100.00	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Persen	8,00	5	5	100.00	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	OPK	16,00	12	12	100.00	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.	Jumlah SDM, Lembaga dan Ppranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	Orang	0,00	20	44	100.00	Sangat Tinggi
6.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Tim	0,00	1	-	0.00	Sangat Rendah
7.	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	SDM	4,00	3	10	100.00	Sangat Tinggi
8.	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Item	10,00	10	16	100.00	Sangat Tinggi
9.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Jenis	1,00	1	1	100.00	Sangat Tinggi
10.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	Pertunjukan	16,00	3	2	66,67	Sedang
11.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	SDM	0,00	1	1	100,00	Sangat Tinggi
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Jenis	1,00	5	5	100,00	Sangat Tinggi
13.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Event	6,00	12	12	100,00	Sangat Tinggi
14.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)	Item	10,00	20	44	100,00	Sangat Tinggi
15.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Item	10,00	1	0	0,00	Sangat Rendah

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Capaian indikator kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2024 belum optimal disebabkan masih ada indikator kinerja daerah yang realisasinya rendah yaitu: Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan.

2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.70: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	82,45	77	74,48	96,73	Sangat Tinggi
2.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0,00	77	65,16	84,62	Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Belum tercapainya target kinerja pada pelayanan perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dikarenakan belum melakukan survey melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari, jumlah buku yang ditamatkan per tahun, frekuensi akses internet per minggu, dan lama akses internet per hari. Hal ini tidak dapat dilakukan, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1) Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2) Belum ada penyusunan roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
3) Dinas Perpustakaan tidak memiliki tenaga/ sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mencapai hal tesebut
4) Belum maksimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan survei TGM bagi wilayah Kepulauan Natuna yang terdiri dari laut dan pulau-pulau.

2.18 Urusan Kearsipan

Tabel 2.71: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
1.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	47,91	75	83,30	100	Sangat Tinggi
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50,00	75	42,75	57,00	Rendah
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75,00	50	62,1	100	Sangat Tinggi

Sumber: Barenlitbang, 2025 (diolah).

Kinerja pada bidang kearsipan dievaluasi melalui indikator Indeks Penyelenggaraan Kearsipan, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Indikator yang belum tercapai disebabkan karena kurangnya SDM kearsipan yang mampu menjalankan tugas kearsipan secara baik, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan arsip.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan kondisi geografi kabupaten Natuna yang sebagian besar merupakan wilayah perairan, maka potensi perikanan dan kelautan relatif besar dan hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakatnya yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau. Potensi kelautan Natuna terdiri atas potensi yang dapat pulih *(renewable resource)* antara sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan potensi tidak dapat pulih *(unrenewable resource)* seperti mineral, minyak dan lain-lain.

Tabel 2.72*:* Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Ekor	60000	50.000	81.673	100	Sangat Tinggi
2.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Kelompok	23,00	5	12	100	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)	Orang	229,00	145	500	100	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	RTP	38,00	10	46	100	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber Data: One Data KKP)	Ton	139468,64	141.000,23	141.002,26	100,00	Sangat Tinggi
6.	Produksi Sektor Perikanan	Ton	139468,64	141.000,23	141.002,26	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Sub sektor perikanan adalah subsektor paling dominan dan menonjol diantara sub sektor pertanian dalam arti luas. Produksi perikanan dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti dan diharapkan untuk masa yang akan datang masih dapat ditingkatkan. Dengan berlakunya hukum laut internasional *Zona Economy Exclusive* (ZEE) diharapkan akan mendorong lebih banyak pengusaha perikanan yang ada. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 139.468,64 ton pada 2023 menjadi 141.002,26 ton pada 2024. Pada tahun 2024, jumlah alat perikanan tangkap dan jumlah produksinya di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024

Kecamatan	Pancing Ulur		Pancing Tonda		Bagan		Jaring Pantai	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	154	1.424,59	142	1.422,02	0	0	27	57,31
2. Suak Midai	132	1.219,69	59	594,28	0	0	34	73,35
3. Bunguran Barat	440	3.872,00	249	2.493,84	120	4.641,36	0	0
4. Bunguran Utara	552	4.250,40	100	1.000,00	11	779,99	296	586,08
5. Pulau Laut	150	1.980,00	130	1.300,00	2	147	13	27,51
6. Pulau Tiga	142	1.307,50	112	1.124,88	21	1.623,65	36	77,94
7. Bunguran Batubi	129	1.191,96	110	1.100,00	0	0	50	108
8. Pulau Tiga Barat	285	3.758,94	284	2.047,71	4	360	0	0
9. Pulau Seluan	301	2.781,24	50	500	0	0	148	319,68
10. Bunguran Timur	456	5.918,88	430	3.868,10	0	0	70	151,29
11. Bunguran Timur Laut	261	2.465,27	273	2.727,30	27	2.069,36	140	302,57
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bunguran Selatan	190	1.756,35	229	2.292,21	0	0	35	75,64
14. Serasan	388	3.582,78	112	1.652,00	5	389,99	20	43,55
15. Subi	297	2.747,77	202	1.414,00	3	234	120	259,2
16. Serasan Timur	386	3.401,18	85	933,86	6	467,99	19	41,26
17. Pulau Panjang	276	2.550,24	101	1.010,00	0	0	60	129,6
2023	**4.539**	**44.208,79**	**2.668**	**25.480,20**	**199**	**10.713,33**	**1.068**	**2.252,97**

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025.

Tabel 2.74: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024

Kecamatan	Sero		Rawai		Bubu Ikan		Bubu Kepiting	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	0	0	34	92,06	1.411	2.328,53	0	0
2. Suak Midai	0	0	0	0	233	462,26	380	410,31
3. Bunguran Barat	0	0	33	476,68	2.530	3.339,60	2.973	2.408,13
4. Bunguran Utara	0	0	0	0	883	1.165,56	893	964,64
5. Pulau Laut	0	0	80	1.159,20	180	297	15	16,05
6. Pulau Tiga	0	0	36	522,81	21	35,02	0	0

Kecamatan	Sero		Rawai		Bubu Ikan		Bubu Kepiting	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
7. Bunguran Batubi	0	0	50	724,5	80	176	120	129,60
8. Pulau Tiga Barat	5	20,6	28	399,8	207	273,15	0	0
9. Pulau Seluan	0	0	0	0	441	970,2	200	216,00
10. Bunguran Timur	0	0	0	0	2.760	4.554,00	1.387	1498,03
11. Bunguran Timur Laut	23	90,64	25	369,05	152	250,39	2.728	2946,12
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bunguran Selatan	21	149,82	72	1.493,76	2.312	2.542,95	621	670,47
14. Serasan	0	0	25	369,05	1.420	3.904,00	33	35,53
15. Subi	0	0	354	4.071,00	1.247	1.371,70	400	432,00
16. Serasan Timur	0	0	44	630,45	1.406	3.093,15	40	43,55
17. Pulau Panjang	0	0	177	2.564,73	623	1.370,60	0	0
2023	**49**	**261,06**	**958**	**13.273,09**	**15.906**	**26.134,11**	**9.790**	**9.770,43**

Sumber: Natuna Dalam Angka 2025

Tabel 2.75: Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2024

Kecamatan	Kelong		Tangkul		Alat Lainnya	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	0	0	0	0	25	140,37
2. Suak Midai	0	0	0	0	22	122,82
3. Bunguran Barat	60	326,64	0	0	214	389,07
4. Bunguran Utara	24	26,36	57	55,01	36	87,26
5. Pulau Laut	0	0	0	0	0	0
6. Pulau Tiga	7	40,11	0	0	25	140,37
7. Bunguran Batubi	0	0	0	0	34	187,16
8. Pulau Tiga Barat	4	22,92	0	0	0	0
9. Pulau Seluan	0	0	0	0	0	0
10. Bunguran Timur	10	51,57	0	0	146	265,1
11. Bunguran Timur Laut	10	51,57	28	26,49	129	234,59
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0
13. Bunguran Selatan	0	0	178	149,76	89	194,54
14. Serasan	17	91,69	0	0	0	0
15. Subi	32	171,92	0	0	16	87,73
16. Serasan Timur	18	97,42	0	0	21	116,98
17. Pulau Panjang	0	0	0	0	0	0
2023	**182**	**880,21**	**263**	**31,26**	**757**	**1.965,99**

Sumber: Natuna Dalam Angka 2024

Potensi perikanan yang sangat besar mewajibkan Kabupaten Natuna memiliki pelabuhan minimal berstandar nasional sehingga kapal-lapal pencari ikan dapat berlabuh di pelabuhan tersebut dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Kabupaten Natuna hanya memiliki Palabuhan Perikanan Ikan (PPI). Diharapkan Kabupaten Natuna segera memiliki pelabuhan sebagai *chek point* kapal-kapal penangkap ikan di wilayah Laut Natuna .

3.2 Urusan Pariwisata

Tabel 2.76: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
1.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Destinasi	3,00	2	2	100	Sangat Tinggi
2.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Event	0,00	1	0	0	Sangat Rendah
3.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Event	3,00	1	2	100	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	DTW	3,00	2	2	100	Sangat Tinggi
5.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	31,06	27.000	31.107	100	Sangat Tinggi
6.	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Pokdarwis	3,00	2	5	100	Sangat Tinggi
7.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Event	3,00	2	6	100	Sangat Tinggi
8.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	TDUP	5,00	2	0	0	Sangat Rendah
9.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	227,00	200	141	70,5	Sedang
10.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Rupiah	3,50	2,5	3,5	100	Sangat Tinggi
11.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	117,97	3	0.50	16,67	Sangat Rendah
12.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persen	31,06	13	0.14	1,08	Sangat Rendah
13.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Persen	112,00	30	130	100	Sangat Tinggi
14.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan	Persen	100,00	80	133	100	Sangat Tinggi
15.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Hari	3,00	4	2	50	Sangat Rendah
16.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	10,00	15	9.76	65,07	Sedang

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Kabupaten Natuna merupakan kota yang kaya akan khazanah kesenian tradisional melayu, seperti mendu, joget dangkung, zapin, makyong, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya. Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna pada tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 179 buah, yang terdiri dari 79 wisata bahari, 5 air terjun, 25 wisata gunung/bukit, 52 situs bersejarah dan 18 buah obyek wisata lainnya. Pada aspek sarana rekreasi dan olah raga kota, kondisi saat ini yang mendesak untuk segera ditangani adalah persebaran sarana rekreasi publik, yaitu taman-taman kota yang bersifat taman rekreasi

publik yang masih minim. Saat ini taman rekreasi publik yang terdapat di Kabupaten Natuna adalah Pantai Piwang, Mesjid Agung Islamic Center Ranai, Pantai Tanjung Ranai, Taman Rekreasi Ceruk, Air Terjun Batu Hiu Ceruk, Air Terjun Munong di Ceruk, Air Terjun Gunung Ranai, Pantai Batu Kasah Cemaga, Pulau Senoa, Pantai Sisi Serasan, Pantai Pasir Marus Sedanau dan lain-lain.

Jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah wisatawan mancanegara hanya 141 orang, menurun drastis dari tahun 2023 dengan jumlah wisatawan sebanyak 227 orang. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah objek wisata selain wisata bahari. Kunjungan ke objek wisata pada tahun ini mencapai 65.543 kunjungan, dengan objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah wisata bahari/pantai (53.802 kunjungan).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah disebabkan karena masih kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, belum adanya aturan mengenai retribusi parkir di objek-objek wisata, dan belum adanya aturan mengenai admission fee di objek-objek wisata yang disertai dengan fasilitas-fasilitas penunjang berstandar nasional pada objek-objek tersebut.

Kepariwisataan merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat tidak tergantung dengan kegiatan dari pemerintahan atau dana APBD. untuk itu diharapkan kepedulian dari Pemerintah kabupaten Natuna untuk menyediaan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek wisata sangat *urgent* untuk dilaksanakan. Selain itu infrastruktur menuju akses tempat wisata dapat dibangun sehingga para wisatawan dapat mengakses dengan mudah.

3.3 Urusan Pertanian

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Natuna yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Terjadinya krisis ekonomi semakin menempatkan usaha pertanian sebagai bidang pembangunan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta menyerap tenaga kerja bagi yang kehilangan pekerjaan.

Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama pemerintah kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan

produksi pertanian dan bertujuan meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Perkebunan merupakan subsektor pertanian yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat regional maupun nasional. Komoditas tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Natuna adalah kelapa dengan jumlah produksi sebesar 2.555 ton pada tahun 2023. Nilai produksi ini merupakan nilai produksi dari kelapa utuh, sedangkan nilai produksi pada tahun 2022 diperoleh dari nilai produksi kopra/kelapa dalam dengan nilai produksi sebesar 61,70 ton. Selain itu, komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Natuna adalah cengkeh dan karet dengan nilai produksi masing masing komoditas di tahun 2023 sebesar 1.027 ton dan 1.012 ton.

Tabel 2. 77: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
1.	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	Persen	60,00	70	70	100	Sangat Tinggi
2.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi	Ha	20,00	6,5	6,5	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	Persen	0,49	2,2	0,17	7,7	Sangat Rendah
4.	Persentase Prasarana yang Digunakan	Persen	102,50	73	73	100	Sangat Tinggi
5.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	Unit	41,00	41	41	100	Sangat Tinggi
6.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	7904,00	149641	11160	7,45	
7.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	5,56	5,92	5,92	100	Sangat Tinggi
8.	Sarana Pertanian yang Diberikan	Unit	5,00	5	5	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Pada bidang Pertanian, indikator kinerja daerah produksi sektor pertanian belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut :

1) Sebagian besar tanaman perkebunan yang ada, telah memasuki masa tua (tidak produktif)
2) Tingginya harga sarana produksi pertanian yang tidak diiringi dengan nilai harga jual produksi.
3) Terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) khusunya tanaman perkebunan dibeberapa Kecamatan seperti gangguan OPT di kecamatan Midai
4) Menurunnya kualitas genetik ternak khusunya ternak sapi sebagai unggulan sektor peternakan sehingga produktifitasnya render
5) Sarana irigasi tidak memadai dan disebagian besar lokasi persawahan yang dibuka tidak ada sarana irigasinya.

3.4 Urusan Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan sarana perekonomian yang sangat mempengaruhi kehidupan kota dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Posisi strategis kota menjadi tujuan masyarakat wilayah sekitar untuk mendistribusikan hasil bumi dan potensi lainnya serta menjadi tujuan untuk memperoleh kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersiernya. Peluang demikian ditangkap dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan baik tradisional maupun modern. Pasar Tradisional sebagai sarana perdagangan yaitu Pasar Ranai. Sedangkan sarana perdagangan modern saat ini sudah berdiri beberapa supermarket dan mini market yang tersebar dan cenderung meningkat pada beberapa lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk. Perdagangan besar dari tahun sebelumnya menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Begitu juga dengan jenis perdagangan lainnya yaitu perdagangan eceran, rumah makan dan restoran, serta kedai kopi.

Tabel 2.78: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
1.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Persen	93,11	87,00	97,18	100,00	Sangat Tinggi
2.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Persen	8,38	1,15	9,80	100,00	Sangat Tinggi
3.	Persentase Alat–alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	2,60	1,67	5,10	100,00	Sangat Tinggi
4.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Persen	9,43	8,70	9,43	100,00	Sangat Tinggi
5.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	NA	1,69	na		Sangat Rendah
6.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	93,11	87,00	97,18	100,00	Sangat Tinggi
7.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	4,92	2,09	0,80	38,28	Sangat Rendah
8.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	3,19	2,37	8,52	100,00	Sangat Tinggi
9.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,00	15,38	17,39	100,00	Sangat Tinggi
10.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Persen	100,00	84,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
11.	Persentase Penerbitan TDG	Persen	100,00	84,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
12.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	40,91	20,83	36,00	100,00	Sangat Tinggi
13.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Persen	60,00	16,00	36,00	100,00	Sangat Tinggi
14.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Persen	0,00	80,60	0,00	0,00	Sangat Rendah
15.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Persen	0,00	13,45	11,54	85,80	Tinggi
16.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Persen	2,00	3,00	2,00	66,67	Sedang

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Salah satu indikator kinerja daerah bidang perdagangan yang belum tercapai targetnya adalah Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Kualitas dari produk masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas kemasan, daya tahan produk, harga produk dan sertifikasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
2) Pemahaman UMKM terhadap penggunaan teknologi yang masih rendah, sehingga produk yang dihasilkan masih bersifat local
3) Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

3.5 Urusan Perindustrian

Pergerakan ekonomi masyarakat salah satunya bisa dilihat dari bergeraknya sektor industri. Unit kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian pada Kabupaten Natuna menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum berbadan hukum. Sektor industri di Kabupaten Natuna sejauh ini masih belum menunjukkan perkembangan yang pesat, industry yang berjalan masih sebatas industri rumahtangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tabel 2.79: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
1.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Persen	25,92	44,88	32,72	72,91	Sedang
2.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin PerLuasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	100,00	84	100	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	100,00	84	100	100	Sangat Tinggi
4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerLuasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	79	100	100	Sangat Tinggi
5.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Persen	100,00	84	100	100	Sangat Tinggi
6.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Persen	100,00	84	100	100	Sangat Tinggi
7.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,00	79	0	0	Sangat Rendah
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	15,86	54	15,86	29,37	Sangat Rendah
9.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Persen	55,94	42,28	35,54	84,06	Tinggi
10.	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Persen	50,00	54	50	92,59	Sangat Tinggi
11.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Persen	58,82	30,73	55,14	100,00	Sangat Tinggi
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Laporan	2,00	2	2	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Beberapa indikator kinerja bidang Perindustrian yang belum tercapai diantaranya adalah Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota, dan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP.

Belum tercapainya target Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota, disebabkan antara lain :

1) Belum meratanya pendataan data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga
2) Masih rendahnya jumlah IKM yang bisa mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi SIINAS
3) Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur dalam melakukan pendampingan pengisian SIINAS.

Dan belum tercapainya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP, dikarenakan realisasi pembangunan sentra industri kecil masih minim darai 42 potensi sentra IKM yang dapat direalisasikan baru 2 jenis Sentra IKM.

3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Tabel 2.80: Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.32.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1,00	1	0	0,00	Sangat Rendah
2.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Permukiman	3,00	2	0	0,00	Sangat Rendah
3.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Satuan Permukiman	6,00	2	0	0,00	Sangat Rendah

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Permasalahan/kendala pencapaian indikator bidang Transmigrasi :

1) Belum terselesaikannya pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
2) Belum terselesaikanya sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 karena

berada dalam kawasan hutan HPK seluas 1.461 Hektar yang masih dalam proses pelepasan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dan 114 APL Permukiman Transmigrasi yang ada di Kabupaten Natuna sudah menjadi Desa dan tidak lagi status Transmigrasi yang masih pembinaan Pemerintah Pusat

3) Belum terselesaikanya sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi natuna
4) Belum terukur dan tertatanya batas HPL murni transmigrasi yang belum dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi secara keseluruhan

Tindak lanjut dari permasalahan :

1) Penyelesian pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
2) Penyelesaian sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 dan 114 APL
3) Penyelesaian sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi natuna
4) Melakukan monitoring dan pemeliharaan tanda batas HPL transmigrasi
5) Pendampingan penyelesaian permasalahan transmigrasi yang dilakukan oleh instansi dan kementrian terkait.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1 Sekretariat Daerah

Tabel 2.81: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,71	3.48	3.42	98.28	Sangat Tinggi
2.	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	Persen	62,63	56	81.44	100	Sangat Tinggi
3.	Nilai LAKIP	Nilai	73,98	76.15	74.31	97.58	Sangat Tinggi
4.	Nilai LPPD	Nilai	3,17	3,48	3,42	98,28	Sangat Tinggi
5.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	69,00	56	81,44	100,00	Sangat Tinggi
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	13,60	76,15	74,31	97,58	Sangat Tinggi
7.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	23,00	3,340,	3,170,	94,91	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Secara umum, indikator capaian Sekretariat Daerah telah tercapai namun ada beberapa indikator yang belum mencapai 100 persen yaitu Nilai LAKIP dan Nilai LPPD. SAKIP dinilai dari 4 komponen; perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

1) Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi
2) Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahawa target kinerja realistis, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik
3) Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagain dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time
4) Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan
5) Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah
6) Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas

Sedangkan untuk indikator Nilai LPPD yang belum mencapai 100 persen disebabkan karena ada kendala ketika memperoleh data dari Perangkat Daerah pengampu indikator LPPD. Selain itu tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan data. Perangkat Daerah juga belum menjadikan data indiaktor LPPD ini sebagai data kinerja yang harus dipenuhi setiap tahun.

Tabel 2.82: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2020	**58,12**
2021	**60,31**
2022	**60,10**
2023	**72,55**
2024	**83,02**

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercapai pada angka 83,22 (BB), sedangkan pada tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi tercapai pada angka 60,10 (B).

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1 Bidang Perencanaan

Tabel 2.83: Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.01.	**PERENCANAAN**						
1.	Indek Kualitas Perencanaan	Persen	7,60	7,9	7,8	98,7	Sangat Tinggi
2.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	51,88	54,75	67,72	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Hasil evaluasi pencapaian Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didukung oleh tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, serta peran aktif seluruh bidang di BP3D serta kerjasama yang baik dari Perangkat Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

5.2 Bidang Keuangan

Tabel 2.84: Evaluasi Pencapaian Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.02.	**KEUANGAN**						
1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	9,31	25	23,84	95,36	Sangat Tinggi
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	11,85	55	30,64	55,71	Rendah
3.	Indeks Pengelolaan Aset	Persen	94,59	65	60,03	92,35	Sangat Tinggi
4.	Indeks Pengelolaan Keuangan	Persen	70,48	79,33	77,60	97,83	Sangat Tinggi
5.	Manajemen Aset	Persen	100,00	85	100	117,65	Sangat Tinggi
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
7.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	14,400	73	12,81	17,55	Sangat Rendah
8.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	16,56	30	17,50	58,33	Rendah
9.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	58,57	73	69,8	95,62	Sangat Tinggi

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
10.	Rasio PAD	Persen	7,35	20	10,31	51,55	Rendah
11.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio	1,52	0,02	0,11	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Hasil evaluasi pencapaian Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan secara umum menunjukkan kinerja baik terlihat dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023, namun ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target diantaranya indikator Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya disebabkan oelh belum optimalnya PAD karena masih kecilnya potensi PAD di luar Pajak MBLB dan belum optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Natuna:

Tabel 2. 85: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Natuna

Tahun	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna
2020	**WTP**
2021	**WTP**
2022	**WTP**
2023	**WTP**
2024	**WTP**

Sumber : BPKPD Kab. Natuna, 2025

5.3 Kepegawaian

Tabel 2. 86*:* Evaluasi Pencapaian Unsur *Pendukung Urusan Pemerintahan* Kepegawaian Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.03.	**KEPEGAWAIAN**						
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	65	56	79,02	100,00	Sangat Tinggi
2.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	89	85	77,41	91,07	Sangat Tinggi
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	22,91	24	24,94	100,00	Sangat Tinggi
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	69,29	77	70,57	91,65	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Untuk capaian kinerja kepegawaian yang belum memenuhi target yaitu Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan) disebabkan oleh terbatasnya fasilitias pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna selain Universitas Terbuka dan STAI Natuna, belum optimalnya rencana peningkatan jenjang pendidikan PNS, dan belum ada alternatif pembiayaan peningkatan pendidikan bagi PNS.

5.4 Pengelolaan Perbatasan

Tabel 2. 87*:* Evaluasi Pencapaian Unsur *Pendukung Urusan Pemerintahan* Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.06.	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						
1.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	Persen	40,85	20	44,74	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Capaian indikator aspek pelayanan umum pengelolaan perbatasan telah tercapai dengan baik, namun ada beberapa permasalahan pembangunan daerah di pengelolaan perbatasan yaitu belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, dan belum optimalnya kegiatan-kegiatan yang menunjang perekonomian di kawasan perbatasan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

6.1 Inspektorat Daerah

Tabel 2.88*:* Evaluasi Pencapaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**						
1.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	100	Sangat Tinggi
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2023 target kinerja yang ditetapkan tercapai 100%. Pada indikator Maturitas SPIP, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah kab. Natuna. Penerapan manajemen risiko masih belum dilakukan evaluasi di lingkungan perangkat daerah secara berkala. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah, dan belum optimalnya penerapan regulasi terkait SPIP.

Sedangkan untuk indikator Peningkatan Kapabilitas APIP, permasalahannya adalah belum optimalnya pencapaian kapabilitas APIP menuju level 4.

7. Unsur Pemerintahan Umum

7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.89*:* Evaluasi Pencapaian Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
1.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	29	36	34	94,45	Sangat Tinggi
2.	Jumlah peserta sosialisai wasbang	Jumlah	0	40	40	100	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Jumlah	50	50	50	100	Sangat Tinggi
4.	Pembinaan Partai Politik	Parpol	9	9	9	100	Sangat Tinggi
5.	Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	Dinas/ Instansi	15	15	15	100	Sangat Tinggi

Sumber : Barenlitbang, 2025 (diolah).

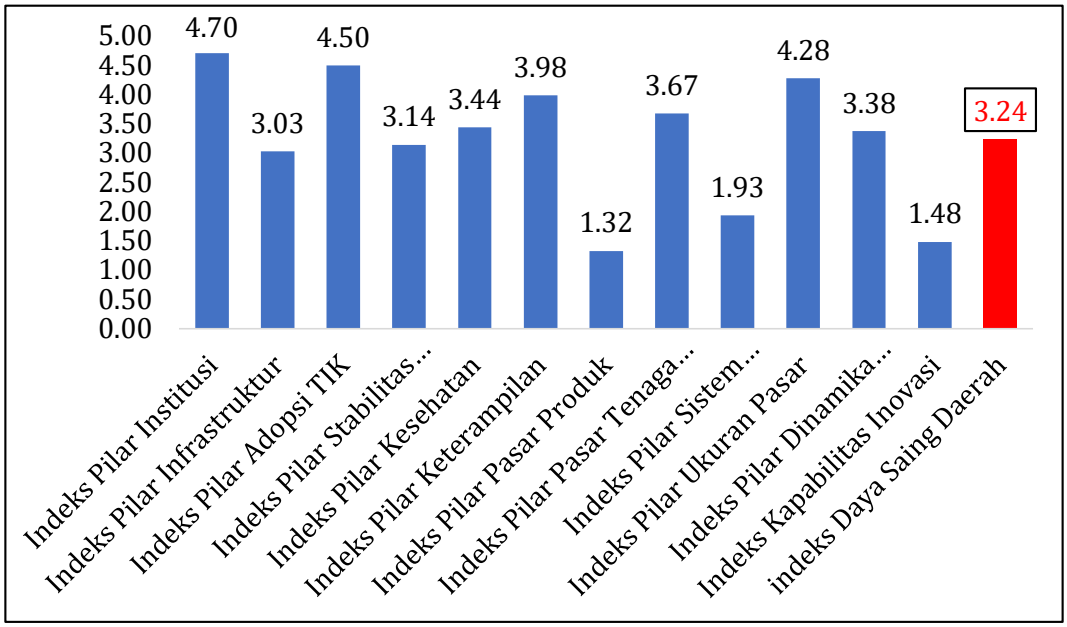
Untuk indikator Jumlah peserta sosialisai wasbang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun namun terkendala oleh waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperluka penguatan daya saing yang mampu mengakseerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas tenaga kerja.

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Secara umum, IDSD Kabupaten Natuna mengalami naik turun. Seperti pada tahun 2020 sebesar 1,84 lalu meningkat pada tahun 2022 sebesar 2,73 dan sempat turun menjadi 2,72 pada tahun 2023. Seterusnya pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Natuna kembali meningkat menjadi 3,24. Adapun yang menjadi kontributor tertinggi adalah Indeks Pilar Institusi (4,70), sedangkan pilar terendah ditempati oleh Indeks Pilar Pasar Produk (1,32).



Gambar 2. 3: Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya, Tahun 2024

Sumber: BRIN, 2025 (diolah).

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

1) Nilai PDRB

Tabel 2.90*:* Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024 (Milyar Rupiah)

No	Indikator	2010	2015	2020	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	654,01	1.760,80	2.455,46	3094,54
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	13.225,04	12.287,84	15232,6
3	Industri Pengolahan	23,34	128,47	166,70	195,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	14,13	17,27	21,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,97	1,17	1,35
6	Konstruksi	62,03	1.230,96	1.664,05	1849,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	481,88	716,83	992,28
8	Transportasi dan Pergudangan	-	114,11	126,28	161,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	76,18	101,04	130,13
10	Informasi dan Komunikasi	-	89,83	147,41	170,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	21,21	30,75	34,59
12	Real Estate	-	98,20	139,15	181,23
13	Jasa Perusahaan	-	0,03	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	292,31	428,20	473,69
15	Jasa Pendidikan	-	29,37	43,12	51,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	49,98	66,25	83,48
17	Jasa lainnya	72,49	11,14	14,35	18,26
Produk Domestik Regional Bruto (dengan Migas)		1.077,39	4.421,47	18.405,91	22.692,67
Produk Domestik Regional Bruto (tanpa Migas)		N/A	N/A	6.145.656	7.494,09

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (diolah)

Nilai PDRB ADHB (dengan Migas) Kabupaten Natuna memiliki pola peningkatan dari pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar 1.077,39 milyar rupiah pada tahun 2010; Rp 4.421,47 milyar rupiah pada tahun 2015; 18.405,91 milyar rupiah pada tahun 2020; dan terakhir 23.519,88 milyar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan pada PDRB ADHB (tanpa Migas) cukup jauh dibandingkan dengan migas dimana pencapaian tahun 2023 sebesar 7.199,72 milyar rupiah. Dari pencapaian PDRB tersebut, kontribusi PDRB yang mendominasi berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Natuna.

Terlihat bahwa potensi ekonomi pada tahun awal perencanaan pembangunan didominasi oleh kategori lapangan usaha yaitu bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Diharapkan ke depan, kategori pembangunan unggulan daerah mampu bersaing dan lebih memeratakan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tentu saja perlu adanya transformasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan perekonomian yang tumbuh, stabil dan

inklusif, khususnya dalam transformasi perekonomian berbasis sumber daya tak terbaharukan.

Tabel 2.91*:* Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Indikator	2010	2015	2020	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,95	9,8	13,34	13,64
2	Pertambangan dan Penggalian	76,77	75,36	66,76	67,13
3	Industri Pengolahan	0,71	0,72	0,91	0,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	6,1	6,88	9,04	8,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,24	2,69	3,89	4,37
8	Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,62	0,69	0,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,43	0,55	0,57
10	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,5	0,8	0,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,12	0,17	0,15
12	Real Estate	0,53	0,55	0,76	0,8
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,71	1,71	2,33	2,09
15	Jasa Pendidikan	0,14	0,16	0,23	0,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,28	0,36	0,37
17	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,08	0,08
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (diolah)

2) PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Tabel 2.92*:* PDRB per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (Juta Rupiah)

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Dengan Migas (juta rupiah)	18.405,91	20.870,15	24.265,43	23.519,88	22.692,67
2	PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	6.145,65	6.285,25	6.716,38	7.199,72	7.494,09
	Jumlah Penduduk	81.321	82.279	83.430	84.556	85,664
3	PDRB Perkapita Dengan Migas	226,34	253,65	290,85	278,16	264,90
4	PDRB Perkapita Tanpa Migas	75,57	76,39	80,50	85,15	87,48

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025 (diolah)

Pergerakkan PDRB per kapita di Kabupaten Natuna dapat dilihat melalui tabel di atas, dimana diketahui bahwa PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024. Dikarenakan dominasi dari komoditas minyak dan gas di Kabupaten Natuna, maka PDRB per kapita non migas dengan migas terpantau cukup jauh dan dari segi analisis kesejahteraan masyarakat, maka lebih relevan jika melihat pada PDRB non migas. Adapun pencapaian PDRB per Kapita non migas di Natuna pada tahun 2023 mencapai 85,15 juta rupiah per kapita dan 87,48 juta rupiah di tahun 2024. Adapun rendahnya PDRB per Kapita non migas pada tahun 2020 disebabkan oleh peristiwa pandemi COVID-19.

2.1.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. berperan sebagai kelompok sasaran juga sebbagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Natuna. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terlihat rata-rata lama sekolah Kabupaten Natuna mencapai 9,08 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas baru mengenyam pendidikan rata-rata selama 9,03 tahun atau lulus sekolah menengah pertama. Adapun harapan lama sekolah yang mencapai 13,93 tahun juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Natuna yang baru lahir di tahun 2023 memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga 13,93 tahun atau setara dengan perguruan tinggi semester empat.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Natuna meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 69,00. Capaian ini tergolong belum optimal sehingga perlu adanya akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Natuna yang lebih merata dan berkualitas.

Tabel 2.93: Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024

No	Indikator	2010	2015	2020	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,06	8,45	8,73	9,2
2	Harapan Lama Sekolah	12,33	13,85	13,90	13,94
3	**Indeks Pendidikan**	57,78	66,64	11,31	11,57
4	Umur Harapan Hidup	61,97	63,64	65,06	66,41
5	**Indeks Kesehatan**	64,57	67,14	0,694	0,700

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, diolah.

Selain itu bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk IPM adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Natuna mencapai 74,15 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun. Pada analisis berikutnya, indikator ini digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan dimana pada tahun 2023, indeks kesehatan di Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83,30.

Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Natuna juga dapat dilihat dari angka literasi dan numerasi SD dan SMP yang diperoleh dari nilai raport ditahun 2022 dan 2023 seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan pada angka literasi dan numerasi baik pada tingkat SD maupun SMP ditahun 2022 dan 2023 yang mana

angka literasi SD meningkat 9 poin ditahun 2023 hingga mencapai 59,14. Kemudian angka numerasi SD juga meningkat sebanyak 7 poin dari 37,66 menjadi 43,53. Selanjutnya angka literasi SMP mengalami peningkatan dari 58,36 menjadi 66,57 dan angka numerasi menurun dari 53,54 menjadi 44,13. Secara umum pada tahun 2024 kecuali angka literasi SD berdasarkan asesmen nasional, lainnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

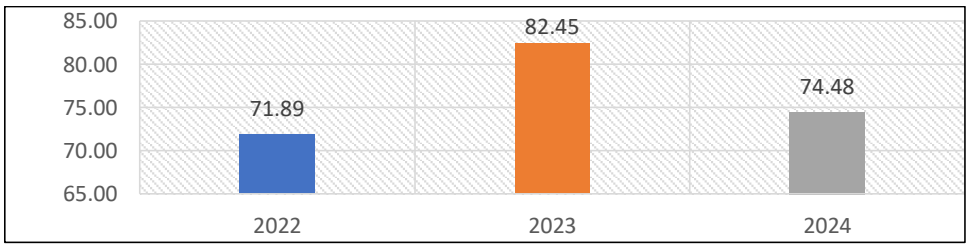
Tabel 2. 94: Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No	Rincian Angka Literasi/ Numerasi	2022	2023	2024
1	Angka Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	50,74	59,14	52,56
2	Angka Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	37,66	43,53	46,76
3	Angka Literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	58,36	66,57	69,30
4	Angka Numerasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	53,54	44,13	59,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, 2022-2024, diolah.

Pembangunan literasi masyarakat adalah proses yang berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang terkait dengan berbagai konteks kehidupan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan tingkat literasi di antara individu dan komunitas secara luas, dengan tujuan memberikan akses yang lebih baik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang.

Dalam meningkatkan literasi masyarakat, pemerintah turut hadir dalam rangka memberikan dukungan baik dari sarana prasarana maupun dalam hal sosialisasi/bimbingan sehingga masyarakat tersadar akan artinya budaya literasi yang baik. Pencapaian pembangunan literasi di Kabupaten Natuna mengalami pasang surut selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2022 berada pada angka 71,89 lalu melonjak menjadi 82,45 di tahun 2023 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 74,48.

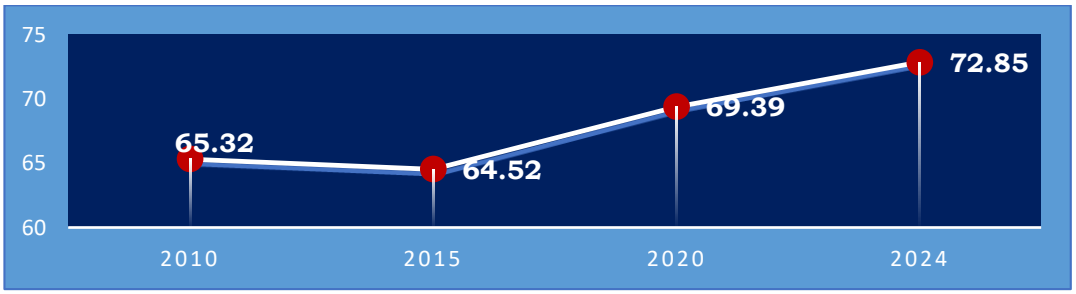


Gambar 2. 4: Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Natuna

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini

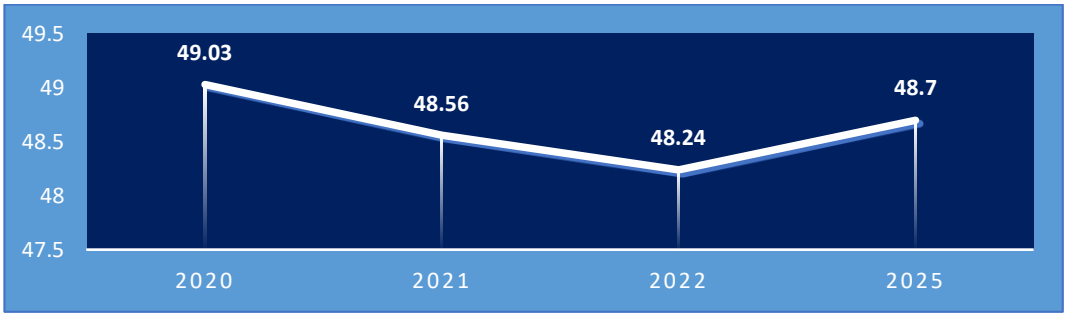
dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Natuna memiliki tren peningkatan sejak tiga periode terakhir. Dimulai pada tahun 2010 pada angka 65,32 yang kemudian turun menjadi 64,52 di tahun 2015. Namun sepuluh tahun berikutnya secara berturut-turut dalam periode lima tahunan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 69,39 di tahun 2020 dan 72,85 di tahun 2024.

Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan pada beberapa periode pembangunan terakhir menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan angkatan kerja agar tidak menjadi pengangguran.



Gambar 2. 5: Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2010-2024

Angka ketergantungan memperlihatkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap pekerja. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.



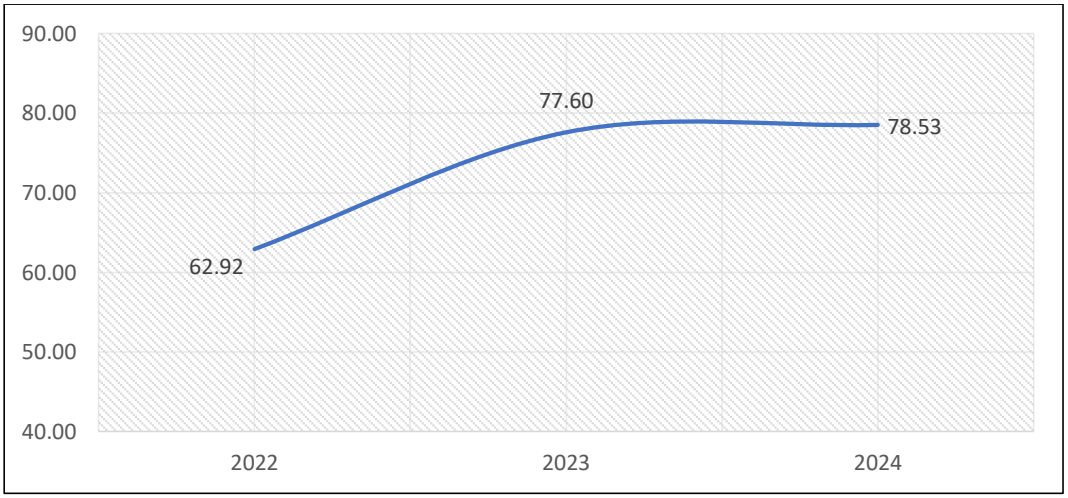
Gambar 2. 6: Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna 2020-2025 (2025=proyeksi)

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial, karena dapat menimbulkan

tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Natuna berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal.

2.1.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Adapun pencapaian indeks infrastruktur Kabupaten Natuna pada tahun 2022 belum optimal dengan capaian sebesar 62,92 dan mengalami peningkatan ditahun 2023 mennjadi 77,6. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Natuna menyajikan data tentang infrastuktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.



Gambar 2. 7: Grafik Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

1) Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Natuna selama tahun 2021-2023 terus ditingkatkan kualitasnya baik sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pelayanan pendidikan di Kabupaten Natuna mengalami

kenaikan meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Namun masih perlunya berbagai inovasi dalam pemerataan dan akses terhadap layanan pendidikan menjadi perhatian stakeholder dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan.

Tabel 2.95: Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Natuna 2022-2024

Indikator	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah Sekolah	85	86	83	40	41	40	26	24	45
Jumlah Guru	944	963	914	575	559	536	545	543	539
Jumlah Murid	9.375	9.220	8.931	4.399	4.296	4.338	3.980	4.140	4.128

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2022-2024

2) Infrastruktur Kesehatan

Berbeda dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan cenderung bersifat fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 terhadap indiaktor jumlah rumah sakit bersalin, jumlah klinik, jumlah puskesmas pembantu. Selain itu, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan pada jumlah perawat. Pada tahun 2023 angka insfrastruktur bidang kesehatan mulai naik kembali meskipun tipis. Tahun 2023 Jumlah rumah sakit di Kabupaten Natuna berjumlah 2 unit, jumlah puskesmas 15 unit, jumlah tenaga kesehatan berjumlah 779 orang, jumlah dokter yang ada 58 orang, jumlah bidan 249 orang, dan jumlah perawat yang ada di Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 371 orang.

Tabel 2. 96: Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Natuna

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	Jumlah Puskesmas	13	14	14	15	15
2	Jumlah Tenaga Kesehatan	474	531	809	779	944
	Jumlah Dokter	38	44	69	58	70
	Jumlah Bidan	167	191	260	249	249
	Jumlah Perawat	208	221	368	371	370

Sumber : BPS , 2025 (diolah)

3) Sarana Prasarana Dasar

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara. Sarana prasarana ini menjadi penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan sarana prasarana yang baik merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sarana prasarana yang penting untuk kehidupan masyarakat adalah perumahan dan permukiman dimana luasan kawasan kumuh perkotaan meningkat hingga mencapai 548,39 ha dengan persentase kawasan kumuh mencapai 20,76 persen.

Tabel 2.97: Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Natuna

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan	120,66	107,8	219,87	241,69	140,28
2	Total Luas Kawasan Kumuh	183,58	170,72	548,39	674,09	380,67
3	Persentase kawasan kumuh yang tertata	7,53%	9,56%	5,53%	12,58%	77,08%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

Sarana dan prasarana lain yang perlu dalam pembangunan adalah terkait konektivitas dan perhubungan antar wilayah. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna.

Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km. Secara umum, hampir seluruh kondisi jalan negara yang ada di Kabupaten Natuna sudah berstatus baik. Sementara untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa/kelurahan masih terdapat bagian jalan yang berstatus rusak/rusak berat yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

Kabupaten Natuna yang merupakan kabupaten kepulauan yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk menjangkau antar kecamatan dan kabupaten, serta transportasi udara untuk menjangkau kabupaten/kota lainnya, terutama Kota Batam. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 2.248 unit kunjungan kapal pelayaran dalam negeri yang berlayar di wilayah Kabupaten Natuna dengan jumlah penumpang yang datang mencapai 54.318 orang dan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 43.608 orang. Sementara itu, untuk transportasi udara, terdapat 419 penerbangan dengan total penumpang yang datang sebanyak 25.320 orang dan yang berangkat sebanyak 25.436 orang.

Dari sisi sarana prasarana telekomunikasi dan informai, data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 145 menara BTS di seluruh wilayah Natuna dimana 11 diantaranya tidak aktif atau rusak. Operator di Malinau didominasi oleh

Telkomsel dengan jumlah menara sebanyak 56 pada tahun 2023. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah perluasan jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

2.1.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Natuna cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan- kemudahan bagi masyarakat. Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ritel, real estate dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Dalam hal ini perlu diupaya percepatan yang lebih terarah, terukur dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor.

Beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta melalui peningkatan Kerjasama dalam kegiatan pameran dan promosi investasi baik secara nasional dan internasional serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan mudah dilaksanakan berdasarkan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh instansi terkait. Disisi lain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha investasi di daerah Kabupaten Natuna.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan/non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elekteronik (online) melalui portal resmi yang dikeluar oleh Kementerian Investasi dan BKPM sesuai peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS-RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.

NSWI (National Single Window for Investment) merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap Perangkat

Daerah (PD) yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW (Indonesia Nasional Single Window) yang terfokus pada layanan kepabeanan. Secara umum, INSW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai system Nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan tahapan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanan dan pengeluaran barang, merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) tahun 2022 di Kabupaten Natuna sebesar 13,93 persen. Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada didaerah Kabupaten Natuna ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar) namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.

Salah satu upaya meningkatkan investasi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Natuna adalah dengan menjaga kondusivitas iklim investasi daerah. Kondusivitas iklim investasi dibentuk dengan adanya kenyamanan investor dalam menanamkan modal, sehingga perlu adanya wilayah yang aman dan damai. Sepanjang tahun 2022, terdapat 64 kejadian tindak pidana di Kabupaten Natuna dengan crime rate mencapai 82 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dimana terjadi 70 tindak pidana dengan crime rate mencapai 84 per 100.000 penduduk. Dari 64 tindak pidana yang terjadi pada tahun 2022, hanya sebanyak 46 tindak pidana yang berhasil diselesaikan atau sebesar 71 persen, dimana angka ini mengalami penurunan tipias dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72 persen

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 2.98: Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
A.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,72	2.9155	3,24	11,34	Sangat Rendah
2.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	37,10	60,0	45,10	73,5	Sedang

Indikator Indeks Inovasi Daerah belum bisa memenuhi target disebabkan oleh masih rendahnya dukungan OPD dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah menyebabkan rendahnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berikut ini hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan IV tahun 2024 yang menggambarkan sejauh mana tingkat capaian kinerja dan realisasi berdasarkan sasaran dan indikator sasaran:

Tabel 2. 99: Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi Hasil terhadap Renja/RKPD Triwulan IV Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	276.895.129.621,00	143.919.381.810,00	66,80	51,98	S	R
2.	Dinas Kesehatan	257.647.137.393,00	154.242.984.367,83	62,32	59,87	R	R
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.816.185.969,00	36.172.422.054,27	40,74	23,67	SR	SR
4.	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	62.173.605.174,00	28.797.240.774,00	33,5	46,32	SR	SR
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	20.953.092.841,00	14.585.621.163,00	67,93	69,61	S	S
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.349.779.299,00	7.089.766.059,00	75,42	68,50	S	S
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.469.878.222,00	5.531.064.166,00	52,61	65,30	R	S
8.	Dinas Sosial	8.779.132.190,00	5.710.791.201,00	59,25	65,05	R	S
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.092.537.632,00	4.613.939.330,00	59,25	65,05	R	S
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.709.033.934,00	6.421.509.208,00	44,81	54,84	SR	R
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.205.503.113,00	10.043.359.803,00	50,48	61,97	R	R

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
12.	Dinas Lingkungan Hidup	16.508.907.601,00	8.754.565.560,00	64,91	53,03	R	R
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.439.790.855,00	3.767.467.820,00	60,2	58,50	R	R
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.208.994.674,00	6.845.868.673,00	67,75	56,07	S	R
15.	Dinas Perhubungan	26.333.064.896,00	12.110.188.432,00	53,59	45,99	R	SR
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.979.221.914,00	11.486.641.320,00	70,91	49,99	S	SR
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.981.214.541,00	5.865.943.472,00	55,71	48,96	R	SR
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.919.045.718,00	7.482.536.679,01	49,20	50,15	SR	SR
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.196.875.916,00	5.886.196.610,00	43,79	52,57	SR	R
20.	Dinas Perikanan	17.089.994.096,00	12.172.155.731,65	55,44	71,22	R	S
21.	Dinas Pariwisata	16.718.169.738,00	7.546.021.845,45	30,56	45,14	SR	SR
22.	Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro	13.504.985.010,00	7.672.823.680,00	62,50	56,81	R	R
23.	Sekretariat Daerah	76.962.812.857,00	49.156.209.421,00	73,00	63,87	S	R
24.	Sekretariat DPRD	54.509.841.328,00	30.709.576.278,00	82,84	56,34	T	R
25.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.128.049.162,00	8.527.667.147,00	51,03	56,37	R	R
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.788.883.877,00	99.995.659.548,00	35,56	65,02	SR	R
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.099.357.640,00	7.264.031.625,00	64,70	65,45	R	S
28.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.941.437.861,00	4.719.508.726,00	60,03	67,99	R	S
29.	Inspektorat Daerah	20.220.530.596,00	12.030.455.786,00	48,21	59,50	SR	R
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	30.391.973.821,00	25.211.748.888,00	51,61	82,96	R	T
31.	Kecamatan Bunguran Timur	13.273.001.318,00	9.066.486.743,00	54,67	68,31	R	S
32.	Kecamatan Bunguran Barat	7.683.803.119,00	4.940.008.664,00	78,45	64,29	T	R
33.	Kecamatan Bunguran Utara	5.994.836.420,00	4.223.344.801,00	72,99	70,45	S	S
34.	Kecamatan Pulau Laut	5.521.086.309,00	3.929.179.939,00	73,48	71,17	S	S
35.	Kecamatan Midai	7.060.982.374,00	4.890.526.684,00	54,36	69,26	R	S
36.	Kecamatan Serasan	6.846.289.058,00	5.112.076.685,00	77,50	74,67	T	S
37.	Kecamatan Subi	5.831.479.266,00	4.127.505.277,00	65,09	70,78	R	S
38.	Kecamatan Pulau Tiga	2.770.314.632,00	2.201.637.740,00	54,47	79,47	R	T
39.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.699.273.603,00	2.120.709.453,00	48,59	78,57	SR	T
40.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.880.833.000,00	3.642.083.452,00	97,73	61,93	ST	R

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
41.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.701.015.200,00	2.498.830.987,00	59,53	67,52	R	S
42.	Kecamatan Serasan Timur	4.905.296.305,00	3.492.881.013,00	59,69	71,21	R	S
43.	Kecamatan Suak Midai	3.540.556.831,00	3.318.583.883,00	69,74	93,73	S	ST
44.	Kecamatan Bunguran Batubi	4.766.851.950,00	2.922.051.058,00	70,25	61,30	S	R
45.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	4.079.911.267,00	2.625.396.311,00	44,84	64,35	SR	R
46.	Kecamatan Pulau Panjang	4.236.027.316,00	1.992.582.348,00	53,37	47,04	R	SR
47.	Kecamatan Seluan	3.896.537.537,00	2.544.271.049,00	55,65	65,30	R	R
Total		1.464.702.262.994,00	807.981.503.265,21	59,26	55,16	R	R

2.2.1 Rincian Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024

2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 87,60% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 38,77% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) yaitu sebesar 57,30% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 38,30%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 67,50% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,25%.

Tabel 2.100: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67,90	2.253.931.885	85	584.610.034	100,00	25,94	ST	SR
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	2.253.931.885	8	584.610.034	11,85	25,94	SR	SR
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	660.603.750	4	36.032.296	100,00	5,45	ST	SR
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1.532.628.935	10	548.577.738	100,00	35,79	ST	SR
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	60.699.200	0	0	0,00	0,00	SR	SR
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	195.665.333.440	75	158.023.457.231	88,24	80,76	T	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
9.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	181.224.108.736	1	150.067.883.753	100,00	82,81	ST	T
10.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1081	179.998.617.622	1.325	149.062.011.947	100,00	82,81	ST	T
11.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1.225.491.114	1	1.005.871.806	100,00	82,08	ST	T
12.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	368.900.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	368.900.000	3	0	11,54	0,00	SR	SR
14.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	200.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	1.912.949.130	15	870.205.377	20,61	45,49	SR	SR
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	164.424.600	5	107.110.370	100,00	65,14	ST	Rp
18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	71.833.400	2	65.177.610	100,00	90,73	ST	T
19.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	206.356.000	4	171.431.300	100,00	83,08	ST	T
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	28.696.000	10	26.048.000	100,00	90,77	ST	T
21.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.441.639.130	1	500.438.097	100,00	34,71	ST	SR
22.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	1.197.549.950	15	414.457.073	19,33	34,61	SR	SR
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	1.197.549.950	24	414.457.073	12,00	34,61	SR	SR
24.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	4.293.227.430	80	1.871.851.959	100,00	43,60	ST	SR
25.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	727.410.460	4	703.660.000	100,00	96,73	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
26.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	330.466.000	668	213.400.000	100,00	64,58	ST	R
27.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	1.130.000.000	15	304.916.400	100,00	26,98	ST	SR
28.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.435.816.970	8	863.275.559	100,00	35,44	ST	SR
30.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	3.874.666.224	69	3.463.863.510	86,76	89,40	T	T
31.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	177.085.120	1	102.497.547	33,33	57,88	SR	R
32.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	113.097.240	2	42.539.309	100,00	37,61	ST	SR
33.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1080	3.584.483.864	1.080	3.318.826.654	100,00	92,59	ST	ST
34.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	2.263.465.970	75	1.121.795.559	100,00	49,56	ST	R
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	245.238.000	15	65.940.910	100,00	26,89	ST	SR
36.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.640.371.970	5	781.044.849	100,00	47,61	ST	SR
38.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	377.856.000	75	274.809.800	100,00	72,73	ST	S
39.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,009615	17.247.808.249	13	5.494.030.590	100,00	31,85	ST	SR
40.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	43,75	17.247.808.249	46	5.494.030.590	100,00	31,85	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
41.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0,25	664.578.446	2	635.700.927	100,00	95,65	ST	ST
42.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	186.820.000	2	14.960.580	100,00	8,01	ST	SR
43.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	4.686.252.275	28	1.896.089.319	100,00	40,46	ST	SR
44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	190.730.000	1	17.019.800	100,00	8,92	ST	SR
45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	714.769.233	1	169.571.060	100,00	23,72	ST	SR
46.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	2.385.450.000	3	522.620.250	100,00	21,91	ST	SR
47.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	8.419.208.295	10	2.238.068.654	100,00	26,58	ST	SR
49.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,72	8.438.851.575	100	2.648.525.618	100,00	31,38	ST	SR
50.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70	5.727.268.400	12	1.659.410.677	16,77	28,97	SR	SR
51.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22	106.393.100	15	69.888.630	70,27	65,69	S	S
52.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27	199.035.300	100	0	100,00	0,00	ST	R
53.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27	5.421.840.000	100	1.589.522.047	100,00	29,32	ST	SR
54.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71,34	2.711.583.175	0	989.114.941	0,00	36,48	SR	SR
55.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	1.410.000.000	4	0	100,00	0,00	ST	SR
56.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	270.775.000	3	169.540.000	100,00	62,61	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
57.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta didik	3250	797.300.000	676	607.468.000	20,80	76,19	SR	S
58.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4432	139.568.175	9.756	118.166.941	100,00	84,67	ST	T
59.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	93.940.000	100	93.940.000	100,00	100,00	ST	ST
60.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	60,12	12.608.376.705	80	5.735.262.904	100,00	45,49	ST	SR
61.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	71,34	2.947.930.000	0	737.597.810	0,00	25,02	SR	SR
62.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	2.947.930.000	4	737.597.810	66,67	25,02	S	SR
63.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	71,34	9.660.446.705	0	4.997.665.094	0,00	51,73	SR	R
64.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	2.715.970.000	1	742.131.000	100,00	27,32	ST	SR
65.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	1.410.000.000	4	0	100,00	0,00	ST	SR
66.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	325.139.000	1	318.109.963	50,00	97,84	SR	ST
67.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	628.344.000	3	407.952.345	100,00	64,93	ST	R
68.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	384.066.564	1	380.365.225	100,00	99,04	ST	ST
69.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4	406.837.000	1	400.192.760	25,00	98,37	SR	ST
70.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	1.261.785.136	3	756.464.365	100,00	59,95	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
71.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	2.805.405.265	8	1.467.987.352	100,00	52,33	ST	R
72.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	220.600.000	1	205.629.506	100,00	93,21	T	ST
73.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	912.299.740	5	318.832.578	41,67	34,95	SR	SR
74.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	3.832.163.875	94	1.748.106.829	100,00	45,62	T	R
75.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0	2.381.984.125	11	1.260.390.475	0,00	52,91	SR	R
76.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	93.681.750	1	31.779.450	100,00	33,92	ST	SR
77.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500	1.186.498.000	3.040	455.936.904	86,86	38,43	T	SR
78.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	170.000.000	1	0	50,00	0,00	SR	SR
80.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
81.	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
82.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1,20	4.579.907.840	1	2.610.498.938	100,00	57,00	ST	R
83.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250	1.486.550.000	65	1.350.195.522	26,00	90,83	SR	T
84.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	116	377.423.130	116	120.718.686	100,00	31,98	ST	SR
85.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116	2.353.020.000	114	1.105.947.619	98,28	47,00	ST	SR
86.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	18	362.914.710	16	33.637.111	88,89	9,27	T	SR
87.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	96,87	22.597.533.906	112	14.029.622.171	100,00	62,08	ST	R
88.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	100	19.426.931.656	99	13.620.642.171	99,33	70,11	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
89.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16	198.100.000	2	23.544.514	12,50	11,89	SR	SR
90.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83	6.252.944.416	318	5.866.038.311	100,00	93,81	ST	ST
91.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	84	241.710.000	84	81.484.000	100,00	33,71	ST	SR
92.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	84	12.626.060.000	1	7.603.319.030	1,19	60,22	SR	R
93.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	86	108.117.240	1	46.256.316	1,16	42,78	SR	SR
94.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	43,75	3.170.602.250	46	408.980.000	100,00	12,90	ST	SR
95.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	2.057.200.000	3	408.980.000	100,00	19,88	ST	SR
96.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	1.113.402.250	0	0	0,00	0,00	SR	SR
97.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang erpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	91,91	620.900.000	100	183.587.995	100,00	29,57	ST	SR
98.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	45	620.900.000	100	183.587.995	100,00	29,57	ST	SR
99.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	605.900.000	3	183.587.995	100,00	30,30	ST	SR
100	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	15.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
101	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
102	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
103	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	60,00	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
104	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar	6,21	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
105	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
106	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	31,54	1.165.500.000	38	487.583.940	100,00	41,83	ST	SR
107	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100	1.165.500.000	91	487.583.940	91,30	41,83	ST	SR
108	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	652.554.820	20	314.595.896	100,00	48,21	ST	SR
109	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	512.945.180	52	172.988.044	100,00	33,72	ST	SR
Rata-rata Program							87,60	38,77	T	SR
Rata-rata Kegiatan							57,30	38,30	R	SR
Rata-rata Sub Kegiatan							67,50	41,25	S	SR

2.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki kinerja Program Rendah (R) yaitu sebesar 65,52% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 44,03% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) yaitu sebesar 70,40% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 47,52% Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 62,32% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,92%.

Tabel 2.101: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 Bidang Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,64	608.941.150	77	155.080.676	86,59	25,47	T	SR
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	608.941.150	75	155.080.676	100,00	25,47	ST	SR
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	296.620.320	2	23.448.000	100,00	7,91	ST	SR
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	312.320.830	2	131.632.676	100,00	42,15	ST	SR
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	102.327.954.561	83	94.816.065.796	100,00	92,66	ST	ST
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	99.309.805.187	1	93.602.141.308	100,00	94,25	ST	ST
9.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	494	99.309.805.187	889	93.602.141.308	100,00	94,25	ST	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
10.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah	75	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	101.800.000	100	43.905.488	100,00	43,13	ST	SR
16.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.800.000	1	5.154.000	100,00	88,86	ST	T
20.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	28	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	96.000.000	3	38.751.488	100,00	40,37	ST	SR
22.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70	767.104.333	75	346.377.881	100,00	45,15	ST	SR
23.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
24.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	88.905.000	26	39.212.500	100,00	44,11	ST	SR
25.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	14.997.000	38	6.409.000	100,00	42,74	ST	SR
26.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	34.979.000	2	13.511.600	100,00	38,63	ST	SR
27.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	44.999.200	12	7.783.250	100,00	17,30	ST	SR
28.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18	74.998.700	20	40.893.900	100,00	54,53	ST	SR
30.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118	433.225.433	100	238.567.631	84,75	55,07	T	R
31.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	70.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	1.082.795.000	69	57.966.990	100,00	5,35	ST	SR
33.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114	94.867.000	12	14.066.990	10,53	14,83	SR	SR
35.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54	787.928.000	35	43.900.000	64,81	5,57	R	SR
36.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	200.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
37.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	709.401.941	75	599.841.896	100,00	84,56	ST	T
38.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	7.500.000	1	4.950.000	100,00	66,00	ST	S
39.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	25.629.564	4	5.919.500	100,00	23,10	ST	SR
40.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	676.272.377	1	588.972.396	100,00	87,09	ST	T
41.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	63	357.048.100	66	165.832.233	100,00	46,45	ST	SR
42.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	322.156.100	7	147.752.233	50,00	45,86	SR	SR
43.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	34.892.000	2	18.080.000	100,00	51,82	ST	SR
45.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	26,5	410.921.700	97	48.306.200	100,00	11,76	ST	SR
46.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	100	410.921.700	100	48.306.200	100,00	11,76	ST	SR
47.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	410.921.700	1	48.306.200	100,00	11,76	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
48.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJiP	88,64	223.973.250	77	60.081.250	86,59	26,83	T	SR
49.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	1	223.973.250	1	60.081.250	100,00	26,83	ST	SR
50.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	223.973.250	1	60.081.250	100,00	26,83	ST	SR
51.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	4,6	317.500.000	9	276.272.600	100,00	87,01	ST	T
52.	Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100	317.500.000	100	276.272.600	100,00	87,01	ST	T
53.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	317.500.000	1	276.272.600	100,00	87,01	ST	T
54.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	80	199.999.800	30	48.428.912	37,34	24,21	SR	SR
55.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/keluarahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	80	199.999.800	45	48.428.912	56,81	24,21	R	SR
56.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	199.999.800	1	48.428.912	100,00	24,21	ST	SR
57.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4	57.573.400	82	8.026.000	82,46	13,94	T	SR
58.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	57.573.400	34	8.026.000	34,39	13,94	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
59.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	525	57.573.400	791	8.026.000	100,00	13,94	ST	SR
60.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	73,3	171.635.840	85	49.857.665	100,00	29,05	ST	SR
61.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	87,8	171.635.840	85	49.857.665	97,15	29,05	ST	SR
62.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	171.635.840	1	49.857.665	100,00	29,05	ST	SR
63.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	93,33	18.880.398.172	100	13.283.797.995	100,00	70,36	ST	S
64.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45	597.144.180	39	251.029.546	87,29	42,04	T	SR
65.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7200	242.500.000	7.154	186.813.400	99,36	77,04	ST	T
66.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18	354.644.180	41	64.216.146	100,00	18,11	ST	SR
67.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71	11.208.457.000	89	8.816.748.241	100,00	78,66	ST	T
68.	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	10.158.229.200	2	8.280.869.850	100,00	81,52	ST	T
69.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
70.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
71.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	550.301.000	7	392.733.686	100,00	71,37	ST	S
72.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	499.926.800	1	143.144.705	100,00	28,63	ST	SR
73.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
74.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	80	5.973.653.772	93	3.691.925.809	100,00	61,80	ST	R
75.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	5.973.653.772	1	3.691.925.809	100,00	61,80	ST	R
76.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	86,6	449.329.420	100	305.114.079	100,00	67,90	ST	S
77.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	449.329.420	15	305.114.079	100,00	67,90	ST	S

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
78.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	100	272.000.000	100	102.720.320	100,00	37,76	ST	SR
79.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	272.000.000	1	102.720.320	100,00	37,76	ST	SR
80.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	80	379.813.800	100	116.260.000	100,00	30,61	ST	SR
81.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	379.813.800	1	116.260.000	100,00	30,61	ST	SR
82.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100	13.461.771.100	101	12.170.056.340	100,00	90,40	ST	T
83.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	46850	13.461.771.100	85.120	12.170.056.340	100,00	90,40	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
84.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	13.461.771.100	1	12.170.056.340	100,00	90,40	ST	T
85.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase KK yang sudah diverifikasi	92,89	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
86.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang diverifikasi	16713	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
87.	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	16713	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
88.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	40,25	447.081.820	100	209.244.468	100,00	46,80	ST	SR
89.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	447.081.820	89	209.244.468	88,72	46,80	T	SR
90.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300	447.081.820	1.005	209.244.468	77,31	46,80	**T**	**SR**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
91.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
92.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19**	**5,1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
93.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
94.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan**	**100**	**699.773.000**	**98**	**661.115.100**	**97,61**	**94,48**	**ST**	**ST**
95.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**292.125.000**	**98**	**285.372.100**	**98,09**	**97,69**	**ST**	**ST**
96.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1614	292.125.000	981	285.372.100	60,78	97,69	R	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
97.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**407.648.000**	**96**	**375.743.000**	**96,42**	**92,17**	**ST**	**ST**
98.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1611	407.648.000	960	375.743.000	59,59	92,17	R	ST
99.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan**	**100**	**746.256.180**	**100**	**587.803.577**	**100,00**	**78,77**	**ST**	**T**
100.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**245.613.060**	**97**	**207.357.814**	**96,65**	**84,42**	**ST**	**T**
101.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14218	245.613.060	15.374	207.357.814	100,00	84,42	ST	T
102.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat**	**5,63**	**121.253.000**	**9**	**57.664.400**	**100,00**	**47,56**	**ST**	**SR**
103.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	121.253.000	1	57.664.400	100,00	47,56	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
104.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**133.946.500**	**82**	**113.952.200**	**82,32**	**85,07**	**T**	**T**
105.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58920	133.946.500	43.960	113.952.200	74,61	85,07	**S**	**T**
106.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**245.443.620**	**78**	**208.829.163**	**77,59**	**85,08**	**T**	**T**
107.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5888	245.443.620	5.429	208.829.163	92,20	85,08	**ST**	**T**
108.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM**	**42,9**	**593.275.700**	**93**	**384.063.888**	**100,00**	**64,74**	**ST**	**R**
109.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	100	211.256.600	82	78.338.588	82,00	37,08	T	SR
110.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136	211.256.600	155	78.338.588	100,00	37,08	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
111.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	100	314.897.500	98	268.496.900	97,87	85,26	ST	T
112.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1238	314.897.500	1.374	268.496.900	100,00	85,26	ST	T
113.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	100	67.121.600	84	37.228.400	84,00	55,46	T	R
114.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18286	67.121.600	8.496	37.228.400	46,46	55,46	SR	R
115.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100	67.897.400	100	67.253.180	100,00	99,05	ST	ST
116.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	67.897.400	86	67.253.180	85,66	99,05	T	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
117.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4635	67.897.400	4.670	67.253.180	100,00	99,05	ST	ST
118.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	64,28	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
119.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	9	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
120.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
121.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	88,35	589.719.640	100	318.933.440	100,00	54,08	ST	R

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
122.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	22262	589.719.640	25.795	318.933.440	100,00	54,08	ST	R
123.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	589.719.640	1	318.933.440	100,00	54,08	ST	R
124.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	0,3	158.309.140	0	0	100,00	0,00	ST	SR
125.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	158.309.140	93	0	93,46	0,00	ST	SR
126.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1802	158.309.140	2.043	0	100,00	0,00	ST	SR
127.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	93,3	1.577.954.200	60	987.916.562	64,31	62,61	R	R

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
128.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	100	62.117.800	100	19.010.150	100,00	30,60	ST	SR
129.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	49	62.117.800	26	19.010.150	53,06	30,60	R	SR
130.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	136.640.600	60	60.491.384	60,00	44,27	R	SR
131.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	783	136.640.600	911	60.491.384	100,00	44,27	R	SR
132.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	60	1.379.195.800	0	908.415.028	0,00	65,87	SR	R

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
133.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	18	1.379.195.800	204	908.415.028	100,00	65,87	ST	R
134.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	58,55	446.908.300	48	184.773.350	81,81	41,34	T	SR
135.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	58,55	110.229.900	86	43.503.850	100,00	39,47	ST	SR
136.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	110.229.900	1	43.503.850	100,00	39,47	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
137.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	400	336.678.400	467	141.269.500	100,00	41,96	ST	SR
138.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	74	336.678.400	80	141.269.500	100,00	41,96	ST	SR
139.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	30	704.154.400	29	401.439.250	98,07	57,01	ST	R
140.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	60	200.000.000	100	78.334.250	100,00	39,17	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
141.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	200.000.000	1	78.334.250	100,00	39,17	ST	SR
142.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	7	254.091.400	15	163.688.800	100,00	64,42	ST	R
143.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	254.091.400	1	163.688.800	100,00	64,42	ST	R
144.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif	70	250.063.000	121	159.416.200	100,00	63,75	ST	R
145.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	250.063.000	1	159.416.200	100,00	63,75	ST	R
146.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
147.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
148.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pengguna**	**80,2**	**30.439.718.747**	**0**	**21.147.941.903**	**0,00**	**69,47**	**SR**	**S**
149.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**persentase capaian SPM**	**100**	**30.439.718.747**	**400**	**21.147.941.903**	**100,00**	**69,47**	**ST**	**S**
150.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	30.439.718.747	4	21.147.941.903	100,00	69,47	ST	S
151.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**88,64**	**140.124.964**	**307**	**16.048.389**	**100,00**	**11,45**	**ST**	**SR**
152.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen RBA defenitif**	**2**	**140.124.964**	**2**	**16.048.389**	**100,00**	**11,45**	**ST**	**SR**
153.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	140.124.964	2	16.048.389	100,00	11,45	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
154.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**80**	**8.611.985.903**	**360**	**4.219.887.274**	**100,00**	**49,00**	**ST**	**SR**
155.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
156.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
157.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
158.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	17	413.583.946	326	148.607.102	100,00	35,93	ST	SR
159.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74	413.583.946	6	148.607.102	8,11	35,93	SR	SR
160.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70	1.967.763.480	360	831.710.364	100,00	42,27	ST	SR
161.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52	190.000.000	56	96.647.000	100,00	50,87	ST	SR
162.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	155	631.607.000	18	343.781.500	11,61	54,43	R	R
163.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250	572.000.000	750	254.536.800	100,00	44,50	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
164.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	15.000.000	8	7.000.000	100,00	46,67	ST	R
165.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	559.156.480	44	129.745.064	73,33	23,20	S	SR
166.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**65**	**3.156.337.000**	**225**	**1.249.811.500**	**100,00**	**39,60**	**ST**	**SR**
167.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	1.309.737.000	6	1.249.811.500	85,71	95,42	T	ST
168.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	365.000.000	4	0	80,00	0,00	T	SR
169.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	1.253.000.000	2	0	100,00	0,00	ST	SR
170.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	228.600.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
171.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**75**	**561.906.000**	**270**	**425.493.108**	**100,00**	**75,72**	**ST**	**S**
172.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	40.992.000	2.000	19.800.000	100,00	48,30	ST	SR
173.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	106.964.000	6	74.623.450	100,00	69,77	ST	S
174.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	389	413.950.000	61	331.069.658	15,68	79,98	SR	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
175.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**63**	**1.496.619.489**	**255**	**915.092.500**	**100,00**	**61,14**	**ST**	**R**
176.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**75**	**1.015.775.988**	**255**	**649.172.700**	**100,00**	**63,91**	**ST**	**R**
177.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	815.775.988	39	649.172.700	100,00	79,58	ST	T
178.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
179.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	1.496.619.489	75	915.092.500	100,00	61,14	ST	R
180.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	**70,5**	**12.887.298.000**	**336**	**10.271.277.669**	**100,00**	**79,70**	**ST**	**T**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
181.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi**	**70,0**	**12.887.298.000**	**400**	**10.271.277.669**	**100,00**	**79,70**	**ST**	**T**
182.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	12.887.298.000	4	10.271.277.669	100,00	79,70	ST	T
183.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk**	**0,14**	**30.405.035.092**	**4**	**11.094.057.253**	**100,00**	**36,49**	**ST**	**SR**
184.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**55**	**29.995.110.592**	**189**	**10.943.092.453**	**100,00**	**36,48**	**ST**	**SR**
185.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	9.000.000.000	1	7.402.158.670	100,00	82,25	ST	T
186.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
187.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	14.163.604.970	0	1.105.868.849	0,00	7,81	SR	SR
188.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	135	730.000.000	60	107.073.375	44,44	14,67	SR	SR
189.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	6.101.505.622	3	2.327.991.559	100,00	38,15	ST	SR
190.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Laporan profil kesehatan**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**ST**	**SR**
191.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
192.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar**	**80**	**409.924.500**	**380**	**150.964.800**	**100,00**	**36,83**	**ST**	**SR**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
193.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
194.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	409.924.500	4	150.964.800	100,00	36,83	ST	SR
195.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang memiliki sertifikat**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
196.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang mengikuti diklat/kursus**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
197.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10	0	0	0	0,00	0,00	**SR**	**SR**
198.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
199.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
200.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.278.499.240	85	1.111.664.389	100,00	86,95	ST	T
201.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	2.121.199.000	85	2.033.723.534	100,00	95,88	ST	ST
202.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	2.121.199.000	141	2.033.723.534	100,00	95,88	ST	ST
203.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	2.121.199.000	1	2.033.723.534	100,00	95,88	ST	ST
204.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.278.499.240	85	1.111.664.389	100,00	86,95	ST	T
205.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.278.499.240	1	1.111.664.389	100,00	86,95	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
206.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	26,5	285.075.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
207.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	100	285.075.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
208.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	285.075.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
209.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJiP	88,64	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
210.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan Profil Kesehatan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
211.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
212.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	4,6	550.339.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
213.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100	550.339.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
214.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	550.339.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
215.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4	44.400.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
216.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar	0	16.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
217.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	16.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
218.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	28.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
219.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	28.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
220.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	73,3	52.446.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
221.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	87,8	52.446.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
222.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	52.446.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
223.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	62.664.000	0	15.600.000	0,00	24,89	SR	SR
224.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	32.964.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
225.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	32.964.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
226.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	29.700.000	0	15.600.000	0,00	52,53	SR	R
227.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	29.700.000	0	15.600.000	0,00	52,53	SR	R
228.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100	265.677.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
229.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
230.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								
231.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar								
232.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi								

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
233.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM								
234.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KIPI yang tercatat pasca imunisasi dan pemberian obat masal	0	22.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
235.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	22.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
236.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan biaya operasional	0	8.910.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
237.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	8.910.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
238.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit								

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
239.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar								
240.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak								
241.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih								
242.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	22262	31.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
243.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	31.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
244.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	0,3	20.100.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
245.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3.600.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
246.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	3.600.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
247.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	16.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
248.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	16.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
249.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	0	23.535.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
250.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif	0	23.535.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
251.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	23.535.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
252.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
253.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
254.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.745.050.498	96	1.196.322.663	100,00	68,56	ST	S
255.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	486.096.602	131	332.528.308	100,00	68,41	ST	S
256.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	486.096.602	1	332.528.308	100,00	68,41	ST	S
257.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.258.953.896	93	863.794.355	100,00	68,61	ST	S
258.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.258.953.896	1	863.794.355	100,00	68,61	ST	S
259.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
260.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
261.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.179.855.856	90	996.212.967	100,00	84,44	ST	T
262.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	422.330.716	104	383.989.196	100,00	90,92	ST	T
263.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	422.330.716	1	383.989.196	100,00	90,92	ST	T
264.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	757.525.140	91	612.223.771	100,00	80,82	ST	T
265.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	757.525.140	1	612.223.771	100,00	80,82	ST	T
266.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
267.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
268.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.117.072.040	86	871.340.306	100,00	78,00	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
269.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	0,8	324.345.000	121	280.919.507	100,00	86,61	ST	T
270.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	324.345.000	1	280.919.507	100,00	86,61	ST	T
271.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	792.727.040	52	590.420.799	73,86	74,48	S	S
272.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	792.727.040	1	590.420.799	100,00	74,48	T	S
273.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
274.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
275.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.365.945.462	85	1.036.087.382	100,00	75,85	ST	S
276.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	525.242.000	95	463.273.527	100,00	88,20	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
277.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	525.242.000	1	463.273.527	100,00	88,20	ST	T
278.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	840.703.462	0	572.813.855	0,00	68,14	SR	S
279.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	840.703.462	1	572.813.855	100,00	68,14	ST	S
280.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
281.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
282.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	2.233.948.641	86	1.809.251.279	100,00	80,99	ST	T
283.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	867.057.305	178	755.774.235	100,00	87,17	ST	T
284.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	867.057.305	1	755.774.235	100,00	87,17	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
285.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.366.891.336	80	1.053.477.044	100,00	77,07	ST	T
286.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.366.891.336	1	1.053.477.044	100,00	77,07	ST	T
287.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
288.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
289.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.271.376.948	88	937.437.317	100,00	73,73	ST	S
290.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	499.670.000	207	416.644.345	100,00	83,38	ST	T
291.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	499.670.000	1	416.644.345	100,00	83,38	ST	T
292.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	771.706.948	87	520.792.972	100,00	67,49	ST	S

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
293.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	771.706.948	1	520.792.972	100,00	67,49	ST	S
294.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
295.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
296.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.417.984.121	82	986.263.264	100,00	69,55	ST	S
297.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	308.230.009	221	284.183.021	100,00	92,20	ST	ST
298.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	308.230.009	1	284.183.021	100,00	92,20	ST	ST
299.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.109.754.112	85	702.080.243	100,00	63,26	ST	R
300.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.109.754.112	1	702.080.243	100,00	63,26	ST	R

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
301.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
302.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
303.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.771.912.391	79	1.317.376.981	100,00	74,35	ST	S
304.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	591.971.515	64	515.304.093	100,00	87,05	ST	T
305.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	591.971.515	1	515.304.093	100,00	87,05	ST	T
306.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.179.940.876	73	802.072.888	100,00	67,98	ST	S
307.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.179.940.876	1	802.072.888	100,00	67,98	ST	S
308.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
309.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
310.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.991.675.692	85	1.430.021.184	100,00	71,80	ST	S
311.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	900.380.000	174	592.382.975	100,00	65,79	ST	R
312.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	900.380.000	1	592.382.975	100,00	65,79	ST	R
313.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.091.295.692	99	837.638.209	100,00	76,76	ST	T
314.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.091.295.692	1	837.638.209	100,00	76,76	ST	T
315.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
316.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
317.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.700.166.388	84	1.323.823.789	100,00	77,86	ST	T
318.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	483.174.000	105	438.302.613	100,00	90,71	ST	T
319.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	483.174.000	1	438.302.613	100,00	90,71	ST	T
320.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.216.992.388	72	885.521.176	100,00	72,76	ST	S
321.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.216.992.388	1	885.521.176	100,00	72,76	ST	S
322.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
323.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
324.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.497.814.196	87	1.187.055.565	100,00	79,25	ST	T
325.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	353.270.000	74	331.150.871	100,00	93,74	ST	ST
326.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	353.270.000	1	331.150.871	100,00	93,74	ST	ST
327.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	1.144.544.196	84	855.904.694	100,00	74,78	ST	S
328.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.144.544.196	1	855.904.694	100,00	74,78	ST	S

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
329.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
330.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
331.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	990.527.459	86	750.666.031	100,00	75,78	ST	S
332.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	316.436.159	58	267.577.890	100,00	84,56	ST	T
333.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	316.436.159	1	267.577.890	100,00	84,56	ST	T
334.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	674.091.300	80	483.088.141	100,00	71,67	ST	S
335.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	674.091.300	1	483.088.141	100,00	71,67	ST	S
336.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
337.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
338.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.094.430.120	88	822.303.866	100,00	75,14	ST	S
339.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,8	176.900.000	78	139.869.605	100,00	79,07	ST	T
340.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	176.900.000	1	139.869.605	100,00	79,07	ST	T
341.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	70,0	917.530.120	86	682.434.261	100,00	74,38	ST	S
342.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	917.530.120	1	682.434.261	100,00	74,38	ST	S
343.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
344.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
345.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	45	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
346.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	87	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
347.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
348.	Rata-rata Program						65,52	44,03	R	SR
349.	Rata-rata Kegiatan						70,40	47,52	S	SR
350.	Rata-rata Sub kegiatan						62,32	40,92	R	SR

2.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 94,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,61% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 64,09% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,73%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 40,74% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,27%.

Tabel 2.102: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG									
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Laporan LKjIP	77,20	63.092.813	73	42.749.601	94,56	67,76	ST	S
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	63.092.813	200	42.749.601	100,00	67,76	ST	S
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	63.092.813	4	42.749.601	100,00	67,76	ST	S
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	12.020.513.302	85	10.321.009.831	100,00	85,86	ST	T
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	10.261.922.642	1	9.034.455.346	100,00	88,04	ST	T
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	10.261.922.642	68	9.034.455.346	97,14	88,04	ST	T
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	557.804.830	45	359.475.003	81,82	64,44	T	R
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	123.849.190	3	101.774.500	100,00	82,18	ST	T
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.000.000	1	22.020.000	100,00	88,08	ST	T
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	2.500.000	7	1.800.000	14,58	72,00	SR	S
21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	406.455.640	80	233.880.503	100,00	57,54	ST	R
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	35	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	74	982.907.338	76	849.538.336	100,00	86,43	ST	T
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	35.025.000	16	27.018.750	100,00	77,14	ST	T
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	20.668.650	7	7.338.000	100,00	35,50	ST	SR
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	927.213.688	78	815.181.586	100,00	87,92	ST	T
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	69	217.878.492	42	77.541.146	60,87	35,59	R	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	217.878.492	13	77.541.146	100,00	35,59	ST	SR
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Ketersediaan Air Baku	185,41	379.508.645	185	57.316.945	100,00	15,10	ST	SR
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Tampungan Air Baku	96,945	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,05	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1,00	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	47,83	379.508.645	48	57.316.945	100,00	15,10	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
49	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0	379.508.645	0	57.316.945	0,00	15,10	SR	SR
50	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1,5	2.377.139.570	1	549.227.620	95,33	23,10	ST	SR
52	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	160	2.377.139.570	740	549.227.620	100,00	23,10	ST	SR
53	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	160	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	436.737.000	0	63.969.000	0,00	14,65	SR	SR
56	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3	1.489.592.570	88	434.313.820	100,00	29,16	ST	SR
57	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	450.810.000	1	50.944.800	0,00	11,30	SR	SR
59	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	35,90	263.679.975	36	0	98,89	0,00	ST	SR
60	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	5	263.679.975	0	0	0,00	0,00	SR	SR
61	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	590	263.679.975	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
62	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,17	2.631.438.950	79	2.118.543.222	99,77	80,51	ST	T
64	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat	200	134.570.000	249	89.448.156	100,00	66,47	ST	S
65	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20	134.570.000	10	89.448.156	50,00	66,47	SR	S
66	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	200	2.496.868.950	249	2.029.095.066	100,00	81,27	ST	T
67	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai Standar	200	2.470.608.950	249	2.029.095.066	100,00	82,13	ST	T
68	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	26.260.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	48,87	17.066.562.431	51	10.501.235.953	100,00	61,53	ST	R
70	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	62,86	17.066.562.431	69	10.501.235.953	100,00	61,53	ST	R
71	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	268	13.195.298.480	10.832	8.339.120.899	100,00	63,20	ST	R
72	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
73	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	500	1.014.943.001	8.353	517.923.304	100,00	51,03	ST	R
74	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	500	2.856.320.950	2.552	1.644.191.750	100,00	57,56	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
75	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
76	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100	0	87	0	87,10	0,00	T	SR
77	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang dibangun	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
78	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	87,10	14.700.228.490	87	4.343.442.265	100,00	29,55	ST	SR
80	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting	4	14.700.228.490	14	4.343.442.265	100,00	29,55	ST	SR
81	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	14.375.443.310	4	4.237.667.710	80,00	29,48	T	SR
82	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1	76.768.620	1	40.553.555	100,00	52,83	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
83	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4	248.016.560	14	65.221.000	100,00	26,30	ST	SR
84	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	87,66	8.921.119.620	85	1.454.531.677	97,33	16,30	ST	SR
85	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	71,20	8.921.119.620	71	1.454.531.677	100,00	16,30	ST	SR
86	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4	8.921.119.620	3	1.454.531.677	75,00	16,30	S	SR
87	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	44,05	130.295.152.403	46	59.355.490.340	100,00	45,55	ST	SR
88	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	204,44	38.233.182.201	212	13.090.993.801	100,00	34,24	ST	SR
89	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10,000	37.581.852.891	11	12.620.004.244	100,00	33,58	ST	SR
90	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
91	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,2	651.329.310	32	470.989.557	100,00	72,31	ST	S
92	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	204,44	92.061.970.202	46	46.264.496.539	22,34	50,25	SR	SR
93	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	1.480.600.000	4	0	100,00	0,00	ST	SR
94	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,00	37.581.852.891	11	12.620.004.244	100,00	33,58	ST	SR
95	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,50	47.472.879.661	11	32.036.816.912	100,00	67,48	ST	S
96	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,50	1.020.008.340	3	333.494.900	100,00	32,70	ST	SR
97	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
98	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0	2.061.800.000	7	344.056.821	0,00	16,69	SR	SR
99	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2	1.793.500.000	1	459.134.105	43,60	25,60	SR	SR
100	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6	651.329.310	32	470.989.557	100,00	72,31	ST	S
101	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	85,00	136.292.400	50	42.800.000	58,82	31,40	R	SR
102	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil	360	51.909.600	5	0	1,39	0,00	SR	SR
103	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	300	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
104	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
105	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60	51.909.600	0	0	0,00	0,00	SR	SR
106	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah	1	60.646.800	1	42.800.000	100,00	70,57	ST	S
107	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	30.323.400	1	21.400.000	100,00	70,57	ST	S
108	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	30.323.400	1	21.400.000	100,00	70,57	ST	S
109	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
110	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis	1	23.736.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
111	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	30	23.736.000	24	0	80,00	0,00	T	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
112	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	2,00	1.037.000.920	2	603.926.119	100,00	58,24	ST	R
113	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang Ditetapkan	2	275.575.900	2	162.908.638	100,00	59,12	ST	S
114	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	255.575.900	11	162.908.638	100,00	63,74	ST	R
115	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	1	20.000.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
116	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	2	627.575.020	2	438.317.481	100,00	69,84	ST	S
117	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	627.575.020	4	438.317.481	100,00	69,84	ST	S
118	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	20	133.850.000	42	2.700.000	100,00	2,02	ST	SR
119	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1	133.850.000	1	2.700.000	100,00	2,02	ST	SR
120	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
121	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
122	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
123	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Berusaha Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program					94,75	39,61	ST	SR	
	Rata-rata Kegiatan					64,09	32,732	R	SR	
	Rata-rata Sub kegiatan					40,74	23,27	SR	SR	

2.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 40,17% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 19,24% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 48,46% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,31%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan sebesar Sangat Rendah (SR) 33,50% dengan realisasi anggaran sebesar Sangat Rendah (SR) sebesar 25,98%.

Tabel 2.103: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	75,60	14.538.303	71	8.482.014	93,32	58,34	ST	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77	14.538.303	98	8.482.014	100,00	58,34	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	14.538.303	9	8.482.014	100,00	58,34	ST	R
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.638.635.822	85	6.094.151.838	100,00	63,23	ST	R
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.846.433.462	1	3.262.524.354	100,00	55,80	ST	R
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	5.846.433.462	24	3.262.524.354	100,00	55,80	ST	R
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	50.000.000	150	0	100,00	0,00	ST	SR
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	50.000.000	150	0	100,00	0,00	ST	SR
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	593.137.360	45	201.556.215	60,00	33,98	R	SR
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	39.356.360	1	32.325.000	20,00	82,13	SR	T
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.000.000	1	24.860.000	100,00	82,87	ST	T
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	14.000.000	1	5.800.000	100,00	41,43	ST	SR
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	509.781.000	55	138.571.215	83,33	27,18	T	SR
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	902.500.000	70	472.500.000	100,00	52,35	ST	R
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	473.000.000	1	472.500.000	100,00	99,89	ST	ST
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	429.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85	1.891.184.000	84	1.842.561.166	98,53	97,43	ST	ST
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	16.000.000	1	15.228.000	20,00	95,18	SR	ST
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1.052.130.000	1	1.030.582.858	50,00	97,95	SR	ST
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	823.054.000	1	796.750.308	4,00	96,80	SR	ST
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	345.381.000	159	315.010.103	100,00	91,21	ST	ST
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	184.381.000	16	154.891.900	100,00	84,01	ST	T
35	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	161.000.000	1	160.118.203	100,00	99,45	ST	ST
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	80	10.000.000	96	0	100,00	0,00	ST	SR
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
39	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah sertifikat	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung(SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	83	137.832.500	229	23.535.559	100,00	17,08	ST	SR
43	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah laporan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	6	137.832.500	3	23.535.559	50,00	17,08	SR	SR
46	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
47	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2	137.832.500	0	23.535.559	0,00	17,08	SR	SR
49	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	6	0	89	0	100,00	0,00	ST	SR
50	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
51	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	19,76	8.410.240.700	54	2.740.019.272	100,00	32,58	ST	SR
52	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	luas areal kawasan kumuh	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	30	8.410.240.700	170	2.740.019.272	100,00	32,58	ST	SR
55	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30	644.494.500	11	597.501.592	36,67	92,71	SR	ST

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
56	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1	7.765.746.200	230	2.142.517.680	100,00	27,59	ST	SR
57	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	0,153846	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
61	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62	Perbaikan Rumah TidakLayak Huni untukPencegahan TerhadapTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
64	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	56	40.133.657.849	182	28.878.993.221	100,00	71,96	ST	S
67	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	230	40.133.657.849	291	28.878.993.221	100,00	71,96	ST	S
68	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5	40.133.657.849	49	28.878.993.221	100,00	71,96	ST	S
69	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
71	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
72	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
73	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
74	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	85	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
75	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
76	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
77	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
78	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas tanah yang dibebaskan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
80	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
81	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan	50	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
82	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
83	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	9,96	100.000.000	5	59.601.300	49,40	59,60	SR	R
84	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	jumlah laporan	1	100.000.000	1	59.601.300	100,00	59,60	ST	R
85	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	100.000.000	1	59.601.300	100,00	59,60	ST	R
86	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
87	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Rekomendasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
88	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
89	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	30	3.738.700.000	125	185.660.600	100,00	4,97	ST	SR
90	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Tanah	10	3.738.700.000	15	185.660.600	100,00	4,97	ST	SR
91	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3.738.700.000	1	185.660.600	100,00	4,97	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
92	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
93	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						40,17	19,24	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						48,46	21,31	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						33,50	25,98	SR	SR

2.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 77,71% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,93% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 69,55% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 53,62%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 61,35% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,34%.

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	SATPOP PP									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,50	85.716.620	77	56.281.419	100,00	65,66	ST	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	85.716.620	66	56.281.419	93,57	65,66	ST	R
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	85.716.620	2	56.281.419	100,00	65,66	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	19.406.305.999	85	17.163.022.311	100,00	88,44	ST	T
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11.860.752.461	1	11.093.468.853	100,00	93,53	ST	ST
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	11.860.752.461	85	11.093.468.853	93,41	93,53	ST	ST
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	10	469.920.650	80	16.940.204	100,00	3,60	ST	SR
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	469.920.650	240	16.940.204	100,00	3,60	ST	SR
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	85	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	621.746.540	1.560	465.249.280	100,00	74,83	ST	S
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	62.018.000	1	37.789.150	50,00	60,93	SR	R
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10.000.000	1	9.916.500	100,00	99,17	ST	ST
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	44.763.700	13.000	38.019.240	100,00	84,93	ST	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.500.000	1	2.000.000	100,00	80,00	ST	T
21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	R	SR
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	502.464.840	53	377.524.390	100,00	75,13	ST	S
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	1.055.992.188	18	356.105.750	24,11	33,72	SR	SR
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	742.400.000	2	70.360.000	100,00	9,48	ST	SR
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	26.000.000	20	10.000.000	100,00	38,46	ST	SR
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	287.592.188	12	275.745.750	100,00	95,88	ST	ST
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	4.918.622.160	75	4.816.250.724	100,00	97,92	ST	ST
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	14.400.000	300	12.000.000	100,00	83,33	ST	T
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	76.730.000	3	56.358.907	100,00	73,45	ST	S
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	4.827.492.160	159	4.747.891.817	100,00	98,35	ST	ST
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	479.272.000	154	415.007.500	100,00	86,59	ST	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	423.672.000	11	365.830.500	100,00	86,35	ST	T
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	40.000.000	16	33.600.000	100,00	84,00	ST	T
35	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15.600.000	1	15.577.000	100,00	99,85	ST	ST
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	1.461.070.222	15	870.023.305	18,28	59,55	SR	R
38	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80	1.194.469.340	38	698.280.449	48,00	58,46	SR	R
39	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	283.518.710	1	72.961.657	100,00	25,73	ST	SR
40	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	129.113.630	10	53.952.202	66,67	41,79	S	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
41	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	9	781.837.000	2	571.366.590	22,22	73,08	SR	S
43	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80	167.117.330	40	103.496.026	50,00	61,93	SR	R
45	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2	167.117.330	6	103.496.026	100,00	61,93	ST	R
47	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan PPNS	50	99.483.552	40	68.246.830	80,00	68,60	ST	S
48	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	99.483.552	2	68.246.830	100,00	68,60	ST	S

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
49	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	85	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80	0	38	0	48,00	0,00	SR	SR
51	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN									
52	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,30	48.769.575	78	34.192.950	100,00	70,11	ST	S
55	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77	48.769.575	100	34.192.950	100,00	70,11	ST	S
56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	48.769.575	2	34.192.950	100,00	70,11	ST	S

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.162.447.264	50	7.582.533.350	58,82	82,76	R	T
58	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.541.874.968	1	5.234.747.322	100,00	94,46	ST	ST
59	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	5.541.874.968	54	5.234.747.322	100,00	94,46	ST	ST
60	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	96	653.362.164	13	47.200.898	13,54	7,22	SR	SR
61	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	286.257.024	2	15.182.518	100,00	5,30	ST	SR
62	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	367.105.140	4	32.018.380	20,00	8,72	SR	SR
63	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	491.632.340	15	410.694.471	18,75	83,54	SR	T
64	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	22.572.130	114	22.572.000	100,00	100,00	ST	ST
65	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20.000.000	1	19.999.850	100,00	100,00	ST	ST
67	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	20.000.000	1	16.600.000	100,00	83,00	ST	T
68	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	20.500.000	1	18.750.000	16,67	91,46	SR	ST

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
69	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	408.560.210	127	332.772.621	100,00	81,45	ST	T
70	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	170.667.234	20	129.963.223	30,77	76,15	SR	T
71	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	36.817.234	4	13.329.973	100,00	36,21	ST	SR
72	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	133.850.000	7	116.633.250	100,00	87,14	ST	T
73	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	2.197.976.236	35	1.682.066.643	50,00	76,53	SR	T
74	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	10.000.000	254	9.997.000	100,00	99,97	ST	ST
75	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	95.130.000	2	69.926.575	100,00	73,51	ST	S
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.092.846.236	9	1.602.143.068	75,00	76,55	S	S
77	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	40	106.934.322	31	77.860.793	77,50	72,81	T	S
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	82.534.322	9	72.490.793	100,00	87,83	ST	T
79	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	14.000.000	6	5.370.000	100,00	38,36	ST	SR
80	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.400.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
81	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
82	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100	859.667.380	100	718.251.431	100,00	83,55	ST	T
83	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	778.956.380	100	664.886.356	100,00	85,36	ST	T
84	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15	748.078.380	61	641.106.356	100,00	85,70	ST	T
85	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	30.878.000	1	23.780.000	100,00	77,01	ST	T
86	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
87	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	50	52.208.000	3	39.155.051	6,66	75,00	SR	S

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
88	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	52.208.000	1	39.155.051	100,00	75,00	ST	S
89	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
90	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100	28.503.000	100	14.210.024	100,00	49,85	ST	SR
91	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	28.503.000	1	14.210.024	100,00	49,85	ST	SR
92	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
93	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
94	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	66,70	87.696.000	67	19.596.600	100,00	22,35	ST	SR
97	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	87.696.000	100	19.596.600	100,00	22,35	ST	SR
98	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	29.866.000	3	12.672.900	100,00	42,43	ST	SR
99	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	57.830.000	3	6.923.700	100,00	11,97	ST	SR
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.566.584.222	100	6.504.695.586	100,00	85,97	ST	T
101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.904.014.714	1	4.512.187.738	100,00	92,01	ST	ST
102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.904.014.714	29	4.512.187.738	100,00	92,01	ST	ST
103	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	182.520.000	100	116.453.832	100,00	63,80	ST	R
104	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	84.520.000	76	53.853.832	0,00	63,72	ST	R
105	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	98.000.000	8	62.600.000	100,00	63,88	ST	R
106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	660.701.908	75	411.829.240	100,00	62,33	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
107	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	59.744.908	5	49.601.000	100,00	83,02	ST	T
108	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	50.091.000	10	38.399.000	100,00	76,66	ST	T
109	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80000	47.280.000	80.000	36.594.740	100,00	77,40	ST	T
110	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	503.586.000	75	287.234.500	100,00	57,04	ST	R
111	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	432.944.000	215	262.579.000	100,00	60,65	ST	R
112	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
113	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65	81.364.000	70	49.967.000	100,00	61,41	ST	R
114	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	339.580.000	70	200.772.000	100,00	59,12	ST	R
115	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	60	12.000.000	70	11.840.000	100,00	98,67	ST	ST
116	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	1.216.797.800	100	1.129.040.485	100,00	92,79	ST	ST
117	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	54.310.000	500	40.706.600	100,00	74,95	ST	S
118	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	20.667.800	2	6.656.090	100,00	32,21	ST	SR
119	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	1.141.820.000	15	1.081.677.795	100,00	94,73	ST	ST

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	60	25.700.000	70	19.596.000	100,00	76,25	ST	T
121	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	143.905.800	70	53.009.291	93,33	36,84	ST	SR
122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	114.625.800	2	53.009.291	100,00	46,25	ST	SR
123	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	25.700.000	65	19.596.000	100,00	76,25	ST	T
124	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
125	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
126	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	29.280.000	1	0	20,00	0,00	SR	SR
127	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3,90	815.598.000	9	334.002.958	100,00	40,95	ST	SR
128	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	30	111.914.000	0	62.500.000	0,00	55,85	SR	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
129	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	20	111.914.000	310	62.500.000	100,00	55,85	ST	R
130	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota	1	145.111.200	0	74.469.580	0,00	51,32	SR	R
131	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	145.111.200	1	74.469.580	100,00	51,32	ST	R
132	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70	303.235.200	80	78.206.252	100,00	25,79	ST	SR
133	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	68.316.000	1	1.100.000	100,00	1,61	ST	SR
134	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40	55.230.000	80	40.695.000	100,00	73,68	ST	S
135	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
136	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
137	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
138	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
139	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
140	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
141	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	78.400.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
142	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150	7.880.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
143	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	93.409.200	0	36.411.252	0,00	38,98	SR	SR
144	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	161.210.400	100	92.306.685	100,00	57,26	ST	R
145	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	90	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
146	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	74.610.400	6	57.531.685	100,00	77,11	ST	T
147	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
148	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10	86.600.000	92	34.775.000	100,00	40,16	ST	SR
149	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
150	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
151	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	1	94.127.200	100	26.520.441	100,00	28,18	ST	SR
152	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	1	0	100	0	100,00	0,00	ST	SR
153	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
154	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
155	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
156	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
157	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	29.607.200	1	20.120.441	100,00	67,96	ST	S
158	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	64.520.000	1	6.400.000	100,00	9,92	ST	SR
	Rata-rata Program						77,71	59,93	T	R
	Rata-rata Kegiatan						69,55	53,62	S	R
	Rata-rata Sub kegiatan						61,35	43,34	R	SR

2.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program yaitu Tinggi (T) sebesar 87,35% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 48,39% dan kinerja Kegiatan yaitu Sangat Tinggi (ST) sebesar 92,89% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 56,68%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 59,25% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 42,45%.

Tabel 2.105: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00	26.466.200	78	8.194.649	98,80	30,96	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	26.466.200	100	8.194.649	100,00	30,96	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	26.466.200	2	8.194.649	100,00	30,96	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.658.162.330	85	4.082.062.672	100,00	87,63	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.478.365.080	1	3.265.963.132	100,00	93,89	ST	ST

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	3.478.365.080	22	3.265.963.132	100,00	93,89	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	11	77.250.000	23	49.220.072	100,00	63,72	ST	R
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	77.250.000	5	49.220.072	100,00	63,72	ST	R
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	503.393.460	75	294.046.229	100,00	58,41	ST	R
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	75.996.110	4	49.951.650	100,00	65,73	ST	R
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	27.183.000	3	17.257.750	100,00	63,49	T	R
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	10.400.000	1	10.400.000	100,00	100,00	ST	ST
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	384.848.450	74	214.936.829	100,00	55,85	ST	R
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	4.965.900	6	1.500.000	100,00	30,21	ST	SR
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	77.200.000	63	46.928.336	100,00	60,79	ST	R
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	23.063.000	1	17.728.336	10,00	76,87	SR	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	51.137.000	6	26.200.000	60,00	51,23	R	R
24	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	3.000.000	1	3.000.000	20,00	100,00	SR	ST
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	66	289.205.290	70	258.555.117	100,00	89,40	ST	T
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	35.650.000	1	28.400.401	100,00	79,66	ST	T
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5.130.000	1	307.500	100,00	5,99	ST	SR
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	248.425.290	12	229.847.216	100,00	92,52	ST	ST
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	232.748.500	75	167.349.786	100,00	71,90	ST	S
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	172.972.500	3	108.372.300	100,00	62,65	ST	R
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.000.000	10	9.800.000	100,00	98,00	ST	ST
32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	49.776.000	4	49.177.486	80,00	98,80	T	ST
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	50	29.825.300	50	2.606.285	100,00	8,74	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
35	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6	29.825.300	6	2.606.285	100,00	8,74	ST	SR
36	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	29.825.300	1	2.606.285	100,00	8,74	ST	SR
38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	100	1.232.522.620	100	909.396.585	100,00	73,78	ST	S
39	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	1.232.522.620	100	909.396.585	100,00	73,78	ST	S
40	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	10	6.480.000	264	0	100,00	0,00	ST	SR
41	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10.000.000	264	0	100,00	0,00	ST	SR
42	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	827.661.096	243	690.768.307	100,00	83,46	ST	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
43	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	18.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	14.240.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	72.700.360	5	20.316.114	100,00	27,94	ST	SR
46	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	282.941.164	6	198.312.164	100,00	70,09	ST	S
47	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	60,09	2.339.665.700	93	1.530.906.032	100,00	65,43	ST	R
51	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	64,93	2.339.665.700	100	1.530.906.032	100,00	65,43	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
52	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675	2.321.676.845	4.295	1.513.577.977	100,00	65,19	ST	R
53	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	17.988.855	0	17.328.055	0,00	96,33	SR	ST
54	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	397.229.040	100	169.196.706	100,00	42,59	ST	SR
55	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100	300.000.000	100	108.519.952	100,00	36,17	ST	SR
56	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	300.000.000	51	108.519.952	0,00	36,17	SR	SR
57	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	1	97.229.040	1	60.676.754	100,00	62,41	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
61	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	97.229.040	1	60.676.754	100,00	62,41	ST	R
62	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	100	44.761.000	100	34.891.261	100,00	77,95	ST	T
63	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	44.761.000	100	34.891.261	100,00	77,95	ST	T
64	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	44.761.000	11	34.891.261	100,00	77,95	ST	T
	Rata-rata Program						87,35	48,39	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						92,86	56,68	ST	R
	Rata-rata Sub kegiatan						59,25	42,45	R	SR

2.2.1.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 70,45% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 48,91% dan kinerja kegiatan Rendah (R) sebesar 56,15% dengan realisasi anggaran juga Sangat Rendah (SR) sebesar 44,66%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 57,11%. dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,15%.

Tabel 2.106: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,89	32.192.080	74	5.912.463	90,61	18,37	T	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	32.192.080	74	5.912.463	74,20	18,37	S	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	32.192.080	2	5.912.463	100,00	18,37	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.350.218.692	100	5.324.039.608	100,00	83,84	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.906.503.852	1	4.548.262.594	100,00	92,70	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	4.906.503.852	33	4.548.262.594	100,00	92,70	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	416.388.640	53	206.296.205	93,21	49,54	ST	SR
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	31.479.000	1	22.390.000	100,00	71,13	ST	S
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	37.733.300	2	19.594.300	100,00	51,93	ST	R
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2.736.400	2	2.730.000	100,00	99,77	ST	ST
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	32.395.340	2	10.988.900	100,00	33,92	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	7.000.000	5	675.000	100,00	9,64	ST	SR
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	305.044.600	7	149.918.005	35,00	49,15	SR	SR
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	211.000.000	62	55.792.150	100,00	26,44	ST	SR
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	211.000.000	3	55.792.150	75,00	26,44	S	SR
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	483.824.200	31	426.096.659	30,80	88,07	SR	T
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	37.295.000	12	27.685.500	100,00	74,23	ST	S
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	98.629.200	2	62.144.558	100,00	63,01	ST	R
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	347.900.000	12	336.266.601	100,00	96,66	ST	ST
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59,30	332.502.000	8	87.592.000	12,92	26,34	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	102.412.000	11	51.298.000	100,00	50,09	ST	SR
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	30.090.000	6	22.530.000	60,00	74,88	R	S
31	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	200.000.000	1	13.764.000	50,00	6,88	SR	SR
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,12	270.644.450	1	193.167.749	100,00	71,37	ST	S
34	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	75	270.644.450	80	193.167.749	100,00	71,37	ST	S
35	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	270.644.450	16	193.167.749	100,00	71,37	ST	S
36	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	94	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	92	93.130.970	2	68.754.350	2,53	73,83	SR	S
42	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	6	93.130.970	15	68.754.350	100,00	73,83	ST	S
43	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	93.130.970	20	68.754.350	100,00	73,83	ST	S
45	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3	128.600.980	33	19.570.192	100,00	15,22	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
46	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	55	128.600.980	0	19.570.192	0,00	15,22	SR	SR
47	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	91.645.980	0	7.269.992	0,00	7,93	SR	SR
48	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3200	36.955.000	3.762	12.300.200	100,00	33,28	ST	SR
49	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	158.751.440	100	126.565.562	100,00	79,73	ST	T
52	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	96.251.440	100	69.688.492	100,00	72,40	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
53	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	21.746.400	1	13.920.160	100,00	64,01	ST	R
54	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	457.800	1	195.000	100,00	42,60	ST	R
55	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.425.000	2	2.089.000	100,00	47,21	ST	SR
57	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	69.622.240	15	53.484.332	100,00	76,82	ST	T
59	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
61	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	62.500.000	75	56.877.070	75,00	91,00	S	ST
62	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.000.000	9	5.877.070	75,00	83,96	S	T
63	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	55.500.000	9	51.000.000	75,00	91,89	S	ST
	Rata-rata Program					70,45	48,91	S	SR	
	Rata-rata Kegiatan					56,15	44,66	R	SR	
	Rata-rata Sub kegiatan					57,11	37,15	R	SR	

2.2.1.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 77,78% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 55,84% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 66,20% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,68%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 48,49% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 33,31%.

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,64	20.765.160	78	17.880.572	100,00	86,11	ST	T
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	20.765.160	75	17.880.572	100,00	86,11	ST	T
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	20.765.160	3	17.880.572	100,00	86,11	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.346.942.795	100	4.545.442.370	100,00	85,01	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.915.864.604	1	3.652.767.050	100,00	93,28	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	3.915.864.604	23	3.652.767.050	51,11	93,28	R	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	61.460.020	88	18.279.800	93,12	29,74	ST	SR
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	61.460.020	2	18.279.800	66,67	29,74	S	SR
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	585.759.653	76	372.598.524	100,00	63,61	ST	R
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	18.629.570	12	5.598.900	100,00	30,05	ST	SR
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	4.245.633	6	1.480.500	50,00	34,87	SR	SR
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	9.720.000	1.255	4.300.000	100,00	44,24	ST	SR
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	553.164.450	273	361.219.124	100,00	65,30	ST	SR
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	166.800.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	18.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	148.800.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	445.718.518	76	426.490.913	100,00	95,69	ST	ST
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	36.494.000	12	30.297.000	100,00	83,02	ST	T
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1.000.000	1	362.500	100,00	36,25	ST	SR
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	408.224.518	12	395.831.413	100,00	96,96	ST	ST
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	171.340.000	72	75.306.083	95,64	43,95	ST	SR
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	109.000.000	37	50.068.700	100,00	45,93	ST	SR
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	62.340.000	18	25.237.383	60,00	40,48	R	SR
31	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	94.857.060	64	47.230.659	100,00	49,79	ST	SR
34	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	3	94.857.060	3	47.230.659	100,00	49,79	ST	SR
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	94.857.060	1	47.230.659	100,00	49,79	ST	SR
36	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80	678.836.500	97	141.512.826	100,00	20,85	ST	SR
38	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0	678.836.500	1	141.512.826	0,00	20,85	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
39	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	678.836.500	1	141.512.826	100,00	20,85	ST	SR
40	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0	174.484.700	1	79.790.890	0,00	45,73	SR	SR
43	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,ekonomi ,sosial,dan ekonomi	2	174.484.700	5	79.790.890	100,00	45,73	ST	SR
44	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	9	174.484.700	9	79.790.890	100,00	45,73	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
45	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	733.727.000	100	523.301.539	100,00	71,32	ST	S
46	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	2	63.930.000	10	46.460.727	100,00	72,67	ST	S
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	63.930.000	1	46.460.727	100,00	72,67	ST	S
48	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	524.440.000	100	385.243.512	100,00	73,46	ST	S
49	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	8	524.440.000	147	385.243.512	100,00	73,46	ST	S
50	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesrsentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	100	145.357.000	100	91.597.300	100,00	63,02	ST	R
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	145.357.000	6	91.597.300	100,00	63,02	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
52	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfrehensif	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	244.460.724	100	146.225.739	100,00	59,82	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
58	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	100	244.460.724	463	146.225.739	100,00	59,82	ST	R
59	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	244.460.724	12	146.225.739	100,00	59,82	ST	R
60	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan keluarga	0,2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
61	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	10,87	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	75	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
66	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	230.183.436	70	170.060.196	100,00	73,88	ST	S
67	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah lembaga PHA	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
68	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	100	230.183.436	100	170.060.196	100,00	73,88	ST	S
70	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	72	230.183.436	12.000	170.060.196	100,00	73,88	ST	S
71	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	100	397.422.260	100	323.400.149	100,00	81,37	ST	T
72	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	100	85.344.800	100	77.330.267	100,00	90,61	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
73	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	215	85.344.800	12	77.330.267	5,58	90,61	SR	T
74	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
75	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	11	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
76	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pesrsentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	70	211.737.464	100	166.116.773	100,00	78,45	ST	T
77	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25	211.737.464	55	166.116.773	100,00	78,45	ST	T
78	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	100.339.996	3	79.953.109	100,00	79,68	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
79	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60	100.339.996	66	79.953.109	100,00	79,68	ST	T
	Rata-rata Program						77,78	55,84	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						66,20	46,68	S	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						48,49	33,31	SR	SR

2.2.1.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 38,92% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 27,35% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 41,93% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,28%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 91,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,43%.

Tabel 2.108 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,50	13.752.844	71	10.759.812	89,56	78,24	T	T
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74	13.752.844	76	10.759.812	100,00	78,24	ST	T
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	13.752.844	2	10.759.812	100,00	78,24	ST	T
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	13.600.262.209	85	11.921.612.136	99,45	87,66	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11.429.487.308	1	10.588.506.307	100,00	92,64	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	11.429.487.308	75	10.588.506.307	90,36	92,64	T	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70	957.818.100	66	455.639.383	93,57	47,57	ST	SR
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	356.400.000	1	94.900.000	100,00	26,63	ST	SR
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	28.715.240	1	22.500.200	100,00	78,36	ST	T
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	33.700.000	1	22.114.500	100,00	65,62	ST	R
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	58.600.000	1	36.511.400	100,00	62,31	ST	R
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	85.004.000	1	69.114.100	100,00	81,31	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	395.398.860	12	210.499.183	100,00	53,24	ST	R
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	797.647.950	84	676.925.236	100,00	84,87	ST	T
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15.400.000	1	12.400.000	100,00	80,52	ST	T
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	34.630.000	2	27.501.500	100,00	79,42	ST	T
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	747.617.950	1	637.023.736	100,00	85,21	ST	T
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	415.308.851	79	200.541.210	98,40	48,29	ST	SR
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	322.208.410	30	151.406.150	100,00	46,99	ST	SR
26	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	93.100.441	1	49.135.060	100,00	52,78	ST	R
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	5	70.119.750	14	9.614.484	100,00	13,71	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
29	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	80,00	70.119.750	0	9.614.484	0,00	13,71	SR	SR
30	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	12	70.119.750	10	9.614.484	83,33	13,71	T	SR
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400	76.409.250	2.402	0	100,08	0,00	ST	SR
33	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	10	76.409.250	5	0	48,10	0,00	SR	SR
34	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	76.409.250	1	0	100,00	0,00	ST	SR
35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	2100	180.000.000	2.132	0	100,00	0,00	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
36	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	57	180.000.000	67	0	100,00	0,00	ST	SR
37	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	180.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	4,08	184.497.500	5	21.096.176	100,00	11,43	ST	SR
39	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	10	184.497.500	10	21.096.176	100,00	11,43	ST	SR
40	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	184.497.500	25	21.096.176	100,00	11,43	ST	SR
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	90	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
43	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	60	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								SR	SR
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								SR	SR
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	55.000.000	0	22.000.000	0,00	40,00	SR	SR
49	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
51	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	5	55.000.000	3	22.000.000	60,00	40,00	R	SR
52	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	55.000.000	5	22.000.000	100,00	40,00	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
53	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	65	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						73,64	28,88	S	SR
	Rata-rata Kegiatan						53,34	27,78	R	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						57,71	32,70	R	SR

2.2.1.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 20,93% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,18% dan kinerja Kegiatan sebesar 18,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 8,03%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 18,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 8,03%.

Tabel 2.109: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
3	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	20	0	20	0	0,00	0,00	SR	SR
4	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	20	0	20	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	85	0	85	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
8	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	0	4	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	30	0	30	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas tanah yang dibebaskan	2	0	2	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	70	0	70	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan	50	0	50	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5	0	5	0	0,00	0,00	SR	SR
15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	9,96	100.000.000	9,96	100.000.000	5,22	59,60	SR	R
16	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	jumlah laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	0,00	59,60	SR	R
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	100.000.000	1	100.000.000	0,00	59,60	SR	R
18	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	20	0	20	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Rekomendasi	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
21	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	30	3.738.700.000	30	3.738.700.000	96,67	4,65	ST	SR
22	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Tanah	10	3.738.700.000	10	3.738.700.000	100,00	4,65	ST	SR
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3.738.700.000	1	3.738.700.000	0,00	4,65	SR	SR
24	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						20,93	9,18	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						18,31	8,03	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						18,31	8,03	SR	SR

2.2.1.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 83,89% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 53,27% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 84,50% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 53,34%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 64,91% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 44,46%.

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	62,50	115.644.377	64	47.198.690	100,00	40,81	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	115.644.377	64	47.198.690	100,00	40,81	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	115.644.377	3	47.198.690	100,00	40,81	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.032.039.484	87	5.002.262.949	100,00	82,93	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.955.853.538	1	3.656.380.994	100,00	92,43	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.955.853.538	24	3.656.380.994	100,00	92,43	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	42.353.380	90	30.138.771	100,00	71,16	ST	S
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	42.353.380	5	30.138.771	100,00	71,16	ST	S
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	521.852.340	58	307.825.208	96,61	58,99	ST	R
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	83.782.400	4	71.072.100	100,00	84,83	ST	T
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	17.500.000	10	17.500.000	100,00	100,00	ST	ST
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	18.500.000	12	14.314.000	100,00	77,37	ST	T
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	61.000.000	19	51.320.000	79,17	84,13	T	T
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	341.069.940	15	153.619.108	100,00	45,04	ST	SR
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	63	212.147.736	65	56.848.584	100,00	26,80	ST	SR
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	212.147.736	2	56.848.584	100,00	26,80	ST	SR
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
22	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	63	225.300.000	65	15.200.000	100,00	6,75	ST	SR
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	225.300.000	4	15.200.000	100,00	6,75	ST	SR
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	782.829.300	91	738.095.464	91,43	94,29	ST	ST
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	18.000.000	1	18.000.000	100,00	100,00	ST	ST
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	8.630.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	756.199.300	12	720.095.464	100,00	95,23	ST	ST
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	291.703.190	34	197.773.928	81,82	67,80	ST	S
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	231.703.190	6	146.269.928	100,00	63,13	ST	R
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	60.000.000	6	51.504.000	100,00	85,84	ST	T
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
33	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1	386.279.950	3	293.386.174	100,00	75,95	ST	S
34	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1	386.279.950	1	293.386.174	100,00	75,95	ST	S
37	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	386.279.950	1	293.386.174	100,00	75,95	ST	S
38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	21,44	58.084.090	23	37.691.646	100,00	64,89	ST	R
39	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	4	58.084.090	2	37.691.646	100,00	64,89	ST	R
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2	58.084.090	2	37.691.646	100,00	64,89	ST	R
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50	2.580.961.780	44	1.743.250.002	80,43	67,54	T	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
42	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	80	2.580.961.780	71	1.743.250.002	80,43	67,54	T	S
43	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,4	2.580.961.780	3	1.743.250.002	80,43	67,54	T	S
45	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	73,92	370.935.240	65	91.207.119	87,50	24,59	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
49	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	5	8.000.000	5	7.500.000	100,00	93,75	ST	ST
50	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3	8.000.000	2	7.500.000	66,67	93,75	S	ST
51	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi yang ditindaklanjuti	5	362.935.240	5	83.707.119	100,00	23,06	ST	SR
52	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5	362.935.240	5	83.707.119	100,00	23,06	ST	SR
53	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	15	215.647.810	29	130.669.448	100,00	60,59	ST	R
54	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	1	215.647.810	1	130.669.448	100,00	60,59	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
55	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	215.647.810	95	130.669.448	100,00	60,59	ST	R
56	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	49.890.000	1	24.104.177	100,00	48,31	ST	SR
57	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup	75	49.890.000	75	24.104.177	100,00	48,31	ST	SR
58	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	49.890.000	3	24.104.177	100,00	48,31	ST	SR
59	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	71,89	42.395.000	44	19.472.702	60,00	45,93	R	SR
60	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	5	42.395.000	3	19.472.702	60,00	45,93	R	SR
61	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5	42.395.000	3	19.472.702	60,00	45,93	R	SR
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	35,90	3.355.434.060	34	2.495.632.447	94,91	74,38	ST	S
63	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	42	3.355.434.060	40	2.495.632.447	95,13	74,38	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
64	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	459.498.640	1	89.389.588	100,00	19,45	ST	SR
66	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	5630	2.895.935.420	4.828	2.406.242.859	85,45	83,09	T	T
67	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						83,89	53,27	T	R
	Rata-rata Kegiatan						84,50	53,34	T	R
	Rata-rata Sub kegiatan						64,91	44,46	R	SR

2.2.1.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 82,08% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,15% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 58,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 34,99%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 60,20% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 38,71%.

Tabel 2.111: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,40	47.985.717	71	3.199.048	92,47	6,67	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	95	47.985.717	93	3.199.048	97,89	6,67	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	47.985.717	2	3.199.048	100,00	6,67	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.107.196.508	85	4.140.668.439	100,00	81,08	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.549.842.608	1	3.252.304.638	100,00	91,62	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.549.842.608	18	3.252.304.638	75,00	91,62	S	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	389.114.500	65	130.476.387	100,00	33,53	ST	SR
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	51.500.000	12	31.557.800	100,00	61,28	ST	R
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	24.620.000	9	6.371.800	75,00	25,88	S	SR
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	52.000.000	12	18.806.500	100,00	36,17	ST	SR
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	15.000.000	12	10.600.000	100,00	70,67	ST	S
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	39.905.600	12	24.030.600	100,00	60,22	ST	R
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	206.088.900	13	39.109.687	43,33	18,98	SR	SR
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	239.786.400	0	739.326	0,00	0,31	SR	SR
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	239.786.400	0	739.326	0,00	0,31	SR	SR
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	681.338.000	100	596.461.110	100,00	87,54	ST	T
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	41.008.000	12	30.912.500	100,00	75,38	ST	S
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	93.630.000	12	74.626.852	100,00	79,70	ST	T
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	546.700.000	6	490.921.758	50,00	89,80	SR	T
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	247.115.000	4	160.686.978	6,15	65,03	SR	R
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	93.115.000	5	50.129.797	71,43	53,84	S	R
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	25.000.000	3	11.670.000	30,00	46,68	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	129.000.000	2	98.887.181	100,00	76,66	ST	T
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan	86	300.000.000	195	90.427.372	100,00	30,14	ST	SR
34	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	95	300.000.000	292	90.427.372	100,00	30,14	ST	SR
35	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5	300.000.000	20	90.427.372	100,00	30,14	ST	SR
36	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	85	300.000.000	243	209.022.294	100,00	69,67	ST	S
37	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100	300.000.000	231	209.022.294	100,00	69,67	ST	S
38	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6	300.000.000	6	209.022.294	100,00	69,67	ST	S
39	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	75	607.608.630	83	214.548.045	100,00	35,31	ST	SR
40	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	25	607.608.630	23	214.548.045	92,00	35,31	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	11	607.608.630	11	214.548.045	100,00	35,31	ST	SR
42	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Data Profil Kependudukan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						82,08	37,15	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						58,00	34,99	R	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						60,20	38,71	R	SR

2.2.1.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (R) sebesar 48,19% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 93,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,65%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 67,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,55%.

Tabel 2.112: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,50	50.265.940	79	23.058.740	100,00	45,87	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	96,80	50.265.940	100	23.058.740	100,00	45,87	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	50.265.940	3	23.058.740	100,00	45,87	ST	SR
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	8.607.111.240	85	6.738.602.805	100,00	78,29	ST	T
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.182.244.674	1	4.591.314.068	100,00	88,60	ST	T
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	5.182.244.674	27	4.591.314.068	100,00	88,60	ST	T
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	92	73.852.270	99	16.986.939	100,00	23,00	ST	Rp
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	73.852.270	3	16.986.939	100,00	23,00	ST	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	926.735.920	65	456.484.264	100,00	49,26	ST	SR
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	22.049.800	2	15.001.600	100,00	68,04	ST	S
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	14.994.700	1	8.372.300	100,00	55,84	ST	R
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	15.976.000	2	10.875.000	100,00	68,07	ST	S
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	12.000.000	4	11.730.000	100,00	97,75	ST	ST
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	859.231.420	12	408.194.864	100,00	47,51	ST	SR
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	2.484.000	4	2.310.500	100,00	93,02	ST	ST
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	25	484.443.000	50	168.784.000	100,00	34,84	ST	SR
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	168.891.000	6	55.585.000	100,00	32,91	ST	SR
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	315.552.000	7	113.199.000	87,50	35,87	T	SR
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	55	1.783.801.726	60	1.405.540.937	100,00	78,79	ST	T
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	10.991.700	4	8.470.000	100,00	77,06	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12.530.000	3	3.250.500	100,00	25,94	ST	SR
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.760.280.026	12	1.393.820.437	100,00	79,18	ST	T
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	156.033.650	70	99.492.597	100,00	63,76	ST	R
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	108.753.650	4	85.185.150	100,00	78,33	ST	T
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	24.000.000	6	14.307.447	100,00	59,61	ST	R
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	23.280.000	2	0	100,00	0,00	ST	SR
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	75	128.982.400	80	60.727.005	100,00	47,08	ST	SR
38	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	70	128.982.400	70	60.727.005	100,00	47,08	ST	SR
39	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	128.982.400	1	60.727.005	100,00	47,08	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
40	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	35,71	142.719.700	43	87.181.550	100,00	61,09	ST	R
43	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	25	142.719.700	30	87.181.550	100,00	61,09	ST	R
44	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25	67.422.600	30	53.006.550	100,00	78,62	ST	T
45	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	75.297.100	0	34.175.000	0,00	45,39	SR	SR
47	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	36	148.238.840	39	24.406.386	100,00	16,46	ST	SR
48	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina	54	148.238.840	68	24.406.386	100,00	16,46	ST	SR
49	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	54	148.238.840	68	24.406.386	100,00	16,46	ST	SR
50	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	45	961.333.744	50	245.587.101	100,00	25,55	ST	SR
51	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa	70	961.333.744	70	245.587.101	100,00	25,55	ST	SR
52	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
53	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	70	33.349.790	70	0	100,00	0,00	ST	SR
55	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	70	297.437.244	70	121.103.350	100,00	40,72	ST	SR
56	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	125.496.390	70	2.340.000	100,00	1,86	ST	SR
57	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	70	19.855.220	77	8.701.200	100,00	43,82	ST	SR
59	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	70	73.196.400	70	24.431.610	100,00	33,38	ST	SR
60	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	120.146.400	70	52.131.750	100,00	43,39	ST	SR
61	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1	209.000.000	3	10.815.284	100,00	5,17	ST	SR
62	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	77	82.852.300	77	26.063.907	100,00	31,46	ST	SR
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	25	73.887.320	50	48.404.500	100,00	65,51	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
64	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	40	73.887.320	0	48.404.500	0,00	65,51	SR	R
65	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10	73.887.320	10	48.404.500	100,00	65,51	ST	R
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	12	1.729.455.490	14	789.281.379	100,00	45,64	ST	SR
67	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	105	1.729.455.490	120	789.281.379	100,00	45,64	ST	SR
68	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
69	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	159.164.330	1	51.133.707	100,00	32,13	ST	SR
70	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Hukum Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	166.233.600	5	0	100,00	0,00	ST	SR
71	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	292.253.840	10	220.703.245	100,00	75,52	ST	S
72	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	273.558.100	2	115.956.666	100,00	42,39	ST	SR
73	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	92	838.245.620	94	401.487.761	100,00	47,90	ST	SR
	Rata-rata Program						100,00	48,19	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						92,31	49,65	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						67,75	32,55	S	SR

2.2.1.14 Urusan Pemerintah bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 77,33% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 63,03% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 37,60% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 24,15%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 35,29% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,30%.

Tabel 2.113: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	2,49	30.441.652	2	10.797.739	84,74	35,47	T	SR
3	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendididkan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Yang telah dilakukan Penguatan pendidikan Kependudukan Jalur Formal	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
8	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemampaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangga kencana	2	30.441.652	2	10.797.739	100,00	35,47	ST	SR
12	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2	30.441.652	2	10.797.739	100,00	35,47	ST	SR
13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	77,78	218.064.587	73	190.510.136	93,34	87,36	ST	T
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan	25	218.064.587	16	190.510.136	64,00	87,36	ST	T
15	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	77	218.064.587	79	190.510.136	100,00	87,36	ST	T
16	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangka kencana	25	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
17	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Unmeet need	11,85	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UnMeet need	11,85	3.130.227.440	4	2.413.182.549	31,22	77,09	SR	T
21	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktip /MCPR	10339	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
22	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15- 19 tahun	25	50.748.440	30	18.057.317	100,00	35,58	ST	SR
24	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13	50.748.440	13	18.057.317	100,00	35,58	ST	SR
25	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	76,75	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	13	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
28	Pengendalian danPendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KB MKJP	2	3.079.479.000	2.330	2.395.125.232	100,00	77,78	ST	T
29	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	3.079.479.000	4	2.395.125.232	100,00	77,78	ST	T
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	57,80	408.620.620	62	214.098.382	100,00	52,40	ST	R
31	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	75	288.677.920	75	107.748.087	100,00	37,32	ST	SR
32	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	15	288.677.920	17	107.748.087	100,00	37,32	ST	SR
33	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	650	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
34	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPKKS) Aktif	75	119.942.700	75	106.350.295	100,00	88,67	ST	T
37	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	119.942.700	5	106.350.295	100,00	88,67	ST	T
	Rata-rata Program						77,33	63,08	T	R
	Rata-rata Kegiatan						37,60	24,15	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						35,29	21,30	SR	SR

2.2.1.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 86,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,24% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) yaitu sebesar 70,87% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 34,13%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 53,59% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,37%.

Tabel 2.114: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,9	46.427.570	72	5.722.011	91,13	12,32	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	46.427.570	73	5.722.011	73,00	12,32	S	SR
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	46.427.570	3	5.722.011	100,00	12,32	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.236.688.586	100	7.820.510.300	100,00	84,67	ST	T
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.293.177.002	1	3.927.384.734	100,00	91,48	ST	ST
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	4.293.177.002	27	3.927.384.734	90,00	91,48	T	ST
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	869.228.922	98	552.359.337	100,00	63,55	ST	R
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	113.625.792	9	68.953.550	100,00	60,68	ST	R
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	42.000.000	5	25.946.040	50,00	61,78	SR	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	15.000.000	18	13.300.000	100,00	88,67	ST	T
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51	698.603.130	96	444.159.747	100,00	63,58	ST	R
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	760.810.000	25	331.227.000	50,00	43,54	SR	SR
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	82.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	479.500.000	16	203.382.000	100,00	42,42	ST	SR
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	47.410.000	3	4.850.000	100,00	10,23	ST	SR
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	151.700.000	1	122.995.000	100,00	81,08	ST	T
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	3.047.508.512	28	2.815.715.810	40,00	92,39	SR	ST
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	9.995.700	9	9.988.000	3,00	99,92	SR	ST
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	26.630.000	9	11.219.250	90,00	42,13	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.010.882.812	9	2.794.508.560	75,00	92,81	S	ST
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	265.964.150	100	193.823.419	100,00	72,88	ST	S
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	265.964.150	18	193.823.419	100,00	72,88	ST	S
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	68	8.268.712.440	38	4.873.489.802	55,88	58,94	R	R
37	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	60	8.058.357.900	207	4.851.354.902	100,00	60,20	ST	R
38	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	40.000.000	2	19.920.000	100,00	49,80	ST	SR
39	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	175	5.754.439.900	297	3.081.777.032	100,00	53,55	ST	R
40	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	2.263.918.000	149	1.749.657.870	100,00	77,28	ST	T
41	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	1	118.577.240	100	0	100,00	0,00	ST	SR
44	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	118.577.240	1	0	100,00	0,00	ST	SR
45	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum perdesaan	1	0	2	0	100,00	0,00	ST	SR
47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum perdesaan	1	91.777.300	2	22.134.900	100,00	24,12	ST	SR
48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	91.777.300	12	22.134.900	100,00	24,12	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
49	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4	8.781.236.300	0	3.601.716.220	100,00	41,02	ST	SR
51	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	91	8.029.556.500	107	3.547.012.130	100,00	44,17	ST	SR
54	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	4.331.880.000	1	1.105.780.864	100,00	25,53	ST	SR
55	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	3.697.676.500	3	2.441.231.266	100,00	66,02	ST	S
56	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	0	9	0	75,00	0,00	S	SR
57	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	1	751.679.800	1	54.704.090	100,00	7,28	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
58	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1	751.679.800	7	54.704.090	100,00	7,28	ST	SR
	Rata-rata Program						86,75	49,24	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						70,87	34,13	S	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						53,59	30,37	R	SR

2.2.1.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,14% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 64,41% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 90,91% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 55,11%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 69,09% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,85%.

Tabel 2. 115: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,30	18.753.242	75	1.391.481	92,56	7,42	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	18.753.242	100	1.391.481	100,00	7,42	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	18.753.242	2	1.391.481	100,00	7,42	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.345.453.420	100	4.415.941.461	100,00	69,59	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.608.757.130	1	2.993.144.179	100,00	82,94	ST	T
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.608.757.130	25	2.993.144.179	96,15	82,94	ST	T
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	96	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	77	568.868.758	75	300.677.981	97,40	52,86	ST	R
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	43.080.200	6	29.269.750	100,00	67,94	ST	S
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	50.080.400	64	29.774.400	100,00	59,45	ST	R
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	58000	37.016.900	19.879	24.148.850	34,27	65,24	SR	R
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	438.691.258	86	217.484.981	100,00	49,58	ST	R
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	30	1.048.123.800	58	499.268.750	100,00	47,63	ST	R
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	455.923.800	120	342.918.750	100,00	75,21	ST	S
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	592.200.000	1	156.350.000	20,00	26,40	SR	SR
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	82	774.707.000	14	574.170.971	17,07	74,11	ST	S
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	46.717.000	650	31.194.750	32,50	66,77	SR	S
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	46.190.000	9	21.785.310	100,00	47,16	ST	SR
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	681.800.000	29	521.190.911	100,00	76,44	ST	T
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	67	344.996.732	50	48.679.580	74,63	14,11	S	SR
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	116.696.732	2	44.759.580	100,00	38,36	ST	SR
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	21.500.000	3	3.920.000	100,00	18,23	ST	SR
29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	206.800.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	74,77	12.444.258.100	60	8.095.850.000	79,86	65,06	T	R
32	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	42744	12.444.258.100	35.268	8.095.850.000	82,51	65,06	T	R
33	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	136.126.000	30	65.419.770	50,00	48,06	SR	SR
34	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1	29.549.000	0	11.624.800	0,00	39,34	SR	SR
35	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik Komunikasi	400	7.700.347.100	294	5.579.035.626	73,50	72,45	S	S
36	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	4.578.236.000	8	2.439.769.804	100,00	53,29	ST	R
37	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	21	3.898.199.752	75	736.142.783	100,00	18,88	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
38	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web	55	270.989.572	100	68.979.590	100,00	25,45	ST	SR
39	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	270.989.572	3	68.979.590	100,00	25,45	ST	SR
40	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	165	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO	72,22	3.322.594.400	100	431.427.040	100,00	12,98	ST	SR
42	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9	3.322.594.400	6	431.427.040	66,67	12,98	R	SR
43	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	63	304.615.780	50	235.736.153	79,37	77,39	T	T
44	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	46.470.000	1	23.272.412	100,00	50,08	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
46	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	12.799.900	2	1.205.900	40,00	9,42	SR	SR
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	245.345.880	1	211.257.841	100,00	86,11	ST	T
	Rata-rata Program						93,11	40,24	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						77,36	41,81	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						55,10	33,70	R	SR

2.2.1.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja program yaitu Sangat Rendah (SR) sebesar 38,69% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,35% dan kinerja Kegiatan yaitu Sangat Rendah (SR) sebesar 41,26% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,35%. Sedangkan kinerja Sub Kegiatan Rendah (R) sebesar 62,50% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,33%.

Tabel 2. 116: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	15,63	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan asset	10,84	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
6	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	29,51	104.604.000	67	100.233.000	100,00	95,82	ST	ST
7	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	2	104.604.000	10	100.233.000	100,00	95,82	ST	ST
8	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10	104.604.000	24	100.233.000	100,00	95,82	ST	ST
9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	0	364.740.000	58	309.358.153	0,00	84,82	SR	T
10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	20	364.740.000	53	309.358.153	100,00	84,82	ST	T
11	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	364.740.000	140	309.358.153	100,00	84,82	ST	T
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,88	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelambagaan dan usaha	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
14	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	5,68	390.324.000	11	454.509.746	100,00	100,00	ST	ST
16	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	3094	390.324.000	4	454.509.746	0,12	100,00	SR	ST
17	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2	367.680.000	38	222.333.948	100,00	60,47	ST	R
19	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1	13.824.000	6.964	9.841.850	100,00	71,19	ST	S
20	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	48,76	953.336.000	16	719.544.900	32,12	75,48	SR	S
21	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	276	953.336.000	131	719.544.900	47,46	75,48	SR	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
22	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	3	617.036.000	45	359.772.450	100,00	58,31	ST	R
	Rata-rata Program						38,69	59,35	SR	R
	Rata-rata Kegiatan						41,26	59,35	SR	R
	Rata-rata Sub kegiatan						62,5	46,33	R	SR

2.2.1.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 85,71% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 45,31%. Sedangkan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 75,40% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,43%. Sedangkan kinerja Sub Kegiatan Rendah (R) sebesar 55,71% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,37%.

Tabel 2. 117: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,00	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	10.332.700.039	100	7.238.766.562	100,00	70,06	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.735.767.429	1	5.117.337.595	100,00	89,22	ST	T
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	5.735.767.429	34	5.117.337.595	100,00	89,22	ST	T
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	92	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	92	400.000	100	0	100,00	0,00	ST	SR
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	400.000	1	0	100,00	0,00	SR	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	69	498.540.506	105	256.838.713	100,00	51,52	ST	R
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	53.120.000	1	30.882.000	100,00	58,14	ST	R
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	79.969.200	1	46.212.350	100,00	57,79	ST	R
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	37.651.306	2	30.296.600	100,00	80,47	ST	T
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	327.800.000	30	149.447.763	100,00	45,59	ST	SR
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	2.131.676.470	90	236.889.748	100,00	11,11	ST	SR
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	779.276.470	108	37.959.748	100,00	4,87	ST	SR
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1.352.400.000	127	198.930.000	100,00	14,71	ST	SR
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	678.817.634	100	582.368.793	100,00	85,79	ST	T
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	51.584.358	12	34.297.500	100,00	66,49	ST	S
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	86.757.300	3	58.203.739	100,00	67,09	ST	S
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	540.475.976	1	489.867.554	100,00	90,64	ST	T
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	69	1.287.498.000	87	1.045.331.713	100,00	81,19	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	22.000.000	5	2.690.000	100,00	12,23	ST	SR
35	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.265.498.000	1	1.042.641.713	100,00	82,39	ST	T
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	12,10	39.212.700	23	10.553.899	100,00	26,91	ST	SR
38	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan	40	39.212.700	71	10.553.899	100,00	26,91	ST	SR
42	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	39.212.700	1	10.553.899	100,00	26,91	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
43	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	15,22	100.145.370	209	40.730.989	100,00	40,67	ST	SR
44	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	53	100.145.370	234	40.730.989	100,00	40,67	ST	SR
45	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	100.145.370	1	40.730.989	50,00	40,67	SR	SR
46	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,47	213.539.500	4	115.030.086	100,00	53,87	ST	SR
47	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	1,8	213.539.500	1	115.030.086	55,56	53,87	R	R
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	213.539.500	3.923	115.030.086	100,00	53,87	ST	R
50	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	125	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
51	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	100	618.506.000	995	448.223.400	100,00	72,47	ST	S
52	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12	618.506.000	12	448.223.400	100,00	72,47	ST	S
53	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	53	92.700.000	195	61.027.400	100,00	65,83	ST	R
54	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	53	340.405.000	302	228.155.000	100,00	67,02	ST	S
55	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	53	185.401.000	120	159.041.000	100,00	85,78	ST	T
56	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	100	58.301.732	100	31.015.278	100,00	53,20	ST	R
57	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	12	58.301.732	12	31.015.278	100,00	53,20	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
58	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	58.301.732	12	31.015.278	100,00	53,20	ST	R
	Rata-rata Program						85,71	45,31	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						75,40	40,43	S	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						55,71	30,37	R	SR

2.2.1.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

UrusanPemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 58,05% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,63% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 69,11% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 47,97%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 49,20% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 34,40%.

Tabel 2.118: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64,50	126.308.453	112	24.872.081	100,00	19,69	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	126.308.453	132	24.872.081	100,00	19,69	ST	SR
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	126.308.453	3	24.872.081	100,00	19,69	ST	SR
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.610.636.927	75	5.822.949.704	88,58	88,08	T	T
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.128.079.333	1	4.732.778.456	100,00	92,29	ST	ST
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	5.128.079.333	32	4.732.778.456	100,00	92,29	ST	ST
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	63	329.646.826	92	161.490.051	100,00	48,99	ST	SR
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	0	0	0	0,00	0,00	R	SR
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	20.107.416	4	15.348.216	40,00	76,33	SR	T
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	527	24.280.000	333	7.828.500	63,19	32,24	R	SR
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25000	9.278.300	25	4.600.000	0,10	49,58	SR	SR
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	13.765.200	9	6.730.900	75,00	48,90	S	SR
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	257.383.910	62	122.537.635	100,00	47,61	ST	SR
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	4.832.000	40	4.444.800	100,00	91,99	ST	ST
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	2	226.216.528	3	213.232.528	100,00	94,26	ST	ST
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	196.501.528	1	195.517.528	50,00	99,50	SR	ST
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	29.715.000	3	17.715.000	60,00	59,62	R	R
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	818.877.750	75	648.849.973	93,75	79,24	ST	T
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525	21.849.750	1.200	20.113.750	100,00	92,05	ST	ST
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	3.630.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	793.398.000	38	628.736.223	100,00	79,25	ST	T
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	107.816.490	70	66.598.696	93,33	61,77	ST	R
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	96.979.490	7	61.163.696	100,00	63,07	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	10.837.000	4	5.435.000	100,00	50,15	ST	SR
32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	70	538.140.019	14	310.239.424	20,00	57,65	SR	R
33	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1	0	100	0	100,00	0,00	ST	SR
34	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1	206.563.600	100	179.417.624	100,00	86,86	ST	T
35	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	70	0	100	0	100,00	0,00	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10	206.563.600	25	179.417.624	100,00	86,86	ST	T
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	80	331.576.419	100	130.821.800	100,00	39,45	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
42	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	11	331.576.419	11	130.821.800	100,00	39,45	ST	SR
43	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	50	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	70	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	88	2.485.326.604	46	1.231.981.588	52,63	49,57	R	SR
47	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	2	2.096.197.800	2	953.345.907	100,00	45,48	ST	SR
48	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	708.547.300	2	584.495.600	100,00	82,49	ST	T
49	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	7	1.387.650.500	154	368.850.307	100,00	26,58	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
51	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	78	123.799.800	21	46.224.400	26,92	37,34	SR	SR
52	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	4	123.799.800	3	46.224.400	75,00	37,34	S	SR
53	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	7	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	163.545.004	50	131.744.681	66,67	80,56	S	T
58	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	163.545.004	1	131.744.681	100,00	80,56	ST	T
59	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	14	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	101.784.000	0	100.666.600	0,00	98,90	SR	ST
61	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	101.784.000	1	100.666.600	100,00	98,90	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
62	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	37,44	3.750.838.700	38	328.969.584	100,00	8,77	ST	SR
65	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	158	3.750.838.700	100	328.969.584	63,29	8,77	R	SR
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	3.750.838.700	7	328.969.584	100,00	8,77	ST	SR
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	80	559.738.950	50	391.456.071	62,50	69,94	R	S
68	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	559.738.950	70	391.456.071	100,00	69,94	ST	S
69	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	62.951.550	1	52.682.650	100,00	83,69	ST	T
70	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
71	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	237.983.400	1	141.884.500	100,00	59,62	ST	R
72	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	258.804.000	1	196.888.921	100,00	76,08	ST	T
73	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						58,05	40,63	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						69,11	47,97	S	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						49,20	34,40	SR	SR

2.2.1.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Sangat rendah (SR) sebesar 31,51% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 31,51% Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 31,51%.

Tabel 2.119: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	25	57.155.380	90	79.101.414	100,00	33,51	ST	SR
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	18	57.155.380	276	79.101.414	100,00	33,51	ST	SR
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	57.155.380	2	60.153.400	100,00	33,51	ST	SR
	Rata-rata Program						100	33,51	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						100	33,51	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						100	33,51	ST	SR

2.2.1.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2023 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 47,82% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 47,82%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (R) sebesar 55,79%.

Tabel 2. 120: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	25	57.155.380	100	19.151.867	100,00	47,82	ST	SR
3	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	18	57.155.380	47	19.151.867	100,00	47,82	ST	SR
4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	57.155.380	1	19.151.867	100,00	55,79	ST	R
	Rata-rata Program						100	47,82	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						100	47,82	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						100	55,79	ST	R

2.2.1.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 77,73% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,60% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 57,26% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 36,83%. Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 66,82% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,73%.

Tabel 2.121: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	14,44	742.795.330	25	808.693.694	100,00	100,00	ST	ST
5	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang di kelola	65	106.837.330	88	54.565.694	100,00	51,07	ST	R
6	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	106.837.330	1	54.565.694	50,00	51,07	SR	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	2	635.958.000	12	754.128.000	100,00	100,00	ST	ST
8	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	585.958.000	12	377.064.000	100,00	64,35	ST	R
9	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	50.000.000	12	377.064.000	100,00	100,00	ST	ST
10	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang D isediakan / D ifasilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	31,13	136.364.000	34	4.557.000	100,00	3,34	ST	SR
13	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang dibina	2	136.364.000	3	4.557.000	100,00	3,34	ST	SR
14	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	6.364.000	2	2.278.500	100,00	35,80	ST	SR
15	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	130.000.000	2	2.278.500	100,00	1,75	ST	SR
16	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
17	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	98,82	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola	502	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	20	841.193.270	100	624.099.521	100,00	74,19	ST	S
23	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	1	841.193.270	1	624.099.521	100,00	74,19	ST	S
24	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	841.193.270	8	624.099.521	100,00	74,19	ST	S
	Rata-rata Program					77,73	37,60	T	SR	
	Rata-rata Kegiatan					57,26	36,83	R	SR	
	Rata-rata Sub Kegiatan					66,82	40,73	S	SR	

2.2.1.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 71,18% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 50,81% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 75,19% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 53,90%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 53,97% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,00%.

Tabel 2.122: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	83,50	30.181.207	72	9.841.350	86,71	32,61	T	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	30.181.207	80	9.841.350	94,12	32,61	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	30.181.207	1	9.841.350	50,00	32,61	SR	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.680.466.944	85	5.019.822.732	100,00	88,37	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.085.317.434	1	3.792.015.411	100,00	92,82	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	4.085.317.434	30	3.792.015.411	100,00	92,82	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	71.474.924	30	6.640.070	31,58	9,29	SR	SR
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	71.474.924	13	6.640.070	54,17	9,29	R	SR
12	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	270.046.000	65	188.679.122	86,67	69,87	T	S
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	34.398.000	3	21.597.360	100,00	62,79	ST	R
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3.500.000	1	3.500.000	20,00	100,00	SR	ST
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1363	14.407.000	659	13.776.000	48,35	95,62	SR	ST
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	11.510.000	3	10.967.750	100,00	95,29	ST	ST
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	42.000.000	12	32.777.000	100,00	78,04	ST	T
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	164.231.000	90	106.061.012	100,00	64,58	ST	R
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	75	30.100.000	75	5.100.000	100,00	16,94	T	SR
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	30.100.000	1	5.100.000	16,67	16,94	SR	SR
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	75	146.394.000	75	140.840.330	100,00	96,21	ST	ST
26	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	146.394.000	12	140.840.330	100,00	96,21	ST	ST
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	157.562.764	80	113.000.000	100,00	71,72	ST	S
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	132.500.000	2	105.500.000	100,00	79,62	ST	T
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	7.500.000	1	7.500.000	25,00	100,00	SR	ST
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	17.562.764	1	0	100,00	0,00	ST	SR
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	753.466.822	80	679.421.049	100,00	90,17	ST	T
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	56.667.282	12	46.100.500	100,00	81,35	T	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	75.000.000	2	50.338.173	100,00	67,12	ST	T
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	621.799.540	6	582.982.376	100,00	93,76	ST	ST
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	7	3.314.000	6	2.050.000	85,71	61,86	T	R
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	3.314.000	6	2.050.000	85,71	61,86	T	R
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	162.791.000	75	92.076.750	100,00	56,56	ST	R
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	91.861.000	5	71.044.750	100,00	77,34	ST	T
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115	25.930.000	35	21.032.000	30,43	81,11	SR	T
42	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	45.000.000	8	0	100,00	0,00	ST	SR
43	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	76	5.140.443.765	74	4.227.786.390	98,00	82,25	ST	T
44	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	22,000	5.009.154.760	10.419	4.130.570.020	100,00	82,46	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
45	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	55	4.956.397.760	7	4.128.382.020	12,73	83,29	SR	T
47	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1	52.757.000	30	2.188.000	100,00	4,15	ST	SR
48	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	11	131.289.005	6	97.216.370	54,55	74,05	R	S
51	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
52	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8	131.289.005	8	97.216.370	100,00	74,05	ST	S
54	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						71,18	50,81	S	SR
	Rata-rata Kegiatan						75,19	53,90	S	R
	Rata-rata Sub kegiatan						53,97	43,00	R	SR

2.2.1.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 50,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,43% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 10,87% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,97%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 10,47% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 13,95%.

Tabel 2. 123: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	70	345.784.000	83	258.867.777	100,00	74,86	ST	S
3	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	46	345.784.000	25	258.867.777	54,35	74,86	R	S
4	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	46	264.014.000	7	193.283.777	15,22	73,21	SR	S
5	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	138	81.770.000	5.077	65.584.000	100,00	80,21	ST	T
6	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	23	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	123	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	46	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	250	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah OPD yang melakukan Pemusnahan Arsip	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	15	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
15	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	46	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	46	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	46	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang ditemukan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						50,00	37,43	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						10,87	14,97	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						10,47	13,95	SR	SR

2.2.1.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 83,33% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,73% dan kinerja Kegiatan rendah (R) sebesar 58,82% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 45,37%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 55,44% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,14%.

Tabel 2.124: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan PErikanan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.409.150.396	100	8.200.391.693	100,00	87,15	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6.511.639.508	1	6.129.551.836	100,00	94,13	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	6.511.639.508	45	6.129.551.836	93,75	94,13	ST	SR
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	86	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	961.754.000	100	550.100.469	100,00	57,20	ST	R
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	114.100.000	2	96.160.165	100,00	84,28	ST	T
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	55.000.000	2	49.923.476	100,00	90,77	ST	ST
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	25.200.000	10	12.000.000	100,00	47,62	ST	SR
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	767.454.000	230	392.016.828	100,00	51,08	ST	R
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	78	560.193.000	95	416.700.250	100,00	74,39	ST	S
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	68.000.000	18	62.240.000	100,00	91,53	ST	ST
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	472.193.000	47	354.460.250	100,00	75,07	ST	S
22	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	20.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	77	941.747.888	100	883.829.027	100,00	93,85	ST	ST
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	54.529.000	12	46.820.500	100,00	85,86	ST	T
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24.389.500	12	1.606.000	100,00	6,58	ST	SR
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38	862.829.388	38	835.402.527	100,00	96,82	ST	ST
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	77	433.816.000	134	220.210.111	100,00	50,76	ST	SR
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	213.816.000	90	181.658.111	100,00	84,96	ST	T
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	30.000.000	35	18.665.000	35,71	62,22	SR	R
30	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	190.000.000	3	19.887.000	100,00	10,47	ST	SR
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,51	3.230.768.100	1	3.024.396.633	100,00	93,61	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
32	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	135170,96	3.065.669.000	136.702	2.960.608.171	100,00	96,57	ST	ST
33	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	3.065.669.000	5	2.960.608.171	100,00	96,57	ST	ST
34	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	18,67	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	0	165.099.100	39	63.788.462	0,00	38,64	SR	SR
38	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	165.099.100	1	63.788.462	0,00	38,64	SR	SR
39	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33	2.881.144.400	3	2.226.488.187	100,00	77,28	ST	T
40	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	14	249.187.900	50	57.234.750	100,00	22,97	ST	SR
41	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
42	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	249.187.900	50	57.234.750	100,00	22,97	ST	SR
43	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	25000	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4160,68	2.631.956.500	4.301	2.169.253.437	100,00	82,42	ST	T
46	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	267.230.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
47	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2.364.726.500	2	2.169.253.437	100,00	91,73	ST	ST
49	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2,00	702.176.500	3	650.993.264	100,00	92,71	ST	ST
50	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
51	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
52	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	3,44	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	6	702.176.500	6	650.993.264	100,00	92,71	ST	ST
55	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	702.176.500	2	650.993.264	100,00	92,71	ST	ST
56	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33	306.525.000	3	207.275.452	100,00	67,62	ST	S
59	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	25000	306.525.000	36.523	207.275.452	100,00	67,62	ST	S
60	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	306.525.000	3	207.275.452	100,00	67,62	ST	S
	Rata-rata Program						83,33	69,73	T	S
	Rata-rata Kegiatan						58,82	45,37	R	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						55,44	39,14	R	SR

2.2.1.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 36,06% dengan realisasi anggaran Tinggi (T) sebesar 34,41% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 33,98% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 31,38%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 30,56% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,58%.

Tabel 2. 125: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,70	35.401.470	77	32.452.700	96,49	91,67	ST	ST
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	81	35.401.470	73	32.452.700	90,12	91,67	ST	ST
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	35.401.470	3	32.452.700	100,00	91,67	ST	ST
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.569.278.948	106	5.990.049.943	100,00	79,14	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.312.574.738	1	4.864.730.384	100,00	91,57	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	5.312.574.738	32	4.864.730.384	100,00	91,57	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	57.000.000	0	52.725.000	0,00	92,50	SR	ST
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	57.000.000	1	52.725.000	100,00	92,50	ST	ST
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	955.178.210	128	522.265.896	100,00	54,68	ST	R
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	38.000.000	3	30.044.000	100,00	79,06	ST	T
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	36.414.750	1	25.047.350	50,00	68,78	SR	R
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	93.595.670	1	64.916.000	100,00	69,36	ST	S
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	40.012.000	1	28.413.800	50,00	71,01	SR	S
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	16.000.000	25	9.900.000	100,00	61,88	ST	R
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	704.455.790	194	363.944.746	100,00	51,66	ST	R
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	26.700.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	410.600.000	100	5.500.000	100,00	1,34	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	410.600.000	2	5.500.000	100,00	1,34	ST	SR
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	65.630.000	108	26.340.860	100,00	40,14	ST	SR
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	12.000.000	7	6.990.000	70,00	58,25	S	R
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	53.630.000	6	19.350.860	100,00	36,08	ST	SR
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	563.508.000	40	400.448.228	50,00	71,06	SR	S
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	563.508.000	6	400.448.228	50,00	71,06	SR	S
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	204.788.000	186	118.039.575	100,00	57,64	ST	R
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	116.988.000	12	69.317.075	100,00	59,25	ST	R
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	87.800.000	1	48.722.500	50,00	55,49	SR	R
32	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	5,18	4.348.306.810	18	1.129.453.173	100,00	25,97	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
33	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5	1.522.682.920	2	165.908.572	40,00	10,90	SR	SR
34	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	5	1.522.682.920	1	165.908.572	20,00	10,90	SR	SR
36	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	5	2.825.623.890	1	963.544.601	20,00	34,10	SR	SR
41	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	2.825.623.890	1	963.544.601	100,00	34,10	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
42	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	100	0	400	0	100,00	0,00	ST	SR
48	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	3	0	1	0	33,33	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
49	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5	0	15	0	100,00	0,00	ST	SR
50	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	70	3.193.862.510	1	1.600.012.414	0,90	50,10	SR	SR
51	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	1	3.193.862.510	1	1.600.012.414	100,00	50,10	ST	SR
52	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1.142.258.510	4	89.880.000	100,00	7,87	ST	SR
53	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2.051.604.000	8	1.510.132.414	100,00	73,61	ST	S
56	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan Intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
57	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Kreatif	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi yang diembangkan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
61	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
67	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
68	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	60	1.571.320.000	100	876.935.655	100,00	55,81	ST	R
70	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	94	1.571.320.000	200	876.935.655	100,00	55,81	ST	R
71	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	334.961.000	2	203.281.806	100,00	60,69	ST	R
72	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
73	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	30	689.499.320	200	521.854.128	100,00	75,69	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
74	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30	546.859.680	120	151.799.721	100,00	27,76	ST	SR
75	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
76	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
77	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan	25	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
78	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
80	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						36,06	34,41	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						33,98	31,38	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						30,56	23,58	SR	SR

2.2.1.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 55,56% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,74% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 31,96% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 19,99%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (SR) sebesar 40,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 27,60%.

Tabel 2. 126: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1,25	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan	1,53	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG H ewan / T anaman	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	1,5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	1,53	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	0,75	17.847.500	1	15.804.000	100,00	88,55	ST	T
9	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	1,48	17.847.500	0	15.804.000	1,35	88,55	SR	T
10	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30	17.847.500	0	15.804.000	0,00	88,55	SR	T
11	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase lahan hijauan pakan ternak yang dikelola	3,3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Lain	Lain							SR	SR
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	63,8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	41	857.966.720	42	157.318.617	100,00	18,34	ST	SR
19	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	1	100.000.000	1	48.702.000	100,00	48,70	ST	SR
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	100.000.000	1	48.702.000	100,00	48,70	ST	SR
21	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	2562,4	338.023.300	2.562	84.510.817	100,00	25,00	ST	SR
22	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	338.023.300	1	84.510.817	100,00	25,00	ST	SR
23	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan perkebunan	8664,5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
28	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	4	419.943.420	4	24.105.800	100,00	5,74	ST	SR
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	419.943.420	1	24.105.800	100,00	5,74	ST	SR
30	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,48	230.838.600	-0.53	124.704.548	100	54,02	SR	R
31	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	15	230.838.600	41	124.704.548	100,00	54,02	ST	R
32	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1	198.588.600	1	62.352.274	100,00	31,40	ST	SR
33	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1	32.250.000	1	62.352.274	100,00	100,00	ST	ST
34	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	6,5	807.701.590	100	269.613.368	100,00	33,38	ST	SR
35	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	807.701.590	40	269.613.368	100,00	33,38	ST	SR
36	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40	623.801.590	40	134.806.684	100,00	21,61	ST	SR
37	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40	183.900.000	40	134.806.684	100,00	73,30	ST	S
38	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2,0	111.107.150	2	71.537.153	100,00	64,39	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
39	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	29,25	111.107.150	31	71.537.153	100,00	64,39	ST	R
42	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	111.107.150	2	71.537.153	100,00	64,39	ST	R
43	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	1,3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/Dibangun	6,66	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana BPP	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						55,56	28,74	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						31,96	19,99	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						40,00	27,60	SR	SR

2.2.1.28 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 82,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 50,17% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 78,94% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,17% Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 58,83% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,47%.

Tabel 2. 127: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	2,30	39.050.000	3	27.183.372	100,00	69,61	ST	S
4	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	13,32	11.000.000	74	9.471.466	100,00	86,10	ST	T
5	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	11.000.000	3	9.471.466	100,00	86,10	ST	T
6	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	81	24.000.000	27	16.878.151	33,47	70,33	SR	S
7	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	24.000.000	1	16.878.151	100,00	70,33	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
8	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	3	4.050.000	230	833.755	100,00	20,59	ST	SR
11	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2	4.050.000	1	833.755	50,00	20,59	SR	SR
12	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20,45	758.150.000	41	26.772.951	100,00	3,53	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	1	758.150.000	1	26.772.951	100,00	3,53	ST	SR
15	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	758.150.000	1	26.772.951	100,00	3,53	ST	SR
16	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,06	281.800.000	0	150.061.544	9,22	53,25	SR	R
17	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	1	91.000.000	1	47.671.798	100,00	52,39	ST	R
18	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	91.000.000	1	47.671.798	100,00	52,39	ST	R
19	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	1	173.025.000	1	100.772.450	100,00	58,24	ST	R
20	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	110.025.000	6	86.386.500	50,00	78,52	SR	T
21	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	63.000.000	1	14.385.950	100,00	22,83	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
22	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	47	17.775.000	93	1.617.296	100,00	9,10	ST	SR
23	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	17.775.000	1	1.617.296	100,00	9,10	ST	SR
25	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,71	287.525.000	5	198.885.522	100,00	69,17	ST	S
26	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2	287.525.000	6	198.885.522	100,00	69,17	ST	S
27	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1	287.525.000	1	198.885.522	100,00	69,17	ST	S
28	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	61	75.250.000	71	35.451.815	100,00	47,11	ST	SR
30	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2	75.250.000	2	35.451.815	100,00	47,11	ST	SR
31	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
32	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	1	75.250.000	1	35.451.815	100,00	47,11	ST	SR
33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	68,42	278.630.000	58	162.546.607	84,61	58,34	T	R
34	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	24	278.630.000	8	162.546.607	34,92	58,34	SR	R
35	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	255	278.630.000	408	162.546.607	100,00	58,34	ST	R
36	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						82,31	50,17	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						78,94	43,17	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						58,82	30,47	R	SR

2.2.1.29 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 85,56% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 54,55% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 74,91% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,68% Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 63,79% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,9%.

Tabel 2. 128: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	5.500.000	85	5.328.966	100,00	96,89	ST	ST
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5.500.000	3	5.328.966	100,00	96,89	ST	ST
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.650.851.010	85	6.248.537.674	100,00	81,67	ST	T
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.701.746.010	1	5.278.136.871	100,00	92,57	ST	ST
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	5.701.746.010	31	5.278.136.871	100,00	92,57	ST	ST
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	81.500.000	75	57.649.450	100,00	70,74	ST	S
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	81.500.000	1	57.649.450	100,00	70,74	ST	S
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	622.100.000	50	266.811.659	66,67	42,89	S	SR
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15.000.000	1	7.579.000	100,00	50,53	ST	R
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12.000.000	1	7.746.000	100,00	64,55	ST	R
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	66.000.000	1	25.040.200	100,00	37,94	ST	SR
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	10.000.000	1	8.100.000	100,00	81,00	ST	T
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	519.100.000	60	218.346.459	100,00	42,06	ST	SR
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	57.885.000	171	18.469.448	100,00	31,91	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	57.885.000	3	18.469.448	100,00	31,91	ST	SR
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75	304.800.000	43	59.530.000	57,15	19,53	R	SR
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	279.300.000	3	59.530.000	100,00	21,31	ST	SR
24	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	25.500.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	614.655.000	80	491.346.456	100,00	79,94	ST	T
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	53.975.000	1	32.505.000	100,00	60,22	ST	R
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	10.630.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	550.050.000	6	458.841.456	50,00	83,42	SR	T
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	268.165.000	75	76.593.790	100,00	28,56	ST	SR
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	129.125.000	5	61.600.790	100,00	47,71	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	25.000.000	14	14.993.000	100,00	59,97	ST	R
32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	114.040.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,61	2.223.760.000	5	1.171.307.614	100,00	52,67	ST	R
35	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda	53,00	2.223.760.000	50	1.171.307.614	94,34	52,67	SR	R
36	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	87.500.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	2.136.260.000	1	1.171.307.614	100,00	54,83	ST	R
39	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
40	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	57	68.375.000	43	10.447.300	75,88	15,28	S	SR
41	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin yang dipantau dan dianalis dalam laporan hasil pemantauan	15	68.375.000	58	10.447.300	100,00	15,28	ST	SR
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
43	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	68.375.000	1	10.447.300	0,00	15,28	SR	SR
44	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	26,50	23.090.000	12	9.324.180	46,60	40,38	SR	SR
45	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKIdanIPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	1	23.090.000	1	9.324.180	100,00	40,38	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
46	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	23.090.000	1	9.324.180	100,00	40,38	ST	SR
47	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						85,56	54,55	T	R
	Rata-rata Kegiatan						74,91	37,68	S	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						63,79	32,9	R	SR

2.2.1.30 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,70% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,70% Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,70%.

Tabel 2.129: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	100	41.230.420	100	26.956.678	100,00	65,38	ST	R
4	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	41.230.420	1	26.956.678	100,00	65,38	ST	R
5	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	41.230.420	1	26.956.678	100,00	65,38	ST	R
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100	30.168.600	100	17.501.040	100,00	58,01	ST	R
7	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	2	30.168.600	2	17.501.040	100,00	58,01	ST	R
8	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	30.168.600	9	17.501.040	100,00	58,01	ST	R
	Rata-rata Program						100,00	61,70	ST	R
	Rata-rata Kegiatan						100,00	61,70	ST	R
	Rata-rata Sub kegiatan						100,00	61,70	ST	R

2.2.1.31 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 71,44% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 63,85% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 86,38% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 66,38%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sedang (s) sebesar 73,00% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,52%.

Tabel 2. 130: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	SEKRETARIAT DAERAH									
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	100	937.424.646	2	627.975.803	2,09	66,99	SR	R
4	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	937.424.646	43	627.975.803	47,78	66,99	SR	R
5	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	325.126.500	1	268.989.661	100,00	82,73	SR	R
6	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	384.523.046	1	154.517.660	100,00	40,18	ST	SR
7	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	227.775.100	1	204.468.482	100,00	89,77	ST	S
8	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
9	SEKRETARIAT DAERAH									
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	81	990.977.831	68	489.856.845	84,22	49,43	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	72	990.977.831	97	489.856.845	100,00	49,43	SR	SR
12	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520	550.571.520	576	217.751.935	100,00	39,55	T	SR
13	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	328.038.950	0	203.756.910	0,00	62,11	SR	SR
14	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	425	112.367.361	601	68.348.000	100,00	60,83	ST	R
15	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
16	SEKRETARIAT DAERAH									
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	65	1.175.066.362	100	750.371.790	100,00	63,86	ST	R
18	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	748.059.362	100	525.505.867	100,00	70,25	SR	R
19	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	348.253.780	100	220.999.086	100,00	63,46	ST	SR
20	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	271.800.722	100	193.784.458	100,00	71,30	ST	S
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	128.004.860	100	110.722.323	100,00	86,50	ST	T
22	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	100	427.007.000	100	224.865.923	100,00	52,66	SR	SR
23	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	251.845.960	100	175.008.194	100,00	69,49	R	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
24	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	175.161.040	100	49.857.729	100,00	28,46	SR	SR
25	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
26	SEKRETARIAT DAERAH									
27	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	3,13	480.264.470	0	312.308.523	8,95	65,03	SR	R
28	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	55	327.518.800	30	245.356.729	54,55	74,91	R	S
29	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	129.704.600	1	66.456.900	100,00	51,24	ST	SR
30	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	197.814.200	2	178.899.829	100,00	90,44	SR	T
31	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	55	152.745.670	20	66.951.794	36,36	43,83	SR	SR
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	152.745.670	1	66.951.794	100,00	43,83	ST	SR
33	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
34	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,52	230.184.320	63	105.098.538	80,23	45,66	S	SR
36	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	230.184.320	84	105.098.538	98,82	45,66	ST	SR
37	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	230.184.320	1	105.098.538	100,00	45,66	ST	SR
38	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	1.005.413.000	37	508.101.109	40,60	50,54	SR	R
41	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	1.005.413.000	58	508.101.109	64,77	50,54	SR	R
42	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	504.069.240	1	309.683.821	100,00	61,44	SR	R
43	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	501.343.760	12	198.417.288	100,00	39,58	S	SR
44	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
45	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
46	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3	1.860.576.420	188	1.422.366.000	100,00	76,45	ST	S
47	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	1.860.576.420	100	1.422.366.000	100,00	76,45	SR	S
48	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1.860.576.420	1	1.422.366.000	100,00	76,45	SR	S
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3	10.067.194.255	3	8.712.353.723	100,00	86,54	ST	T
50	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	10.067.194.255	100	8.712.353.723	100,00	86,54	ST	T
51	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	10.067.194.255	2	8.712.353.723	40,00	86,54	SR	T
52	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
53	SEKRETARIAT DAERAH									
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	54.306.165.798	35	43.443.537.770	41,18	80,00	SR	T
55	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	22.427.518.036	30	20.730.780.949	100,00	92,43	ST	ST
56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	22.427.518.036	139	20.730.780.949	92,67	92,43	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
57	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	45	27.715.000	40	22.796.590	88,89	82,25	T	T
58	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	27.715.000	4	22.796.590	66,67	82,25	S	T
59	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	5.726.369.128	60	4.486.835.626	80,00	78,35	T	S
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	455.000.000	6	239.481.100	50,00	52,63	R	R
61	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	200.331.534	1	164.321.200	20,00	82,02	SR	T
62	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	880.000.000	1	814.140.100	8,33	92,52	SR	S
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	328.956.714	1	236.543.250	7,14	71,91	SR	S
64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	3.862.080.880	131	3.032.349.976	100,00	78,52	ST	S
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	625.954.000	83	440.220.674	100,00	70,33	R	SR
66	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	625.954.000	3	440.220.674	100,00	70,33	ST	SR
67	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	6.231.899.828	100	5.685.308.353	100,00	91,23	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
68	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	62.917.348	6	49.475.000	50,00	78,63	SR	T
69	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.975.746.000	6	1.555.962.009	50,00	78,75	SR	T
70	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4.193.236.480	100	4.079.871.344	100,00	97,30	ST	T
71	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	8.595.886.410	30	5.335.480.561	42,86	62,07	SR	R
72	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	5.799.351.410	18	3.990.502.571	46,15	68,81	SR	R
73	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	1.384.855.000	8	844.477.790	100,00	60,98	ST	R
74	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1.411.680.000	3	500.500.200	75,00	35,45	T	SR
75	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	100	10.670.823.396	100	6.742.115.017	100,00	63,18	ST	R
76	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.673.465.000	2	818.981.664	100,00	48,94	ST	SR
77	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
78	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	8.997.358.396	2	5.923.133.353	100,00	65,83	ST	R
79	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
80	SEKRETARIAT DAERAH									
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.443.638.445	100	970.408.335	100,00	67,22	ST	R
82	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler Terencana yang terfasilitasi	85	1.443.638.445	86	970.408.335	100,00	67,22	ST	R
83	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	685.912.255	9	463.649.289	75,00	67,60	S	R
84	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	345.857.000	9	269.220.786	75,00	77,84	S	R
85	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	411.869.190	9	237.538.260	75,00	57,67	S	R
86	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
87	SEKRETARIAT DAERAH									
88	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	1.587.306.680	158	960.061.076	100,00	60,48	ST	R
89	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3,6	1.001.576.660	23	680.528.996	100,00	67,95	ST	S
90	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	1.001.576.660	12	680.528.996	100,00	67,95	S	S
91	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
92	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	14	585.730.020	69	279.532.080	100,00	47,72	ST	SR
93	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	585.730.020	4	279.532.080	100,00	47,72	S	SR
94	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
95	SEKRETARIAT DAERAH									
96	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90	560.228.810	201	302.424.422	100,00	53,98	ST	SR
97	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	560.228.810	180	302.424.422	100,00	53,98	ST	SR
98	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	444.296.540	18	202.489.233	100,00	45,58	ST	SR
99	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
100	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	115.932.270	1	99.935.189	100,00	86,20	SR	R
	Rata-rata Program						71,44	63,85	S	R
	Rata-rata Kegiatan						86,38	66,38	T	S
	Rata-rata Sub kegiatan						73,00	59,52	S	R

2.2.1.32 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 97,23% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 66,06% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,34% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 58,29%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 82,84% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,38%.

Tabel 2. 131: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	SEKRETARIAT DPRD									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,11	202.226.600	72	124.909.571	91,70	61,77	ST	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	84	202.226.600	92	124.909.571	100,00	61,77	ST	R
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	202.226.600	3	124.909.571	100,00	61,77	ST	R
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	27.561.437.978	100	20.945.285.576	100,00	75,99	ST	R
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	7.030.159.738	100	6.483.917.369	100,00	92,23	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	6.916.935.738	52	6.480.155.369	91,38	93,69	ST	ST
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	113.224.000	1	3.762.000	100,00	3,32	ST	SR
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	92	202.070.500	87	76.419.418	94,03	37,82	ST	SR
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	30.000.000	1	29.240.000	100,00	97,47	ST	ST
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	172.070.500	8	47.179.418	80,00	27,42	T	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	2.664.660.680	60	1.393.694.058	99,82	52,30	ST	R
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	227.736.000	9	166.047.015	75,00	72,91	S	T
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	128.000.000	9	105.908.500	75,00	82,74	S	T
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	354.900.000	9	82.628.524	75,00	23,28	S	SR
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	50.000.000	12	0	100,00	0,00	ST	SR
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	670.448.000	9	276.050.000	12,00	41,17	SR	SR
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	1.233.576.680	61	763.060.019	50,83	61,86	R	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	2.223.910.000	66	473.083.289	93,64	21,27	ST	SR
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	304.500.000	38	62.000.000	100,00	20,36	S	SR
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	1.096.910.000	51	272.925.930	100,00	24,88	ST	SR
24	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12	498.500.000	10	39.157.359	83,33	7,86	SR	SR
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	324.000.000	5	99.000.000	100,00	30,56	ST	SR
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	79	3.398.549.000	100	3.032.907.160	100,00	89,24	ST	R
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20.000.000	12	20.000.000	100,00	100,00	S	S
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	526.870.000	12	365.590.332	100,00	69,39	S	SR
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.851.679.000	12	2.647.316.828	100,00	92,83	S	S
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	1.499.793.000	89	564.563.316	100,00	37,64	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	186.000.000	3	62.505.074	100,00	33,60	ST	SR
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	310.000.000	43	146.493.895	100,00	47,26	ST	SR
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	200.000.000	55	96.160.700	100,00	48,08	ST	SR
35	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	70.000.000	8	0	100,00	0,00	SR	SR
36	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	479.793.000	2	229.514.605	100,00	47,84	ST	SR
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	254.000.000	5	29.889.042	71,43	11,77	SR	SR
38	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	8.191.750.060	100	8.026.659.192	100,00	97,98	ST	S
39	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20	7.787.257.000	20	7.742.135.192	100,00	99,42	ST	S
40	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	257.500.000	4	232.400.000	100,00	90,25	ST	ST
41	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20	146.993.060	13	52.124.000	65,00	35,46	SR	SR
42	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	8	2.350.545.000	100	894.041.774	100,00	38,04	ST	SR
43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	2.350.545.000	12	894.041.774	100,00	38,04	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
44	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75	24.346.176.750	82	14.708.012.361	100,00	60,41	ST	R
45	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	1.901.502.140	100	1.262.750.448	100,00	66,41	T	S
46	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	1.901.502.140	10	1.262.750.448	100,00	66,41	ST	S
47	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	3	6.267.175.540	98	3.167.827.162	100,00	50,55	T	SR
48	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	778.900.000	20	0	100,00	0,00	ST	SR
49	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40	1.011.691.780	37	364.879.682	92,50	36,07	SR	SR
50	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	40.000.000	2	30.600.000	66,67	76,50	S	T
51	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	212.000.000	5	159.500.000	100,00	75,24	ST	S
52	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	278.296.760	12	147.400.480	100,00	52,97	S	SR
53	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	3.946.287.000	12	2.465.447.000	100,00	62,48	S	R
54	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	30	3.109.513.000	36	1.380.867.750	90,91	44,41	ST	SR
55	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24	761.060.000	41	218.448.000	85,42	28,70	S	SR
56	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	20	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	2.348.453.000	40	1.162.419.750	66,67	49,50	S	SR
58	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	12	13.067.986.070	86	8.896.567.001	100,00	68,08	T	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
59	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	8.574.215.120	72	5.790.208.974	100,00	67,53	ST	S
60	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	4.493.770.950	64	3.106.358.027	88,89	69,13	R	S
	Rata-rata Program						97,23	66,06	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						98,34	58,29	ST	R
	Rata-rata Sub kegiatan						82,84	46,38	T	SR

2.2.1.33 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,76% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,46% dan kinerja kegiatan Tinggi (T) sebesar 83,93% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,73%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 56,47% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 29,43%.

Tabel 2. 132: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	PERENCANAAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,35	53.213.610	79	28.558.394	89,08	53,67	T	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	53.213.610	77	28.558.394	100,00	53,67	ST	R
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	13.568.620	2	7.696.107	100,00	56,72	ST	R
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	39.644.990	3	20.862.287	100,00	52,62	ST	R
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.744.797.422	78	7.874.512.700	91,49	80,81	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6.939.576.284	1	6.443.075.800	100,00	92,85	ST	ST
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	6.939.576.284	42	6.443.075.800	72,41	92,85	S	ST
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	61.200.000	69	0	72,67	0,00	S	SR
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	7.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	54.000.000	4	0	80,00	0,00	T	SR
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	82	952.241.910	94	621.613.891	100,00	65,28	ST	R
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.477.000	12	33.812.500	100,00	55,91	ST	R
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	16.449.900	12	15.462.700	100,00	94,00	ST	ST
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	58.539.640	12	42.710.000	100,00	72,96	ST	S
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	20.000.000	12	8.900.000	100,00	44,50	ST	SR
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4.720.000	1	2.150.000	100,00	45,55	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93	783.035.370	85	512.678.691	91,40	65,47	R	R
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	9.020.000	40	5.900.000	100,00	65,41	ST	R
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	1.012.079.000	94	344.138.000	100,00	34,00	ST	SR
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	94.000.000	2	0	40,00	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	918.079.000	20	344.138.000	100,00	37,48	ST	SR
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	428.431.428	75	353.888.019	75,00	82,60	S	T
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.744.000	12	18.744.000	100,00	100,00	ST	ST
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35.127.000	12	9.144.000	100,00	26,03	ST	SR
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	374.560.428	9	326.000.019	75,00	87,04	S	T
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	82	351.268.800	79	111.796.990	96,43	31,83	ST	SR
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	119.000.000	5	84.016.990	100,00	70,60	ST	S
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	32.432.800	5	27.780.000	100,00	85,65	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
33	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	199.836.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	84	1.937.199.400	99	1.272.158.691	100,00	65,67	SR	R
37	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	69	1.937.199.400	17	1.272.158.691	16,93	65,67	SR	R
38	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	21.770.000	1	8.195.500	100,00	37,65	ST	SR
39	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat D aerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat D aerah / Lintas Perangkat Daerah	1	100.310.000	1	52.922.500	100,00	52,76	ST	R
40	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	554.328.960	2	405.103.760	100,00	73,08	ST	S
41	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	170	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	2	1.260.790.440	4	805.936.931	100,00	63,92	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
43	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	64	906.704.120	83	163.667.893	100,00	18,05	ST	SR
46	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90	102.781.340	99	25.147.107	100,00	24,47	ST	SR
47	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	102.781.340	3	25.147.107	100,00	24,47	SR	SR
48	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	60	803.922.780	90	138.520.786	100,00	17,23	ST	SR
50	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	803.922.780	4	138.520.786	100,00	17,23	S	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
51	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	877.611.560	100	362.377.237	100,00	41,29	ST	SR
52	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	877.611.560	100	362.377.237	100,00	41,29	ST	SR
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	11.100.000	8	2.450.000	100,00	22,07	ST	SR
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8	101.476.000	8	51.255.500	100,00	50,51	ST	SR
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	328.245.040	8	146.663.237	100,00	44,68	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	17.250.000	8	3.267.000	100,00	18,94	ST	SR
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	419.540.520	1	158.741.500	100,00	37,84	ST	SR
61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	93	882.801.320	96	329.188.080	100,00	37,29	ST	SR
62	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93	459.387.270	100	131.103.148	100,00	28,54	ST	SR
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	197.643.800	5	58.273.454	100,00	29,48	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	261.743.470	3	72.829.694	60,00	27,82	R	SR
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
71	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93	423.414.050	100	198.084.932	100,00	46,78	ST	SR
72	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	44.891.000	3	31.510.000	100,00	70,19	ST	S
73	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
74	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	71.900.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
75	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	306.623.050	3	166.574.932	100,00	54,33	SR	SR
76	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
77	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
78	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						96,76	49,46	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						82,93	41,73	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						56,47	29,43	R	SR

2.2.1.34 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 92,19% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 65,26% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 84,60% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,01%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 35,56% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 24,81%.

Tabel 2. 133: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD-P tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	KEUANGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,50	158.524.000	76	79.707.364	92,88	50,28	ST	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65,50	158.524.000	50	79.707.364	76,34	50,28	S	SR
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	102.400.000	2	58.461.463	100,00	57,09	ST	SR
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	56.124.000	3	21.245.901	75,00	37,86	S	SR
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	18.627.401.237	85	14.131.166.611	100,00	75,86	ST	S
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11.224.125.681	1	10.394.806.824	100,00	92,61	ST	ST
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	11.224.125.681	75	10.394.806.824	97,40	92,61	ST	ST
15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
19	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah	80	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	80	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
29	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
30	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	193.660.000	85	147.683.501	89,47	76,26	T	T
31	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	165	32.800.000	79	19.500.000	47,88	59,45	SR	R
32	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	160.860.000	9	128.183.501	100,00	79,69	ST	T
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	980.471.310	55	798.048.265	100,00	81,39	ST	T
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	64.823.600	9	55.693.300	75,00	85,92	S	T
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	144.590.000	9	116.824.500	75,00	80,80	S	T
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	95.000.000	9	62.035.000	75,00	65,30	S	R
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	24.000.000	27	12.000.000	45,00	50,00	SR	R
39	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	90.541.200	9	85.665.500	75,00	94,61	S	ST
40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	561.516.510	111	465.829.965	100,00	82,96	ST	S
41	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
42	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	1.987.600.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	515.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	70.000.000	11	0	44,00	0,00	SR	SR
45	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	1.402.100.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	2.296.850.000	85	2.002.197.469	100,00	87,17	ST	T
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.296.850.000	9	2.002.197.469	75,00	87,17	S	T
50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	520.889.596	85	234.502.500	100,00	45,02	ST	SR
51	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.260.000	9	17.985.000	75,00	98,49	S	ST
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	502.629.596	9	216.517.500	75,00	43,08	S	SR
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	1.423.804.650	88	553.928.052	97,78	38,90	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	116.184.650	17	71.970.385	100,00	61,94	ST	R
55	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1.006.140.000	3	434.537.667	100,00	43,19	ST	SR
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	301.480.000	1	47.420.000	50,00	15,73	R	SR
61	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- udangan	100	130.060.709.180	100	123.017.001.704	100,00	94,58	ST	T
62	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	1.715.912.400	100	1.163.416.768	100,00	67,80	SR	R
63	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	392.268.000	1	277.075.598	100,00	70,63	SR	S
64	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
65	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
67	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	758.370.000	12	443.929.934	100,00	58,54	S	R
68	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	565.274.400	12	442.411.236	100,00	78,26	S	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
70	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	0	0	0	0,00	0,00		
71	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
72	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
73	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
74	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	92	1.310.507.880	95	924.062.910	103,26	70,51	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
75	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	416.562.000	12	186.473.879	100,00	44,76	S	SR
76	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	97.041.000	9	93.153.800	75,00	95,99	S	ST
77	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	167.418.380	9	127.898.078	75,00	76,39	S	S
78	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	319.065.180	9	286.281.879	75,00	89,73	S	T
79	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	2	135.187.480	2	128.733.811	100,00	95,23	ST	ST
80	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							ST	SR
81	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	105.020.000	1	36.048.549	100,00	34,33	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
82	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	35.963.000	1	33.007.000	100,00	91,78	SR	SR
83	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
84	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
85	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
86	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	34.250.840	1	32.465.914	100,00	94,79	ST	T
87	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	127.034.288.900	9	120.929.522.026	90,00	95,19	SR	SR
88	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
89	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
90	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
91	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
92	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
93	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
94	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	T
95	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	117.601.391.900	1	117.547.942.000	25,00	99,95	ST	SR
96	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	4.000.000.000	1	665.131.517	100,00	16,63	SR	R
97	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	5.432.897.000	1	2.716.448.509	25,00	50,00	ST	SR
98	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi	94	3.391.908.440	100	1.556.897.150	100,00	45,90	ST	SR
99	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	3.391.908.440	1	1.556.897.150	100,00	45,90	SR	SR
100	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
101	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
102	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
103	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
104	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
105	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
106	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1.039.892.270	1	200.765.115	100,00	19,31	ST	R
107	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	1	796.252.730	1	589.080.148	100,00	73,98	SR	SR
108	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							SR	SR
109	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
110	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	1.555.763.440	3	767.051.887	30,00	49,30	SR	SR
111	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	0	0	0	0,00	0,00	R	R
112	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
113	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	83	1.856.531.070	50	1.156.628.124	60,24	62,30	ST	S
114	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100	333.886.570	100	233.003.180	100,00	69,79	SR	SR
115	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	265.518.380	3	198.117.680	300,00	74,62	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
116	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
117	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	68.368.190	2	34.885.500	100,00	51,03	ST	SR
118	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	77	1.522.644.500	74	923.624.944	96,71	60,66	ST	R
119	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	85.182.670	1	21.300.300	100,00	25,01	ST	SR
120	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	398.330.120	1	282.678.602	100,00	70,97	ST	R
121	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	171.400.000	1	67.946.200	100,00	39,64	ST	R
122	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	311.335.610	1	177.424.400	100,00	56,99	ST	R
123	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	162.886.960	5	124.365.940	100,00	76,35	SR	SR
124	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	393.509.140	12	249.909.502	100,00	63,51	SR	SR
125	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	0	0	0	0,00	0,00	R	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
126	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
127	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5	1.680.904.950	7	1.053.313.897	100,00	62,66	SR	SR
128	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	6	1.680.904.950	47	1.053.313.897	100,00	62,66	SR	SR
129	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
130	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
131	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	37.400.000	1	0	100,00	0,00	R	S
132									SR	SR
133	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
134	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1365	1.024.886.950	1.907	787.741.436	100,00	76,86	ST	SR
135	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
136	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
137	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	618.618.000	44.699	265.572.461	100,00	42,93	SR	SR
138	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
139	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
140	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1365	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
141	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
142	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						92,19	65,26	ST	R
	Rata-rata Kegiatan						84,60	59,01	T	R
	Rata-rata Sub kegiatan						35,56	24,81	SR	SR

2.2.1.35 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 99,80% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 66,96% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 74,95% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,66%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 67,19% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 48,91%.

Tabel 2. 134: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	KEPEGAWAIAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,75	55.700.000	80	33.655.514	99,20	60,42	ST	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75,00	55.700.000	100	33.655.514	100,00	60,42	SR	R
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	55.700.000	3	33.655.514	100,00	60,42	S	R
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	8.012.052.490	100	7.114.311.833	100,00	88,80	SR	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	6.629.747.050	12	6.198.960.202	100,00	93,50	S	T
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	6.629.747.050	43	6.198.960.202	100,00	93,50	ST	T
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	804.098.440	100	410.962.104	100,00	51,11	ST	SR
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	97.830.440	9	59.427.600	100,00	60,75	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	26.000.000	12	22.189.300	100,00	85,34	S	T
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	150.736.000	12	96.034.900	100,00	63,71	S	R
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.600.000	12	2.700.000	100,00	75,00	S	S
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	525.932.000	12	230.610.304	100,00	43,85	S	SR
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	251.000.000	95	207.057.000	10,00	82,49	ST	T
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	251.000.000	2	207.057.000	16,67	82,49	ST	T
19	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	291.207.000	100	261.447.527	100,00	89,78	SR	T
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	39.472.000	6	31.350.311	100,00	79,42	SR	S
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	23.330.000	12	7.350.000	100,00	31,50	S	SR
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	228.405.000	12	222.747.216	100,00	97,52	S	T
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	36.000.000	50	35.885.000	71,43	99,68	S	ST
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	36.000.000	12	35.885.000	100,00	99,68	R	ST
27	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
29	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	19	2.924.208.150	25	1.701.278.596	100,00	58,18	ST	R
30	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	100	260.233.130	100	113.884.021	100,00	43,76	ST	SR
31	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	260.233.130	1	113.884.021	100,00	43,76	SR	SR
32	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	100	707.805.450	13	319.560.856	13,09	45,15	SR	SR
33	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	443.997.450	16	173.454.633	64,00	39,07	R	SR
34	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	263.808.000	1	146.106.223	100,00	55,38	ST	R
35	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	72	1.531.050.570	126	986.136.958	100,00	64,41	T	R
36	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	85	688.307.000	838	442.808.900	100,00	64,33	ST	R
37	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85	194.229.090	80	73.073.400	94,12	37,62	R	SR
38	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	6	481.919.730	4	454.007.923	66,67	94,21	SR	T
39	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	36	166.594.750	2	16.246.735	5,56	9,75	SR	SR
40	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	100	425.119.000	55	281.696.761	55,00	66,26	R	R
41	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	314.394.000	1	238.454.761	100,00	75,85	SR	S
42	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	110.725.000	3	43.242.000	100,00	39,05	SR	SR
	Rata-rata Program						99,80	66,96	T	R
	Rata-rata Kegiatan						74,95	69,66	S	R
	Rata-rata Sub kegiatan						67,19	48,91	R	SR

2.2.1.36 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

Tidak terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan) pada Tahun 2024 Triwulan IV

Tabel 2. 135: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	80	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

2.2.1.37 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 91,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,75% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 50,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,38%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 20,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,35%.

Tabel 2. 136: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	55,00	341.680.710	45	133.558.480	82,00	39,09	S	SR
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	341.680.710	100	133.558.480	100,00	39,09	SR	SR
4	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	341.680.710	1	133.558.480	100,00	39,09	SR	SR
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	25	377.041.020	25	205.165.426	100,00	54,41	ST	SR
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100	377.041.020	100	205.165.426	100,00	54,41	ST	SR
8	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	377.041.020	1	205.165.426	100,00	54,41	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						91,00	46,75	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						50,00	23,38	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						20,00	9,35	SR	SR

2.2.1.38 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,58% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 75,22% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 91,67% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 67,97%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 60,03% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,72%.

Tabel 2. 137: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	PENGELOLAAN PERBATASAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,67	43.237.600	71	23.498.759	89,74	54,35	T	R
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	43.237.600	100	23.498.759	100,00	54,35	SR	R
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	43.237.600	3	23.498.759	100,00	54,35	ST	R
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.348.199.181	100	5.412.940.497	100,00	85,27	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.540.130.446	1	4.108.253.108	100,00	90,49	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	4.540.130.446	25	4.108.253.108	89,29	90,49	T	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	176.500.000	100	117.740.250	100,00	66,71	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	152.500.000	3	117.740.250	100,00	77,21	ST	T
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	24.000.000	2	0	66,67	0,00	S	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	514.621.923	75	296.554.031	100,00	57,63	ST	R
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	48.500.000	5	29.983.200	50,00	61,82	SR	R
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	35.183.000	11	12.635.000	91,67	35,91	ST	SR
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	25.009.000	10	10.860.000	83,33	43,42	T	SR
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	13.500.000	4	6.662.700	100,00	49,35	ST	SR
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71	392.429.923	134	236.413.131	100,00	60,24	ST	R
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	10	392.100.000	14	337.143.750	100,00	85,98	ST	T
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	392.100.000	14	337.143.750	100,00	85,98	ST	T
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	35	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70	41.000.000	100	31.076.750	100,00	75,80	ST	S
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	41.000.000	12	31.076.750	100,00	75,80	SR	S
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	515.808.200	100	473.010.328	100,00	91,70	ST	ST
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	56.628.200	12	41.932.672	100,00	74,05	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	459.180.000	22	431.077.656	100,00	93,88	ST	ST
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	168.038.612	100	49.162.280	100,00	29,26	ST	SR
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	60.802.612	4	39.712.280	100,00	65,31	ST	R
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	81.476.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25.760.000	3	9.450.000	100,00	36,68	ST	SR
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	20	550.001.080	45	473.275.815	100,00	86,05	ST	T
34	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	15	250.000.060	20	194.086.209	100,00	77,63	ST	S
35	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1	250.000.060	1	194.086.209	100,00	77,63	ST	T
37	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	75	150.000.300	75	142.790.915	100,00	95,19	ST	ST
38	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	150.000.300	1	142.790.915	100,00	95,19	ST	ST
39	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
42	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi	45	150.000.720	85	136.398.691	100,00	90,93	ST	ST
44	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	150.000.720	1	136.398.691	100,00	90,93	ST	ST
45	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						96,58	75,22	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						91,67	67,97	ST	S
	Rata-rata Sub kegiatan						60,03	41,72	R	SR

2.2.1.39 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat) pada tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 89,99% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,73% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 55,47% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 56,47%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 48,21% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,38%.

Tabel 2. 138: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
2	INSPEKTORAT DAERAH									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,80	57.025.610	70	21.354.032	88,28	37,45	T	SR
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	57.025.610	3	21.354.032	4,80	37,45	SR	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	57.025.610	3	21.354.032	100,00	37,45	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	16.690.071.104	100	13.562.372.877	100,00	81,26	ST	T
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11.623.129.726	1	10.801.449.931	100,00	92,93	ST	ST
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	11.623.129.726	62	10.801.449.931	100,00	92,93	ST	ST
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	1.201.418.540	20	839.326.244	19,79	69,86	SR	S
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	1.201.418.540	34	839.326.244	100,00	69,86	ST	S
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	1.237.109.750	25	792.884.411	33,12	64,09	SR	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	91.000.000	1	55.907.000	100,00	61,44	ST	R
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	740	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40000	37.000.000	1	26.173.554	0,00	70,74	SR	S
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	1.109.109.750	30	710.803.857	39,47	64,09	SR	R
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	2.100.626.000	102	788.130.000	100,00	37,52	ST	SR
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	376.500.000	14	134.550.000	46,67	35,74	SR	SR
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	1.619.456.000	54	653.580.000	100,00	40,36	ST	SR
22	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	104.670.000	3	0	60,00	0,00	R	SR
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	291.419.088	26	240.542.741	36,64	82,54	SR	T
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	4.992.000	1	4.991.000	0,20	99,98	SR	ST
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	9.630.000	2	0	100,00	0,00	ST	SR
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	276.797.088	9	235.551.741	69,23	85,10	S	T
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	236.368.000	100	100.039.550	100,00	42,32	ST	SR
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	236.368.000	14	100.039.550	100,00	42,32	ST	SR
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100	1.645.417.670	100	1.025.643.604	100,00	62,33	ST	R
32	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	1.279.801.520	11	804.867.795	10,99	62,89	SR	R
33	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	197.779.570	13	105.282.500	100,00	53,23	ST	R
34	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	389.746.000	47	323.856.850	100,00	83,09	ST	T
35	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45	96.177.570	1	50.320.238	2,22	52,32	SR	R
36	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	45	25.650.000	45	25.650.000	100,00	100,00	ST	ST
37	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	336.488.380	9	139.207.600	60,00	41,37	R	SR
38	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	233.960.000	94	160.550.607	100,00	68,62	ST	R
40	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	100	365.616.150	64	220.775.809	64,33	60,38	R	R
41	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	65	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	365.616.150	11	220.775.809	11,00	60,38	SR	R
43	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	60	731.324.800	37	464.795.344	61,67	63,56	R	R
44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	100	731.324.800	98	464.795.344	98,00	63,56	ST	R
47	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	80.700.000	47	22.650.000	47,00	28,07	SR	SR
48	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	540.595.000	100	397.295.644	100,00	73,49	ST	S
49	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	110.029.800	8	44.849.700	8,00	40,76	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
50	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	40	746.691.412	60	478.324.696	100,00	64,06	ST	R
51	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	100	746.691.412	98	478.324.696	98,00	64,06	ST	R
52	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	746.691.412	47	478.324.696	47,00	64,06	SR	R
	Rata-rata Program						89,99	61,73	T	R
	Rata-rata Kegiatan						55,47	56,47	R	R
	Rata-rata Sub kegiatan						48,21	41,38	SR	SR

2.2.1.40 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Unsur Kewillayahan (Kecamatan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 86,69% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,08% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 85,21% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 64,59%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 66,46% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 51,47%.

Tabel 2. 139: Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Unsur Kewillayahan (Kecamatan)

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR									
2	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
3	SEKRETARIAT DAERAH									
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	219.180.000	20	206.054.338	100,00	94,01	ST	ST
5	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	219.180.000	100	206.054.338	100,00	94,01	ST	ST
6	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	219.180.000	1	206.054.338	100,00	94,01	ST	ST
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
8	KECAMATAN									
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,95	24.581.000	71	13.080.072	89,00	53,21	T	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	24.581.000	65	13.080.072	86,67	53,21	T	R
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	24.581.000	2	13.080.072	66,67	53,21	S	R
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.622.132.792	65	8.142.671.588	76,47	84,62	T	T
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6.865.092.772	1	6.327.276.234	100,00	92,17	ST	ST
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	6.865.092.772	48	6.327.276.234	97,96	92,17	ST	ST
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	126.500.000	70	62.856.486	73,68	49,69	S	SR
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	42.500.000	1	17.831.672	100,00	41,96	ST	SR
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	84.000.000	3	45.024.814	50,00	53,60	SR	R
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	649.215.000	60	313.981.014	80,00	48,36	T	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	52.500.000	9	27.538.100	75,00	52,45	S	R
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	238.720.000	9	152.521.000	75,00	63,89	S	R
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	40.595.000	9	14.991.900	75,00	36,93	S	SR
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	75.600.000	1	36.887.536	100,00	48,79	ST	SR
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	241.800.000	63	82.042.478	100,00	33,93	ST	SR
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	945.708.000	65	558.400.375	86,67	59,05	T	R
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	281.300.000	8	249.220.000	100,00	88,60	ST	T
30	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	69.751.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	544.657.000	24	309.180.375	100,00	56,77	ST	R
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	50.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	880.551.700	50	767.783.666	50,00	87,19	SR	T
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	31.158.000	9	29.739.250	75,00	95,45	S	ST
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	104.531.300	9	32.724.917	75,00	31,31	S	SR
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	744.862.400	9	705.319.499	75,00	94,69	S	ST
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	155.065.320	60	112.373.813	80,00	72,47	T	S
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	100.355.320	5	62.689.443	100,00	62,47	ST	R
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	18.110.000	5	13.150.000	100,00	72,61	ST	S
40	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	36.600.000	1	36.534.370	20,00	99,82	SR	ST
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	76.501.916	75	30.886.433	75,00	40,37	S	SR
44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	76.501.916	51	30.886.433	92,73	40,37	ST	SR
45	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.501.916	9	30.886.433	75,00	40,37	S	SR
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	124.066.540	50	84.316.964	50,00	67,96	SR	S
47	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	124.066.540	50	84.316.964	50,00	67,96	SR	S
48	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	124.066.540	8	84.316.964	100,00	67,96	ST	S
49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	43.919.550	70	31.400.600	100,00	71,50	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
50	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	43.919.550	70	31.400.600	87,53	71,50	T	S
51	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	43.919.550	8	31.400.600	66,67	71,50	S	S
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	82.996.140	75	57.216.069	75,00	68,94	S	S
53	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	82.996.140	75	57.216.069	75,00	68,94	S	S
54	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	41.156.440	8	30.865.569	100,00	75,00	ST	S
55	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	41.839.700	9	26.350.500	6,00	62,98	SR	S
56	UNSUR KEWILAYAHAN									
57	KECAMATAN									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	864.380.000	75	729.486.598	75,00	84,39	S	T
59	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	864.380.000	45	729.486.598	81,82	84,39	T	T
60	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	864.380.000	9	729.486.598	75,00	84,39	S	T
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64	UNSUR KEWILAYAHAN									
65	KECAMATAN									
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	915.655.000	75	679.275.070	75,00	74,18	S	S
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
67	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	915.655.000	65	679.275.070	100,00	74,18	ST	S
68	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	915.655.000	9	679.275.070	75,00	74,18	S	S
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
70	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
71	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
72	UNSUR KEWILAYAHAN									
73	KECAMATAN									
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	586.458.380	75	406.790.382	75,00	69,36	S	S
75	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	586.458.380	25	406.790.382	45,45	69,36	SR	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
76	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	586.458.380	9	406.790.382	75,00	69,36	S	S
77	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
78	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
80	UNSUR KEWILAYAHAN									
81	KECAMATAN									
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	733.130.000	75	518.018.466	75,00	70,66	S	S
83	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	733.130.000	68	518.018.466	100,00	70,66	ST	S
84	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	733.130.000	9	518.018.466	75,00	70,66	S	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
86	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
87	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
88	UNSUR KEWILAYAHAN									
89	KECAMATAN BUNGURAN BARAT									
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.000.000	0	0	0	0	SR	SR
91	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	4.000.000	0	0	0	0	SR	SR
92	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	4.000.000	0	0	0	0	SR	SR
93	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
94	SEKRETARIAT DAERAH									
95	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	105.000.000	20	105.386.500	100	99,92	ST	ST
96	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	105.000.000	100	105.386.500	100	99,92	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
97	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	105.000.000	1	105.386.500	100	99,92	ST	ST
98	UNSUR KEWILAYAHAN									
99	KECAMATAN									
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,6	50.000.000	70	18.483.618	87,91	66,72	T	S
101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74	50.000.000	88	18.483.618	100	66,72	ST	S
102	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	20.000.000	3	3.400.000	100	84,58	ST	T
103	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	30.000.000	2	15.083.618	100	63,69	ST	R
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.784.070.496	100	5.055.952.884	100	78,52	ST	T
105	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.689.870.496	1	3.845.322.541	100	89,69	ST	T
106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3.689.870.496	28	3.845.322.541	100	89,69	ST	T
107	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	60.000.000	89	2.482.680	94,19	4,58	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
108	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	60.000.000	4	2.482.680	100	4,58	ST	SR
109	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	280.200.000	57	378.334.200	94,44	66,85	ST	S
110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.000.000	12	34.257.700	100	83,96	ST	T
111	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12.000.000	12	44.158.100	100	88,46	ST	T
112	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	10.000.000	0	0	0	0	SR	SR
113	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	36.000.000	12	18.991.600	100	71,38	ST	S
114	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	5.000.000	0	0	0	0	SR	SR
115	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	150.000.000	255	280.926.800	100	62,62	ST	R
116	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	80.000.000	57	79.169.750	94,85	18,51	ST	SR
117	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	25.000.000	16	79.169.750	100	41,32	ST	SR
118	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	55.000.000	21	0	100	0	ST	SR
119	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	502.000.000	100	519.187.224	100	93,79	ST	ST
120	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.000.000	12	26.121.750	100	70,38	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
121	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	26.000.000	12	32.738.134	100	72,88	ST	S
122	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	470.000.000	12	460.327.340	100	97,62	ST	ST
123	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	172.000.000	68	231.456.489	97,4	42,02	ST	SR
124	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	50.000.000	10	180.678.450	100	74,45	ST	S
125	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	20.000.000	0	0	0	0	SR	SR
126	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	40.000.000	12	42.770.039	100	14,35	ST	SR
127	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	50.000.000	2	8.008.000	100	80,08	ST	T
128	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	12.000.000	0	0	0	0	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	167.641.000	100	163.316.266	100	76,64	ST	T
130	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	167.641.000	35	163.316.266	58,33	76,64	R	T
131	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	167.641.000	12	163.316.266	100	76,64	ST	T
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	55.000.000	100	36.528.892	100	64,42	ST	R
133	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	55.000.000	100	36.528.892	100	64,42	ST	R
134	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	55.000.000	6	36.528.892	100	64,42	ST	R
135	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	20.000.000	100	16.825.065	100	41,63	ST	SR
136	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	20.000.000	100	16.825.065	100	41,63	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
137	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	20.000.000	12	16.825.065	100	41,63	ST	SR
138	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	80.000.000	100	53.571.468	100	57	ST	R
139	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	80.000.000	100	53.571.468	100	57	ST	R
140	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	40.000.000	5	41.642.868	100	76,67	ST	T
141	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	40.000.000	12	11.928.600	100	30,07	ST	SR
142	UNSUR KEWILAYAHAN									
143	KECAMATAN									
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	335.000.000	100	583.272.207	100	81,92	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
145	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	335.000.000	55	583.272.207	100	81,92	ST	S
146	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	335.000.000	9	583.272.207	75	81,92	S	S
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	120.000.000	0	0	0	0	SR	SR
148	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	120.000.000	0	0	0	0	SR	SR
149	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	120.000.000	0	0	0	0	SR	SR
150	KECAMATAN BUNGURAN UTARA									
151	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
152	SEKRETARIAT DAERAH									
153	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	208.454.250	20	206.398.250	100,00	99,01	ST	ST
154	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	208.454.250	100	206.398.250	100,00	99,01	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
155	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	208.454.250	1	206.398.250	100,00	99,01	ST	ST
156	UNSUR KEWILAYAHAN									
157	KECAMATAN									
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64,5	41.114.850	71	29.708.352	100,00	96,63	ST	S
159	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,5	41.114.850	63	29.708.352	100,80	96,63	ST	S
160	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	21.394.850	2	16.669.352	100,00	94,47	ST	S
161	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	19.720.000	2	13.039.000	100,00	99,53	ST	S
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.855.591.426	85	4.029.729.281	100,00	82,15	ST	ST
163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.182.468.496	1	2.321.803.147	100,00	83,30	ST	ST
164	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	2.182.468.496	16	2.321.803.147	100,00	83,30	ST	ST
165	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	55.208.270	90	47.703.300	94,74	55,94	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
166	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
167	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	55.208.270	6	47.703.300	200,00	55,94	ST	T
168	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	503.034.660	60	475.840.700	100,00	83,55	ST	T
169	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
170	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	106.912.000	12	106.888.600	100,00	85,23	S	T
171	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	69.640.000	12	68.802.500	100,00	89,38	S	ST
172	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	85.000.000	12	82.995.000	100,00	77,20	S	T
173	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
174	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
175	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	216.482.660	50	190.545.600	100,00	81,77	ST	S
176	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	25.000.000	40	26.609.000	100,00	99,92	ST	ST
177	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	258.365.000	75	230.377.474	100,00	51,14	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
178	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	40.680.000	1	40.000.000	100,00	48,78	SR	ST
179	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	126.000.000	3	104.500.000	100,00	82,94	ST	T
180	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	53.685.000	5	48.727.474	100,00	36,23	ST	T
181	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	38.000.000	2	37.150.000	100,00	34,40	ST	ST
182	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	512.865.000	100	533.350.160	100,00	92,55	S	T
183	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000	12	18.000.000	100,00	100,00	S	ST
184	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	51.000.000	12	35.200.000	100,00	69,02	S	S
185	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	446.865.000	12	480.150.160	100,00	94,65	S	T
186	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	343.650.000	75	420.654.500	93,75	96,46	ST	ST
187	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	157.000.000	7	164.228.000	100,00	97,99	ST	ST
188	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	47.000.000	5	47.000.000	100,00	87,04	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
189	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	90.000.000	5	163.810.000	100,00	99,92	ST	ST
190	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
191	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	49.650.000	2	45.616.500	100,00	90,23	ST	T
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	487.365.000	100	515.818.000	100,00	85,80	S	ST
193	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	462.365.000	60	491.020.000	100,00	85,22	T	ST
194	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	462.365.000	12	491.020.000	100,00	85,22	S	ST
195	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	25.000.000	4	24.798.000	100,00	99,19	S	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
196	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	25.000.000	12	24.798.000	100,00	99,19	S	ST
197	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	110.522.750	100	98.969.743	100,00	89,42	S	T
198	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	110.522.750	100	98.969.743	100,00	89,42	S	T
199	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	110.522.750	7	98.969.743	100,00	89,42	S	T
200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	45.699.750	20	44.405.670	80,00	82,43	T	ST
201	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	45.699.750	90	44.405.670	100,00	82,43	SR	ST
202	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	45.699.750	9	44.405.670	75,00	82,43	S	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
203	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	93.250.000	100	69.518.000	100,00	82,01	ST	S
204	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	93.250.000	100	69.518.000	100,00	82,01	ST	S
205	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	50.150.000	6	35.273.000	85,71	97,37	T	S
206	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	43.100.000	12	34.245.000	100,00	70,54	S	S
207	KECAMATAN PULAU LAUT									
208	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
209	SEKRETARIAT DAERAH									
210	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	182.096.700	20	179.639.500	100,00	98,65	ST	ST
211	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	182.096.700	100	179.639.500	100,00	98,65	ST	ST
212	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	182.096.700	1	179.639.500	100,00	98,65	ST	ST
213	UNSUR KEWILAYAHAN									
214	KECAMATAN									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67,00	15.000.000	69	14.995.000	100,00	99,97	T	T
216	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	67	15.000.000	69	14.995.000	100,00	99,97	ST	T
217	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15.000.000	2	14.995.000	100,00	99,97	ST	ST
218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	4.490.929.384	85	3.554.447.408	100,00	79,15	ST	T
219	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.621.339.744	1	2.112.560.094	100,00	80,59	ST	ST
220	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.621.339.744	20	2.112.560.094	100,00	80,59	ST	ST
221	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
222	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
223	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	651.914.890	75	468.381.300	100,00	71,85	ST	ST
224	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
225	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	71.315.000	9	59.443.250	75,00	83,35	ST	ST
226	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	67.107.000	9	34.669.750	75,00	51,66	S	S
227	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	107.602.240	9	77.600.500	75,00	72,12	S	ST
228	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	S	T
229	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	101.930.000	1	76.503.000	100,00	75,05	S	ST
230	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	303.960.650	47	220.164.800	90,38	72,43	SR	SR
231	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
232	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	170.979.750	75	96.219.798	100,00	56,28	ST	S
233	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	56.479.750	2	55.749.798	100,00	98,71	ST	ST
234	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
235	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	114.500.000	5	40.470.000	71,43	35,34	ST	T
236	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	564.795.000	100	473.267.716	100,00	83,79	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
237	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19.600.000	9	19.584.000	75,00	99,92	SR	SR
238	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16.630.000	9	5.728.500	75,00	34,45	SR	SR
239	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	528.565.000	9	447.955.216	75,00	84,75	ST	S
240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	481.900.000	85	404.018.500	100,00	83,84	S	ST
241	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	373.490.000	5	300.518.500	100,00	80,46	S	ST
242	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	0,00	0,00	S	T
243	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	108.410.000	2	103.500.000	100,00	95,47	ST	ST
244	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
245	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	488.312.500	100	329.880.000	100,00	67,56	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
246	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	488.312.500	45	329.880.000	81,82	67,56	SR	SR
247	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	488.312.500	9	329.880.000	75,00	67,56	ST	ST
248	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	132.643.800	100	81.999.384	100,00	61,82	SR	SR
249	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	132.643.800	100	81.999.384	100,00	61,82	ST	ST
250	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	132.643.800	5	81.999.384	100,00	61,82	ST	ST
251	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	52.583.925	20	27.108.712	80,00	51,55	S	ST
252	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	52.583.925	90	27.108.712	100,00	51,55	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
253	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	52.583.925	9	27.108.712	75,00	51,55	S	ST
254	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	73.520.000	100	42.810.000	100,00	58,23	ST	ST
255	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	73.520.000	100	42.810.000	100,00	58,23	ST	ST
256	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	73.520.000	4	42.810.000	100,00	58,23	ST	ST
257	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	T	R
258	KECAMATAN MIDAI									
259	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
260	SEKRETARIAT DAERAH									
261	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	166.700.000	20	166.550.000	100,00	99,91	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
262	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	166.700.000	100	166.550.000	100,00	99,91	ST	T
263	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	166.700.000	1	166.550.000	100,00	99,91	S	SR
264	UNSUR KEWILAYAHAN								SR	SR
265	KECAMATAN									
266	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	74,70	22.650.000	77	22.490.000	100,00	99,29		
267	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	22.650.000	75	22.490.000	100,00	99,29		
268	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.450.000	3	10.415.000	100,00	99,67	ST	ST
269	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	12.200.000	2	12.075.000	100,00	98,98	ST	ST
270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.564.594.194	85	3.066.634.423	100,00	55,11	ST	ST
271	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.479.006.574	1	1.961.793.132	100,00	56,39		
272	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	3.479.006.574	11	1.961.793.132	100,00	56,39		

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
273	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	56.000.000	95	31.508.600	100,00	56,27	ST	ST
274	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	56.000.000	0	31.508.600	0,00	56,27	ST	ST
275	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	566.045.860	60	359.969.907	100,00	63,59	ST	ST
276	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
277	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	46.430.000	6	30.322.000	50,00	65,31	ST	S
278	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	46.800.000	6	24.535.000	50,00	52,43	ST	S
279	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	88.500.000	6	51.487.500	50,00	58,18	ST	S
280	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
281	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	87.891.380	2	45.662.000	100,00	51,95	SR	T
282	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	296.424.480	16	207.963.407	30,77	70,16	ST	T
283	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
284	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	106.000.000	60	80.900.000	100,00	76,32	SR	S
285	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	Rp

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
286	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	70.000.000	0	45.000.000	0,00	64,29	SR	T
287	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	36.000.000	3	35.900.000	100,00	99,72	SR	SR
288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	647.439.000	100	353.682.784	100,00	54,63	ST	T
289	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.000.000	6	11.040.000	50,00	61,33	SR	T
290	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37.339.000	6	13.647.799	50,00	36,55	SR	SR
291	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	592.100.000	6	328.994.985	50,00	55,56	ST	SR
292	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	710.102.760	70	278.780.000	100,00	39,26	SR	SR
293	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	384.802.760	5	211.990.000	100,00	55,09	SR	ST
294	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	47.000.000	5	22.390.000	100,00	47,64	ST	ST
295	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	278.300.000	2	44.400.000	100,00	15,95	ST	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
296	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	ST
297	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	448.400.000	100	225.786.000	100,00	50,35	SR	SR
298	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	448.400.000	60	225.786.000	100,00	50,35	SR	S
299	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	448.400.000	6	225.786.000	50,00	50,35	ST	S
300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	115.148.180	100	56.860.000	100,00	49,38	ST	S
301	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	115.148.180	4	56.860.000	4,00	49,38	ST	T
302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	115.148.180	20	56.860.000	100,00	49,38	ST	ST
303	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	43.820.000	90	18.650.000	100,00	42,56	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
304	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	43.820.000	3	18.650.000	3,75	42,56	ST	S
305	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	43.820.000	100	18.650.000	100,00	42,56	ST	S
306	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	86.640.000	100	42.385.000	100,00	48,92	SR	S
307	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	86.640.000	100	42.385.000	100,00	48,92	ST	R
308	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	22.890.000	4	21.785.000	100,00	95,17	ST	R
309	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	63.750.000	6	20.600.000	50,00	32,31	ST	R
310	UNSUR KEWILAYAHAN								ST	SR
311	KECAMATAN								ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	618.030.000	0	263.133.750	0,00	42,58	ST	SR
313	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	618.030.000	0	263.133.750	0,00	42,58	ST	R
314	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	618.030.000	0	263.133.750	0,00	42,58	ST	R
315	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
316	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	R
317	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	0	0	0	0,00	0,00		
318	KECAMATAN SERASAN									
319	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
320	SEKRETARIAT DAERAH									
321	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	193.378.000	20	193.378.000	100,00	100,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
322	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	193.378.000	100	193.378.000	100,00	100,00	SR	SR
323	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	193.378.000	1	193.378.000	100,00	100,00	SR	SR
324	UNSUR KEWILAYAHAN								SR	SR
325	KECAMATAN									
326	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,70	9.800.000	76	8.380.130	99,48	85,51	ST	ST
327	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	9.800.000	95	8.380.130	100,00	85,51	ST	ST
328	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6.300.000	3	4.880.130	100,00	77,46	ST	ST
329	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3.500.000	2	3.500.000	100,00	100,00	ST	ST
330	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.110.493.921	85	4.640.666.732	100,00	90,81	ST	ST
331	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.483.053.921	1	3.226.323.628	100,00	92,63	ST	ST
332	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	3.483.053.921	28	3.226.323.628	100,00	92,63		

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
333	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	66.360.000	95	65.799.250	100,00	99,15	ST	SR
334	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	31.860.000	1	31.860.000	100,00	100,00	ST	SR
335	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	34.500.000	3	33.939.250	100,00	98,37	ST	SR
336	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	77	396.900.000	78	351.860.155	100,00	88,65	ST	SR
337	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	95.000.000	12	95.000.000	100,00	100,00	ST	ST
338	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
339	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	57.000.000	12	57.000.000	100,00	100,00	ST	ST
340	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	63.500.000	12	53.300.000	100,00	83,94	ST	S
341	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	2.400.000	12	2.400.000	100,00	100,00	ST	ST
342	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
343	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	179.000.000	67	144.160.155	100,00	80,54	ST	ST
344	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	S	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
345	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	77	181.250.000	78	123.816.500	100,00	68,31	SR	SR
346	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	66.250.000	4	63.819.500	100,00	96,33	S	ST
347	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	115.000.000	5	59.997.000	100,00	52,17	S	ST
348	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	834.430.000	100	761.435.195	100,00	91,25	S	S
349	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	52.600.000	12	42.047.500	100,00	79,94	SR	SR
350	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	21.630.000	12	17.916.868	100,00	82,83	ST	S
351	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	760.200.000	12	701.470.827	100,00	92,27	SR	SR
352	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	77	148.500.000	78	111.432.004	100,00	75,04	ST	ST
353	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	121.500.000	4	84.432.004	100,00	69,49	ST	T
354	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	12.000.000	5	12.000.000	100,00	100,00	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
355	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00	100,00	ST	ST
356	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	S	S
357	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	695.200.000	100	671.420.250	100,00	96,58	S	T
358	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	695.200.000	60	671.420.250	100,00	96,58	S	ST
359	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	695.200.000	12	671.420.250	100,00	96,58	ST	ST
360	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	37.122.000	100	36.501.690	100,00	98,33	ST	ST
361	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	37.122.000	100	36.501.690	100,00	98,33	ST	ST
362	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	37.122.000	8	36.501.690	100,00	98,33	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
363	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	94.235.947	20	88.363.310	80,00	93,77	SR	SR
364	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	94.235.947	90	88.363.310	100,00	93,77	ST	SR
365	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	94.235.947	12	88.363.310	100,00	93,77	ST	SR
366	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	78.816.000	100	59.765.527	100,00	75,83	S	SR
367	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	78.816.000	100	59.765.527	100,00	75,83	ST	ST
368	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	59.916.000	8	56.840.527	100,00	94,87	ST	ST
369	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	18.900.000	12	2.925.000	100,00	15,48	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
370	UNSUR KEWILAYAHAN								T	T
371	KECAMATAN								ST	T
372	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	613.743.190	100	500.772.690	100,00	81,59	S	T
373	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	613.743.190	60	500.772.690	100,00	81,59	ST	R
374	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	613.743.190	12	500.772.690	100,00	81,59	ST	R
375	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	18.500.000	100	8.749.847	100,00	47,30	ST	ST
376	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	18.500.000	4	8.749.847	100,00	47,30	S	SR
377	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	18.500.000	5	8.749.847	100,00	47,30		
378	KECAMATAN SUBI									
379	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								ST	T
380	SEKRETARIAT DAERAH								ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
381	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	208.404.250	20	207.760.250	100,00	99,69	ST	T
382	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	208.404.250	100	207.760.250	100,00	99,69	ST	SR
383	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	208.404.250	1	207.760.250	100,00	99,69	ST	SR
384	UNSUR KEWILAYAHAN								ST	SR
385	KECAMATAN									
386	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,70	32.730.000	61	32.717.000	75,78	99,96	S	SR
387	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	32.730.000	100	32.717.000	100,00	99,96	ST	ST
388	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
389	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	32.730.000	2	32.717.000	100,00	99,96	ST	ST
390	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.782.478.397	100	4.272.320.986	100,00	89,33	ST	ST
391	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.845.455.217	1	2.554.242.101	100,00	89,77		

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
392	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.845.455.217	19	2.554.242.101	100,00	89,77		
393	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	100	0	100,00	0,00	T	SR
394	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
395	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
396	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	548.951.430	60	475.674.492	100,00	86,65	ST	ST
397	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	83.278.410	12	78.592.000	100,00	94,37	ST	T
398	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	40.000.000	12	38.081.000	100,00	95,20	ST	T
399	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	94.759.160	12	64.634.000	100,00	68,21	ST	SR
401	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	1.000.000	12	0	100,00	0,00	SR	SR
402	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
403	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	329.913.860	30	294.367.492	100,00	89,23	ST	T
404	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	S	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
405	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	209.987.750	60	103.567.310	100,00	49,32	S	T
406	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	59.987.750	4	34.367.310	100,00	57,29	SR	SR
407	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	150.000.000	5	69.200.000	100,00	46,13	S	R
408	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	788.157.000	100	769.578.893	100,00	97,64	S	SR
409	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	21.600.000	12	19.800.000	100,00	91,67	SR	SR
410	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35.600.000	12	29.614.989	100,00	83,19	ST	T
411	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	730.957.000	12	720.163.904	100,00	98,52	SR	SR
412	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	389.927.000	70	369.258.190	100,00	94,70	ST	SR
413	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	331.127.000	5	310.563.190	100,00	93,79	ST	R
414	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.000.000	5	9.950.000	100,00	99,50	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
415	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	48.800.000	2	48.745.000	100,00	99,89	ST	T
416	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	T
417	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	S
418	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	515.884.830	100	355.208.970	100,00	68,85	S	T
419	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	515.884.830	60	355.208.970	100,00	68,85	ST	T
420	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	515.884.830	9	355.208.970	100,00	68,85	ST	T
421	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	86.650.000	100	73.620.000	100,00	84,96	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
422	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	86.650.000	100	73.620.000	100,00	84,96	ST	S
423	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	86.650.000	9	73.620.000	100,00	84,96	SR	SR
424	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	64.700.000	20	54.564.000	100,00	84,33	SR	SR
425	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	64.700.000	90	54.564.000	100,00	84,33	ST	R
426	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	64.700.000	12	54.564.000	100,00	84,33	ST	R
427	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	140.631.789	100	126.416.320	100,00	89,89	S	R
428	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	140.631.789	100	126.416.320	100,00	89,89	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
429	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	39.250.000	7	39.088.000	87,50	99,59	ST	S
430	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	101.381.789	12	87.328.320	100,00	86,14	ST	S
431	KECAMATAN PULAU TIGA									
432	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
433	SEKRETARIAT DAERAH									
434	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	62.745.100	20	62.745.100	100,00	98,49	ST	ST
435	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	63.710.000	100	62.745.100	100,00	98,49	ST	ST
436	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	63.710.000	1	62.745.100	100,00	98,49	ST	ST
437	UNSUR KEWILAYAHAN									
438	KECAMATAN									
439	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	65,10	28.482.550	59	7.620.388	90,48	26,75	T	SR
440	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	67	28.482.550	90	7.620.388	100,00	26,75	ST	SR
441	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	28.482.550	3	7.620.388	100,00	26,75	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
442	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	ST
443	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.105.851.518	83	2.091.373.475	98,04	67,34	ST	S
444	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.019.130.768	1	1.594.007.474	100,00	78,95	ST	S
445	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	2.019.130.768	12	1.594.007.474	92,31	78,95	ST	SR
446	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	46.479.750	94	1.267.483	98,63	2,73	ST	SR
447	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
448	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	46.479.750	2	1.267.483	66,67	2,73	SR	SR
449	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	64	293.636.750	52	133.228.658	80,78	45,37	T	S
450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	39.876.750	9	27.626.045	75,00	69,28	ST	T
451	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	8.000.000	9	3.400.000	75,00	42,50	ST	T
452	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
453	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.000.000	9	8.890.000	75,00	59,27	SR	SR
454	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
455	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	T	SR
456	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	230.760.000	31	93.312.613	100,00	40,44	S	S
457	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
458	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	71	131.560.000	41	29.900.000	58,17	22,73	SR	SR
459	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	0	0	0,00	0,00	S	S
460	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	131.560.000	2	29.900.000	40,00	22,73	SR	SR
461	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
462	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	377.986.750	100	265.637.760	100,00	70,28	ST	SR
463	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	9	2.596.000	75,00	51,92	SR	SR
464	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33.430.000	9	13.600.000	75,00	40,68	R	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
465	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	339.556.750	9	249.441.760	75,00	73,46	SR	SR
466	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	64	237.057.500	40	67.332.100	61,72	28,40	SR	ST
467	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	211.057.500	5	65.043.100	100,00	30,82	SR	SR
468	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	6.000.000	3	2.289.000	60,00	38,15	ST	S
469	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	20.000.000	4	0	100,00	0,00	S	Rp
470	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
471	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	S	T
472	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	163.973.000	93	132.855.070	93,33	81,02	R	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
473	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	163.973.000	56	132.855.070	100,00	81,02	ST	SR
474	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	163.973.000	9	132.855.070	75,00	81,02	R	SR
475	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	29.099.500	100	10.100.151	100,00	34,71	ST	SR
476	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	29.099.500	100	10.100.151	100,00	34,71	SR	SR
477	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	29.099.500	7	10.100.151	100,00	34,71	SR	SR
478	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	20.750.950	20	6.575.617	80,00	31,69	ST	T
479	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	20.750.950	70	6.575.617	87,50	31,69	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
480	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	20.750.950	9	6.575.617	75,00	31,69	S	T
481	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	43.019.250	100	3.111.435	100,00	7,23	ST	SR
482	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	43.019.250	100	3.111.435	100,00	7,23	ST	SR
483	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	36.539.250	7	3.111.435	100,00	8,52	ST	SR
484	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	6.480.000	9	0	75,00	0,00	T	SR
485	KECAMATANG BUNGURAN TENGAH									
486	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
487	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
488	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	120.400.000	15	95.682.398	75,00	79,47	S	S
489	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	120.400.000	100	95.682.398	100,00	79,47	ST	S
490	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	120.400.000	1	95.682.398	100,00	79,47	ST	S
491	UNSUR KEWILAYAHAN									
492	KECAMATAN									
493	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	72,10	3.250.000	72	386.791	100,00	11,90	ST	SR
494	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	3.250.000	63	386.791	100,00	11,90	ST	SR
495	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.500.000	3	386.791	100,00	25,79	ST	SR
496	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
497	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1.750.000	2	0	100,00	0,00	ST	SR
498	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.981.385.343	100	2.412.771.063	100,00	80,93	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
499	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.153.420.500	1	1.907.921.182	100,00	88,60	ST	S
500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2.153.420.500	12	1.907.921.182	60,00	88,60	R	T
501	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	35.250.000	95	15.917.440	100,00	45,16	ST	SR
502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
503	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	35.250.000	2	15.917.440	100,00	45,16	ST	SR
504	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	360.741.000	60	194.885.211	100,00	54,02	ST	R
505	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	20.000.000	9	19.045.000	75,00	95,23	ST	T
506	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	8.130.000	9	5.580.000	75,00	68,63	S	R
507	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	116.665.000	9	80.044.500	75,00	68,61	S	R
508	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
509	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
510	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
511	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	215.946.000	67	90.215.711	100,00	41,78	ST	SR
512	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
513	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	35.321.500	0	0	0,00	0,00	SR	SR
514	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
515	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	10.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
516	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	15.160.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
517	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	10.161.500	0	0	0,00	0,00	SR	SR
518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	316.248.000	100	274.009.230	100,00	86,64	ST	T
519	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	42.090.000	9	39.357.193	75,00	93,51	S	ST
520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.420.000	9	3.162.000	75,00	30,35	S	SR
521	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	263.738.000	9	231.490.037	75,00	87,77	S	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
522	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	80.404.343	70	20.038.000	100,00	24,92	ST	SR
523	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	65.137.407	4	20.038.000	100,00	30,76	ST	SR
524	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5.506.936	1	0	20,00	0,00	SR	SR
525	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.880.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
526	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
527	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.880.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
528	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	32.164.250	100	20.326.723	100,00	63,20	ST	R
529	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	32.164.250	60	20.326.723	100,00	63,20	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
530	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	32.164.250	9	20.326.723	75,00	63,20	S	SR
531	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	8.964.250	100	7.902.019	100,00	88,15	ST	T
532	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	8.964.250	100	7.902.019	100,00	88,15	ST	T
533	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	8.964.250	4	7.902.019	100,00	88,15	ST	T
534	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	6.100.000	20	4.178.831	80,00	68,51	T	S
535	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	6.100.000	20	4.178.831	25,00	68,51	SR	S
536	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	6.100.000	6	4.178.831	50,00	68,51	SR	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
537	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	3.800.000	100	3.080.000	100,00	81,05	ST	T
538	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	3.800.000	100	3.080.000	100,00	81,05	ST	T
539	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	3.800.000	4	3.080.000	100,00	81,05	ST	T
540	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
541	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT									
542	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
543	SEKRETARIAT DAERAH									
544	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	207.617.943	20	207.454.805	100,00	99,92	ST	SR
545	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	207.617.943	100	207.454.805	100,00	99,92	ST	SR
546	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	207.617.943	1	207.454.805	100,00	99,92	SR	SR
547	UNSUR KEWILAYAHAN									
548	KECAMATAN									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
549	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,51	9.675.000	70	8.408.506	88,42	86,91	T	T
550	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	9.675.000	70	8.408.506	100,00	86,91	ST	T
551	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.025.000	3	4.658.506	100,00	92,71	ST	ST
552	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4.650.000	2	3.750.000	100,00	80,65	ST	T
553	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.645.556.797	100	3.713.973.753	100,00	79,95	ST	T
554	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.669.510.000	1	2.314.333.100	100,00	86,70	ST	T
555	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.669.510.000	19	2.314.333.100	100,00	86,70	ST	T
556	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	92.000.000	100	63.582.200	100,00	69,11	ST	T
557	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	16.000.000	1	15.750.000	100,00	98,44	ST	ST
558	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	76.000.000	3	47.832.200	100,00	62,94	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
559	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	403.275.797	60	368.767.800	100,00	91,44	ST	T
560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	27.894.000	12	23.245.000	100,00	83,33	ST	T
561	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	30.000.000	12	30.000.000	100,00	100,00	ST	T
562	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12.324.000	12	12.322.000	100,00	99,98	ST	S
563	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	20.635.297	12	20.630.400	100,00	99,98	ST	ST
564	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
565	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	202.924.500	9	187.810.000	900,00	92,55	ST	T
566	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	106.690.000	71	91.952.400	100,00	86,19	S	S
567	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.808.000	1	2.808.000	100,00	100,00	S	ST
568	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	438.847.000	70	245.315.034	100,00	55,90	S	T
569	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	46.947.000	3	43.318.034	100,00	92,27	S	T
570	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	391.900.000	5	201.997.000	100,00	51,54	SR	SR
571	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
572	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
573	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	685.995.000	100	600.220.213	100,00	87,50	ST	ST
574	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	48.215.000	12	47.003.500	100,00	97,49	ST	R
575	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.980.000	12	21.924.529	100,00	70,77	ST	ST
576	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	606.800.000	12	531.292.184	100,00	87,56	ST	R
577	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	355.929.000	100	121.755.406	100,00	34,21	SR	SR
578	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	112.755.000	6	92.581.406	100,00	82,11	SR	SR
579	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	12.000.000	5	12.000.000	100,00	100,00	ST	T
580	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
581	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	231.174.000	1	17.174.000	100,00	7,43	S	R
582	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	T
583	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	644.596.500	100	357.633.852	100,00	55,48	ST	R
584	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	48.455.000	60	47.381.560	100,00	97,78	ST	T
585	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	48.455.000	9	47.381.560	75,00	97,78	ST	ST
586	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	596.141.500	9	310.252.292	100,00	52,04	SR	SR
587	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	596.141.500	9	310.252.292	75,00	52,04	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
588	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	118.431.760	100	86.205.980	100,00	72,79	SR	SR
589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	118.431.760	100	86.205.980	100,00	72,79	ST	SR
590	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	118.431.760	8	86.205.980	100,00	72,79	ST	ST
591	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	9.250.000	20	6.715.626	80,00	72,60	S	ST
592	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	9.250.000	0	6.715.626	0,00	72,60	ST	SR
593	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	9.250.000	9	6.715.626	75,00	72,60	S	R
594	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	45.705.000	100	32.480.348	100,00	71,07	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
595	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	45.705.000	100	32.480.348	100,00	71,07	ST	S
596	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	31.550.000	7	19.325.348	100,00	61,25	ST	S
597	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	14.155.000	9	13.155.000	75,00	92,94	T	S
598	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	S
599	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN									
600	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
601	SEKRETARIAT DAERAH									
602	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	100	174.851.028	100	163.820.145	100,00	93,69	ST	R
603	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	174.851.028	100	163.820.145	100,00	93,69	S	T
604	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	174.851.028	1	163.820.145	100,00	93,69	SR	SR
605	UNSUR KEWILAYAHAN									
606	KECAMATAN									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
607	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		76,60	4.354.144	70	2.651.400	91,38	60,89		
608	SEKRETARIAT DAERAH		65	4.354.144	70	2.651.400	100,00	60,89	ST	ST
609	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	2	2.204.144	3	1.622.750	100,00	73,62	ST	ST
610	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	2	950.000	2	329.000	100,00	34,63	ST	ST
611	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	1.200.000	1	699.650	50,00	58,30		
612	UNSUR KEWILAYAHAN		85	3.279.026.430	75	2.476.006.455	88,24	75,51		
613	KECAMATAN		3,3	1.988.269.214	4	1.677.904.779	100,00	84,39	ST	R
614	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	10	1.988.269.214	10	1.677.904.779	100,00	84,39	ST	R
615	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	95	29.476.100	75	4.500.000	78,95	15,27	SR	S
616	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	29.476.100	3	4.500.000	100,00	15,27	ST	SR
617	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55	323.510.766	30	216.503.623	54,55	66,92	SR	R
618	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	0	0	0,00	0,00	T	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
619	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12	53.394.000	9	46.330.048	75,00	86,77	ST	T
620	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
621	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	36.450.000	9	30.749.500	75,00	84,36	T	SR
622	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	15.000.000	9	14.995.900	75,00	99,97	ST	SR
623	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	0	0	0	0,00	0,00	R	S
624	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	1	49.482.496	1	49.468.000	100,00	99,97	SR	SR
625	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	169.184.270	21	74.960.175	100,00	44,31	S	T
626	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
627	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65	164.614.404	70	99.250.000	100,00	60,29	S	T
628	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	S	ST
629	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	119.800.000	10	99.250.000	100,00	82,85	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
630	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	44.814.404	1	0	20,00	0,00	ST	ST
631	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
632	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	433.284.000	75	346.512.414	75,00	79,97	SR	SR
633	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
634	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	12	17.130.000	9	4.700.270	75,00	27,44	SR	SR
635	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	416.154.000	9	341.812.144	75,00	82,14	ST	T
636	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65	339.871.946	45	131.335.639	69,23	38,64	SR	SR
637	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	74.583.840	3	66.168.672	100,00	88,72	SR	SR
638	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	18.196.106	5	18.169.000	100,00	99,85	S	T
639	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	1	247.092.000	1	46.997.967	100,00	19,02	SR	SR
640	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
641	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	S	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
642	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	182.185.314	50	172.859.818	50,00	94,88	S	SR
643	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	55	182.185.314	40	172.859.818	72,73	94,88	ST	T
644	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	182.185.314	9	172.859.818	75,00	94,88	ST	T
645	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	35.227.504	75	24.990.298	75,00	70,94	ST	SR
646	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	35.227.504	75	24.990.298	75,00	70,94	SR	SR
647	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	35.227.504	5	24.990.298	100,00	70,94	SR	SR
648	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	5.717.052	20	2.781.500	80,00	48,65	SR	ST
649	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80	5.717.052	75	2.781.500	93,75	48,65	S	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
650	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12	5.717.052	18	2.781.500	100,00	48,65	S	ST
651	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	19.653.728	75	15.524.758	75,00	78,99	S	S
652	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	19.653.728	75	15.524.758	75,00	78,99	S	S
653	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	5	12.028.728	5	8.814.808	100,00	73,28	ST	S
654	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	7.625.000	9	6.709.950	75,00	88,00	T	SR
655	KECAMATAN SERASAN TIMUR									
656	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
657	SEKRETARIAT DAERAH									
658	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	191.812.250	20	189.320.305	100,00	98,70	ST	ST
659	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	191.812.250	100	189.320.305	100,00	98,70	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
660	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	191.812.250	1	189.320.305	100,00	98,70	ST	ST
661	UNSUR KEWILAYAHAN									
662	KECAMATAN									
663	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,00	31.353.925	72	30.838.972	91,88	98,36	ST	ST
664	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	78,50	31.353.925	71	30.838.972	89,65	98,36	T	ST
665	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.553.925	2	17.060.972	66,67	97,19	S	ST
666	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	13.800.000	2	13.778.000	100,00	99,84	ST	ST
667	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.848.347.130	100	3.197.327.972	100,00	83,08	ST	T
668	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.973.772.000	1	1.635.190.327	100,00	82,85	ST	T
669	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.973.772.000	12	1.635.190.327	78,57	82,85	S	T
670	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	90.447.770	100	50.060.348	100,00	55,35	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
671	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
672	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	90.447.770	5	50.060.348	60,00	55,35	R	R
673	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	78	607.520.610	100	537.929.471	93,75	88,55	ST	T
674	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	108.824.750	12	78.516.400	100,00	72,15	ST	T
675	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	50.068.620	12	50.065.000	100,00	99,99	ST	ST
676	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	60.200.000	12	52.852.600	100,00	87,80	ST	T
677	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	101.640.000	12	73.034.000	100,00	71,86	ST	S
678	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
679	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
680	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	286.787.240	55	283.461.471	100,00	98,84	ST	ST
681	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
682	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	78	205.354.250	80	54.522.669	100,00	26,55	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
683	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
684	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	54.854.250	3	42.522.669	100,00	77,52	ST	S
685	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	143.000.000	2	12.000.000	20,00	8,39	SR	SR
686	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	7.500.000	0	0	0,00	0,00	ST	ST
687	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	602.585.000	100	576.858.633	100,00	95,73	ST	ST
688	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.000.000	12	18.000.000	100,00	100,00	ST	ST
689	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	39.630.000	12	29.990.563	100,00	75,68	ST	S
690	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	544.955.000	12	528.868.070	100,00	97,05	ST	ST
691	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78	368.667.500	100	342.766.524	100,00	92,97	ST	ST
692	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	162.727.500	5	142.966.524	100,00	87,86	ST	ST
693	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	38.000.000	5	32.000.000	100,00	84,21	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
694	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	167.940.000	3	167.800.000	75,00	99,92	S	ST
695	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
697	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	519.194.250	100	473.722.250	100,00	91,24	ST	ST
698	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	519.194.250	58	473.722.250	75,00	91,24	ST	ST
699	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	519.194.250	12	473.722.250	100,00	91,24	ST	ST
700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	131.739.750	100	124.657.318	100,00	94,62	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
701	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	131.739.750	100	124.657.318	100,00	94,62	ST	ST
702	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	131.739.750	5	124.657.318	100,00	94,62	ST	ST
703	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	75.179.750	20	65.393.685	100,00	86,98	ST	T
704	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	75.179.750	100	65.393.685	100,00	86,98	ST	T
705	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	75.179.750	12	65.393.685	100,00	86,98	ST	T
706	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	107.669.250	100	101.734.250	100,00	94,49	ST	ST
707	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	107.669.250	100	101.734.250	100,00	94,49	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
708	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	50.369.250	5	48.559.250	100,00	96,41	ST	ST
709	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	57.300.000	12	53.175.000	100,00	92,80	ST	ST
710	KECAMATAN SUAK MIDAI									
711	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
712	SEKRETARIAT DAERAH									
713	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	157.754.250	20	157.273.290	100,00	99,70	ST	ST
714	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	157.754.250	100	157.273.290	100,00	99,70	ST	ST
715	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	157.754.250	1	157.273.290	100,00	99,70	ST	ST
716	UNSUR KEWILAYAHAN									
717	KECAMATAN									
718	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	7060	32.017.850	61	30.745.010	0,86	96,02	ST	ST
719	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	32.017.850	67	30.745.010	100,00	96,02	ST	ST
720	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	21.317.850	2	20.111.010	100,00	94,34	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
721	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.700.000	2	10.634.000	100,00	99,38	ST	ST
722	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.943.933.380	100	3.097.710.774	100,00	78,54	ST	ST
723	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.332.058.630	1	1.964.740.348	100,00	84,25	ST	ST
724	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	2.332.058.630	15	1.964.740.348	100,00	84,25	ST	ST
725	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	48.479.750	95	21.704.630	100,00	44,77	ST	ST
726	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	48.479.750	2	21.704.630	66,67	44,77	R	SR
727	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	629.846.280	60	475.442.214	100,00	75,49	ST	S
728	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	112.130.420	12	92.014.000	100,00	82,06	ST	S
729	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	96.650.000	12	72.449.500	100,00	74,96	ST	SR
730	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	421.065.860	27	310.978.714	77,14	73,86	S	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
731	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	160.854.250	50	106.929.760	100,00	66,48	ST	R
732	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	101.354.250	2	59.789.760	0,00	58,99	SR	R
733	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0	0	0,00	0,00	ST	ST
734	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	59.500.000	5	47.140.000	100,00	79,23	ST	ST
735	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	374.877.470	75	364.005.328	75,00	97,10	S	ST
736	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19.000.000	12	18.996.000	100,00	99,98	ST	ST
737	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	21.630.000	12	12.360.090	100,00	57,14	ST	R
738	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	334.247.470	12	332.649.238	100,00	99,52	ST	ST
739	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	397.817.000	70	164.888.494	100,00	41,45	ST	SR
740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	116.417.000	4	92.588.494	100,00	79,53	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
741	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	45.000.000	5	35.900.000	100,00	79,78	ST	S
742	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	236.400.000	1	36.400.000	100,00	15,40	ST	SR
743	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
744	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
745	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	454.166.156	100	336.887.474	100,00	74,18	T	R
746	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	454.166.156	45	336.887.474	81,82	74,18	ST	SR
747	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	454.166.156	12	336.887.474	100,00	74,18	SR	SR
748	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	117.208.050	100	93.184.146	100,00	79,50	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
749	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	117.208.050	75	93.184.146	75,00	79,50	ST	S
750	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	117.208.050	4	93.184.146	80,00	79,50	T	S
751	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	75.913.925	75	75.583.276	100,00	99,56	S	S
752	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	75.913.925	75	75.583.276	93,75	99,56	ST	T
753	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	75.913.925	12	75.583.276	100,00	99,56	S	T
754	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	111.747.850	75	79.116.812	75,00	70,80	T	T
755	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	111.747.850	75	79.116.812	75,00	70,80	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
756	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	49.847.850	2	44.891.812	50,00	90,06	T	T
757	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	61.900.000	12	34.225.000	100,00	55,29	S	T
758	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI									
759	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
760	SEKRETARIAT DAERAH									
761	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	196.659.424	20	184.038.149	100,00	93,58	ST	ST
762	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	196.659.424	100	184.038.149	100,00	93,58	ST	ST
763	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	196.659.424	1	184.038.149	100,00	93,58	ST	ST
764	UNSUR KEWILAYAHAN									
765	KECAMATAN									
766	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	71,10	31.312.400	69	26.480.034	97,19	84,57	ST	ST
767	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74,50	31.312.400	95	26.480.034	100,00	84,57	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
768	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	12.500.000	2	10.483.000	100,00	83,86	ST	T
769	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	18.812.400	2	15.997.034	100,00	85,03	ST	T
770	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.842.646.040	100	2.796.654.578	100,00	72,78	ST	T
771	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	2.252.503.000	95	1.775.414.481	100,00	78,82	ST	T
772	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	2.252.503.000	13	1.775.414.481	100,00	78,82	ST	T
773	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
774	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
775	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0,00	0,00	SR	T
776	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	555.914.340	60	396.217.283	80,00	71,27	ST	T
777	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	35.242.000	3	28.208.750	25,00	80,04	SR	SR
778	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	59.300.000	9	32.582.000	75,00	54,94	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
779	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	35.280.000	9	12.360.000	75,00	35,03	SR	SR
780	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	92.000.000	9	69.446.000	75,00	75,48	T	S
781	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	3.000.000	9	3.000.000	75,00	100,00	SR	T
782	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	96.286.000	1	93.200.000	100,00	96,79	S	SR
783	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	234.806.340	20	157.420.533	66,67	67,04	S	SR
784	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	S	S
785	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	112.284.800	75	67.970.664	100,00	60,53	S	ST
786	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	112.284.800	4	67.970.664	80,00	60,53	ST	ST
787	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	412.934.000	100	340.104.112	100,00	82,36	ST	T
788	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.000.000	9	16.652.000	75,00	92,51	R	SR
789	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	13.730.000	9	7.482.636	75,00	54,50	ST	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
790	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	381.204.000	9	315.969.476	75,00	82,89	T	R
791	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	509.009.900	93	216.948.038	100,00	42,62	ST	T
792	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	178.650.000	3	135.370.550	100,00	75,77	S	ST
793	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	48.101.900	5	32.730.000	100,00	68,04	S	R
794	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	282.258.000	1	48.847.488	100,00	17,31	S	T
795	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
796	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	468.069.000	75	276.289.306	75,00	59,03	ST	S
797	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	468.069.000	20	276.289.306	36,36	59,03	ST	S

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
798	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	468.069.000	9	276.289.306	75,00	59,03	T	SR
799	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	121.306.086	100	60.842.578	100,00	50,16	SR	SR
800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	121.306.086	100	60.842.578	100,00	50,16	S	R
801	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	121.306.086	6	60.842.578	100,00	50,16	SR	R
802	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	26.929.000	15	11.337.056	60,00	42,10	S	R
803	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	26.929.000	75	11.337.056	93,75	42,10	ST	SR
804	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	26.929.000	9	11.337.056	75,00	42,10	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
805	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	79.930.000	100	48.504.761	100,00	60,68	AT	SR
806	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	79.930.000	100	48.504.761	100,00	60,68	ST	S
807	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	79.930.000	6	48.504.761	100,00	60,68	ST	SR
808	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
809	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT									
810	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
811	SEKRETARIAT DAERAH									
812	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	256.462.250	20	187.357.923	100,00	73,05	ST	S
813	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	256.462.250	100	187.357.923	100,00	73,05	ST	S
814	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	256.462.250	1	187.357.923	100,00	73,05	ST	S
815	UNSUR KEWILAYAHAN									
816	KECAMATAN									

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
817	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	70,10	188.057.750	85	73.319.756	100,00	38,99	ST	S
818	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	188.057.750	95	73.319.756	100,00	38,99	ST	S
819	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
820	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
821	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	188.057.750	2	73.319.756	100,00	38,99	ST	SR
822	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.899.076.767	100	2.262.923.608	100,00	78,06	ST	SR
823	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.098.259.158	1	1.865.672.455	100,00	88,92	SR	SR
824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.098.259.158	12	1.865.672.455	100,00	88,92	SR	SR
825	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
826	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
827	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
828	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,40	247.041.500	76	78.534.406	100,00	31,79	ST	T
829	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
830	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	45.577.500	9	12.804.206	75,00	28,09	SR	SR
831	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
832	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.900.000	6	340.000	50,00	2,14	ST	SR
833	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	36.000.000	9	36.000.000	75,00	100,00	SR	SR
834	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4.744.000	1	2.529.000	100,00	53,31	S	SR
835	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	144.820.000	40	26.861.200	100,00	18,55	SR	SR
836	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
837	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	131.184.000	0	1.296.138	0,00	0,99	SR	SR
838	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
839	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	31.184.000	0	1.296.138	0,00	4,16	ST	SR
840	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
841	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	100.000.000	1	0	100,00	0,00	SR	SR
842	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	352.353.859	100	285.521.873	100,00	81,03	ST	T
843	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.001.000	9	715.000	75,00	71,43	S	S
844	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18.680.000	9	10.466.711	75,00	56,03	SR	SR
845	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	332.672.859	9	274.340.162	75,00	82,47	ST	SR
846	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	70.238.250	50	31.898.736	71,43	45,42	S	SR
847	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	53.138.250	2	14.858.736	100,00	27,96	S	S
848	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	17.100.000	3	17.040.000	60,00	99,65	S	R
849	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	S	SR
851	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
852	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	446.404.000	100	218.009.200	100,00	48,84	ST	SR
853	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	446.404.000	4	218.009.200	100,00	48,84	ST	SR
854	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	446.404.000	9	218.009.200	75,00	48,84	SR	SR
855	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	170.010.500	100	11.225.600	100,00	6,60	ST	SR
856	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	170.010.500	100	11.225.600	100,00	6,60	ST	SR
857	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	170.010.500	8	11.225.600	100,00	6,60	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
858	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	99.100.000	15	67.265.382	60,00	67,88	R	R
859	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	99.100.000	90	67.265.382	100,00	67,88	ST	R
860	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	99.100.000	9	67.265.382	75,00	67,88	S	R
861	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
862	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
863	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
864	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	KECAMATAN PULAU PANJANG									
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	86.219.250	20	57.231.154	100,00	88,43	ST	T
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	86.219.250	100	57.231.154	100,00	88,43	ST	T
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	64.719.250	1	57.231.154	100,00	88,43	ST	T
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69,70	30.160.000	70	2.500.000	100,00	8,29	ST	SR
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	30.160.000	70	2.500.000	100,00	8,29	ST	SR
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	26.360.000	2	2.500.000	100,00	9,48	ST	SR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3.800.000	2	0	100,00	0,00	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.488.367.966	100	2.004.689.470	100,00	57,47	ST	SR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.928.920.416	1	1.462.876.665	100,00	75,84	ST	SR
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1.928.920.416	10	1.462.876.665	100,00	75,84	ST	SR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	545.023.250	100	297.062.000	100,00	54,50	SR	SR
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	109.883.500	6	65.404.000	50,00	59,52	SR	SR
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	65.670.000	6	38.505.000	50,00	58,63	SR	SR
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	ST	R
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	369.469.750	8	193.153.000	44,44	52,28	SR	R
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	0	0	0	0,00	0,00	SR	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	763.825.700	20	93.090.801	36,36	12,19	SR	SR
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	52.075.700	2	40.609.801	100,00	77,98	ST	S
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	369.250.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	82.500.000	5	52.481.000	100,00	63,61	ST	R
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	260.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	134.082.600	100	99.181.004	100,00	73,97	ST	S
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	26.652.600	6	14.681.004	50,00	55,08	SR	R
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6.130.000	6	0	50,00	0,00	R	SR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	101.300.000	6	84.500.000	50,00	83,42	ST	S
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	116.516.000	75	52.479.000	100,00	45,04	ST	R
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	91.516.000	2	40.624.000	100,00	44,39	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	25.000.000	5	11.855.000	100,00	47,42	ST	SR
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	309.598.700	100	152.718.327	100,00	49,33	ST	SR
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	309.598.700	60	152.718.327	100,00	49,33	ST	SR
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	309.598.700	6	152.718.327	50,00	49,33	SR	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	122.633.700	100	39.521.743	100,00	32,23	ST	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	122.633.700	100	39.521.743	100,00	32,23	ST	SR
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	122.633.700	3	39.521.743	100,00	32,23	ST	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	95.362.000	25	17.275.391	100,00	18,12	ST	SR
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	95.362.000	50	17.275.391	62,50	18,12	ST	SR
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	95.362.000	6	17.275.391	50,00	18,12	ST	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	103.685.700	50	54.563.917	50,00	52,62	SR	R
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	103.685.700	50	54.563.917	50,00	52,62	SR	R

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	39.385.700	6	33.288.917	100,00	84,52	ST	T
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8	64.300.000	8	21.275.000	100,00	33,09	ST	SR
	KECAMATAN PULAU SELUAN									
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	166.804.250	20	165.419.250	100,00	99,17	ST	ST
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	166.804.250	100	165.419.250	100,00	99,17	ST	ST
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	166.804.250	1	165.419.250	100,00	99,17	ST	ST
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69,70	24.643.925	75	23.993.099	100,00	97,36	ST	ST
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50	24.643.925	75	23.993.099	100,00	97,36	ST	ST
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	13.543.925	3	12.993.099	100,00	95,93	ST	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	11.100.000	2	11.000.000	100,00	99,10	ST	ST
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.262.725.870	100	2.290.770.843	100,00	70,21	ST	ST
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.022.070.110	1	1.476.245.995	100,00	73,01	ST	ST
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	2.022.070.110	10	1.476.245.995	100,00	73,01	ST	ST
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	61.774.640	50	1.294.750	52,63	2,10	ST	S
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	S
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	61.774.640	1	1.294.750	50,00	2,10	ST	S
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	479.889.620	60	375.206.807	100,00	78,19	ST	S
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	55.965.000	6	51.427.000	50,00	91,89	SR	ST
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	42.900.000	6	42.347.000	50,00	98,71	SR	ST

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	64.500.000	6	62.211.000	50,00	96,45	SR	ST
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	73.831.520	1	67.330.000	100,00	91,19	ST	ST
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	242.693.100	20	151.891.807	100,00	62,59	SR	S
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	366.434.250	0	179.169.750	0,00	48,90	SR	SR
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	223.434.250	1	46.719.750	100,00	20,91	ST	R
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	38.000.000	3	30.000.000	75,00	78,95	S	S
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	105.000.000	5	102.450.000	100,00	97,57	ST	ST
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	272.177.500	100	211.883.688	100,00	77,85	ST	S
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.000.000	6	12.000.000	50,00	100,00	SR	SR

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	38.630.000	6	27.428.000	50,00	71,00	SR	SR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	221.547.500	6	172.455.688	50,00	77,84	ST	T
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	60.379.750	100	46.969.853	100,00	77,79	ST	S
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	39.000.000	6	27.826.500	100,00	71,35	ST	S
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	21.379.750	6	19.143.353	100,00	89,54	ST	T
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	324.147.500	100	294.756.000	100,00	90,93	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	324.147.500	30	294.756.000	54,55	90,93	R	ST
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	324.147.500	6	294.756.000	50,00	90,93	SR	T
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	72.759.750	100	60.918.588	100,00	83,73	ST	T
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	72.759.750	100	60.918.588	100,00	83,73	ST	T
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	72.759.750	3	60.918.588	100,00	83,73	ST	T
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	18.678.317	20	10.864.606	80,00	58,17	T	R
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	18.678.317	50	10.864.606	62,50	58,17	ST	T

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	18.678.317	6	10.864.606	50,00	58,17	ST	T
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	26.777.925	100	25.462.086	100,00	95,09	ST	ST
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	26.777.925	100	25.462.086	100,00	95,09	ST	ST
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	26.777.925	3	25.462.086	100,00	95,09	ST	ST
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						86,69	69,08	T	S
	Rata-rata Kegiatan						85,21	64,59	T	R
	Rata-rata Sub kegiatan						66,46	51,47	S	R

2.2.1.41 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,77% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,11% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 69,97% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 45,93%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 62,50% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,91%.

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,41	95.005.000	60	63.831.008	77,38	67,19	T	SR
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	78,50	95.005.000	60	63.831.008	76,31	67,19	ST	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	95.005.000	3	63.831.008	100,00	67,19	ST	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10	6.213.739.358	100	5.077.957.099	100,00	81,72	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.341.410.978	1	3.785.494.101	100,00	87,20	ST	SR
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	4.341.410.978	23	3.785.494.101	100,00	87,20	ST	SR
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	92	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	80	0	0	0	0,00	0,00	T	SR
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	659.018.380	60	401.933.984	100,00	60,99	ST	SR
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	192.918.380	3	138.214.500	100,00	71,64	S	SR
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	13.100.000	14	10.500.000	100,00	80,15	ST	SR
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	25.000.000	2	11.300.000	100,00	45,20	ST	SR
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	13.000.000	8	3.000.000	100,00	23,08	ST	SR
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	0	0	0,00	0,00	S	ST
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	415.000.000	193	238.919.484	100,00	57,57	R	SR
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	736.850.000	75	493.627.750	100,00	66,99	ST	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	711.000.000	1	493.627.750	100,00	69,43	R	ST
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	25.850.000	0	0	0,00	0,00	ST	T
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	55	392.260.000	100	358.420.872	100,00	91,37	SR	SR
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	41.900.000	6	28.899.000	50,00	68,97	S	SR
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	350.360.000	16	329.521.872	100,00	94,05	SR	SR
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara	55	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	0	0	0	0,00	0,00	SR	ST
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	84.200.000	100	38.480.392	100,00	45,70	SR	ST
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	84.200.000	8	38.480.392	100,00	45,70	SR	ST
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	75	2.237.192.000	80	1.731.588.007	100,00	77,40	SR	SR
33	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3	2.237.192.000	1	1.731.588.007	33,33	77,40	SR	SR
34	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1.202.210.000	66	1.108.137.907	100,00	92,18	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
35	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75	1.034.982.000	160	623.450.100	100,00	60,24	SR	SR
36	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	26	19.798.294.483	78	18.634.752.818	100,00	94,12	ST	SR
38	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	80	19.798.294.483	200	18.634.752.818	100,00	94,12	ST	SR
39	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	19.798.294.483	27	18.634.752.818	100,00	94,12	ST	SR
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	100	104.083.800	100	18.921.333	100,00	18,18	SR	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
41	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65	104.083.800	90	18.921.333	100,00	18,18	SR	SR
42	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	104.083.800	50	18.921.333	100,00	18,18		
43	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65	0	0	0	0,00	0,00		
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	70	310.341.000	75	75.048.100	100,00	24,18	ST	SR
45	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	65	310.341.000	75	75.048.100	100,00	24,18	ST	SR
46	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70	310.341.000	75	75.048.100	100,00	24,18	ST	SR
47	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
48	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100	1.606.688.180	100	818.655.900	100,00	50,95	ST	SR
49	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	100	1.606.688.180	100	818.655.900	100,00	50,95	ST	SR
50	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
51	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5	603.520.000	40	67.651.000	100,00	11,21	ST	SR
52	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30	732.553.180	75	554.554.900	100,00	75,70	ST	S

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
53	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	15.600.000	4	14.592.000	100,00	93,54	ST	ST
54	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	255.015.000	6	181.858.000	50,00	71,31	SR	S
	Rata-rata Program						96,77	59,11	ST	R
	Rata-rata Program						69,97	45,93	S	SR
	Rata-rata Program						62,5	41,81	R	SR

B2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya mencerminkan kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan Kabupaten Natuna saat ini dengan target yang telah direncanakan, serta perbedaan antara kondisi yang diharapkan di masa depan dengan situasi riil pada saat perencanaan disusun. Keberadaan permasalahan pembangunan menjadi dasar penting dalam merumuskan prioritas pembangunan pada tahun pelaksanaan RKPD, yang selanjutnya diuraikan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan. Proses identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan melalui verifikasi terhadap informasi yang bersumber dari gambaran umum daerah, data relevan lainnya, serta hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis per aspek dan urusan, dapat dirumuskan permasalahan pembangunan yang menjadi fokus penanganan pada tahun perencanaan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu Strategis)

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan merupakan kondisi atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta target prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD pada tahun rencana. Permasalahan ini diidentifikasi berdasarkan keterkaitannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kewajiban pelaksanaan kebijakan nasional maupun provinsi yang bersifat mandatory. Adapun permasalahan terkait prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat.
   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna masih rendah dengan kontraksi -3,57% pada 2024, jauh di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau 5,02%. Pendapatan per kapita yang rendah dan meningkatnya tingkat kemiskinan dari 4,43% (2020) menjadi 5,04% (2024) menunjukkan belum meratanya kesejahteraan. Perekonomian masih bergantung pada sektor pertambangan dan perikanan yang mengalami penurunan, sementara industri pengolahan hanya berkontribusi 0,78%. Investasi melambat, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi terbatas, serta distribusi pendapatan tidak merata. Potensi besar seperti cadangan gas 46 triliun kaki kubik dan perikanan 12% produksi nasional belum optimal dimanfaatkan akibat illegal fishing dan minimnya hilirisasi. Sektor pariwisata juga belum berkembang karena keterbatasan infrastruktur dan promosi. Untuk

mengatasi hal ini, diperlukan strategi pembangunan terarah melalui peningkatan kualitas SDM, diversifikasi ekonomi, penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

2) Konektivitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar.
   Kabupaten Natuna menghadapi keterbatasan konektivitas antar pulau dan akses terhadap layanan dasar akibat kondisi geografis kepulauan dan infrastruktur yang belum memadai. Transportasi laut dan udara masih terbatas, kapasitas dan frekuensi penerbangan perlu ditingkatkan, serta pembangunan jalan dan pelabuhan di berbagai pulau masih diperlukan. Keterbatasan ini berdampak pada sulitnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta belum meratanya konektivitas internet yang menghambat akses informasi dan layanan digital. Hambatan tersebut membatasi pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan perikanan. Peningkatan infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Natuna.

3) Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Sarana Prasarana Pembangunan.
   Permasalahan terkait belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pembangunan di Kabupaten Natuna mencakup keterbatasan kualitas infrastruktur dasar, belum meratanya distribusi sarana pelayanan publik antarwilayah, serta masih adanya ketimpangan ketersediaan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya aksesibilitas layanan dasar, terhambatnya pemerataan pembangunan antar-kecamatan, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi wilayah secara menyeluruh.

4) Belum Optimalnya Hilirisasi Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang inklusif.
   Hilirisasi sektor unggulan di Kabupaten Natuna belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, ditandai rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang pada 2024 hanya 0,78%, sehingga potensi sumber daya alam seperti perikanan dan pertambangan masih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah signifikan. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas industri, pasokan listrik yang belum stabil, konektivitas transportasi yang rendah, minimnya SDM terampil, regulasi dan insentif

investasi yang kurang menarik, serta terbatasnya akses pasar produk olahan lokal. Kondisi koperasi dan UMKM juga belum berkembang optimal, tercermin dari penurunan persentase koperasi berkualitas dan rendahnya jumlah wirausaha mikro. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi lapangan kerja di sektor hilir, sehingga diperlukan strategi terpadu meliputi penguatan infrastruktur industri, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemberian insentif investasi, dan perluasan akses pasar untuk mewujudkan hilirisasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5) Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia menuju Masyarakat yang Unggul.

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Natuna belum optimal, tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 78,60 yang masih di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau, tingginya Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,805, serta rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 43,86%. Partisipasi pendidikan juga masih menjadi tantangan, di mana pada 2024 tingkat partisipasi PAUD usia 5–6 tahun hanya 80% dan partisipasi pendidikan dasar usia 7–12 tahun turun dari 96,37% pada 2020 menjadi 71,06% pada 2024. Rendahnya kualitas SDM ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta minimnya program penguatan keterampilan kerja berbasis industri lokal. Diperlukan strategi holistik melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta kolaborasi lintas sektor agar pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus mendorong kesetaraan gender dan daya saing masyarakat.

6) Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi.

   Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Natuna belum optimal, ditandai dengan pemanfaatan teknologi yang masih terbatas dalam pelayanan publik, rendahnya adopsi digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan, dan keterbatasan infrastruktur teknologi akibat tantangan geografis daerah kepulauan. Meskipun Indeks SPBE meningkat dari 2,24 pada 2021 menjadi 3,61 pada 2024, capaian ini masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 sebesar 45,10 juga tergolong rendah. Keterbatasan jaringan telekomunikasi, akses internet yang belum merata, serta sarana pendukung digitalisasi yang belum memadai menjadi hambatan utama, ditambah dengan tingkat profesionalitas ASN yang berada pada kategori sedang (73,02) sehingga kompetensi aparatur dalam

mengelola sistem digital belum optimal. Kondisi ini menuntut percepatan pembangunan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi ASN, dan penguatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi agar reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7) Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup serta Potensi Kebencanaan yang Tinggi.
Meningkatnya potensi degradasi lingkungan hidup dan tingginya risiko bencana di Kabupaten Natuna menjadi tantangan serius, ditandai dengan peringkat ke-4 nasional untuk ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, serta ke-78 untuk ancaman cuaca ekstrem. Keterbatasan infrastruktur mitigasi bencana terlihat dari menurunnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (82,79% pada 2022 menjadi 72,88% pada 2023) dan kawasan pantai rawan abrasi (89,76% pada 2020 menjadi 12,82% pada 2023), disertai penurunan drastis layanan kesiapsiagaan bencana dari 91% pada 2022 menjadi 33,33% pada 2023. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal berisiko memperburuk degradasi, tercermin dari proyeksi daya dukung pangan yang anjlok dari 5,84 pada 2025 menjadi 0,004 pada 2029 serta Indeks Ketahanan Pangan 2024 sebesar 60,51 (kategori Agak Tahan, peringkat 350 dari 416). Selain itu, volume pengelolaan sampah menurun dari 56,26 m^3 pada 2022 menjadi 39,96 m^3 pada 2024, mengindikasikan lemahnya sistem pengelolaan limbah. Kondisi ini menuntut peningkatan infrastruktur mitigasi, penguatan sistem peringatan dini, strategi adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi agar ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencerminkan berbagai kendala, hambatan, atau kekurangan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Natuna. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya, belum optimalnya tata kelola pemerintahan, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanan publik, maupun dinamika kebijakan nasional dan provinsi yang memerlukan penyesuaian di tingkat daerah. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Rincian permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.140: Permsalahan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan :

No	Urusan	Permasalahan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1.1	Pendidikan	Masih terdapat anak usia sekolah yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang semestinya.
		Terbatasnya jumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di wilayah Kabupaten Natuna.
1.2	Kesehatan	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melakukan skrining penyakit Tuberkulosis (TBC).
		Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
		Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan kesehatan, termasuk logistik, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai.
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih terbatasnya cakupan dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi darat untuk menghubungkan antar wilayah, terutama di daerah terluar dan terpencil.
		Belum optimalnya pengelolaan tata ruang wilayah yang sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
		Keterbatasan infrastruktur dasar permukiman seperti sistem drainase, pengendalian banjir, dan pengelolaan air bersih.
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat kawasan permukiman yang tidak layak huni akibat keterbatasan kualitas bangunan, sanitasi, dan akses air bersih.
		Terbatasnya pembangunan perumahan baru yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
		Belum optimalnya penataan kawasan kumuh dan permukiman padat penduduk.
1.5	Keterntraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah personel aparatur pemadam kebakaran masih belum memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
		Terbatasnya jumlah personel Satpol PP yang berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
		Pelayanan informasi peringatan dini rawan bencana belum optimal.
		Sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi kebakaran di desa/kelurahan belum memadai.
1.6	Sosial	Bimbingan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih minim baik dari segi cakupan maupun kualitas.
		Belum tersedianya shelter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS.
		Masih banyak penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu yang belum memiliki akses terhadap alat bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial.
		Jumlah SDM dalam pelaksanaan bimbingan sosial masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	

No	Urusan	Permasalahan
2.1	Tenaga Kerja	Belum terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM tenaga kerja lokal.
		Belum terbentuknya Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah kejuruan.
		Kurangnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja ke luar negeri.
		Tidak tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdaftar secara resmi.
		Belum maksimalnya fasilitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1).
		SDM tenaga kerja lokal belum kompeten untuk bersaing di tingkat nasional.
		Ketersediaan program kejuruan belum sesuai minat dan bakat masyarakat akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
		Standar kejuruan belum memenuhi Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).
		Rendahnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja tidak tetap.
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peran, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan belum optimal, ditambah kurangnya kader perempuan di kelurahan dan desa yang jauh, serta minimnya kegiatan pemberdayaan perempuan.
		Pemahaman media massa terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang, sehingga pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal.
		Masih adanya pandangan di masyarakat bahwa perempuan tidak layak mengambil keputusan, serta adanya pola pikir di kalangan perempuan sendiri yang merasa tidak layak menjadi pemimpin.
		Perlindungan terhadap perempuan dan anak belum optimal.
2.3	Pangan	Ketersediaan bahan pangan belum stabil sepanjang tahun, yang berdampak pada fluktuasi pasokan dan harga di masyarakat.
		Akses distribusi komoditas pangan ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, masih terbatas.
		Pengelolaan lumbung pangan daerah belum optimal dalam menjaga cadangan pangan strategis.

No	Urusan	Permasalahan
		Penanganan kerawanan pangan masih berfokus pada daerah terdampak bencana, belum menyeluruh ke wilayah rawan pangan lainnya.
2.4	Pertanahan	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan tata kelola pertanahan di daerah.
		Pelaksanaan program pengelolaan tanah kosong belum optimal, khususnya pada kegiatan inventarisasi tanah kosong, akibat belum terselesaikannya permasalahan batas tanah masyarakat pada tahun 2024.
2.5	Lingkungan Hidup	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perizinan lingkungan, termasuk Persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (PUU LH), masih rendah.
		Nilai baku mutu air di beberapa lokasi masih di bawah standar, dengan kategori cemar ringan.
		Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum optimal, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan akhir.
		Pengelolaan ruang terbuka (RTH) hijau belum optimal
2.6	Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi dan pembaruan data kependudukan masih rendah.
		Pemanfaatan data kependudukan oleh pemerintah dan masyarakat luas belum optimal, baik untuk perencanaan, pelayanan publik, maupun kegiatan ekonomi.
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia pada kelembagaan desa masih terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
		Masih terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum memiliki unit usaha ekonomi masyarakat.
		Kapasitas pengelola BUMDes dalam manajemen usaha dan pengembangan bisnis masih terbatas.
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem pencatatan dan pelaporan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari pemangku kepentingan dan mitra kerja belum optimal.
		Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap manfaat dan keikutsertaan dalam program KB, penggunaan metode kontrasepsi modern, serta faktor penunjang lainnya masih rendah.
		Pemahaman PUS mengenai metode kontrasepsi jangka panjang (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP) belum optimal.

No	Urusan	Permasalahan
		Jumlah tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan *Clinical Training Unit* (CTU) masih terbatas.
2.9	Perhubungan	Layanan perhubungan, khususnya menuju wilayah yang memiliki potensi pembangunan perekonomian, belum optimal.
		Tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan uji KIR untuk pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
2.10	Komunikasi dan Informatika	Layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi belum optimal, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.
		Pemanfaatan dan penggunaan e-Government oleh perangkat daerah belum optimal.
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan program pengembangan UMKM belum maksimal, antara lain karena masih banyak usaha mikro yang belum mengajukan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk.
		Kemampuan manajerial koperasi dan UKM masih belum optimal.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk UKM masih rendah.
		Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan.
2.12	Penanaman Modal	Pemahaman pelaku usaha terkait prosedur pengurusan izin usaha, baik perizinan maupun non-perizinan, masih rendah.
		Peningkatan kualitas iklim investasi daerah belum optimal.
		Kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi di daerah masih belum memadai.
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	Data kewirausahaan yang diperoleh dari pihak kecamatan belum lengkap, sehingga pencapaian target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada tahun 2024 belum maksimal.
		Keterbatasan anggaran menghambat akomodasi peserta di luar wilayah Bunguran, sehingga target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada tahun 2024 tidak tercapai sepenuhnya.
		Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas untuk penyelenggaraan event, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan penyelenggara kegiatan olahraga belum optimal.
2.14	Statistik	Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan statistik sektoral masih terbatas.
2.15	Persandian	Fasilitas dan perlengkapan persandian belum memadai untuk mendukung keamanan informasi di pemerintah daerah.
		Pengelolaan persandian dan keamanan informasi belum mencakup seluruh perangkat daerah, ditambah

No	Urusan	Permasalahan
		keterbatasan infrastruktur dan SDM yang mampu mengoperasikannya
2.16	Kebudayaan	Dukungan kebijakan untuk pengembangan cagar budaya masih perlu ditingkatkan.
		Sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan masih belum optimal.
2.17	Perpustakaan	Kualitas pelayanan dan tata kelola perpustakaan daerah masih memerlukan peningkatan untuk menjangkau kebutuhan informasi masyarakat secara lebih luas.
		Akses dan pemerataan literasi di berbagai wilayah belum sepenuhnya terwujud.
2.18	Kearsipan	Kapasitas dan jumlah sumber daya manusia di bidang kearsipan pada perangkat daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih perlu diperkuat untuk mendukung pengawasan kearsipan internal dan eksternal.
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	
3.1	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.
3.2	Pariwisata	Biaya transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna masih relatif tinggi.
		Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan pengelolaan objek wisata masih terbatas.
3.3	Pertanian	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian masih belum optimal.
		Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia (petugas kesehatan hewan/medik/paramedik).
		Harga sarana produksi pertanian masih tinggi dan tidak sebanding dengan nilai jual hasil produksi.
		Hilirisasi dan pemasaran produk pertanian belum berjalan optimal.
3.4	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran produk unggulan daerah
		Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah
3.5	Perindustrian	Masih terbatasnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standar, tersertifikasi, dan memiliki izin resmi
		Belum tersedianya data pemantauan dan pengawasan izin IUKI dan IPKI
		Belum optimalnya pengembangan sentra industri berbasis produk unggulan daerah
		Kendala transportasi yang terbatas sehingga berdampak pada aktivitas produksi dan ketersediaan bahan baku
3.6	Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi belum berjalan optimal sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
		Masih terdapat permasalahan transmigrasi yang belum terselesaikan secara tuntas, meliputi penyelesaian sertifikat hak milik transmigran, pelepasan kawasan hutan untuk lahan usaha II (LU2), penyelesaian aset transmigrasi, penanganan lahan restan, dan lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) murni.

No	Urusan	Permasalahan
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
4.1	Sekretariat Daerah	Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik masih rendah, ditandai dengan minimnya inovasi, serta belum optimalnya sosialisasi penggunaan sistem pengaduan masyarakat.
		Keterbatasan infrastruktur teknologi, regulasi yang kompleks dan dinamis, serta kondisi eksternal yang kurang kondusif turut menghambat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
		Inovasi dan upaya dari perangkat daerah dalam peningkatan layanan publik berbasis digital masih terbatas, banyak layanan yang terdaftar tidak berjalan, serta belum ada evaluasi yang memadai terhadap mutu layanan.
4.2	Sekretariat DPRD	NIHIL
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
5.1	Perencanaan	Masih terdapat ketidaksamaan persepsi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, dan indikator kegiatan pada dokumen perencanaan.
5.2	Keuangan	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan.
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran.
		Belum optimalnya penerimaan dari sektor PAD.
5.3	Kepegawaian	Besarnya biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan classical.
		Inisiatif yang rendah dari pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi bersertifikat.
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Pendidikan dan Pelatihan tidak diprioritaskan pada RPJMD Tahun 2021–2026.
5.5	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan berbasis inovasi dan IT.
5.6	Pengelolaan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
6.1	Inspektorat	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi APIP.
		Lemahnya pemahaman terhadap SPIP.
7	Unsur Kewilayahan	
7.1	Kecamatan	Nihil
	1) Bunguran Timur	
	2) Bunguran Barat	
	3) Bunguran Timur Laut	
	4) Bunguran Selatan	
	5) Bunguran Tengah	
	6) Bunguran Utara	
	7) Pulau Tiga	
	8) Serasan	
	9) Serasan Timur	
	10) Midai	
	11) Kecamatan Subi	

No	Urusan	Permasalahan
	12) Pulau Laut	
	13) Bunguran Batubi	
	14) Suak Midai	
	15) Pulau Tiga Barat	
	16) Pulau Seluan	
	17) Pulau Panjang	
8	Unsur Pemerintahan Umum	
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Nihil



BAB 3

KERANGKA EKONOMOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Tahun 2026 menandai arah kebijakan ekonomi dan fiskal pertama pemerintahan hasil Pemilu 2024. Oleh karena itu, penyusunan arah kebijakan berperan strategis dalam mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 — bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Arah kebijakan ekonomi nasional 2026 juga tidak terlepas dari pada semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi harus berorientasi pada kemakmuran rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasiona.

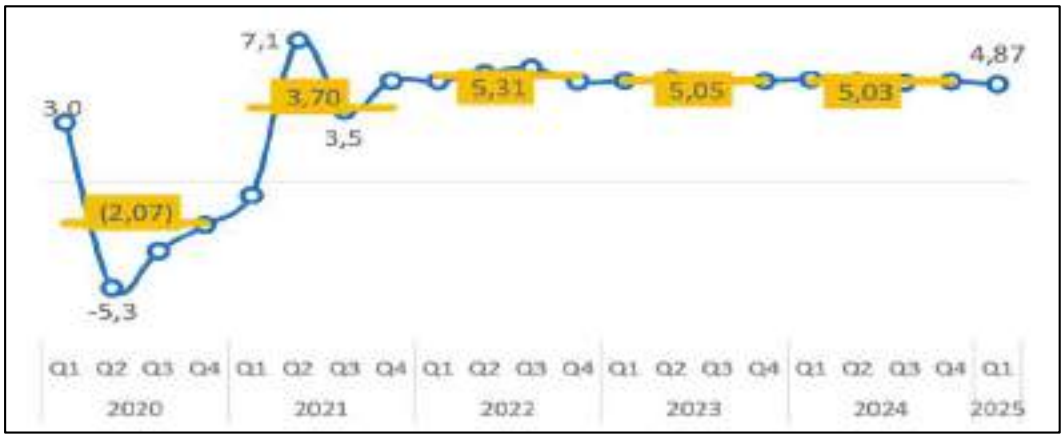
Secara global, tahun 2024–2025 ditandai dengan perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya ketidakpastian. IMF dalam World Economic Outlook (April 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,2 persen pada 2024 menjadi 2,8 persen pada 2025, dan baru pulih sedikit menjadi 3,0 persen pada 2026 — di bawah rata-rata historis 3,7 persen. Ketegangan geopolitik dan perang tarif Amerika Serikat terhadap 145 negara mitra dagang menekan rantai pasok dunia, meningkatkan biaya perdagangan, dan memicu fragmentasi ekonomi global. Kondisi ini berdampak langsung pada perdagangan dan arus modal negara berkembang, termasuk Indonesia.

Fluktuasi global tersebut berimplikasi terhadap pelemahan perdagangan dunia. Volume perdagangan global diproyeksikan turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 1,7 persen pada 2025. Sementara itu, harga komoditas energi — minyak, batu bara, dan gas — mengalami penurunan tajam, meski harga pangan seperti beras dan CPO sempat naik akibat fenomena El Niño 2024. Tekanan ini diikuti dengan volatilitas arus modal ke negara-negara berkembang dan depresiasi nilai tukar yang mendorong risiko inflasi. Dalam situasi demikian, arah kebijakan ekonomi Indonesia 2026 difokuskan pada penguatan stabilitas makro, ketahanan eksternal, dan daya saing nasional.



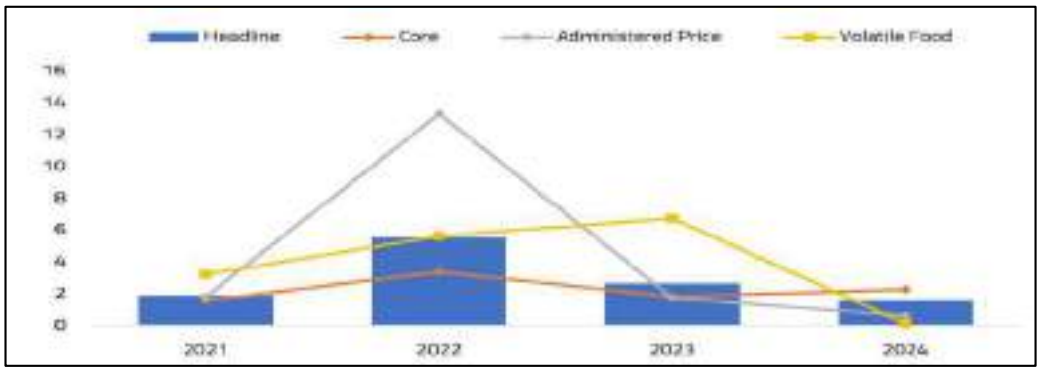
Gambar 3.1: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Global (2023-2026)
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,03 persen, melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Pertumbuhan Triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen (yoy) menunjukkan kemampuan ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal. Sumber utama pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94 persen dan berkontribusi 54 persen terhadap PDB, serta investasi yang meningkat 4,61 persen, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.



Gambar 3. 2: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2020-2025)
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

Dari sisi inflasi, Indonesia berhasil menurunkan tekanan harga hingga 1,6 persen pada 2024, terendah dalam dua dekade terakhir. Stabilitas harga pangan, normalisasi pasokan pasca-El Niño, serta koordinasi kebijakan pengendalian inflasi pusat-daerah melalui TPIP dan TPID menjadi faktor utama. Pada 2025, inflasi diperkirakan terkendali di kisaran 2,0–2,5 persen, mendukung daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik. Stabilitas ini menjadi pondasi arah kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada penguatan permintaan domestik sebagai penopang utama pertumbuhan.



Gambar 3.3: Perkembangan Inflasi Indonesia (2021-2024)
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

Dari sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap surplus sebesar USD7,2 miliar pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya (USD6,3 miliar). Namun, Neraca Transaksi Berjalan (NTB) mengalami defisit USD8,9 miliar (0,6 persen dari PDB) akibat menurunnya harga komoditas ekspor utama dan meningkatnya impor barang modal. Surplus perdagangan barang masih tinggi (USD39,9 miliar) namun menurun dibandingkan 2022. Kondisi ini menuntut penguatan diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah produk hilirisasi, dan diplomasi ekonomi internasional yang lebih aktif.

Struktur pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan sebagai kontributor utama. Tahun 2024, sektor manufaktur tumbuh 4,43 persen, didorong industri berbasis hilirisasi logam dasar (13,34 persen) dan makanan-minuman (5,9 persen). Sektor pertanian yang sempat melambat pada 2024 kembali pulih pada Triwulan I 2025 dengan lonjakan 10,52 persen (yoy) berkat reformasi tata kelola pupuk dan peningkatan produktivitas beras nasional. Sementara sektor pertambangan tumbuh 4,9 persen pada 2024, ditopang peningkatan produksi tembaga dan nikel.

Arah kebijakan ekonomi nasional 2026 menempatkan hilirisasi industri sebagai motor utama transformasi ekonomi. Pemerintah memperluas kebijakan hilirisasi tidak hanya di sektor mineral, tetapi juga pertanian, perikanan, energi, dan industri kimia dasar. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kapasitas industri dalam negeri menghadapi fragmentasi global. Kebijakan ini juga berimplikasi langsung terhadap daerah seperti Kabupaten Natuna, yang memiliki potensi besar pada sektor energi, perikanan, dan maritim.

Pemerintah juga memprioritaskan transformasi sumber daya manusia (SDM) sebagai penopang utama produktivitas ekonomi. Program peningkatan keterampilan, pendidikan vokasi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. Di sisi lain, kebijakan insentif fiskal seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik, perumahan, dan sektor strategis bertujuan menjaga konsumsi dan mempercepat adopsi industri ramah lingkungan.

Dari sisi fiskal, kebijakan 2026 dijalankan dengan prinsip ekspansif terarah dan terukur. Pemerintah akan menjaga defisit APBN dalam batas aman, namun tetap memberikan ruang untuk kebijakan countercyclical. Belanja negara difokuskan pada kegiatan produktif: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya tahan fiskal nasional.

Pada sisi pendapatan, arah kebijakan diarahkan untuk memperkuat mobilisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang berkeadilan dan perluasan basis pajak. Implementasi core tax system dan digitalisasi pelayanan perpajakan menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi

administrasi dan transparansi fiskal. Pendapatan negara bukan pajak juga dioptimalkan, terutama dari sektor SDA dan aset negara, melalui tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kebijakan pembiayaan diarahkan secara inovatif namun tetap prudent, melalui pengembangan sovereign wealth fund seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pembiayaan kreatif tersebut ditujukan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan menarik investasi strategis. Dengan pendekatan ini, APBN tidak hanya berperan sebagai instrumen belanja, tetapi juga sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Kebijakan ekonomi nasional 2026 juga menekankan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas utama. Pemerintah memperkuat sistem distribusi dan logistik pangan, memperluas cadangan pangan nasional, serta mendorong investasi pada energi baru dan terbarukan. Dalam konteks daerah, seperti Kabupaten Natuna, kebijakan ini membuka ruang bagi peningkatan peran strategis sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan baru yang berdaya saing tinggi.

Proyeksi pertumbuhan yang positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk secara responsif menjawab tanda-tanda perlambatan ekonomi yang muncul sebagai rambatan pelemahan ekonomi global.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat terus dijaga seiring dengan inflasi yang terkendali, dengan proporsi sebesar 54,53% dari keseluruhan PDB sektor pengeluaran dan tercatat mengalami pertumbuhan yang tinggi. Hal ini akan berefek terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sisi konsumsi. BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi pada sub komponen transportasi dan komunikasi dan estoran dan hotel. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor. Hal ini tecermin dari momen Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan nilai ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa.

Komponen lain dalam PDB sektor pengeluaran yang ikut memberi dampak pertumbuhan yang positif termasuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang dipengaruhi oleh pasokan impor barang modal khususnya jenis mesin dan kendaraan. Selain itu, terdapat komponen ekspor yang juga diproyeksi turut tumbuh positif melalui ekspor barang non-migas antara lain seperti lemak & minyak hewan/nabati; besi & baja; mesin & peralatan listrik; serta kendaraan dan bagiannya. Pertumbuhan ekspor jasa salah satunya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh positif. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain melalui kebijakan belanja yang produktif dan berkualitas, peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), serta penguatan usaha rakyat. P-KP yang tumbuh positif diperkirakan akan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian, mendukung keberlangsungan transformasi ekonomi, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Selain itu, tren perbaikan kinerja investasi diproyeksikan berlanjut pada 2025. Konsumsi domestik yang masih kuat dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi, produktivitas, serta daya saing, akan menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja investasi pada tahun 2025. Pengembangan dan mulai beroperasinya berbagai industri hilir komoditas unggulan (mineral dan hasil pertanian) diharapkan mampu menjadi kontributor aktivitas investasi. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, kawasan perkantoran dan hunian di IKN, transportasi, hingga layanan perkotaan di wilayah metropolitan diharapkan secara langsung mendukung aktivitas PMTB dan melalui efek multiplier mengakselerasi investasi sektor swasta. Instrumen kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong optimalisasi dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal yang terukur dan terarah mendorong penyerapan tenaga kerja, menunjang akselerasi ekonomi hijau, serta mendukung UMKM. Potensi terciptanya kepastian pascapemilu baik global maupun nasional juga diharapkan akan turut menguatkan keyakinan investor.

Seterusnya, kinerja ekspor tahun 2025 diharapkan kembali menguat di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendorong kinerja ekspor, diantaranya (i) mendorong akselerasi investasi berorientasi ekspor; (ii) meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk dapat menciptakan produk ekspor baru; (iii) memperluas program hilirisasi yang tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan melainkan juga pada komoditas lainnya; (iv) perbaikan infrastruktur konektivitas, pelabuhan, dan persoalan ketenagakerjaan; serta (v) menarik FDI yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, diperlukan strategi yang komprehensif yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan ekonomi.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi

yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah.

Pada tahun 2025 inflasi diperkirakan mencapai 2,5 persen didukung oleh tingkat permintaan yang terjaga. Pada triwulan I 2025, inflasi sempat berada di luar rentang sasaran karena adanya stimulus diskon listrik untuk mendukung daya beli. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut bersifat sementara. Hingga April 2025, inflasi sudah kembali dalam rentang sasaran, mencapai 2,0 persen (yoy), didukung oleh harga pangan dan energi yang terkendali. Inflasi inti di level 2,5 persen, mengindikasikan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi kelompok volatile food terjaga rendah di 0,64 persen dan administered price pada level 1,25 persen, didukung koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Bank Indonesia. Meskipun demikian, risiko transmisi dari ketidakpastian global pada inflasi domestik perlu tetap diwaspadai. Kebijakan yang antisipatif jelang hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Tahun Baru juga perlu tetap dilaksanakan untuk menjaga tingkat harga yang stabil.

Harga pangan di tahun 2025 juga diharapkan tetap stabil di didorong oleh cuaca yang lebih kondusif dan fokus Pemerintah dalam penguatan pasokan pangan dalam negeri. Namun demikian, disrupsi jangka pendek dari beberapa program nasional seperti program MBG terhadap pasokan nasional tetap perlu dikelola secara hati-hati. Penguatan cadangan pangan diharapkan dapat menjadi buffer dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga. Koordinasi TPIP-TPID yang kuat dalam upaya

pengendalian inflasi di pusat dan daerah terus didorong untuk mengurangi disparitas harga antarwaktu antardaerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30– 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Tabel 3. 1 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Konsmumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53 – 5,83
2	Konsumsi Pemerintah	6,85 – 6,96
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	6,17 – 7,18
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,05 – 7,17
5	Impor Barang dan Jasa	5,80 – 6,30
Pertumbuhan PDB		5,80 – 6,30

Sumber: RKP 2026 Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah)

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor demand side pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan

mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor- Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

Tabel 3. 2: Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Sisi Lapangan Usaha	
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
	Industri Pengolahan	5,85–6,38
	Pengadaan Listrik, Gas dan Produk Es	5,68–6,10
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
	Konstruksi	7,80–7,91
	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	9,67–9,82
	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
	Real Estate	2,78–2,98
	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
	Jasa Lainnya	7,24–7,76
	PERTUMBUHAN PDB	5,80–6,30
2	Sisi Pengeluaran	
	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
	Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	6,17–7,18
	Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
	Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50
	PERTUMBUHAN PDB	5,80–6,30

Sumber: RKP 2026 Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah)

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi nasional 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas makro, memperdalam reformasi struktural, dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral akan menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia menghadapi fragmentasi global. Bagi daerah seperti Kabupaten Natuna, pemahaman terhadap arah kebijakan ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan memperkuat posisi daerah dalam agenda transformasi ekonomi nasional.

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam KEM-PPKF 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah 2026 dapat membawa dampak langsung terhadap arah pembangunan di daerah, termasuk bagi Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan Kabupaten Natuna pada

khususnya. Fokus pemerintah pusat pada penguatan stabilitas makro, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta pemerataan pembangunan wilayah menjadi pedoman penting bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang selaras dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global. Dalam konteks tersebut, Natuna memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi maritim di kawasan barat Indonesia melalui penguatan sektor unggulan seperti perikanan, migas, pariwisata bahari, dan ekonomi digital.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil pada kisaran 5,0 persen dan inflasi terjaga di bawah 3 persen, kondisi makro ini menciptakan peluang bagi daerah untuk memperluas investasi dan menggerakkan sektor produktif. Kebijakan hilirisasi nasional yang kini mencakup sektor pertanian, perikanan, dan energi membuka kesempatan bagi Natuna untuk membangun rantai nilai industri perikanan dan energi terintegrasi, sekaligus memperkuat daya saing ekspor daerah. Selain itu, arah kebijakan nasional yang menekankan transformasi digital, penguatan SDM, dan pemberdayaan UMKM menjadi landasan penting untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi pembangunan dengan prioritas nasional, terutama dalam mengembangkan kawasan industri maritim, memperluas akses logistik dan transportasi laut, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ekonomi nasional 2026 diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menempatkan Provinsi Kepulauan Riau maupun Kabupaten Natuna pada khususnya sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RKP 2026, Kabupaten Natuna ditempatkan dalam kerangka keunggulan kompetitif sebagai kawasan komoditas unggulan Ekonomi Biru, kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan keunggulan swasembada energi, serta kawasan konservasi /rawann bencana Geopark Natun

Tabel 3.3 Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

No	Komponen Marko	Sasaran 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,4
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	181,7 – 187,2
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,6
4	Kemiskinan (%)	3,00 – 4,00
5	Rasio Gini	0,296 – 0,319
6	Indeks Modal Manusia	0,63
7	Penurunan Intensitas Emisi KRG (%)	1,00
8	IKLH Daerah	71,20
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92 – 6,35

Sumber: RKP 2026 Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah)

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025 Bank Indonesia, Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,60% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan komponen Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan. Inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok: (1) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (2) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun; serta (3) kelompok pendidikan.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani. Prospek perekonomian global diprakirakan tetap tumbuh stabil, meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tetap kuat diindikasikan dapat menjadi faktor pendorong perekonomian global. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia juga diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang. Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan

rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	Rasio Gini	Indeks	0,353
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33 – 5,50
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,25 - 4,75
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	6,06 – 6,36
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	66,46
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	Bagus
7	Indeks Harmoni	Indeks	0,61
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	169,22
9	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp. Juta per tahun	5,03
10	Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	0,353

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat meliputi:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: (a) Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA); (b) Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik; dan (c) Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and

Exhibition) serta quality tourism. b. Mendukung implementasi kebijakan short term visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri. c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.

3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat local value chain (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS cross border.
6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daera (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produkproduk unggulan yang berorientasi ekspor.
8. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (a) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (b) penguatan kapasita budidaya pangan mandiri; (c) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (d) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (e) dukungan optimalisasi pasa murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (f) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (g) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
9. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta Pembangunan greenhouse untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
10. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat

koordinasi, rapat teknis, hingga High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakankebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.

11. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
12. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor. 6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna

Dalam melihat kondisi perekonomian Kabupaten Natuna secara umum, hal ini dapat dijelaskan dari pembentukan Nilai Produk Domestik Regional Bruto yang terjadi di dalam perekonomian Kabupaten Natuna. Dimana PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2024 mencapai 14,26 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,6 persen atau sekitar 0,53 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,79 triliun rupiah. Sedangkan derdasarkan harga berlaku, angka PDRB juga mengalami penurunan yang cukup tinggi, yakni dari 23,51 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 22,69 triliun rupiah pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya berkontribusi di bawah 5 persen. Sedangkan menurut pengeluaran, distribusi paling besar terdapat pada jenis pengeluaran Ekspor Neto barang dan jasa. Pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kabupaten natuna mengalami kontraksi sebesar -3,57 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis lapangan usaha, kontraksi tersebar terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -6,12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.5: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,38	1,63	3,28	4,00	1,18
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,82	-0,02	-0,96	-0,22	-6,12
3	Industri Pengolahan	1,68	1,14	1,20	0,02	3,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,49	0,39	3,17	6,16	6,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,75	8,43	3,32	3,43	0,05
6	Konstruksi	-5,06	-4,52	0,51	4,02	0,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,75	1,83	4,71	3,82	5,94
8	Transportasi dan Pergudangan	-22,09	1,12	11,74	4,72	-2,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,05	4,31	3,75	3,46	3,01
10	Informasi dan Komunikasi	8,34	7,42	4,23	0,08	0,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	0,48	1,67	2,82	2,33
12	Real Estate	3,50	4,50	3,52	3,22	6,83
13	Jasa Perusahaan	-8,13	1,19	8,23	1,99	-1,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,49	-1,58	2,45	0,73	9,67
15	Jasa Pendidikan	-0,36	4,46	3,11	0,61	4,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,95	6,01	3,61	1,02	5,40
17	Jasa lainnya	-0,40	0,31	3,60	4,46	3,86
	Produk Domestik Regional Bruto (Dengan Migas)	**-4,29**	**0,02**	**0,11**	**0.85**	**-3,57**
	Produk Domestik Regional Bruto (Tanpa Migas)	**-2,93**	**0,12**	**2,80**	**3,45**	**2,42**

Sumber: PDRB Kabupaten Natuna 2020-2024, diolah (2025).

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dibagi menjadi dua yakni pertumbuhan ekonomi PDRB dengan minyak dan gas serta pertumbuhan ekonomi PDRB tanpa minyak dan gas. Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil mengingat kontribusi minyak dan gas di Kabupaten Natuna sangat besar. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan peningkatan pasca pandemi COVID-19 meskipun masih tergolong rendah dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 0,85 persen dan pada tahun 2024 menurun menjadi -3,57 persen. Namun pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 terlihat lebih tinggi dimana pencapaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 3,45 persen dan tahun 2024 menurun menjadi 2,42 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi adalah pada pertumbuhan PDRB kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,67%), real estate (6,83), pengadaan listrik dan gas

(6,34%) dan diikuti perdagangan besar dan eceran (5,94%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,40%).

Selain itu, terdapat indikator lain yang dapat menunjukkan sejauh mana penciptaan nilai ekonomi dalam output yang dihasilkan dalam PDRB Kabupaten Natuna dihitung menurut ukuran rata-rata atau disebut dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah indikator kemakmuran yang dihitung dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dibagi jumlah penduduk. Nilai ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta potensi sumber daya alam dan faktor produksi di wilayah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata, PDRB per kapita tetap relevan untuk melihat tren peningkatan pendapatan agregat.

Pertumbuhan PDRB per kapita dengan migas menurun dari 290,85% (2022) menjadi 268,37% (2024), sedangkan tanpa migas tumbuh positif dari 75,57% (2021) menjadi 87,84% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor produksi dan potensi sumber daya alam sangat memengaruhi fluktuasi pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Natuna. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 6: PDRB Per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB dengan Migas (juta rupiah)	18.405.913	20.870.156	24.265.430	23.507.240	22.692.670
	PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	6.145.656	6.285.249	6.716.388	7.187.080	7.494,090
2	Jumlah Penduduk	81.321	82.279	83.430	84.556	85.660
3	**PDRB Perkapita**					
	PDRB Perkapita dengan Migas	226,34	253,65	290,85	278,01	268,37
	PDRB Perkapita Tanpa Migas	75,57	76,39	80,50	85,00	87,48

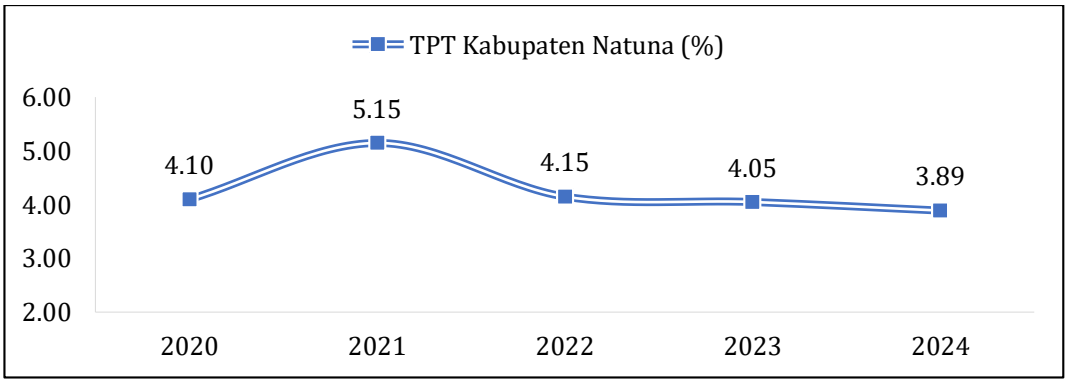
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, diolah (2025).

PDRB per kapita dengan migas di Kabupaten Natuna mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir yaitu menurun pada tahun 2023 dan menurun kembali pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari komoditas minyak dan gas di Kabupaten Natuna, maka PDRB per kapita non migas dengan migas terpantau cukup jauh dan dari segi analisis kesejahteraan masyarakat, maka lebih relevan jika melihat pada PDRB non migas. Adapun pencapaian PDRB per Kapita non migas di Natuna pada tahun 2023 mencapai 85,00 persen per kapita dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,50 persen per kapita. Adapun PDRB per Kapita non migas tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.

Selain itu, kinerja ekonomi Kabupaten Natuna dapat ditunjukkan dari perkembangan tingkat pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Natuna dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori

Angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Angka pengangguran di Kabupaten Natuna memiliki pergerakan fluktuatif dan mencapai kondisi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,15 persen. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga di tahun 2023 pengangguran menurun menjadi 4,05 persen dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 3,89 persen. Meskipun begitu, perlu ditelaah lebih dalam terkait tenaga kerja di Kabupaten Natuna, khususnya dalam hal kompetensi maupun keahlian sehingga terlihat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3. 4: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, diolah (2025).

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, serta memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten Natuna sebagai kawasan terdepan yang memiliki posisi strategis di perbatasan negara dan berdekatan langsung dengan jalur perdagangan internasional serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN, maka Kabupaten Natuna memiliki potensi strategis untuk mengoptimalkan peran dalam merespons dinamika perekonomian regional dan global secara adaptif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Natuna diarahkan pada upaya penguatan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah. Pada tingkat global, proyeksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren moderat di kisaran 3,1 hingga 3,2 persen. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,87 persen, yang terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, dan aktivitas ekspor. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah regional menunjukkan kinerja ekonomi yang

positif dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen pada Triwulan I Tahun 2025, ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa perusahaan.

Sebagai daerah kepulauan yang terletak di wilayah perbatasan negara, Kabupaten Natuna memiliki keunggulan komparatif di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan pada optimalisasi potensi sumber daya alam lokal, melalui penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan industri pengolahan hasil laut, serta pemanfaatan peluang ekspor komoditas perikanan yang sejalan dengan tren pertumbuhan net ekspor di tingkat provinsi. Pengembangan sektor jasa maritim dan logistik juga menjadi prioritas strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan penguatan konektivitas antarwilayah.

Selanjutnya, sektor pariwisata bahari perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya mendukung diversifikasi struktur ekonomi daerah, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam menghadapi potensi perlambatan pada sejumlah sektor seperti pertambangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan—sebagaimana tercermin di tingkat provinsi—Kabupaten Natuna perlu memperkuat ketahanan ekonomi melalui dorongan terhadap diversifikasi usaha berbasis potensi lokal. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor perikanan, pertanian, dan jasa pendukung pariwisata, menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi pengeluaran, Kabupaten Natuna perlu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mendorong peningkatan investasi melalui akselerasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pelabuhan perikanan, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sarana pendukung sektor pariwisata. Selain itu, belanja daerah hendaknya diprioritaskan untuk program produktif dan padat karya guna menjamin stabilitas pendapatan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengendalian inflasi juga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meskipun inflasi di tingkat Provinsi Kepulauan Riau relatif stabil pada level 2,01 persen secara tahunan, Kabupaten Natuna tetap perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok dan layanan dasar masyarakat. Untuk itu, penguatan sistem logistik dan

ketahanan pangan lokal menjadi prioritas utama guna menjaga keterjangkauan harga di wilayah kepulauan yang rentan terhadap fluktuasi harga akibat keterbatasan akses.

Secara spasial, diperlukan penguatan konektivitas ekonomi Kabupaten Natuna dengan pusat-pusat pertumbuhan utama di Provinsi Kepulauan Riau, terutama Batam dan Bintan, serta pengembangan jejaring perdagangan dan logistik ke wilayah perbatasan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi ekonomi Natuna dalam konteks pembangunan regional dan global, serta mempertegas posisinya sebagai wilayah strategis nasional.

Tabel 3. 7: Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,60
2.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	Rp. 91,24
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,99
4.	Tingkat Kemiskinan	%	4,74
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02
6.	Indeks Gini	Indeks	0,284

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, diolah.

Tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1) Menjaga pertumbuhan konsumsi tetap tinggi
   Pertumbuhan konsumsi tetap tinggi dilakukan dengan Menjaga daya beli masyarakat; dan menjaga inflasi rendah dan stabil. Pertumbuhan konsumsi RT terus meningkat mendekati kondisi sebelum Covid-19, dengan share PDRB sebesar 18,06% Di sisi lain, Tekanan inflasi yang meningkat sejalan penyesuaian subsidi BBM dan perubahan harga di berbagai daerah sebagai pemasok barang.

2) Menjaga dan meningkatkan daya saing investasi
   Daya saing investasi Kabupaten Natuna masih memiliki cukup ruang untuk ditingkatkan. Penguatan daya saing investasi dapat difokuskan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur pedukung yang memadai dan sarana umum, kapasitas ASN, dan koordinasi dengan Kota/Kabupaten.

3) Sistem keuangan digital yang masih perlu dioptimalkan.
   Pangsa realisasi pajak dan retribusi melalui kanal digital khususnya QRIS meningkat, namun masih sangat terbatas.

Rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu: Menjaga Momentum Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Inflasi dengan cara:

1) Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dan pemulihan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (perdagangan dan penyediaan akmamin).
2) Penguatan program pengendalian inflasi melalui sinergi implementasi program GNPIP dengan prioritas program dengan dukungan dana yang kuat melalui: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.
3) Meningkatkan daya saing investasi dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan berusaha bagi investor serta penguatan akses dan infrastruktur pendukung yang lebih optimal (mis. Jembatan Batam Bintan).
4) Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan UMKM melalui penguatan business matching and showcasing produk UMKM (mis. pembangunan Export Hub produk UMKM).
5) Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (BLK, Politeknik, dan LPK) melalui penguatan riset dan kerjasama, program Kampus Merdeka, magang, sertifikasi profesi, serta program beasiswa.
6) Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran untuk memperbesar multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.
7) Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku & Promosi) dengan tujuan meningkat length of stay dan amount of spending.
8) Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & digitalisasi pembayaran di fasilitas umum
9) Mendorong hilirisasi komoditas berbasis SDA terutama di bidang maritim sebagai produk unggulan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1) Menjaga Pertumbuhan Konsumsi Tetap Tinggi dengan mendorong realisasi Belanja Wajib Pemerintah dalam rangka Penangangan Dampak Inflasi melalui:
   a) Penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja.

b) Menyukseskan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang difokuskan pada 7 implementasi program yaitu: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui high level meeting TPID.

2) Meningkatkan kemudahan layanan perizinan seperti pemantapan penggunaan sistem perizinan OSS-RBA serta peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pelaku usaha

3) Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi di Kabupaten Natuna melalui Percepatan Digitalisasi Daerah

4) Mendorong Peningkatan Konektivitas Untuk Efisiensi Biaya Logistik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah melalui Optimalisasi jalur pelayaran (tol laut) untuk konektivitas antar pulau, dan rute pelayaran.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna diarahkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Kabupaten Natuna, sebagai salah satu wilayah kepulauan terluar dan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan ASEAN, memiliki posisi geostrategis yang penting dalam kerangka pertahanan negara dan stabilitas kawasan. Namun demikian, kondisi sosial ekonomi di Natuna menghadapi tantangan tersendiri, terutama akibat tingginya biaya logistik dan pelayanan publik sebagai dampak dari letak geografisnya yang tersebar dan terisolasi oleh laut.

Dalam konteks tersebut, arah kebijakan keuangan daerah Natuna tidak hanya berfokus pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada keadilan fiskal, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat pulau-pulau kecil dan perbatasan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan nasional yang mendorong efisiensi anggaran dan semangat pembangunan inklusif sebagaimana ditegaskan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita ketiga untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dalam kerangka negara kesatuan, serta cita kelima yang menekankan peningkatan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, Natuna diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif pembangunan nasional, tetapi juga

berperan aktif sebagai motor pertumbuhan yang mampu mengelola keuangan daerah secara adaptif dan berkelanjutan.

Strategi penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas, meskipun secara struktural Natuna memiliki keterbatasan basis ekonomi lokal. Upaya dilakukan melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset secara produktif, serta peningkatan transparansi fiskal melalui digitalisasi. Di sisi belanja, fokus diarahkan pada efisiensi penggunaan anggaran melalui pergeseran alokasi ke program prioritas yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar antar pulau, penyediaan layanan dasar yang menjangkau wilayah terpencil, serta penguatan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi masyarakat pesisir.

Penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan RKPD Kabupaten Natuna sangat ditentukan oleh postur belanja yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dalam pedoman penyusunan APBD menjadi acuan yang krusial. Pedoman tersebut menekankan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja, prinsip money follow program yang memastikan anggaran mendukung program prioritas, serta penajaman belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks Natuna, kebijakan belanja juga harus mempertimbangkan faktor geografis dan biaya distribusi antar pulau yang lebih tinggi dibanding wilayah daratan, sehingga pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan prinsip alokatif fairness untuk menjamin akses dan pemerataan pembangunan.

Lebih lanjut, integrasi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD harus dijaga agar perencanaan pembangunan tidak bersifat normatif semata, melainkan terimplementasi secara nyata melalui anggaran yang memadai dan tepat sasaran. Peningkatan inovasi pembiayaan melalui kemitraan publik-swasta, kerja sama antar daerah, dan pemanfaatan potensi ekonomi kelautan menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal yang dimiliki daerah.

Menghadapi dinamika global dan tantangan fiskal nasional, termasuk potensi gejolak harga dan risiko keterbatasan transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Natuna juga perlu membangun sistem manajemen risiko fiskal yang adaptif. Dengan arah kebijakan keuangan daerah yang terintegrasi, berbasis kebutuhan lokal, dan didukung oleh postur anggaran yang realistis, Kabupaten Natuna diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya sebagai gerbang perbatasan negara sekaligus mendorong pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Maka itu, dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 memiliki peran dan implikasi yang strategis , diantaranya:

1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional daerah. Sumber pendapatan ini dapat berasal dari potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Natuna, maupun melalui alokasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pendapatan daerah sendiri terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi yang mencerminkan adanya periode di mana realisasi pendapatan daerah meningkat atau menurun di waktu tertentu. Namun, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan dengan tingkat pertumbuhan minus 27,74%. Realisasi pendapatan pada tahun tersebut sebesar Rp.963.630.814.399,00 yang menunjukkan capaian lebih rendah di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai Rp.1.333.507.226.175,00. Realisasi pertumbuhan ini dapat terlihat pada Gambar 3.16 berikut:



Gambar 3. 5: Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Natuna, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah bertambah dari Rp.926.418,00 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.963.630,81 juta pada tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp.37.212,81 juta tersebut sebagian besar didorong oleh adanya peningkatan pada dana transfer, serta diikuti oleh pertumbuhan pada PAD Kabupaten Natuna.

Secara lebih rinci Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-Triwulan I 2025 (Juta Rupiah)

Uraian	TAHUN															Rata-Rata % Realisasi
	2021			2022			2023			2024			Triwulan I 2025			
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
PENDAPATAN DAERAH	**1.182.675.738**	**968.639.262**	**81,90%**	**2.369.467.699**	**2.276.486.776**	**96,08%**	**2.274.091.034**	**2.332.507.226**	**102,57%**	**1.309.442.057**	**963.630.814**	**73,59%**	**272.950.029.289**	**37.533.696.578**	**13,75%**	**73,58%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**74.071.779**	**42.613.222**	**57,53%**	**99.493.174**	**66.678.873**	**67,02%**	**86.318.126**	**97.981.165**	**113,51%**	**97.559.677**	**67.663.177**	**69,36%**	**149.378.854**	**5.288.052**	**3,54%**	**62,19%**
Pajak Daerah	11.500.000	13.107.685	113,98%	36.496.435	12.561.988	34,42%	35.404.230	54.850.557	154,93%	50.637.881	27.007.757	53,34%	111.284.968	3.267.813	2,94%	71,92%
Retribusi Daerah	507.000	738.367	145,63%	666.000	963.778	144,71%	725.135	1.049.362	144,71%	1.373.099	1.657.756	120,73%	22.779.660	643.679	2,83%	111,72%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.585.267	8.585.267	100,00%	7.043.060	7.043.060	100,00%	6.927.017	6.927.017	100,00%	5.387.417	5.387.417	100,00%	8.000.000	0	0,00%	80,00%
Lain-Lain PAD yang Sah	53.479.512	20.181.903	37,74%	55.287.678	46.110.047	83,40%	43.261.744	35.154.229	81,26%	40.161.280	33.610.248	83,69%	7.314.226	1.376.559	18,82%	60,98%
PENDAPATAN TRANSFER	**1.097.207.381**	**906.392.991**	**82,61%**	**2.269.974.525**	**2.209.807.902**	**97,35%**	**2.185.251.908**	**2.233.205.370**	**102,19%**	**1.203.510.452**	**888.431.247**	**73,82%**	**272.792.923.995**	**37.527.265.861**	**13,76%**	**73,95%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	925.684.200	737.997.664	79,72%	861.445.454	813.001.270	94,38%	1.001.210.893	1.045.714.855	104,45%	1.047.904.187	763.623.492	72,87%	272.657.021.301	37.490.360.371	13,75%	73,03%
DBH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.152.054.000	37.363.362.550	13,73%	13,73%
DBH Pajak	103.206.417	109.006.827	105,62%	78.822.524	74.298.556	94,26%	88.441.023	132.068.099	149,33%	94.400.708	52.060.549	55,15%	0	0	0	101,09%!
DBH Bukan Pajak (SDA)	306.971.992	131.315.461	42,78%	264.048.021	240.346.392	91,02%	317.928.597	332.799.575	104,68%	372.371.243	160.058.433	42,98%				70,37%
DAU	390.697.487	390.697.487	100,00%	392.551.408	390.559.258	99,49%	407.503.851	407.458.406	99,99%	432.069.006	427.577.646	98,96%	408.285.020	122.647.622	30,04%	85,70%
DAK	124.808.304	106.977.890	85,71%	126.023.501	107.797.064	85,54%	187.337.422	173.388.775	92,55%	149.063.230	123.926.864	83,14%	96.682.281	4.350.199	4,50%	70,29%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	107.610.275	107.610.275	100,00%	54.851.547	54.851.547	100,00%	84.525.423	84.524.748	100,00%	60.067.570	60.067.570	100,00%	66.179.476	26.377.357	39,86%	87,97%
Dana Penyesuaian	41.587.990	41.587.990	100,00%	3.893.265	3.893.265	100,00%	30.674.989	30.674.314	100,00%							100,00%
Dana Desa	66.022.285	66.022.285	100,00%	50.958.282	50.958.282	100,00%	53.850.434	53.850.434	100,00%	54.367.721	54.367.721	100,00%	52.257.709	26.377.357	50,48%	90,10%
Insentif Fiskal										5.699.849	5.699.849	100,00%	13.921.767	0	0,00%	100,00%
Transfer Pemerintah Provinsi	63.912.906	60.785.051	95,11%	1.353.677.524	1.341.955.085	99,13%	1.099.515.592	1.102.965.767	100,31%	95.538.695	64.740.185	67,76%	69.723.218	10.528.133	15,10%	75,48%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.912.906	60.785.051	95,11%	65.177.524	53.455.085	82,01%	99.515.592	102.965.767	103,47%	94.978.695	64.180.185	67,57%	0	0	0	87,04%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.163.218	10.528.133	15,22%	15,22%!
Bantuan Keuangan	0	0	0	1.288.500.000	1.288.500.000	100,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	560.000	560.000	100,00%	560.000	0	0,00%	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**11.396.579**	**19.633.049**	**172,27%**	**0**	**0**	**0**	**2.521.000**	**1.320.690**	**52,39%**	**8.371.928**	**7.536.390**	**90,02%**	**7.726.440**	**1.142.666**	**14,79%**	**82,37%**
Pendapatan Hibah	11.396.579	19.633.049	172,27%	0	0	0!	2.478.000	1.254.000	50,61%	636.000	636.000	100,00%	0	0	0	107,63%
Pendapatan Lainnya/Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Per-UU	0	0	-	0	0	0	43.000	66.690	155,09%	7.735.928	6.900.390	89,20%	7.726.440	1.142.666	14,79%	86,36%

Sumber: BPKPD Natuna, 2025

Kenaikan yang signifikan dalam total pendapatan daerah tidak terlepas dari meningkatnya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Natuna. Meskipun demikian, kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sepanjang periode tersebut, PAD Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan sebesar 31,30%, sedangkan dana transfer meningkat sebesar 3,14%. Capaian tertinggi PAD terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.98.981,17 juta, sementara dana transfer mencapai puncaknya di tahun yang sama dengan total Rp.1.234.205,37 juta. Sebaliknya, PAD mencapai titik terendah pada tahun 2021, sedangkan dana transfer mencatat nilai terendah pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meskipun dana transfer berperan besar, tetapi potensi pertumbuhan PAD yang cukup signifikan tetap memiliki kontribusi penting dalam struktur pendapatan daerah. Meskipun tingkat rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan transfer lebih rendah dari PAD, namun secara struktural pendapatan transfer menjadi determinan utama pendapatan daerah Kabupaten Natuna.

Capaian tertinggi PAD Kabupaten Natuna terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.98.981,17 juta, sementara dana transfer mencapai puncaknya di tahun yang sama dengan total Rp.1.234.205,37 juta. Sebaliknya, PAD mencapai titik terendah pada tahun 2021, sedangkan catatan dana transfer dengan nilai terendah adalah pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meskipun dana transfer berperan besar, akan tetapi potensi pertumbuhan PAD yang cukup signifikan tetap memiliki kontribusi penting dalam struktur pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2026 sesuai RPJMD Kabupaten Natuna diperkirakan sebesar Rp. 915.097.520.000,-. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 diprediksikan mencapai Rp. 123.395.557.000,-. Jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer Kabupaten Natuna pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 784.618.838.000,- yang terdiri dari dana perimbangan dan Dana Insentif Daerah (D.I.D). sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada tahun 2026 sebesar Rp. 7.083.125.000,-.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 selengkapanya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

PENDAPATAN DAERAH		
URAIAN	2025	2026
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.755.140.000,00	123.395.557.000,00
a) Pajak Daerah	23.744.070.000,00	85.132.064.666,00
b) Retribusi Daerah	770.240.000,00	27.750.293.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.113.170,00	6.400.000.000,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	57.127.670.000,00	4.113.200.000,00
2. Pendapatan Transfer	1.098.245.970.000,00	784.618.838.000,00
a) a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.172.090.000,00	744.577.528.000,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.073.880.000,00	40.041.310.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.815.550.000,00	7.083.125.000,00
a) a. Pendapatan Hibah	14.815.550.000,00	7.083.125.000,00
b) b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	1.201.816.670.000,00	915.097.520.000,00

3.2.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah di Kabupaten Natuna pada periode 2020-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada rentang waktu 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan realisasi belanja daerah dengan tambahan sebesar Rp105.032,47 juta dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1.069.464,04 juta. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021, di mana realisasi belanja turun menjadi Rp.952.614,02 juta, berkurang sebesar Rp116.850,02 juta dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, realisasi belanja kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhirnya menurun lagi pada tahun 2024 dengan total realisasi sebesar Rp1.122.137,21 juta. Penurunan ini menyebabkan pertumbuhan belanja daerah mengalami perlambatan sebesar minus 4,46%, setelah sebelumnya menunjukkan tren peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kebutuhan dan prioritas belanja pemerintah. Realisasi Belanja Natuna terlihat seperti gambar G.3.18 berikut:



Gambar 3. 6: Realisasi Belanja Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Rata-rata Belanja Operasi didominasi sebesar 71,40 persen. Persentase tertinggi Belanja Operasi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 73,61 persen, sedangkan angka terendah tercatat pada tahun 2023 dengan 67,17 persen. Belanja Modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 17,01persen, diikuti oleh Belanja Transfer sebesar 11,02 persen, dan Belanja Tidak Terduga dengan porsi terkecil sebesar 0,57 persen. Pada tahun 2023, Belanja Operasi menunjukkan sedikit penurunan menjadi 67,17 persen dari angka sebelumnya sebesar 71,93 persen pada tahun 2020 dan 71,65 persen di tahun 2022. Belanja Modal yang sempat menurun pada tahun 2021 mengalami tren peningkatan hingga tahun 2023. Sebaliknya, Belanja Transfer yang awalnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 justru mengalami tren penurunan hingga tahun 2023. Data ini mencerminkan dinamika penggunaan anggaran di Kabupaten Natuna selama periode 2020-2024.

Realisasi belanja di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10: Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – Triwulan 1 2025 (Juta Rupiah)

Uraian	TAHUN															Rata-Rata % Realisasi
	2021			2022			2023			2024			Triwulan I 2025			
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
BELANJA DAERAH	1.198.702.229	952.614.020	79,47%	1.114.635.528	1.016.634.842	91,21%	1.280.058.660	1.174.496.510	91,75%	1.473.414.716	1.122.137.210	76,16%	1.074.010.939	167.523.203	15,60%	70,84%
Belanja Operasi	807.865.861	692.062.668	85,67%	788.680.575	728.446.072	92,36%	874.817.161	788.943.177	90,18%	1.028.631.172	826.005.260	80,30%	747.860.036	125.458.914	16,78%	73,06%
Belanja Pegawai	436.617.468,70	395.339.136,56	90,55%	392.881.440,98	380.605.113,18	96,88%	455.925.566,23	418.913.978,80	91,88%	545.753.351,35	480.835.325,47	88,10%	412.366.777,39	95.964.265,20	23,27%	78,14%
Belanja Barang	344.434.630,18	277.840.642,73	80,67%	357.885.231,57	314.912.697,74	87,99%	378.182.119,40	330.784.746,05	87,47%	424.852.545,31	302.032.101,12	71,09%	310.439.561,30	29.494.648,33	9,50%	67,34%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0!	0,00	0,00	0	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	16.302.447,67	8.640.230,60	53,00%	31.826.402,33	27.753.967,11	0,87	38.233.275,74	37.301.653,82	0,98	49.906.867,20	35.582.718,72	71,30%	22.634.197,82	0,00	0,00%	61,81%
Belanja Bantuan Sosial	10.511.314,02	10.242.658,36	97,44%	6.087.500,42	5.174.294,37	85,00%	2.476.200,00	1.942.798,00	78,46%	8.118.408,00	7.555.114,59	93,06%	1.819.500,00	0,00	0,00%	70,79%
Belanja Modal	214.436.726,33	124.908.898,04	58,25%	216.743.786,90	180.851.143,81	83,44%	283.117.329,84	264.281.035,09	93,35%	318.078.413,14	175.478.036,18	55,17%	199.115.157,50	6.209.651,98	3,12%	58,66%
Belanja Tanah	4.330.235,60	3.524.035,60	81,38%	20.807.682,70	14.947.363,49	71,84%	4.898.571,16	3.027.754,39	61,81%	5.284.662,10	1.449.980,30	27,44%	2.016.736,19	0,00	0,00%	48,49%
Belanja Peralatan dan Mesin	35.552.661,69	31.700.356,34	89,16%	42.353.411,47	36.673.771,47	86,59%	65.776.300,21	63.225.717,78	96,12%	82.551.699,93	52.370.447,37	63,44%	40.883.691,65	273.160,00	0,67%	67,20%
Belanja Gedung dan Bangunan	29.437.478,19	20.532.700,09	69,75%	38.680.895,96	35.255.591,25	91,14%	49.503.615,43	49.095.024,27	99,17%	75.373.779,72	36.218.407,34	48,05%	62.266.531,60	0,00	0,00%	61,62%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.038.712,64	67.929.465,81	47,16%	114.138.738,56	93.570.889,39	81,98%	161.206.397,45	147.255.543,41	91,35%	152.635.719,62	84.811.150,76	55,56%	92.350.626,01	5.936.491,98	6,43%	56,50%
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.638,22	1.222.340,20	113,43%	763.058,21	403.528,21	52,88%	1.732.445,60	1.676.995,25	96,80%	1.795.061,95	493.571,78	27,50%	1.313.092,05	0,00	0,00%	58,12%
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.489,83	134.478,63	30,74%	284.480,00	0,00	0,00%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	29.050.365,75	11.623.472,66	40,01%	3.205.403,10	1.331.862,66	41,55%	2.500.000,00	1.648.129,34	65,93%	4.000.000,00	665.131,52	16,63%	9.849.339,00	0,00	0,00%	32,82%
Belanja Tidak Terduga	29.050.365,75	11.623.472,66	40,01%	3.205.403,10	1.331.862,66	41,55%	2.500.000,00	1.648.129,34	65,93%	4.000.000,00	665.131,52	16,63%	9.849.339,00	0,00	0,00%	32,82%
Belanja Transfer	147.349.276,19	124.018.980,84	84,17%	106.005.763,00	106.005.762,94	100,00%	119.624.168,40	119.624.168,40	100,00%	122.705.130,90	119.988.782,40	97,79%	117.186.406,00	35.854.637,53	30,60%	82,51%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.200.700,60	500.279,99	41,67%	1.250.700,00	1.250.699,94	100,00%	4.265.558,00	4.265.558,00	100,00%	5.432.897,00	2.716.448,50	50,00%	5.432.897,00	0,00	0,00%	58,33%
Transfer Bagi Hasil Pajak	1.150.000,60	480.000,01	41,74%	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00%	3.540.423,00	3.540.423,00	100,00%	4.707.760,00	2.353.880,00	50,00%	4.707.760,00	0,00	0,00%	58,35%
Transfer Bagi Hasil Retribusi	50.700,00	20.279,98	40,00%	50.700,00	50.699,95	100,00%	725.135,00	725.135,00	100,00%	725.137,00	362.568,50	50,00%	725.137,00	0,00	0,00%	58,00%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	146.148.575,59	123.518.700,85	84,52%	104.755.063,00	104.755.063,00	100,00%	115.358.610,40	115.358.610,40	100,00%	117.272.233,90	117.272.333,90	100,00%	111.753.509,00	35.854.637,53	32,08%	83,32%
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	146.148.575,59	123.518.700,85	84,52%	104.755.063,00	104.755.063,00	100,00%	115.358.610,40	115.358.610,40	100,00%	117.272.233,90	117.272.333,90	100,00%	111.753.509,00	35.854.637,53	32,08%	83,32%
Transfer Bantuan Keuangan kepada Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Persentase realisasi belanja meningkat di sepanjang 2020-2023 di mana realisasi belanja daerah mencapai 91,75 persen di tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 88,13 persen. Hal ini menunjukkan di level perencanaan belanja daerah tidak terdapat selisih yang besar antara jumlah belanja daerah yang dianggarkan dengan realisasinya. Namun demikian, pada tahun 2024 realisasi belanja daerah hanya berkisar 73,59 persen dari jumlah yang dianggarkan. Nilai realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.122.137,21 juta lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.174.496,51 juta.

Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 920.097.520.000,-. Belanja Operasi pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 474.026.998.920,-. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Natuna yang dianggarkan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Natuna yang dianggarkan terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 319.352.999.280,-. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Kabupaten Natuna diperkirakan pada tahun 2026 sebesar Rp. 121.717.521.800,- yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berikut disajikan ringkasan proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2026.

Tabel 3. 11: Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

BELANJA DAERAH		
URAIAN	2025	2026
1.Belanja Operasi	805.757.710.000,00	474.026.998.920,00
a. Belanja Pegawai	492.287.147.000,00	416.338.847.840,00
b. Belanja Barang dan Jasa	277.832.323.000,00	40.188.151.080,00
c. Belanja Hibah	30.064.990.000,00	12.000.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	5.573.250.000,00	5.500.000.000,00
2.Belanja Modal	327.686.000.000,00	319.352.999.280,00
a. Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000.000,00	30.701.000.000,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.900.000.000,00	72.000.000.000,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.100.000.000,00	215.001.999.280,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.000.000,00	650.000.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
3.Belanja Tidak Terduga	235.020.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	235.020.000,00	5.000.000.000,00

BELANJA DAERAH		
URAIAN	2025	2026
4.Belanja Transfer	107.571.910.000,00	121.717.521.800,00
a.Belanja Bagi Hasil	2.451.400.000,00	2.775.029.300,00
b.Belanja Bantuan Keuangan	105.120.510.000,00	118.942.492.500,00
JUMLAH BELANJA	1.241.250.670.000,00	920.097.520.000,00

3.2.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan aktivitas keuangan pemerintah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan tujuan utama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dalam kurun waktu 2020-2024, tren realisasi pembiayaan Kabupaten Natuna menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, realisasi pembiayaan mengalami penurunan tajam sebesar Rp. 16.354 juta dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020 yang sebesar Rp. 159.072 juta. Tren ini kemudian berbalik pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi Rp. 32.327 juta, namun kembali turun menjadi Rp. 4.961 juta di tahun berikutnya. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi pembiayaan melonjak drastis menjadi Rp. 163.972 juta. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat pesat, mencapai 3.205,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pembiayaan cenderung mengalami fluktuasi konstan yang mengisyaratkan adanya ketidakpastian pembiayaan daerah. Hal ini dapat disebabkan pembiayaan daerah secara umum lebih cenderung mengalami dinamika perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dengan komponen utama penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sedangkan penerimaan maupun perbelanjaan untuk investasi hampir tidak pernah terjadi di sepanjang periode 2020-2024. Satu-satunya kegiatan investasi pemerintah yang menjadi penentu pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal yang terjadi di tahun 2019 sebesar Rp. 5 Milyar.

Secara garis besar, realisasi nominal dan persentase pertumbuhan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar G-III.15 berikut.



Gambar 3. 7: Realisasi Pembiayaan Kabupaten Natuna Tahun 2020-2025

Selama periode 2020-2024, APBD Kabupaten Natuna lebih sering mengalami defisit dibandingkan surplus. Ketentuan terkait kondisi surplus atau defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila APBD diperkirakan mengalami surplus, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Pengeluaran tersebut meliputi: (i) Pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo, (ii) Penyertaan modal daerah, (iii) Pembentukan dana cadangan, serta (iv) Pengeluaran pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi APBD yang diproyeksikan mengalami defisit memberikan pilihan sumber dana bagi pemiayaan daerah dapat berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang juga diatur dalam Perda tentang APBD yaitu: (i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (ii) Pencairan dana cadangan, (iii) Penjualan aset daerah yang dipisahkan, (iv) Pinjaman daerah, serta (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian lengkap mengenai realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Natuna selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021- Triwulan 1 2025 (Juta Rupiah)

Uraian	TAHUN															Rata-Rata % Realisasi
	2021			2022			2023			2024			Triwulan I 2025			
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
PEMBIAYAAN																
Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.018.515	16.354.087	102,09%	32.327.192	32.327.192	100,00%	4.961.942	4.961.942	100,00%	163.972.658	163.972.658	100,00%	309.942	0	0,00%	80,00%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	16.018.515	16.018.515	100,00%	32.327.192	32.327.192	100,00%	4.961.942	4.961.942	100,00%	163.972.658	163.972.658	100,00%	309.942	0	0,00%	80,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	335.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (64 - 67)	16.018.515	16.354.087	102,09%	32.327.192	32.327.192	100,00%	4.961.942	4.961.942	100,00%	163.972.658	163.972.658	100,00%	309.942	0	0,00%	80,00%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (58 + 68)	16.018.515	16.354.087	102,09%	32.327.192	32.327.192	100,00%	4.961.942	4.961.942	100,00%	163.972.658	163.972.658	100,00%	309.942	0	0,00%	80,00%

Terjadi defisit ini terutama pada tahun 2020, 2022, dan 2024, sedangkan surplus hanya tercatat pada tahun 2021 dan 2023. Meski demikian, setiap tahun dalam periode tersebut tetap menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp.143.046,03 juta, sedangkan surplus tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 159.010,71 juta.

Pada sisi Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 0,00. Pada tahun 2026, diperkirakan Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Perincian Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

PEMBIAYAAN DAERAH		
Uraian	2025	2026
1. Penerimaan Pembiayaan	39.433.970.000,00	5.000.000.000,00
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.433.970.000,00	5.000.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan	0.00	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	0,00
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**34.433.970.000,00**	**5.000.000.000,00**

3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

3.2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dirumuskan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tren pendapatan lima tahun terakhir, karakteristik kewilayahan sebagai daerah kepulauan perbatasan, serta isu strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini disusun sesuai dengan prinsip penyusunan RKPD berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, yang menekankan optimalisasi PAD, efisiensi pengelolaan pendapatan, dan keadilan fiskal antarwilayah, guna menjamin keberlanjutan pendanaan pembangunan prioritas daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026 sejalan dengan arah kebijakan pendapatan daerah yang mealiputi:

1) Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Terukur dan Berkelanjutan
   a) Berdasarkan tren lima tahun terakhir (2020–2024), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah, cenderung bertumpu pada dana transfer dari pusat .
   b) Maka, kebijakan tahun 2026 difokuskan untuk mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, perluasan basis pajak, serta penerapan digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.
   c) Upaya ini sejalan dengan prinsip “efektivitas dan akuntabilitas” dalam penyusunan RKPD menurut Permendagri 10 Tahun 2025.

2) Peningkatan Pendapatan melalui Pengelolaan Aset Daerah dan Inovasi Fiskal
   a) Isu strategis dalam dokumen RPJMD mencakup lemahnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif.
   b) Oleh karena itu, kebijakan diarahkan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola aset, termasuk kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta atau antar daerah.
   c) Arah ini mendukung tujuan pembangunan fiskal yang inovatif, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka ekonomi daerah dan prinsip efisiensi belanja publik.

3) Penguatan Koordinasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi
   a) Sebagai daerah kepulauan terluar yang menghadapi tantangan keterisolasian geografis dan tingginya biaya logistik antar pulau , Kabupaten Natuna sangat bergantung pada dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH).

b) Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas teknis dalam perencanaan program yang layak didanai melalui DAK Tematik (kelautan, konektivitas, perikanan, pariwisata).
c) Hal ini juga selaras dengan prinsip RPJMD yang menempatkan transfer pusat sebagai pengungkit utama pembangunan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

4) Penyusunan Kebijakan Pendapatan yang Berbasis Keadilan Fiskal dan Wilayah
a) Berdasarkan analisis kondisi objektif wilayah, Natuna memiliki penyebaran wilayah administrasi yang tersebar di 17 pulau berpenghuni, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan fiskal berbasis kewilayahan.
b) Arah kebijakan pendapatan harus mempertimbangkan biaya layanan publik yang tinggi akibat kendala logistik dan infrastruktur dasar.
c) Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2026 harus menerapkan prinsip keadilan distribusi fiskal sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri 10/2025 dan RPJMD.

5) Penguatan Sistem Informasi Pendapatan dan Kepatuhan Wajib Pajak
a) Masih terbatasnya akurasi data objek dan subjek pajak menjadi hambatan dalam optimalisasi PAD.
b) Untuk itu, diarahkan pembenahan sistem informasi pajak dan retribusi secara terintegrasi dengan SIPD, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah.
c) Langkah ini mendukung prinsip "penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis data" yang menjadi fondasi utama RKPD tahun perencanaan.

6) Penyelarasan Pendapatan Daerah dengan Prioritas Pembangunan dan Program Strategis Nasional
a) Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI dan Program Strategis Nasional (PSN), pendapatan daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas di sektor unggulan: perikanan, pariwisata bahari, energi, dan konektivitas.
b) Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "money follow program" dan "integrasi pembangunan pusat-daerah" sebagaimana tertuang dalam Permendagri 10/2025.

3.2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menyangkut Belanja Daerah Tahun 2026 yang terdiri dari:

1) Menetapkan belanja daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2) Menetapkan tolok ukur dan target yang terukur pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program
3) Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap kegiatan belanja daerah
4) Mengarahkan belanja daerah yang berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat
5) Mengarahkan belanja daerah yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik.
6) Mengalokasikan belanja sebagai upaya mendorong dan memberikan stimulan pada masyarakat/swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan
7) Menetapkan Belanja Daerah pada kegiatan yang dapat memberikan timbal balik dalam bentuk pendapatan bagi Pemerintah Daerah (*cost recovery*)
8) Menetapkan Belanja Daerah pada kegiatan strategis yang memiliki dampak dan keterkaitan yang luas pada kehidupan masyarakat
9) Mewujudkan good governance dan clean government dengan Belanja Daerah yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan serta distribusi.

Penentuan pendapatan daerah Kabupaten Natuna tidak terlepas dari perkiraan kapasitas riil di Tahun 2026. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang dihitung dari total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat. Kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14: Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Uraian	2025	2026
1.	Jumlah Pendapatan	1.039.028.879.891,00	1.116.466.375.795,00
	Dikurangi :		
2.	Jumlah Belanja	1.074.161.600.000,00	1.116.466.375.795,00
	Belanja Mengikat :		
	Gaji PNS + TPP	406.066.087.387,00	460.797.631.108,00
	Gaji Kepala Daerah dan BOP	7.759.289.470,00	6.550.000.000,00
	Gaji DPRD	7.021.294.500,00	6.930.000.000,00
	Belanja Mandatory Spending :		
	ADD	111.250.425.000,00	110.549.726.501,00
	Bagi Hasil Pajak	5.432.897.000,00	10.943.235.700,00
	Bagi Hasil Retribusi	560.000.000,00	430.000.000,00
	Belanja Infrastruktur/PEN	196.212.172.331,00	119.352.999.000,00
	Belanja Fungsi Pendidikan	183.572.953.655,00	268.774.086.243,00
	Belanja Fungsi Kesehatan	163.887.233.048,00	129.638.697.243,00
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan		2.399.247.609,00	2.500.000.000,00

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) kelompok prioritas sebagai berikut :

1) Prioritas Pertama : Untuk membiayai belanja wajib dan belanja mengikat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perudang-Undangan. Belanja wajib terdiri dari: a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 Persen dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25 Persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI; d. Belanja Pengawasan, bahwa anggaran pengawasan minimal 0,9 Persen sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024; e. Belanja SPM, bahwa anggaran penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; f. Belanja Pendidikan; g. Belanja Kesehatan; h.

Belanja Infrastruktur; i. Belanja Gaji dan Tunjangan; j. Belanja bagi Hasil Pajak; k. Belanja Batuan Kepada Masyarakat; dan l. Belanja Tidak Terduga. Belanja mengikat digunakan untuk belanja berikut: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja JKN, 3) Belanja DAK/BOS; dan 4) Belanja Operasional Kantor.

Tabel 3. 15 Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) Kabupaten Natuna Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Persentase terhadap Total Belanja Daerah
Total Belanja Daerah = Rp. 1.116.466.375.795,00			
A	Belanja Fungsi Pendidikan	268.774.086.243,00	24,07
B	Belanja Fungsi Kesehatan	223.304.918.210,00	20,00
C	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	841.490.167.977,00	75,37
D	Belanja Fungsi Pengawasan	8.012.710.728,00	0,72
E	Belanja Pendidikan Dan Pelatihan	7.579.436.625,00	0,68
F	Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Spm)	47.026.238.254,00	4,21

Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
2) Belanja DAK BOS;
3) Belanja Operasional Kantor; dan
4) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

2) Prioritas Kedua : Belanja prioritas kedua digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025.

3) Prioritas Ketiga : Belanja Prioritas ketiga digunakan Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

3.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Natuna pada tahun 2026 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya. Sedangkan Anggaran pengeluaran pembiayaan hanya berasal dari Penyertaan Modal Daerah.



BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah membutuhkan arah yang jelas dan fokus yang tepat. Karena itu, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 menetapkan sasaran dan prioritas sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dan prioritas tersebut disusun untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, sekaligus merespons berbagai dinamika dan kebutuhan aktual masyarakat di tahun 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang disajikan pada Subbab 4.1 merupakan hasil penjabaran logis dari visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sementara itu, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang disajikan pada Subbab 4.2 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis daerah, dan proyeksi kondisi sosial ekonomi. Penetapan ini juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga seluruh program dan kegiatan daerah yang direncanakan memiliki keselarasan vertikal dan relevansi tematik terhadap capaian pembangunan jangka menengah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan unsur strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai landasan penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam kerangka perencanaan tahunan. Tujuan dirumuskan sebagai kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun masa perencanaan, sedangkan sasaran menggambarkan capaian terukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, baik secara sektoral maupun lintas sektor. Keduanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang bersifat operasional.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mengacu pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan cerminan arah pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selama masa jabatan lima tahun. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya."

Visi tersebut mengandung tiga unsur utama yang menjadi arah strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yaitu:

1) Makmur;
   Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi; peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

2) Berdaya Saing;
   Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

3) Berbudaya;
   Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan lima misi pembangunan sebagai bentuk rumusan umum mengenai upaya strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025–2029. Masing-masing misi mencerminkan arah kebijakan sektoral maupun lintas sektor, yang disusun untuk menjawab tantangan pembangunan aktual dan mendukung capaian tujuan jangka menengah daerah secara terarah dan terukur.

1) Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kabupaten Natuna. Karena Kabupaten Natuna secara geografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang

besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pariwisata, pertanian, perindustrian dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Natuna.

2) Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau, perbatasan, membangun beberapa sentra ekonomi antar kawasan dalam satu/inter Kabupaten Natuna guna mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir, karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat dan tidak merata. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, Pelabuhan, mendorong dan menfasilitasi untuk pengadaan Kapal/Ferry Ro Ro yang mengangkut orang dan barang-barang hasil produk masyarakat secara reguler yang menghubungkan akses transportasi antar pulau atau antar beberapa kawasan centra ekonomi menuju akses dan pembangunan air bersih, listrik, peningkatan kualitas dan akselerasi akses telekomunikasi yang memadai, ketersediaan jaringan/signal yang standar dan mencukupi, yang dapat menjangkau desa terpencil seluruh Wilayah Kabupaten Natuna.

3) Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan era-Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa beradaptasi, melakukan perbandingan dan bersaing dalam hal peningkatan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini yang tidak kalah pentingnya adalah agar SDM di Kabupaten Natuna memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter serta mampu bersaing.

4) Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas pegawai, penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi. Pemanfataan teknologi informasi ini dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat karena secara geografis Kabupaten Natuna adalah daerah kepulauan.

5) Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai kegamaan, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Nilai keagamaan dan budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Natuna tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Natuna menjadi modal tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

Keterkaitan antara lima misi pembangunan daerah dengan unsur-unsur utama dalam visi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 ditunjukkan dalam tabel berikut. Setiap misi dirancang untuk memperkuat pencapaian salah satu atau lebih dari aspek visi, yaitu *Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya*, sehingga implementasi pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan konsisten dalam lima tahun ke depan.

Tabel 4.1: Keterkaitan Antara Unsur Utama Visi dengan Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Unsur Visi	Misi
Makmur	Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan. Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
Berdaya Saing	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi
Berbudaya	Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Setelah merumuskan visi dan misi pembangunan daerah, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing misi. Tujuan dan sasaran ini menjadi kerangka acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, yang diarahkan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan. Penjabaran lengkap mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi disampaikan pada bagian berikut ini.

1) Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
   Misi 1 memiliki 2 tujuan, pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis sektor unggulan. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan 1 terdiri dari 6 (enam) sasaran, yaitu : 1) meningkatnya sektor unggulan daerah, 2) meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD, 3) meningkatnya investasi daerah, 4) menurunnya tingkat pengangguran terbuka, 5) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat, 6) meningkatnya kewirausahaan daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : pertumbuhan ekonomi, indeks daya saing daerah, pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan dan gini rasio.
   Tujuan kedua adalah meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan adap tasi terhadap perubahan iklim. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan kedua yaitu meningkatnya kualitas lingkungan dan mitigasi becana. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator penurunan intesitas emisi GRK.

2) Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
   Misi 2 memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan infrastruktur dan konektivitas. Sasaran yang ingin dicapai pada

tujuan meliputi : 1) meningkatnya kualitas dan pemerataan penyediaan infrastruktur, dan 2) meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan konektivitas. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks infrastruktur.

3) Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
   Misi 3 memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing berlandaskan kesetaraan. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan meliputi : 1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2), meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dan 3) meningkatnya pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4) Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
   Misi 4 memiliki 1 tujuan, mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi berbasis teknologi . Ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai pada tujuan tersebut yaitu: 1) meningkatnya kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; dan 2) meningkatnya akuntabilias kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Indeks Reformasi Birokrasi.

5) Misi 5 : Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.
   Misi 5 memiliki 2 tujuan, pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar kehidupan yang harmonis dan toleran. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan adalah : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran. Tujuan kedua, Meningkatkan pembinaan dan pelestarian kebudayaan. sasaran yang ingin dicapai pada tujuan adalah Meningkatnya Aktualisasi Budaya Daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : terlestarikannya cagar budaya dan indeks kerukunan umat beragama.

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada pencapaian setiap misi di atas, diuraikan sebagaimana pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis sector unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,6
				Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,35
				Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	304,21
				Tingkat Kemiskinan	Persen	4,74
				Gini Rasio	Indeks	0,283
			1.1.1 Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan	Persen	1,78
				Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum	Persen	0,61
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	3,08
			1.1.2 Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,90
			1.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Persen	0,30
			1.1.4 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,81
			1.1.5 Meningkatnya standar hidup layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran riil	Indeks	15,99
			1.1.6 Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	2,58
		1.2. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi terhadap perubahan iklim		Penurunan Intesitas Emisi GRK	Persen	10,48
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) [Nilai]	Indeks	79,99

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
			1.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan dan mitigasi becana	Indeks Risiko Bencana (IRBi) [Nilai]	Indeks	109,35
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau	2.1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan infrastruktur dan konektivitas		Indeks Infrastruktur	Indeks	62,62
			2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Penyediaan Infrastruktur	Indeks Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman	Indeks	64,16
			2.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Layanan Konektivitas	Rasio Konektivitas	Rasio	60,40
3	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	3.1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan berdaya saing berlandaskan kesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,99
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	15.04
			3.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.71
				Prevalensi Stunting	Persen	15,04
			3.1.2 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,68
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,99
			3.1.3 Meningkatnya pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan,	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persentase	42,62
				Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,90

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
			pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,477
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64, 50
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	4.1 Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi		Indeks Reformasi Birokrasi [Nilai]	Indeks	63
			4.1.1 Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,13
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik	Indeks	3,44
			4.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas kInerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	1, 00
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Level	74, 55
5	Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	5.1 Meningkatkan pembinaan dan pelestarian kebudayaan		Terlestarikannya cagar budaya	Persen	10
			5.1.1 Meningkatnya Aktualisasi Budaya Daerah	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Persen	17, 80

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
		5.2 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar kehidupan yang harmonis dan toleran		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,89
			5.2.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	Persentase Konflik yang diselesaikan	Jumlah	100

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Natuna dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas ini merupakan langkah strategis untuk menjabarkan misi pembangunan jangka menengah ke dalam agenda tahunan yang lebih operasional, fokus, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, perumusan prioritas tahun 2026 juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis daerah, kebutuhan riil masyarakat, serta dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Tema pembangunan yang diusung pada tahun 2026 adalah:

"Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya."

Tema pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2026 tersebut dirumuskan sebagai landasan konseptual dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi. Tema tersebut tidak hanya merefleksikan prioritas makro yang ingin dicapai, tetapi juga menjadi titik tolak dalam penyusunan strategi dan penjabaran kebijakan sektoral secara lebih operasional. Sebagai bentuk konkret dari penerjemahan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan tiga prioritas utama pembangunan yang akan menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan, program, kegiatan, hingga sub kegiatan dalam pembangunan daerah pada tahun perencanaan. Ketiga prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, dinamika isu strategis, serta sinergi lintas sektor yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ketiga prioritas pembangunan tahun 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1) Akselerasi Pengelolan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim Dan Keunggulan Daerah Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
2) Akselerasi Peningkatan Konektivitas Antar Pulau Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan.

3) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dengan Memperkuat Nilai Keagamaan Dan Pelestarian Budaya Daerah.

Tabel 4.3: Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPTD Metrologi Legal
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
2	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PENGELOLAAN PERBATASAN	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
		PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
				Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KECAMATAN	Kecamatan Bunguran Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

Tabel 4. 4: Sasaran Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RKP 2026	TARGET RKPD PROVINSI KEPRI 2026	TARGET RKPD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80 – 6,30	5.46-7.38	1,60	
2.	PDRB Per Kapita (juta)	5.870	180,77 - 191,90	304,21/ 91,24	
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota			7,36	
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	65,75 – 7,5	4,17-3,77	4,74	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	6,29-6,22	3,81	
6.	Rasio Gini	0,377 – 0,380	0,359-0,371	0,283	
7.	Indeks Modal Manusia *)	0,57	0,61-0,63	79,99	
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14		10,42	
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67	75,67	79,99	

Dalam rangka memperkuat pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna selain menetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang mencerminkan arah strategis pembangunan daerah, juga menetapkan program prioritas kepala daerah yang bersifat lebih teknis dan operasional. Program-program ini disusun untuk menjawab kebutuhan spesifik di berbagai sektor pelayanan publik, serta sebagai instrumen percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program prioritas kepala daerah berfungsi sebagai katalis implementatif dari kebijakan pembangunan, dan diarahkan untuk menghasilkan output yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penjabaran lebih lanjut mengenai program prioritas kepala daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 disampaikan pada bagian berikut.

Tabel 4. 5: Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Daerah			
	- Pemberian bantuan Bibit Kelapa Unggulan 5000/pertahun	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	
	- Bibit Cengkeh Unggulan 5000/pertahun	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	
	- Pengadaan Pupuk untuk petani 75 ton pertahun	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	
			- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pengembangan Prasarana Pertanian	
			- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	
	- Memfasilitasi Pupuk Murah dari Nasional	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	
			- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pengembangan Prasarana Pertanian	
			- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	
		4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
	- Pengadaan Bibit Ikan Kerapu 10.000/pertahun	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
			- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Percepatan Pembangunan Infrastrukur Desa/ Kelurahan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Jalan, Seminisasi		- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			- Pembangunan Jalan	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Penggantian Jembatan	
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			- Rehabilitasi Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
		3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			- Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
	- Drainase	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			- Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
3	Pemerataan Konektivitas	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	- Peningkatan Jalan, Jembatan dan Pelabuhan Antar Desa dan Antar Kecamatan pada Wilayah-Wilayah yang Belum Memiliki Akses Baik.		- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			- Pembangunan Jalan	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Penggantian Jembatan	
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			- Rehabilitasi Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
		3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			- Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
			- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
4	Tenaga Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	- Pelatihan dan Sertifikasi untuk Tenaga Kerja.		- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
5	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pelatihan, Peningkatan Keterampilan dan Bantuan Peralatan Usaha untuk Ibu dan Makan Bergizi untuk Anak.		- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota	
			- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
6	Pinjaman Bunga 0% bagi UMKM	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	- 600 juta pertahun.		- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
7	Meningkatkan Tipe/ Pelayanan RSUD Natuna	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan (RSUD)
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana		- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan (RSUD)
			- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
8	Qur'an Center	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	- Boarding School untuk Santri dari Setiap Kecamatan.		- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
9	Pelatihan Penyelenggara Fardhu Kifayah	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	- 80 Orang pertahun		- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
10	Gerakan Maghrib Mengaji	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	- 500 orang pertahun		- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
11	Bantuan untuk Lansia 65 Tahun ke Atas	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
	- 1 milyar/pertahun		- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
12	Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan untuk Buruh, Supir, Pekerja Lepas)			
	- 200 orang pertahun.			
	- Buruh (Pelabuhan)	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
			- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
	- Supir	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
	- Pekerja Lepas (Petani)	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
	- Pekerja Lepas (Tukang)	4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
	- Pekerja Lepas (Buruh)	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

NO	PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
	- Pelaku UMKM	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
13	Beasiswa putra putri pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
			- Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Akselerasi pembangunan tahun 2026 akan didorong melalui penguatan koordinasi dan kemitraan strategis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor kemaritiman, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau, peningkatan investasi, serta penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, jaringan internet, dan bantuan alat tangkap bagi nelayan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan mendorong intervensi strategis guna menurunkan biaya transportasi udara ke Natuna, sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi dan pengembangan pariwisata daerah.

Sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah mengidentifikasi fokus pengembangan masing-masing kecamatan berdasarkan potensi unggulan dan arah program prioritas. Penetapan fokus wilayah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan tidak bersifat seragam, tetapi mempertimbangkan karakteristik dan kekuatan lokal setiap wilayah.

Sesuai dengan urusan dan program pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, maka fokus pengembangan kewilayahan berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6: Fokus Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Perikanan			Pariwisata	Pertanian			Transmigrasi	Perbatasan
		Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan		Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan		
1	Midai				V			V		
2	Suak Midai	V		V	V			V		
3	Bunguran Barat		V	V	V			V		V
4	Bunguran Utara	V	V	V	V	V		V		V
5	Pulau Laut	V		V	V		V	V		V
6	Pulau Tiga	V		V	V			V		V
7	Bunguran Batubi					V		V	V	
8	Pulau Tiga Barat	V		V	V			V		V
9	Pulau Seluan				V			V		
10	Bunguran Timur	V	V	V	V	V	V	V		V
11	Bunguran Timur Laut				V	V	V	V		V
12	Bunguran Tengah		V	V		V		V	V	
13	Bunguran Selatan	V	V	V	V			V		V
14	Serasan	V		V	V			V		V
15	Subi	V		V	V	V		V		V
16	Serasan Timur				V	V		V		V
17	Pulau Panjang				V			V		

Berdasarkan Tabel 4.4, pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna memperlihatkan pendekatan yang berorientasi spasial, dengan mempertimbangkan karakteristik sektoral unggulan dari masing-masing kecamatan. Fokus program mencakup urusan perikanan, pariwisata, pertanian (termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), transmigrasi, serta wilayah perbatasan. Analisis ini menunjukkan adanya klasterisasi pembangunan wilayah yang selaras dengan arah kebijakan prioritas daerah.

1) Kecamatan dengan Fokus Pengembangan Multisektor (klaster strategis utama):
   Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Utara, dan Subi menonjol sebagai wilayah dengan cakupan pengembangan paling luas. Ketiga kecamatan ini tercatat memiliki fokus pada hampir seluruh sektor yang dipetakan, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pengembangan pertanian, transmigrasi, hingga wilayah perbatasan.
   a) Bunguran Timur sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, menjadi episentrum integrasi pembangunan multisektor. Wilayah ini berfungsi sebagai tulang punggung dalam hal konektivitas, layanan dasar, dan distribusi logistik.
   b) Bunguran Utara memiliki potensi besar sebagai wilayah perbatasan yang kaya akan potensi perikanan dan budidaya, serta cocok dikembangkan sebagai simpul pertahanan ekonomi dan kedaulatan wilayah.
   c) Subi, yang juga berada di gugusan luar, menjadi titik penting untuk pengembangan perikanan dan penguatan konektivitas pulau, sekaligus menampung program transmigrasi dan kemandirian pangan.

2) Kecamatan dengan Potensi Spesifik Unggulan (klaster tematik): Beberapa kecamatan menunjukkan fokus pengembangan sektoral yang lebih spesifik, dan berpotensi sebagai sentra tematik unggulan:
   a) Midai dan Pulau Seluan terfokus pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, serta pengolahan hasil.
   b) Pulau Tiga Barat dan Pulau Laut cocok dikembangkan sebagai basis perikanan dan perkebunan terpadu, dengan dukungan pengolahan dan akses antarwilayah.
   c) Serasan dan Serasan Timur menunjukkan arah ke pengembangan terpadu berbasis masyarakat pesisir, terutama dalam budidaya ikan dan penguatan ekonomi keluarga.

3) Wilayah Penyangga Pembangunan dan Pemerataan Layanan: Kecamatan seperti Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, dan Bunguran Timur Laut memiliki fokus pada pertanian, perkebunan, dan kawasan

transmigrasi. Wilayah ini dapat diarahkan sebagai zona penyangga pertumbuhan untuk mendukung pusat-pusat ekonomi di Bunguran Timur dan wilayah perbatasan lainnya.

4) Sinergi dengan Program Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan: Delapan kecamatan teridentifikasi sebagai wilayah sasaran transmigrasi, menunjukkan bahwa strategi pembangunan Kabupaten Natuna tidak hanya mengandalkan kekuatan lokal eksisting, tetapi juga mendorong redistribusi penduduk dan produktivitas lahan di wilayah-wilayah potensial. Keterkaitan dengan status sebagai wilayah perbatasan semakin menguatkan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, sebagaimana amanat Nawacita dan arah RPJMN.

Pola pengembangan wilayah yang tercermin dalam Tabel 4.4 mendukung penerapan prinsip keterpaduan sektoral dan kewilayahan, yang sangat penting dalam penyusunan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. Strategi pengelompokan program per kecamatan ini akan menjadi pijakan dalam:

1) Penyusunan program dan kegiatan berbasis kawasan, bukan sekadar sektoral.
2) Distribusi anggaran yang lebih berkeadilan, dengan melihat beban dan potensi wilayah.
3) Integrasi program antarsektor dan antarperangkat daerah, terutama yang memiliki iris sektor dan wilayah yang sama (misalnya: perikanan dengan koperasi-UMKM, pertanian dengan infrastruktur dasar, pariwisata dengan budaya).

4.2.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Riau

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah tingkat provinsi. Sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, **Kabupaten Natuna** memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan arah dan fokus pembangunan daerahnya agar sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Natuna dalam RKPD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi krusial untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan, konsistensi antar level perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional dan lintas wilayah.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah:

KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA

Makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) MAJU;

Artinya Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya aras pembangunan human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan/energi terbarukan, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

2) MAKMUR;

Artinya Makmur dimaknai sebagai banyak hasil, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Masyarakat makmur merupakan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam negara tanpa kesulitan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Ini dikarenakan

apabila kualitas pendidikan enggak baik maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Disamping itu juga bisa diwujudkan dengan kestabilan ekonomi dan juga palayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat adil dan makmur adalah sebuah konsep ideal yang mencakup tatanan sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh keadilan serta mendapatkan kemakmuran yang merata. Konsep ini melibatkan pemerataan pendapatan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan, serta keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat adil dan makmur merupakan konsep yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat adil berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Selain itu, masyarakat adil juga mengutamakan prinsip keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sementara itu, masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

3) MERATA;

Artinya Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil Pemerataan pembanguan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
   Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.

2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
   Membangun infrastruktur dan transportasi publik dalam menguatkan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; air baku; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, serta peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.

3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
   Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
   Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen

sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya melayu dan nasional. Dalam kaitan ini juga dilakukan penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup yang pada akhirnya meningkatkan resilensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 menjadi landasan strategis dalam penetapan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Berpedoman pada visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan secara terukur dan terarah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan dan sasaran ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional, kondisi faktual daerah, serta kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Natuna.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota dalam menjaga keselarasan arah pembangunan lintas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut adalah rincian tujuan dan sasaran berdasarkan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, (2) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (4) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing, (5) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (6) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (7) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Rasio Gini, dan (3) PDRB Per Kapita, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB PenyediaanAkomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan (9) Tingkat Kemiskinan.

2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan (2) Meningkatnya konektivitas transportasi publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Infratruktur dengan indikator sasarannya (1) Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, (2) Konsumsi Listrik per Kapita dan (3) Rasio Konektivitas.

3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
   Misi ini memiliki tujuan Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas pendidikan, dan (3) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak (4) Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator indeks modal manusia, dengan indikator sasarannya (1) Usia Harapan Hidup (UHH), (2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan

Gender (IKG), (6) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (7) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan, (4) Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN, (5) Meningkatnya transformasi digital daerah, dan (6) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pelayanan Publik, (2) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, (3) Predikat SAKIP, (4) Opini BPK atas Laporan Keuangan, (5) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, (6) Level Maturitas SPIP, (7) Indeks Profesionalitas ASN, (8) Indeks Teknologi Digital Nasional (ITDN), dan (9) Indeks Demokrasi Provinsi.

5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
Misi ini memiliki tujuan (1) Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah dengan sasaran (1) Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayan melayu, (2) Meningkatnya toleransi kerukunan umat Bergama. (3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan (4) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Indeks Harmoni, dan (2) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, (4) Indeks Ekonomi Hijau Daerah, dan (5) Indeks Resiko Bencana.

Tabel 4. 7: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
VISI: "KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA"			
Misi: 1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		
1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,33- 5,50
		Rasio Gini	0,353
		PDRB per Kapita (juta rupiah)	169,22

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,99
1.1.2	Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB(%)	0,1122
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,01-41,41
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	91,50
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,06 -6,36
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	39,12
		Indeks Ketahanan Pangan	67,29
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,95
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,25 - 4,75
Misi: 2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wi		
2.1	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Indeks Infrastruktur	66,46
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	47,76
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.750
2.1.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (%)	0,65
Misi: 3	Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter		
3.1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Modal Manusia	0,61
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,52
		PrevalensiStunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,60
3.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,92
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,327-0,294
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,78
3.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	71,85
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,355
Misi: 4	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan		
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	82,57
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,28
4.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	68,46
4.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan	Predikat SAKIP	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
	Daerah, dan kualitas pengawasan	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	45,87
		Level Maturitas SPIP	Level 3
4.1.4	Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,92
4.1.5	Meningkatnya transformasi digital daerah	Indeks Teknologi Digital Nasional (ITDN)	51,23
4.1.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi	Sedang
Misi: 5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		
5.1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Harmoni	Bagus
5.1.1	Meningkatnya penguatan pemajuan kebudayaan melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,68
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat Bergama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,37 - 84,51
5.2	Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	5,03
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,49
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,03
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	108,00

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan menengah. Penetapan arah dan prioritas pembangunan tahun berjalan dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan daerah yang berkembang, kondisi aktual capaian pembangunan, serta kebutuhan prioritas masyarakat kepulauan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu strategis dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, terdapat tujuh isu strategis yang menjadi fokus penanganan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1) Kualitas pembangunan manusia yang belum optimal, terutama terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
2) Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis maritim yang belum optimal, termasuk pengelolaan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
3) Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih perlu diturunkan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, nelayan, petani, dan pekerja informal.

4) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, khususnya infrastruktur dasar antar pulau, transportasi, kelistrikan, air bersih, serta akses digital.
5) Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, melalui akselerasi reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
6) Pelestarian budaya Melayu sebagai identitas daerah yang belum optimal terkelola, serta masih lemahnya integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah.
7) Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat, sehingga diperlukan penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan kepulauan.

Untuk menjawab tantangan dan isu strategis tersebut, tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

"Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel."

Tema pembangunan tersebut dioperasionalisasikan melalui tiga prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yaitu:

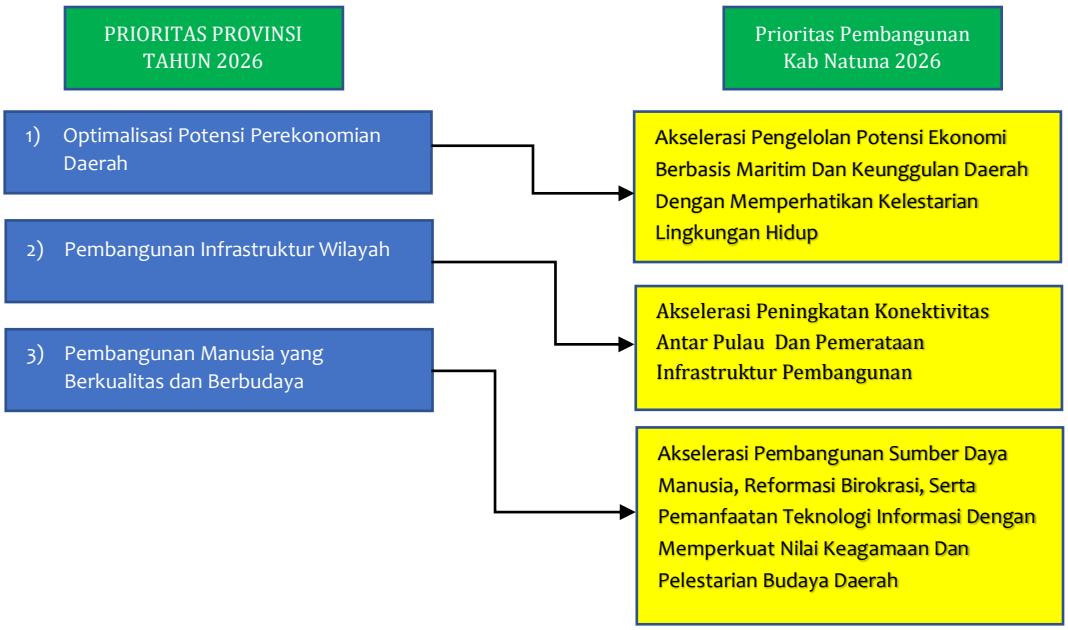
1) Akselerasi pengelolaan potensi ekonomi maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
2) Akselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
3) Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya Melayu.

Penetapan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan, pembangunan wilayah perbatasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa intervensi kebijakan yang menjadi penekanan antara lain:

1) penguatan program bantuan nelayan, UMKM, dan pelaku usaha kecil,
2) akselerasi pengembangan SDM melalui beasiswa dan pelatihan kerja,
3) peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan air bersih di daerah 3T,
4) penguatan layanan kesehatan termasuk pengadaan ambulans laut,
5) serta pengembangan pariwisata berbasis budaya Melayu.

Selaras dengan tema pembangunan dan tiga prioritas utama pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang secara substansial mendukung pencapaian prioritas pembangunan provinsi. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memperkuat kesinambungan perencanaan pembangunan antar level pemerintahan, memastikan efektivitas intervensi pembangunan, serta mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Adapun keterkaitan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4. 1: Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Tabel 4.8: Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN	

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
			BIDANG TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
			DAN MENENGAH	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPTD Metrologi Legal
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
2	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PENGELOLAAN PERBATASAN	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
		PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Perpustakaan dan

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
			PERPUSTAKAAN	Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KECAMATAN	Kecamatan Bunguran Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

No	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD 2026	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

4.2.3 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Dengan Prioritas Nasional

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Keselarasan perencanaan daerah dengan pembangunan nasional menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan konsistensi, sinergi, dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara nasional, arah pembangunan lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang mengusung visi pembangunan nasional sebagai berikut:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut menjadi pijakan dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara yang berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan

delapan misi pembangunan nasional yang dikenal dengan Asta Cita, yang sekaligus menjadi arah prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Adapun rumusan Asta Cita yang menjadi arah prioritas nasional adalah:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan arah pembangunan tahunan, pemerintah menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema pembangunan:

"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."

Tema tersebut berfungsi sebagai arah pembangunan jangka pendek yang fokus pada dua klaster strategis, yaitu:
1) Klaster I: Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi;
2) Klaster II: Penguatan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

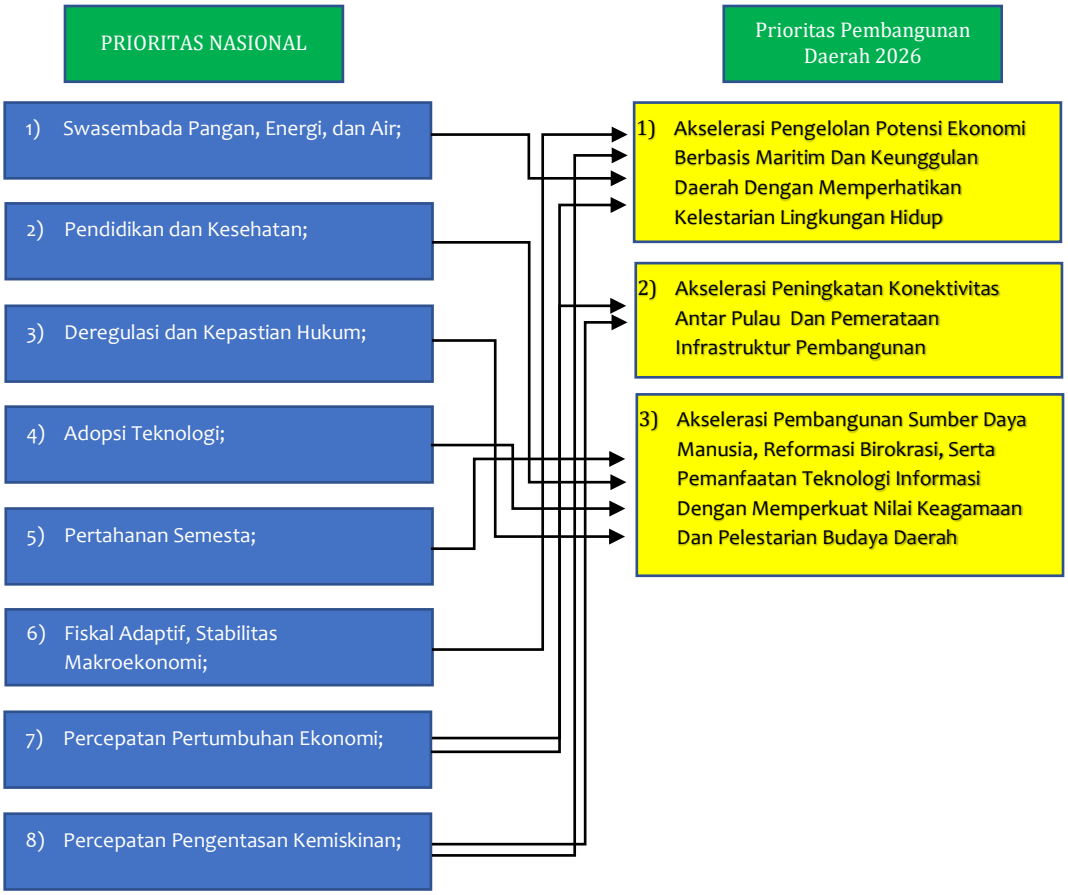
Tema ini dioperasionalisasikan ke dalam delapan prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2026, yaitu:

1) **Swasembada Pangan, Energi, dan Air**;
   Optimalisasi BULOG, Pelaksanaan food estate, Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, Energi terbarukan, Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta pengelolaan sampah.
2) **Pendidikan dan Kesehatan**;
   Ekosistem makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, sekolah rakyat, sekolah unggulan, digitalisasi pendidikan, cek kesehatan, percepatan rumah sakit daerah.
3) **Deregulasi dan Kepastian Hukum**;
   Reformasi birokrasi, Kemudahan berbisnis, Ketertarikan investasi.
4) **Adopsi Teknologi**;
   Transformasi digital, riset dan inovasi.
5) **Pertahanan Semesta**;
   Komponen cadangan, Pemenuhan alutsista, Penguatan kemampuan teritorial.
6) **Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi;**
7) **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**;
   Percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia, Optimalisasi potensi Dana Abadi.
8) **Percepatan Pengentasan Kemiskinan**;
   Data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, 3 juta rumah, koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Di antara delapan prioritas tersebut, terdapat lima (5) direktif utama Presiden yang menjadi penekanan khusus, yaitu: pengelolaan sampah, sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, percepatan pengentasan kemiskinan, dan penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Sejalan dengan arah prioritas pembangunan nasional tersebut, Kabupaten Natuna juga telah menetapkan 12 prioritas pembangunan daerah atau program unggulan yang secara langsung mendukung pelaksanaan agenda nasional tersebut, utamanya pada sektor penguatan sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, percepatan pemerataan infrastruktur wilayah kepulauan, penguatan layanan dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, serta penguatan ketahanan sosial budaya di daerah perbatasan.

Keterkaitan antara prioritas nasional Tahun 2026 dan prioritas Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat diidentifikasi secara langsung sebagai berikut:



Gambar 4. 2: Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Tabel 4. 9: Dukungan Program RKPD Terhadap Asta Cita

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
						Pengadaan Mebel Sekolah
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						Pembangunan Ruang Kelas Baru
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						Pengadaan Mebel Sekolah
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
						Pembangunan Ruang Kelas Baru
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah
						Pembangunan Laboratorium
						Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
						Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						Pembangunan Ruang Kelas Baru
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
						Pengadaan Perlengkapan PAUD
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
						Pengelolaan Dana BOP PAUD
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Pembangunan Puskesmas
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
						Operasional Pelayanan Puskesmas
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
						Operrasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./ Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Kabupaten /Kota
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	Memperkuatpenyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	M eningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	M eningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	M eningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGANAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				KERAWANAN PANGAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	T erwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
						Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agrari
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota
						Penanganan sampah melalui pengangkutan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	M eningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	M eningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	T erwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Melanjutkanpengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
					Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	T erakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
						Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	M eningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
	Memperkuatpenyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
						Pengembangan Cagar Budaya
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	M eningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
						Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (C etak /Digital) oleh Masyarakat
				PROGRAM PELESTARIAN		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	M eningkatnya Tertib Arsip dan M engembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
			M eningkatnya Tertib Arsip dan M engembangkan Memori Kolektif Bangsa			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	T erwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang B erkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	M eningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
						Pengembangan Pendidikan
						Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
						Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
						Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
27	M emantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	M eningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		-	-	-

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		-	-	-
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	M eningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota
						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
						Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	M eningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Tabel 4.10: DUKUNGAN PROGRAM RKPD TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM RKPD	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD
1	Pengentasan Kemiskinan	1) Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		3) Sekolah Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
		4) Pembangunan 3 Juta Rumah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Ketahanan Pangan	1) Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM RKPD	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
		4) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
3	Kesehatan untuk semua	1) Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		3) Jaminan Kesehatan Nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		4) Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
4	Perluasan Akses Pendidikan	1) Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3) Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	-	-	-
		4) Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
5	Pertumbuhan Ekonomi	1) Pengendalian Inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM RKPD	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH
		2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		3) Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.11: Dukungan Program Rkpd Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) /lumbung pangan Sumatra Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	Prioritas Nasional 2	
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan penyediaan energi		
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Y ogyakarta-Prambanan		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
4.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		balita		
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga
5.	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel		
		Pengembangan hilirisasi Tembaga		
		Pengembangan hilirisasi Bauksit		
		Pengembangan hilirisasi Timah		
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit		
		Pengembangan hilirisasi Kelapa		
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
		Pengembangan hilirisasi Kimia		
		Pengembangan industri semikonduktor		
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Pengembangan industri dirgantara		
		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
		Pengembangan KIT Batang		
		Pengembangan KI Weda bay		
6.	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemanfaatan khazanah budaya dan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Sebagai bagian dari penguatan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).** Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus terhadap tema pembangunan daerah (Tematik), menyeluruh mencakup seluruh aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Holistik), terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah (Integratif), serta memperhatikan karakteristik kewilayahan Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan negara (Spasial). Melalui penerapan pendekatan THIS, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk menghadirkan perencanaan yang lebih tajam, solutif, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.3.1 Aspek Tematik

Aspek Tematik dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk mempertegas fokus prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan tematik memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tidak bersifat sektoral semata, melainkan diarahkan untuk menjawab isu-isu prioritas yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan wilayah kepulauan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, aspek tematik tidak disusun secara terpisah, namun dirancang agar memiliki keselarasan vertikal dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Keselarasan tematik ini menjadi landasan bagi Kabupaten Natuna dalam memastikan adanya sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Natuna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan regional secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun keterkaitan tematik pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

1) Tematik Nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2026, difokuskan pada:
   "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."
2) Tematik Provinsi Kepulauan Riau, diarahkan untuk:

"Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel."

3) Tematik Kabupaten Natuna, ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai: *"Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya."*

Ketiga tema tersebut secara substansi memiliki benang merah yang sama, yaitu penguatan sektor ekonomi yang produktif, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, penguatan tata kelola, serta pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui keselarasan tematik ini, Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk mengambil bagian aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi dengan menyesuaikan kebijakan pada karakteristik daerah kepulauan.

Gambar berikut menggambarkan keterkaitan tematik pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026.



Gambar 4.3: Keterkaitan Tematik Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Dengan penguatan aspek tematik tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan mampu lebih terfokus pada penyelesaian isu strategis daerah, mempercepat pembangunan wilayah kepulauan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur.

4.3.2 Aspek Holistik

Pendekatan Holistik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian permasalahan pembangunan tidak dilakukan secara sektoral atau terpisah-pisah, melainkan dilakukan secara lintas sektor, melibatkan kolaborasi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Penanganan masalah yang bersifat kompleks dilakukan secara terintegrasi sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, pendekatan holistik diarahkan untuk menyinergikan seluruh prioritas pembangunan daerah dengan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi. Kebijakan lintas sektor (cross-cutting) dalam RKPD Tahun 2026 difokuskan untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai isu pembangunan yang bersifat prioritas, serta mengoptimalkan keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor dalam satu kerangka pembangunan yang utuh.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang menjadi fokus dalam pendekatan holistik meliputi:

1) Optimalisasi Potensi Ekonomi Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah, melalui integrasi pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, pertanian, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif;
2) Akselerasi Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Pembangunan serta Peningkatan Konektivitas, melalui integrasi program pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antar pulau, serta penguatan layanan transportasi dan logistik;
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya, melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan kelompok rentan;
4) Optimalisasi Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Peningkatan Investasi, melalui sinergi sektor kelautan, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata, serta penguatan iklim investasi daerah;
5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik yang adaptif, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6) Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, melalui kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana wilayah kepulauan.

Melalui pendekatan holistik ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang menyeluruh dan saling terhubung antar sektor. Perencanaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator sektoral, tetapi diarahkan untuk menghasilkan dampak kolektif bagi percepatan pembangunan daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkeadilan.

4.3.3 Aspek Integratif

Pendekatan Integratif dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dengan peran para pemangku kepentingan serta integrasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor atau satu pihak, melainkan merupakan kolaborasi lintas perangkat daerah, lintas level pemerintahan, dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyadari pentingnya integrasi perencanaan dalam upaya menjawab tantangan pembangunan daerah kepulauan yang kompleks, sehingga seluruh program pembangunan Tahun 2026 dirancang dengan pola kerja lintas sektor (multi-sectoral), lintas wilayah (multi-spatial), serta lintas sumber pembiayaan. Program-program pembangunan di Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk saling mendukung antar perangkat daerah, memperkuat integrasi perencanaan sektoral, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Dukungan pembiayaan pembangunan Kabupaten Natuna bersumber dari berbagai pendanaan, baik dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2026;
2) Anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3) Dana Transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa;
4) Potensi pendanaan lainnya melalui kolaborasi sektor swasta, BUMD, CSR, dan optimalisasi investasi daerah.

Penerapan aspek integratif ini diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan dan meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Natuna tidak berjalan secara parsial, namun menjadi sebuah kesatuan kebijakan yang terpadu, terarah, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan negara.

4.3.4 Aspek Spasial

Pendekatan **Spasial** dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan penganggaran pembangunan memperhatikan karakteristik geografis, kondisi kewilayahan, serta potensi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kecamatan. Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan memiliki tantangan spasial tersendiri, terutama terkait dengan keterjangkauan layanan dasar, pemerataan pembangunan antar pulau, serta penguatan ketahanan wilayah di kawasan terluar.

Melalui pendekatan spasial, perencanaan pembangunan diarahkan untuk menjawab kesenjangan pembangunan antar wilayah, mempercepat konektivitas antar pulau, serta mengoptimalkan potensi sektor unggulan secara merata di seluruh kecamatan. Fokus spasial juga memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan menyasar wilayah-wilayah yang memiliki kebutuhan prioritas, baik dari aspek layanan publik, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, maupun penguatan pelayanan sosial dasar.

Penerapan aspek spasial dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 secara khusus mempertimbangkan:

1) Pemetaan wilayah berbasis potensi unggulan seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata bahari, dan energi;
2) Pemetaan wilayah dengan ketimpangan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau;
3) Penguatan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Akselerasi pembangunan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta wilayah-wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
5) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong pemerataan pembangunan antar kecamatan.

Seluruh prioritas dan program pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 diformulasikan dengan memperhatikan pola spasial tersebut, sehingga dapat meningkatkan keadilan wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan wilayah Kabupaten Natuna sebagai bagian penting dari wilayah perbatasan negara.

4.4 Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk memastikan bahwa arah dan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa berpedoman pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang layak dan berkualitas.

RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan urgensi percepatan pencapaian target SPM pada berbagai urusan wajib pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat capaian indikator SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pada bagian ini disajikan tabel yang menunjukkan dukungan program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 terhadap target capaian SPM, yang menjadi dasar evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.

Tabel 4.12: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
2	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru
3	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
4	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
6	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
7	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
9	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
10	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
11	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
12	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
13	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
14	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
17	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru
18	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
23	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru
24	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
26	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
27	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
29	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
30	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
31	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
32	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
33	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
34	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
35	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
37	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
38	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
39	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
40	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
42	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
43	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
44	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
45	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
46	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
47	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
48	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
49	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
84	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
85	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
101	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
102	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
103	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
104	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
105	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
106	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
107	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
121	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
127	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pulau Laut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
130	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Serasan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
131	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Serasan Timur	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
132	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Subi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
133	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Midai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
136	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Suak Midai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
141	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
143	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat
145	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
149	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
150	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
152	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		bencana kabupaten/kota				
153	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
154	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
155	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
156	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
157	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
158	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
160	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
161	SPM Bidang Ketentraman	Pelayanan Penyelamatan dan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	dan Ketertiban Umum	Evakuasi Korban Bencana				
163	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
164	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
167	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
169	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
170	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
180	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
183	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
184	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
185	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu

4.5 Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bersifat universal, integratif, dan inklusif, dengan tujuan utama mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Melalui RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Pemerintah Daerah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs ke dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam perumusan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target TPB/SDGs. Pendekatan ini menunjukkan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan agenda global, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Subbab ini menyajikan tabel yang menggambarkan keterkaitan antara program prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan tujuan-tujuan spesifik dalam TPB/SDGs yang menjadi fokus intervensi pembangunan daerah.

Tabel 4.13: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
3	Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
5	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
6	Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	-	-	-
8	Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
10	Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negaranegara.	PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pemakaian Yang Bertanggungjawab: mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk ramah lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
13	Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
14	Kehidupan di Bawah Air: perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, juga menjadi salah satu fokus SDGs. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas ada pada pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya maritim, sampai pada pengurangan limbah plastik, serta pengendalian praktik perikanan yang merugikan.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
15	Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
16	Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

4.6 Tindaklanjut Terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah

Tindak lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam rangkaian perencanaan pembangunan, karena berfungsi sebagai dasar penentuan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode perencanaan berikutnya. Permasalahan yang telah teridentifikasi pada masing-masing urusan pemerintahan daerah perlu ditangani secara sistematis melalui langkah-langkah tindak lanjut yang terukur dan berkesinambungan. Dengan demikian, setiap hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dicarikan solusi yang tepat, sekaligus memperkuat upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Pada bagian ini akan dipaparkan tindak lanjut dari setiap permasalahan pembangunan per urusan, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 4.14: Tindaklanjut Terhadap Permsalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.1	Pendidikan	Masih terdapat anak usia sekolah yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang semestinya.	Melakukan pendataan dan verifikasi anak usia sekolah; meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan orang tua/wali; memperluas program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk mendorong kesesuaian jenjang.
		Terbatasnya jumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di wilayah Kabupaten Natuna.	Mendorong pembentukan dan akreditasi lembaga pendidikan kesetaraan baru; meningkatkan kemitraan dengan lembaga non-formal dan PKBM; menyediakan dukungan anggaran dan tenaga pendidik.
1.2	Kesehatan	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melakukan skrining penyakit Tuberkulosis (TBC).	Melaksanakan kampanye edukasi kesehatan tentang TBC; mengadakan skrining massal di fasilitas kesehatan dan wilayah rawan; memperkuat peran kader kesehatan dan puskesmas keliling.
		Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil.	Meningkatkan rekrutmen tenaga kesehatan; memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil; memanfaatkan telemedicine untuk pelayanan jarak jauh.
		Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan kesehatan, termasuk logistik, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai.	Mengoptimalkan distribusi logistik kesehatan secara berkala; mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan alat dan obat; memperkuat sistem monitoring ketersediaan sarana kesehatan.
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih terbatasnya cakupan dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi darat untuk menghubungkan antar wilayah, terutama di daerah terluar dan terpencil.	Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan; memprioritaskan wilayah strategis dan terisolasi; mengoptimalkan penggunaan dana transfer pusat dan kerjasama antar daerah.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Belum optimalnya pengelolaan tata ruang wilayah yang sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.	Memperbarui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); memperkuat koordinasi lintas sektor; meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukan.
		Keterbatasan infrastruktur dasar permukiman seperti sistem drainase, pengendalian banjir, dan pengelolaan air bersih.	Membangun dan merehabilitasi sistem drainase dan fasilitas air bersih; mengintegrasikan program pengendalian banjir dengan perencanaan tata ruang; mengoptimalkan pemanfaatan dana DAK dan sumber pembiayaan lainnya.
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat kawasan permukiman yang tidak layak huni akibat keterbatasan kualitas bangunan, sanitasi, dan akses air bersih.	Melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH); membangun dan merehabilitasi sarana sanitasi dan air bersih; mengoptimalkan program BSPS dan kolaborasi dengan pihak swasta.
		Terbatasnya pembangunan perumahan baru yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Mengembangkan skema pembiayaan perumahan bersubsidi; meningkatkan kerjasama dengan pengembang dan lembaga pembiayaan; memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk pembangunan perumahan MBR.
		Belum optimalnya penataan kawasan kumuh dan permukiman padat penduduk.	Menyusun rencana penataan kawasan kumuh berbasis partisipasi masyarakat; melaksanakan program penataan dan revitalisasi lingkungan; mengintegrasikan dengan penataan ruang daerah.
1.5	Keterntraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah personel aparatur pemadam kebakaran masih belum memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi aparatur damkar; melakukan rekrutmen personel baru; memberikan insentif bagi petugas di wilayah rawan kebakaran.
		Terbatasnya jumlah personel Satpol PP yang berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPNS bagi anggota Satpol PP; mendorong peningkatan jenjang karier dan sertifikasi; mengusulkan formasi PPNS dalam rekrutmen ASN.
		Pelayanan informasi peringatan dini rawan bencana belum optimal.	Mengembangkan sistem informasi peringatan dini berbasis teknologi; meningkatkan kapasitas SDM pengelola; memperluas jangkauan layanan informasi ke seluruh wilayah desa/kelurahan.
		Sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi kebakaran di desa/kelurahan belum memadai.	Mengadakan dan mendistribusikan peralatan evakuasi dan pemadam kebakaran ringan di setiap desa/kelurahan; melakukan pelatihan evakuasi bagi masyarakat; membangun pos damkar di wilayah strategis.
1.6	Sosial	Bimbingan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih minim baik dari segi cakupan maupun kualitas.	Meningkatkan frekuensi dan jangkauan bimbingan sosial; memperkuat kapasitas tenaga pendamping sosial; menggandeng LSM dan organisasi masyarakat untuk mendukung layanan bimbingan.
		Belum tersedianya shelter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS.	Membangun atau memanfaatkan fasilitas publik sebagai rumah singgah sementara; menyediakan anggaran operasional dan tenaga pendamping; menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga sosial.
		Masih banyak penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu yang belum memiliki akses terhadap alat bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial.	Mengadakan program bantuan alat bantu disabilitas; memperluas pendataan penerima manfaat; menggandeng CSR perusahaan untuk penyediaan alat bantu.
		Jumlah SDM dalam pelaksanaan bimbingan sosial masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.	Menambah jumlah atau meningkatkan kualitas pekerja sosial dan pendamping lapangan; memberikan pelatihan teknis bimbingan sosial; meningkatkan insentif dan dukungan fasilitas kerja.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.1	Tenaga Kerja	Belum terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).	Menyusun MoU dan perjanjian kerjasama dengan LPK; memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM tenaga kerja lokal.	Menyelenggarakan pelatihan vokasi; memperluas program magang industri; memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.
		Belum terbentuknya Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah kejuruan.	Membentuk dan mengaktifkan BKK di SMK; menyediakan pendampingan dan bimbingan karir; menghubungkan BKK dengan dunia usaha dan industri.
		Kurangnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja ke luar negeri.	Melakukan sosialisasi peluang kerja luar negeri yang aman; memfasilitasi pelatihan bahasa dan keterampilan kerja; menjamin perlindungan tenaga kerja migran.
		Tidak tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdaftar secara resmi.	Mengoptimalkan pendaftaran CPMI/CTKI; melakukan pendataan berkala; memfasilitasi proses administrasi sesuai prosedur resmi.
		Belum maksimalnya fasilitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1).	Meningkatkan kapasitas layanan AK-1 berbasis digital; menambah titik pelayanan di kecamatan; menyederhanakan prosedur penerbitan AK-1.
		SDM tenaga kerja lokal belum kompeten untuk bersaing di tingkat nasional.	Meningkatkan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); memperluas sertifikasi kompetensi; memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.
		Ketersediaan program kejuruan belum sesuai minat dan bakat masyarakat akibat keterbatasan sarana dan prasarana.	Menyediakan kejuruan yang relevan dengan potensi daerah; meningkatkan fasilitas pelatihan; melibatkan industri dalam penentuan jenis pelatihan.
		Standar kejuruan belum memenuhi Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).	Menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan KMPI; meningkatkan kompetensi instruktur; melakukan akreditasi program pelatihan.
		Rendahnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja tidak tetap.	Melakukan sosialisasi kewajiban kepesertaan BPJS; memberikan insentif atau penghargaan bagi perusahaan patuh; memperkuat pengawasan ketenagakerjaan.
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peran, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan belum optimal, ditambah kurangnya kader perempuan di kelurahan dan desa yang jauh, serta minimnya kegiatan pemberdayaan perempuan.	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi kader perempuan di desa/kelurahan; memperluas program pemberdayaan berbasis potensi lokal; memberikan dukungan anggaran dan kemitraan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan.
		Pemahaman media massa terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang, sehingga pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal.	Melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi media massa tentang isu gender dan perlindungan anak; menjalin kemitraan strategis dengan media untuk kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Masih adanya pandangan di masyarakat bahwa perempuan tidak layak mengambil keputusan, serta adanya pola pikir di kalangan perempuan sendiri yang merasa tidak layak menjadi pemimpin.	Mengadakan kampanye perubahan mindset melalui tokoh masyarakat, pendidikan formal, dan komunitas; menyediakan program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan; memberi contoh role model perempuan sukses di berbagai bidang.
		Perlindungan terhadap perempuan dan anak belum optimal.	Memperkuat sistem layanan perlindungan terpadu; meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait; meningkatkan kualitas tenaga profesional untuk pendampingan korban; memastikan akses layanan yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
2.3	Pangan	Ketersediaan bahan pangan belum stabil sepanjang tahun, yang berdampak pada fluktuasi pasokan dan harga di masyarakat.	Mengembangkan sistem produksi dan distribusi pangan yang berkesinambungan melalui peningkatan kapasitas petani, penguatan kemitraan dengan pelaku usaha, serta penyediaan informasi harga dan pasokan secara real-time.
		Akses distribusi komoditas pangan ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, masih terbatas.	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta memperluas jaringan distribusi pangan, termasuk memanfaatkan teknologi logistik modern dan kerja sama antarwilayah.
		Pengelolaan lumbung pangan daerah belum optimal dalam menjaga cadangan pangan strategis.	Memperkuat kelembagaan pengelola lumbung pangan, menerapkan manajemen stok berbasis data, serta memaksimalkan pemanfaatan lumbung sebagai penyangga kebutuhan saat terjadi kelangkaan atau bencana.
		Penanganan kerawanan pangan masih berfokus pada daerah terdampak bencana, belum menyeluruh ke wilayah rawan pangan lainnya.	Melakukan pemetaan wilayah rawan pangan secara berkala, memperluas program intervensi ke wilayah berisiko tinggi, dan mengintegrasikan penanganan kerawanan pangan ke dalam program pembangunan wilayah terpadu.
2.4	Pertanahan	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan tata kelola pertanahan di daerah.	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait regulasi baru kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta menyesuaikan dokumen perencanaan dan pengelolaan pertanahan sesuai ketentuan terbaru.
		Pelaksanaan program pengelolaan tanah kosong belum optimal, khususnya pada kegiatan inventarisasi tanah kosong, akibat belum terselesaikannya permasalahan batas tanah masyarakat pada tahun 2024.	Memfasilitasi penyelesaian batas tanah masyarakat melalui mediasi dan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat inventarisasi tanah kosong untuk mendukung pemanfaatan lahan secara produktif.
2.5	Lingkungan Hidup	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perizinan lingkungan, termasuk Persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (PUU LH), masih rendah.	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Nilai baku mutu air di beberapa lokasi masih di bawah standar, dengan kategori cemar ringan.	Melaksanakan program pengendalian pencemaran air melalui pemantauan kualitas air secara rutin, penertiban pembuangan limbah, dan rehabilitasi ekosistem perairan.
		Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum optimal, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan akhir.	Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu, memperluas fasilitas pengolahan sampah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah.
		Pengelolaan ruang terbuka (RTH) hijau belum optimal	Pendataan ulang terkait RTH, peningkatan sarana dan prasarana RTH
2.6	Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi dan pembaruan data kependudukan masih rendah.	Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan, memperluas layanan daring, dan memberikan insentif non-materi bagi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.
		Pemanfaatan data kependudukan oleh pemerintah dan masyarakat luas belum optimal, baik untuk perencanaan, pelayanan publik, maupun kegiatan ekonomi.	Meningkatkan integrasi data kependudukan dengan sistem informasi perangkat daerah, memperluas akses data secara terkontrol, serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat data kependudukan.
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia pada kelembagaan desa masih terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi perangkat desa, meningkatkan pendampingan oleh tenaga ahli, serta mendorong rekrutmen SDM desa yang kompeten.
		Masih terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum memiliki unit usaha ekonomi masyarakat.	Memfasilitasi pendirian unit usaha BUMDes yang sesuai potensi lokal, menyediakan pendampingan usaha, dan memfasilitasi akses permodalan.
		Kapasitas pengelola BUMDes dalam manajemen usaha dan pengembangan bisnis masih terbatas.	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran, serta membangun jejaring kemitraan antara BUMDes dengan pelaku usaha dan lembaga keuangan.
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem pencatatan dan pelaporan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari pemangku kepentingan dan mitra kerja belum optimal.	Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan pelatihan teknis kepada petugas pencatat dan pelapor.
		Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap manfaat dan keikutsertaan dalam program KB, penggunaan metode kontrasepsi modern, serta faktor penunjang lainnya masih rendah.	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan intensif melalui kader KB, tokoh masyarakat, dan media lokal, dengan pendekatan komunikasi yang sesuai kondisi sosial budaya setempat.
		Pemahaman PUS mengenai metode kontrasepsi jangka panjang (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP) belum optimal.	Meningkatkan edukasi tentang manfaat dan keamanan MKJP melalui layanan konseling, kampanye informasi publik, serta penyediaan tenaga medis terlatih untuk pemasangan MKJP.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Jumlah tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan *Clinical Training Unit* (CTU) masih terbatas.	Menambah kuota pelatihan CTU bagi tenaga medis, memperluas kerja sama dengan lembaga pelatihan kesehatan, dan memastikan tenaga terlatih ditempatkan secara merata di seluruh wilayah pelayanan.
2.9	Perhubungan	Layanan perhubungan, khususnya menuju wilayah yang memiliki potensi pembangunan perekonomian, belum optimal.	Meningkatkan frekuensi dan kualitas layanan transportasi ke wilayah potensial, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan perhubungan.
		Tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan uji KIR untuk pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.	Menyediakan peralatan uji KIR yang memenuhi standar, merekrut atau melatih SDM bersertifikat, serta mengembangkan sistem pelayanan uji KIR yang terjadwal dan transparan.
2.10	Komunikasi dan Informatika	Layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi belum optimal, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.	Memperluas infrastruktur jaringan telekomunikasi melalui kerja sama dengan penyedia layanan, memanfaatkan teknologi alternatif (VSAT, microwave link), serta mengembangkan program internet desa.
		Pemanfaatan dan penggunaan e-Government oleh perangkat daerah belum optimal.	Meningkatkan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, memberikan pelatihan kepada aparatur, serta mengembangkan aplikasi layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan program pengembangan UMKM belum maksimal, antara lain karena masih banyak usaha mikro yang belum mengajukan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk.	Melakukan sosialisasi manfaat sertifikasi dan standarisasi, mempermudah proses pengajuan, serta memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha mikro.
		Kemampuan manajerial koperasi dan UKM masih belum optimal.	Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran, serta membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha besar.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk UKM masih rendah.	Mengembangkan platform pemasaran digital, memberikan pelatihan e-commerce kepada pelaku UKM, dan memfasilitasi akses ke marketplace nasional maupun global.
		Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan.	Melakukan revitalisasi koperasi melalui pembinaan dan pengawasan, mendorong transformasi koperasi menjadi koperasi modern berbasis digital, serta memberikan stimulus usaha bagi koperasi potensial.
2.12	Penanaman Modal	Pemahaman pelaku usaha terkait prosedur pengurusan izin usaha, baik perizinan maupun non-perizinan, masih rendah.	Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan penyediaan layanan konsultasi perizinan terpadu yang mudah diakses, serta memanfaatkan platform digital untuk mempermudah proses perizinan.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Peningkatan kualitas iklim investasi daerah belum optimal.	Menyusun dan melaksanakan strategi promosi investasi yang terarah, memberikan insentif investasi, serta memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah untuk mempermudah pelayanan investasi.
		Kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi di daerah masih belum memadai.	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis (transportasi, energi, telekomunikasi, dan utilitas lainnya) serta mendorong kemitraan pemerintah–swasta dalam penyediaan infrastruktur.
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	Data kewirausahaan yang diperoleh dari pihak kecamatan belum lengkap, sehingga pencapaian target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada tahun 2024 belum maksimal.	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada kecamatan dalam pengumpulan data, menerapkan sistem pelaporan digital terintegrasi, serta memverifikasi data secara berkala.
		Keterbatasan anggaran menghambat akomodasi peserta di luar wilayah Bunguran, sehingga target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada tahun 2024 tidak tercapai sepenuhnya.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran, memanfaatkan sumber pendanaan alternatif (CSR, sponsor), dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
		Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas untuk penyelenggaraan event, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan penyelenggara kegiatan olahraga belum optimal.	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga, memperluas kemitraan dengan stakeholder terkait, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan event olahraga.
2.14	Statistik	Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan statistik sektoral masih terbatas.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data statistik sektoral, mengembangkan sistem informasi statistik terintegrasi, serta memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dalam pengelolaan data.
2.15	Persandian	Fasilitas dan perlengkapan persandian belum memadai untuk mendukung keamanan informasi di pemerintah daerah.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana persandian sesuai standar keamanan informasi, serta melakukan pemeliharaan secara berkala.
		Pengelolaan persandian dan keamanan informasi belum mencakup seluruh perangkat daerah, ditambah keterbatasan infrastruktur dan SDM yang mampu mengoperasikannya	Menambah dan melatih SDM di bidang keamanan informasi, memperluas jangkauan layanan persandian, serta memperkuat infrastruktur keamanan siber.
2.16	Kebudayaan	Dukungan kebijakan untuk pengembangan cagar budaya masih perlu ditingkatkan.	Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang berpihak pada pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya, termasuk penguatan regulasi dan pendanaan.
		Sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan masih belum optimal.	Memperkuat koordinasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, komunitas budaya, dan pihak swasta melalui forum komunikasi dan program bersama.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
2.17	Perpustakaan	Kualitas pelayanan dan tata kelola perpustakaan daerah masih memerlukan peningkatan untuk menjangkau kebutuhan informasi masyarakat secara lebih luas.	Mengoptimalkan kapasitas SDM perpustakaan, memperkaya koleksi bahan pustaka, serta memanfaatkan teknologi informasi dan layanan perpustakaan digital.
		Akses dan pemerataan literasi di berbagai wilayah belum sepenuhnya terwujud.	Mengembangkan program literasi berbasis sekolah dan komunitas, menyelenggarakan kegiatan literasi keliling, serta menyediakan layanan perpustakaan keliling di daerah yang belum memiliki fasilitas memadai.
2.18	Kearsipan	Kapasitas dan jumlah sumber daya manusia di bidang kearsipan pada perangkat daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih perlu diperkuat untuk mendukung pengawasan kearsipan internal dan eksternal.	Menyelenggarakan pelatihan teknis kearsipan, menambah tenaga arsiparis sesuai kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sistem informasi kearsipan.
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		
3.1	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.	Meningkatkan kapasitas dan literasi digital masyarakat pesisir melalui program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai.
3.2	Pariwisata	Biaya transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna masih relatif tinggi.	Mendorong pengembangan aksesibilitas transportasi yang lebih terjangkau dan memperluas konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata.
		Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan pengelolaan objek wisata masih terbatas.	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan kelembagaan pengelola destinasi wisata.
3.3	Pertanian	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian masih belum optimal.	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pertanian guna mendukung produktivitas petani.
		Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia (petugas kesehatan hewan/medik/paramedik).	Memperkuat jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan melalui rekrutmen, pelatihan, dan penempatan yang lebih merata.
		Harga sarana produksi pertanian masih tinggi dan tidak sebanding dengan nilai jual hasil produksi.	Mendorong stabilisasi harga sarana produksi pertanian serta memperkuat akses pasar bagi produk hasil pertanian.
		Hilirisasi dan pemasaran produk pertanian belum berjalan optimal.	Mengembangkan industri hilir berbasis pertanian serta memperluas jaringan pemasaran melalui kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi.
3.4	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran produk unggulan daerah	Meningkatkan promosi dan perluasan akses pasar melalui pameran, digital marketing, dan kerja sama antar daerah.
		Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah	Meningkatkan kualitas produk melalui inovasi, pelatihan UMKM, serta fasilitasi sertifikasi dan standar mutu produk.
3.5	Perindustrian	Masih terbatasnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standar, tersertifikasi, dan memiliki izin resmi	Memfasilitasi sertifikasi, standardisasi, serta perizinan bagi pelaku IKM guna meningkatkan kualitas dan legalitas produk.
		Belum tersedianya data pemantauan dan pengawasan izin IUKI dan IPKI	Membangun sistem basis data terpadu serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perizinan IUKI dan IPKI.
		Belum optimalnya pengembangan sentra industri berbasis produk unggulan daerah	Mendorong pengembangan sentra industri potensial melalui penyediaan sarana, prasarana, serta pembinaan berkelanjutan.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Kendala transportasi yang terbatas sehingga berdampak pada aktivitas produksi dan ketersediaan bahan baku	Memperkuat kerja sama lintas sektor dalam peningkatan akses transportasi dan distribusi bahan baku serta hasil produksi.
3.6	Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi belum berjalan optimal sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Mendorong perencanaan dan implementasi program pembangunan kawasan transmigrasi secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor, serta memperkuat infrastruktur pendukung.
		Masih terdapat permasalahan transmigrasi yang belum terselesaikan secara tuntas, meliputi penyelesaian sertifikat hak milik transmigran, pelepasan kawasan hutan untuk lahan usaha II (LU2), penyelesaian aset transmigrasi, penanganan lahan restan, dan lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) murni.	Mempercepat proses penyelesaian administrasi pertanahan, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta menyiapkan regulasi maupun fasilitasi penyelesaian sengketa aset dan tata kelola lahan transmigrasi.
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.1	Sekretariat Daerah	Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik masih rendah, ditandai dengan minimnya inovasi, serta belum optimalnya sosialisasi penggunaan sistem pengaduan masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan inovasi pelayanan, optimalisasi sosialisasi dan pemanfaatan sistem pengaduan, serta memperkuat mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat.
		Keterbatasan infrastruktur teknologi, regulasi yang kompleks dan dinamis, serta kondisi eksternal yang kurang kondusif turut menghambat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.	Mendorong penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, menyederhanakan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dinamika regulasi dan kondisi eksternal.
		Inovasi dan upaya dari perangkat daerah dalam peningkatan layanan publik berbasis digital masih terbatas, banyak layanan yang terdaftar tidak berjalan, serta belum ada evaluasi yang memadai terhadap mutu layanan.	Meningkatkan komitmen OPD dalam implementasi layanan publik berbasis digital, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap keberlangsungan layanan, serta menyusun mekanisme peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
4.2	Sekretariat DPRD	NIHIL	
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
5.1	Perencanaan	Masih terdapat ketidaksamaan persepsi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, dan indikator kegiatan pada dokumen perencanaan.	Melakukan sinkronisasi dan penyamaan persepsi melalui forum koordinasi, bimbingan teknis, serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan agar indikator yang ditetapkan lebih konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
5.2	Keuangan	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan.	Mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak.
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran.	Memperkuat perencanaan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan kualitas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
		Belum optimalnya penerimaan dari sektor PAD.	Mengintensifkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta retribusi daerah, meningkatkan sistem pengelolaan PAD berbasis digital, dan memperkuat pengawasan serta penegakan regulasi.
5.3	Kepegawaian	Besarnya biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan classical.	Mengoptimalkan pola pengembangan kompetensi ASN melalui metode yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama antar lembaga.

No	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Inisiatif yang rendah dari pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi bersertifikat.	Meningkatkan motivasi dan komitmen pejabat fungsional dengan memberikan insentif berbasis kinerja serta memperkuat sistem penghargaan dan pembinaan karier.
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Pendidikan dan Pelatihan tidak diprioritaskan pada RPJMD Tahun 2021–2026.	Mengintegrasikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ke dalam program prioritas perangkat daerah serta mendorong penyusunan kebijakan pendukung agar tetap relevan dengan peningkatan kapasitas SDM.
5.5	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan berbasis inovasi dan IT.	Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong inovasi daerah yang aplikatif dan berkelanjutan.
5.6	Pengelolaan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.	Mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan program prioritas, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang lebih efektif.
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
6.1	Inspektorat	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi APIP.	Melakukan pemenuhan kebutuhan jumlah APIP serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.
		Lemahnya pemahaman terhadap SPIP.	Meningkatkan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah.
7	Unsur Kewilayahan		
7.1	Kecamatan	Nihil	Nihil
	1) Bunguran Timur		
	2) Bunguran Barat		
	3) Bunguran Timur Laut		
	4) Bunguran Selatan		
	5) Bunguran Tengah		
	6) Bunguran Utara		
	7) Pulau Tiga		
	8) Serasan		
	9) Serasan Timur		
	10) Midai		
	11) Kecamatan Subi		
	12) Pulau Laut		
	13) Bunguran Batubi		
	14) Suak Midai		
	15) Pulau Tiga Barat		
	16) Pulau Seluan		
	17) Pulau Panjang		
8	Unsur Pemerintahan Umum		
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Nihil	Nihil

4.7 Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun penjaringan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pokir DPRD disusun untuk menjadi bahan masukan dalam perumusan kegiatan, penentuan lokasi, serta kelompok sasaran yang sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Selanjutnya, Pokir DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Natuna untuk dilakukan telaah, sinkronisasi, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, telaah Pokir DPRD tidak hanya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta kapasitas riil anggaran daerah. Hal ini bertujuan agar setiap masukan dapat diakomodir secara proporsional tanpa mengurangi konsistensi terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Pada Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah ditetapkan dengan tema:

"Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya."

Berdasarkan tema tersebut, Pokir DPRD diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Substansi Pokir DPRD yang relevan dengan sasaran pembangunan, antara lain:

1) Penataan dan pembangunan drainase untuk penanganan genangan dan pencegahan banjir;
2) Optimalisasi peningkatan jalan serta penyediaan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan pelayaran;
3) Peningkatan sanitasi, air bersih, dan penataan kawasan kumuh;
4) Penyediaan sarana pendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keolahragaan;
5) Pembangunan rumah ibadah dan pasar rakyat;
6) Penyediaan sarana prasarana pertanian, termasuk jalan usaha tani, jalan produksi, serta dukungan pada sektor peternakan, perikanan tangkap, dan budidaya.

Lebih jauh, keterkaitan antara Pokir DPRD dengan prioritas pembangunan daerah juga dapat dilihat melalui hubungan antara Prioritas RKPD Tahun 2024 dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menampung Pokir DPRD Tahun 2026 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.15: Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menampung Pokir DPRD Tahun 2026
1	Akselerasi Pengelolan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim Dan Keunggulan Daerah Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pertanian
		Urusan Perdagangan
		Urusan Perindustrian
		Urusan Koperasi UKM
		Urusan Lingkungan Hidup
2	Akselerasi Peningkatan Konektivitas Antar Pulau Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan.	Urusan Perhubungan
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dengan Memperkuat Nilai Keagamaan Dan Pelestarian Budaya Daerah.	Urusan Pendidikan
		Urusan Kesehatan
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Komunikasi dan Informatika
		Urusan Kebudayaan

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa Pokir DPRD Tahun 2026 memiliki relevansi langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pokir tidak hanya mengakomodir kebutuhan masyarakat di sektor ekonomi maritim, pertanian, perdagangan, maupun industri, tetapi juga memperhatikan aspek konektivitas antar pulau, pemerataan infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi, keagamaan, dan budaya.

Dengan demikian, hasil telaah terhadap Pokir DPRD menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD memiliki keterkaitan erat dengan prioritas pembangunan daerah. Integrasi Pokir DPRD ke dalam RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal secara optimal, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Natuna.



BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini berlandaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta dinamika kebutuhan masyarakat di daerah.

Setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis serta tantangan pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya, sekaligus memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di berbagai sektor. Penentuan pagu pendanaan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, sumber pendanaan alternatif, dan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan ini juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Tahun 2026, serta berperan sebagai instrumen koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Natuna pada tahun 2026 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan kerangka tersebut, rincian rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun untuk setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Rincian ini memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, beserta pagu indikatif, sumber pendanaan, indikator kinerja, serta target capaian yang diharapkan. Penyajian secara terstruktur diharapkan memudahkan proses koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, sekaligus memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun rencana kerja dan pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**268.774.086.243,00**							**188.566.088.077,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**265.744.865.943,00**							**188.566.088.077,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**265.744.865.943,00**							**188.566.088.077,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**190.981.756.789,00**						**-**	**188.566.088.077,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	189.328.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	44.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	32.058.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	112.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	168.342.135.099,00			-	-	-	-	188.101.088.077,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1081 Orang/bulan	168.342.135.099,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	-	-		188.101.088.077,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	124.885.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	49.901.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	74.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.854.852.990,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.995.900,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	725.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	18.901.090,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.513.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	546.058.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	439.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.311.370.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	553.679.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	277.298.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	144.673.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	51.646.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.912.014.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	372.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.720.088.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	212.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	67.928.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				135 Laporan	10.439.710.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	439.097.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	112.075.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	38.260.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	49.896.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	238.866.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**73.663.094.154,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	39.953.234.059,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	2.040.149.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	416.620.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	770.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	3.951.361.759,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			0				0 0	933.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	333.759.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	193.494.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	633.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	197.682.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	362.074.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				5 Peserta Didik	257.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				220 Orang	8.440.660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				6 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				1 Satuan Pendidikan	149.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				84 Satuan Pendidikan	16.504.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1.779.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	49.979.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	49.938.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1.430.870.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				84 Satuan Pendidikan	12.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1.368.054.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	76.377.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	15.052.548.264,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2.007.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	104.860.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	273.450.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	493.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	383.359.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	181.890.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	211.837.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	131.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.127.254.964,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	248.976.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	250.091.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	602.098.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	567.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	49.862.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				350 Peserta Didik	871.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	73.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				185 Orang	3.571.996.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				28 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	49.844.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				28 Satuan Pendidikan	49.868.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	496.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	99.876.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	49.868.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	490.536.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	65.772.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	16.574.467.391,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				16 Unit	3.213.309.081,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				19 Paket	294.145.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				330 Peserta Didik	350.199.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				78 Orang	1.111.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				17 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	230.969.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				116 Satuan Pendidikan	2.216.328.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				123 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	55.496.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	1.108.230.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	4.786.553.060,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2.020.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	396.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	149.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket	49.896.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	591.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2.082.844.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11 Orang	183.997.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Orang	160.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	149.995.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	299.780.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	383.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Orang	117.349.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	52.472.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	92.071.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	642.595.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**250.015.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	200.029.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0 Buku	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah				0 Buku	150.029.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	49.985.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				100 Buku	49.985.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**750.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	750.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				25 Bahasa	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.029.220.300,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.029.220.300,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**800.323.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	349.927.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	349.927.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.420.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				44 Objek	100.420.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	249.976.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 Objek	100.408.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				0 Unit	49.568.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**313.950.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	313.950.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			0				0 0	313.950.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**142.100.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	142.100.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	142.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**250.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				55 Objek	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				832 Objek	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**1.522.847.300,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	1.522.847.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1078 Unit	541.847.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				1 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	137.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1078 Unit	744.000.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**168.027.457.070,00**							**196.127.944.176,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**134.376.929.070,00**							**195.542.944.176,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**134.376.929.070,00**							**195.542.944.176,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**95.208.690.906,00**						**-**	**106.284.737.636,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	94.852.150.906,00			-	-	-	-	103.064.737.636,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				762 Orang/bulan	94.852.150.906,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		103.064.737.636,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	216.540.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.540.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.535.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		555.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**38.558.761.764,00**						**-**	**88.391.602.740,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.981.811.364,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	68.712.112.872,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				15 Unit	7.089.998.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.867.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.634.940.761,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	812.570.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		4.803.172.122,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.084.981.589,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1.570.833.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		594.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	414.082.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		10.450.972.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				11 Unit	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7399 Unit	50.160.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.348.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				510 Unit	6.964.218.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		53.380.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	4.874.937.864,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	5.011.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.168.002.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	18.975.541.808,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1866 Orang	147.439.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1434 Orang	106.022.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1469 Orang	204.180.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6383 Orang	76.934.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16459 Orang	49.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				68208 Orang	40.303.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.303.408,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6816 Orang	54.873.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18428 Orang	42.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		42.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2010 Orang	8.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				153 Orang	58.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		58.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1157 Orang	113.447.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		113.447.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2086 Orang	45.962.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		45.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	723.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	89.952.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	62.997.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	171.138.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	106.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	60.205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	80.590.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.591.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	14.335.864.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	89.795.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		89.795.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	46.923.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1.107.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	74.138.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		74.138.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	75.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	14.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		1.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	7.128.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		590.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	75.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	333.947.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	333.948.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	333.947.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		333.948.060,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**178.288.200,00**						**-**	**86.603.800,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.882.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	30.882.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	86.603.400,00			-	-	-	-	86.603.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				780 Orang	86.603.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.603.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.802.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				923 Orang	60.802.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**210.398.700,00**						**-**	**520.000.000,00**	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	43.835.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	43.835.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	91.563.500,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				463 Unit	91.563.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-	-		375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**220.789.500,00**						**-**	**260.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.129.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	104.129.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	116.660.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	116.660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	X	**NON URUSAN**						**33.650.528.000,00**							**585.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**33.650.528.000,00**							**585.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**33.650.528.000,00**						**-**	**585.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	33.480.528.000,00			-	-	-	-	575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.460.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.457.068.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA						**40.163.020.520,00**							**55.060.019.206,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39.654.647.320,00**							**54.629.019.206,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**39.654.647.320,00**							**54.629.019.206,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**26.394.195.992,00**						**-**	**10.624.825.300,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	63.570.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	63.570.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kehadiran Pegawai*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	318.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		318.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran*	-			85 Persen	702.614.000,00			-	-	-	-	1.712.530.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	349.989.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		662.530.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	249.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	102.665.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah*	-			60 Persen	631.567.000,00			-	-	-	-	6.727.179.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		341.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	311.067.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.365.679.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	320.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.020.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			85 Persen	56.000.000,00			-	-	-	-	147.956.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.992.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	36.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		106.964.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			80 Persen	1.271.510.000,00			-	-	-	-	1.644.160.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	434.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		554.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	252.300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	584.280.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		740.160.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pencapaian SPM*	-			undefined undefined	23.668.934.992,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	23.668.934.992,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**13.105.611.328,00**						**-**	**43.659.193.906,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA*	-			70 Persen	9.017.473.328,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	23.313.393.906,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2.725.272.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.110.543.678,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	342.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	96.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.502.850.228,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	700.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	5.153.101.328,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			85 Nilai	3.690.648.000,00			-	-	-	-	20.072.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				6 Dokumen	3.690.648.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.072.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perizinan Rumah Sakit*	-			1 Dokumen	397.490.000,00			-	-	-	-	273.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	397.490.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		273.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**154.840.000,00**						**-**	**345.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			62 Persen	154.840.000,00			-	-	-	-	345.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	154.840.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		345.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	X	**NON URUSAN**						**508.373.200,00**							**431.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**508.373.200,00**							**431.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**508.373.200,00**						**-**	**431.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran*	-			85 Persen	163.350.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	163.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			85 Persen	345.023.200,00			-	-	-	-	241.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	345.023.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		241.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
		PUSKESMAS RANAI						**3.140.292.000,00**							**1.195.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.140.292.000,00**							**1.195.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.140.292.000,00**							**1.195.500.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.140.292.000,00**						**-**	**1.175.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.140.292.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.155.500.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				475 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	75.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				484 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1.515.145.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		770.500.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.624.747.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		170.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
		PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH						**745.649.000,00**							**745.649.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**745.649.000,00**							**745.649.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**745.649.000,00**							**745.649.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**745.649.000,00**						**-**	**725.649.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	745.649.000,00			-	-	-	-	705.649.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1573 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				85 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	354.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		335.614.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	391.049.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		90.035.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TANJUNG						**1.016.502.000,00**							**743.859.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.016.502.000,00**							**743.859.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.016.502.000,00**							**743.859.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.016.502.000,00**						**-**	**723.859.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.016.502.000,00			-	-	-	-	703.859.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2250 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				152 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	328.859.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		328.859.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	687.643.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		95.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			0				1 0	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
		PUSKESMAS KELARIK						**952.724.000,00**							**849.728.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**952.724.000,00**							**849.728.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**952.724.000,00**							**849.728.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**952.724.000,00**						**-**	**829.728.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	952.724.000,00			-	-	-	-	809.728.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2068 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				132 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	334.728.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		334.728.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	617.996.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		195.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KELARIK
		PUSKESMAS BATUBI JAYA						**753.790.900,00**							**732.591.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**753.790.900,00**							**732.591.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**753.790.900,00**							**732.591.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**753.790.900,00**						**-**	**712.591.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	753.790.900,00			-	-	-	-	702.591.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				69 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1590 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				85 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				116 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	331.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	422.590.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		422.591.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
		PUSKESMAS PULAU LAUT						**550.635.000,00**							**724.635.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**550.635.000,00**							**724.635.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**550.635.000,00**							**724.635.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**550.635.000,00**						**-**	**704.635.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	550.635.000,00			-	-	-	-	684.635.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	81.070.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		81.070.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				935 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				48 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	260.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		134.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	209.565.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		209.565.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PULAU TIGA						**913.517.000,00**							**810.259.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**913.517.000,00**							**810.259.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**913.517.000,00**							**810.259.200,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**913.517.000,00**						**-**	**790.259.200,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	913.517.000,00			-	-	-	-	770.259.200,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				68 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1619 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				85 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				103 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	496.785.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		73.527.200,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	416.732.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		416.732.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
		PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT						**464.098.000,00**							**785.396.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**464.098.000,00**							**785.396.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**464.098.000,00**							**785.396.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**464.098.000,00**						**-**	**765.396.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	464.098.000,00			-	-	-	-	745.396.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1039 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	161.977.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		37.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	302.120.800,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		438.396.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
		PUSKESMAS SERASAN						**1.097.449.900,00**							**845.476.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.097.449.900,00**							**845.476.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.097.449.900,00**							**845.476.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.097.449.900,00**						**-**	**825.476.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.097.449.900,00			-	-	-	-	805.476.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	116.074.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1924 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				146 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	594.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		138.600.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	386.875.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		386.876.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN
		PUSKESMAS SERASAN TIMUR						**779.791.000,00**							**1.056.422.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**779.791.000,00**							**1.056.422.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**779.791.000,00**							**1.056.422.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**779.791.000,00**						**-**	**1.036.422.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	779.791.000,00			-	-	-	-	1.016.422.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				59 Orang	91.538.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				59 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1344 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				99 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		38.920.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	414.475.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		76.100.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	273.778.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		641.402.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
		PUSKESMAS SUBI						**764.718.000,00**							**1.007.865.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**764.718.000,00**							**1.007.865.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**764.718.000,00**							**1.007.865.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**764.718.000,00**						**-**	**987.865.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	764.718.000,00			-	-	-	-	967.865.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58 Orang	101.613.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1320 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				96 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				92 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		60.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	357.340.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		49.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	305.765.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		598.865.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				92 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
		PUSKESMAS MIDAI						**875.444.000,00**							**887.212.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**875.444.000,00**							**887.212.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**875.444.000,00**							**887.212.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**875.444.000,00**						**-**	**867.212.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	875.444.000,00			-	-	-	-	847.212.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	81.472.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1269 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				158 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	458.574.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		35.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	335.398.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		552.212.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MIDAI
		PUSKESMAS SEDANAU						**1.311.499.000,00**							**560.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.311.499.000,00**							**560.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.311.499.000,00**							**560.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.311.499.000,00**						**-**	**540.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.311.499.000,00			-	-	-	-	530.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2749 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				157 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				222 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	575.465.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		25.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	736.034.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		225.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
		PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN						**767.763.000,00**							**1.077.763.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**767.763.000,00**							**1.077.763.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**767.763.000,00**							**1.077.763.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**767.763.000,00**						**-**	**1.057.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	767.763.000,00			-	-	-	-	1.047.763.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1509 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				73 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				97 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	352.440.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		352.440.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	415.323.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		415.323.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
		INSTALASI FARMASI						**667.243.920,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**667.243.920,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**667.243.920,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**667.243.920,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	471.243.920,00			-	-	-	-	0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	471.243.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	196.000.000,00			-	-	-	-	0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	196.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSTALASI FARMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUAK MIDAI						**313.323.900,00**							**461.674.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**313.323.900,00**							**461.674.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**313.323.900,00**							**461.674.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**313.323.900,00**						**-**	**461.674.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	313.323.900,00			-	-	-	-	461.674.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	58.278.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1269 Orang	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				58 Orang	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				158 Orang	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	78.372.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	176.673.900,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.674.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**80.069.970.178,00**							**543.149.818.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.069.970.178,00**							**543.149.818.860,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**80.069.970.178,00**							**543.149.818.860,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.077.200.064,00**						**-**	**10.308.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	18.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.040.159.664,00			-	-	-	-	7.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	8.040.159.664,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	372.010.700,00			-	-	-	-	1.013.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	139.080.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	11.999.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	220.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		595.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	448.201.500,00			-	-	-	-	980.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.753.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.775.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	412.673.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.828.200,00			-	-	-	-	699.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	186.828.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		199.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**620.191.800,00**						**-**	**2.200.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	248.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,2 KM	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	248.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	371.691.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,4 KM	135.585.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	236.106.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.402.623.000,00**						**-**	**7.340.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.402.623.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	7.340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	99.275.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2 Liter/Detik	1.004.618.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				11 Desa	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2 Liter/Detik	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	298.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**383.457.400,00**						**-**	**2.580.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	383.457.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	2.580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				0,1 Ton/hari	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen Dokumen	329.569.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				2 Unit	53.887.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				0,2 Ton/hari	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**909.422.200,00**						**-**	**7.280.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	909.422.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	7.280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				2 M³/Hari	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	313.429.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				7 Desa	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				50 Rumah Tangga	595.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**10.957.825.550,00**						**-**	**6.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.957.825.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	6.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				600 M	5.753.545.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				11 Sistem Drainase Perkotaan	361.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	4.842.443.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**7.432.640.000,00**						**-**	**78.238.386.743,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	7.432.640.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	78.238.386.743,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7.331.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		76.637.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				20 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	101.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		1.300.936.743,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**15.479.678.562,00**						**-**	**57.419.364.100,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.479.678.562,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	57.419.364.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	15.479.678.562,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		57.419.364.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**32.721.931.602,00**						**-**	**368.518.760.328,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	32.721.931.602,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	368.518.760.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1.200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		1.368.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2.9 KM	598.778.529,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.849.929.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				1.80 KM	19.473.501.143,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		222.043.172.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	2.458.667.668,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		18.237.797.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.50 KM	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.782.431.729,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				1 Meter	196.941.737,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.668.535.939,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1.90 KM	7.928.921.627,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		105.409.110.185,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	199.021.898,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				0 Meter	666.099.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		8.534.782.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**85.000.000,00**						**-**	**912.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	518.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		205.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		142.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		171.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	85.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-		342.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		57.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		267.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		17.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	51.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				5 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		51.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.000.000.000,00**						**-**	**1.403.307.689,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	259.415.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	259.615.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	259.415.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		259.615.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.004.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	317.307.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.004.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		317.307.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	420.580.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	653.846.153,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	200.584.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		288.461.538,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	219.996.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		365.384.615,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	172.538.460,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		70.846.153,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		101.692.307,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**37.598.610.437,00**							**126.710.673.778,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.596.960.437,00**							**121.083.305.778,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**36.596.960.437,00**							**121.083.305.778,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.992.314.065,00**						**-**	**9.292.215.982,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.701.000,00			-	-	-	-	59.417.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	22.701.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.417.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.934.407.765,00			-	-	-	-	5.811.166.104,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2.934.407.765,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.811.166.104,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	194.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	104.038.200,00			-	-	-	-	476.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.963.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	81.075.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		424.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	405.571.878,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		148.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		257.071.878,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.831.936.000,00			-	-	-	-	1.969.054.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1.012.795.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	816.141.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		953.054.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	99.231.100,00			-	-	-	-	376.257.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	54.291.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		116.257.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		235.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**200.019.400,00**						**-**	**390.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	200.019.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	390.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	200.019.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		390.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**4.689.532.600,00**						**-**	**7.757.533.799,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	250.184.200,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	250.184.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	4.439.348.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	7.507.533.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	302.085.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		750.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				40 Ha	4.137.263.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.757.333.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**0,00**						**-**	**351.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	351.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		351.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**26.715.094.372,00**						**-**	**103.292.055.997,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	26.715.094.372,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	103.292.055.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		6.515.973.869,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				1 Kelompok	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		1.421.091.421,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				0 Lokasi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				19 Lokasi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				65 Lokasi	26.715.094.372,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		94.854.990.707,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.001.650.000,00**							**5.627.368.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.001.650.000,00**							**5.627.368.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**0,00**						**-**	**1.200.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.200.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**1.001.650.000,00**						**-**	**4.426.868.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.001.650.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	4.426.868.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	824.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		2.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	177.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		826.868.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**15.507.430.866,00**							**22.675.137.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.507.430.866,00**							**22.675.137.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.507.430.866,00**							**22.675.137.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.921.727.966,00**						**-**	**21.309.437.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			85 Persen	58.700.200,00			-	-	-	-	139.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	58.700.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		134.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	10.265.894.966,00			-	-	-	-	11.563.152.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	10.265.894.966,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.563.152.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kehadiran Pegawai*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	197.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	128.380.800,00			-	-	-	-	474.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.901.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.943.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		102.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	102.506.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		222.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.854.000,00			-	-	-	-	2.211.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	150.854.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		171.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			85 Persen	4.116.403.000,00			-	-	-	-	6.298.385.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	69.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4.037.123.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.195.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			90 Persen	201.495.000,00			-	-	-	-	426.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	181.175.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.540.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	11.780.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**585.702.900,00**						**-**	**1.365.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani*	-			80 Persen	341.943.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	849.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		21.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				494 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				200 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		47.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	341.943.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				5 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		66.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada*	-			80 Persen	243.759.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	244.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				5 unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	149.699.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	94.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan PPNS*	-			50 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	272.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**16.333.169.171,00**							**8.601.926.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.218.990.361,00**							**8.487.746.932,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**16.218.990.361,00**							**8.487.746.932,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.533.560.661,00**						**-**	**8.007.546.932,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.766.530.061,00			-	-	-	-	5.766.530.061,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.766.530.061,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.766.530.061,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	38.000.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	38.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	175.436.000,00			-	-	-	-	280.120.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.056.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.996.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	135.384.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		137.120.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.047.941.000,00			-	-	-	-	425.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	5.969.526.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	14.266.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	63.702.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	447.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.420.000.000,00			-	-	-	-	1.421.396.291,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.417.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.418.396.291,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85.653.600,00			-	-	-	-	76.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	64.648.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.245.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.760.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**2.685.429.700,00**						**-**	**480.200.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.543.216.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				48 Laporan	44.845.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	2.398.371.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	98.213.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	98.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	98.213.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		98.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				0 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	44.000.200,00			-	-	-	-	32.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	44.000.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X	**NON URUSAN**						**114.178.810,00**							**114.179.420,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**114.178.810,00**							**114.179.420,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**114.178.810,00**						**-**	**114.179.420,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.677.000,00			-	-	-	-	22.679.420,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	22.677.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.679.420,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.501.810,00			-	-	-	-	91.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	91.501.810,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.323.754.530,00**							**9.571.951.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.323.754.530,00**							**9.571.951.300,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.323.754.530,00**							**9.571.951.300,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.601.666.530,00**						**-**	**8.066.132.300,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			64 Persen	43.530.000,00			-	-	-	-	111.797.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.197.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	12.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	4.450.411.830,00			-	-	-	-	5.010.198.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	4.450.411.830,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.198.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	43.365.200,00			-	-	-	-	176.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	22.365.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	21.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		108.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	174.702.500,00			-	-	-	-	517.336.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		71.300.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	5.008.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.004.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80000 Paket	14.214.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	89.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		366.532.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			80 Persen	52.331.000,00			-	-	-	-	825.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		630.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.319.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	28.932.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	18.080.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	691.031.000,00			-	-	-	-	1.172.887.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	36.323.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.927.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.348.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	645.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.116.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	146.295.000,00			-	-	-	-	252.692.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	92.615.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		194.692.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	24.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	29.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**722.088.000,00**						**-**	**1.505.819.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana*	-			100 Persen	216.929.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	252.762.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	87.842.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		93.547.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	129.087.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		159.215.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-			100 Persen	248.854.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-	-	485.231.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				30 Unit	2.475.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				600 Orang	24.596.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		25.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	36.212.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		32.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	96.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		97.436.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	87.416.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		93.145.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				50 Kawasan	1.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		1.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			100 Persen	190.916.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	685.827.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	103.696.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		377.247.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1400 Orang	87.220.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		308.580.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana*	-			1 Dokumen	65.389.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	81.997.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	65.389.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		81.997.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**7.370.303.437,00**							**8.762.629.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.763.061.311,00**							**4.814.742.300,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.763.061.311,00**							**4.814.742.300,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**326.531.211,00**						**-**	**1.302.965.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.155.500,00			-	-	-	-	348.265.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.532.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	64.221.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		307.265.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	402.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	549.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		299.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.322.211,00			-	-	-	-	229.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.129.211,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179.593.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		221.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.053.500,00			-	-	-	-	80.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	43.053.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**0,00**						**-**	**304.870.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS yang dikembangkan*	-			6 PSKS	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	304.870.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		304.870.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**146.289.600,00**						**-**	**1.503.564.300,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	146.289.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	1.503.564.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	49.979.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		611.830.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		194.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	49.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		159.534.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	46.335.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		278.200.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**3.170.241.300,00**						**-**	**870.343.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	121.331.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	121.331.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.048.910.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	770.343.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	275.990.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		318.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3268 Orang	2.772.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		304.548.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				3268 Usulan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		147.295.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**100.001.000,00**						**-**	**383.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	100.001.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	283.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	100.001.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		283.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**19.998.200,00**						**-**	**450.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	19.998.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.998.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X	**NON URUSAN**						**3.607.242.126,00**							**3.947.887.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.607.242.126,00**							**3.947.887.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.607.242.126,00**						**-**	**3.947.887.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.196.246.026,00			-	-	-	-	3.498.887.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.196.246.026,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.498.887.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.999.600,00			-	-	-	-	49.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	399.996.500,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	399.996.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**5.431.881.082,00**							**8.568.716.020,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.431.881.082,00**							**8.269.716.020,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**5.431.881.082,00**							**8.269.716.020,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.089.214.882,00**						**-**	**6.203.946.020,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.496.600,00			-	-	-	-	37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.496.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.329.610.982,00			-	-	-	-	4.641.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.329.610.982,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.641.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	98.288.100,00			-	-	-	-	432.030.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.106.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.079.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	67.103.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		336.030.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.539.000,00			-	-	-	-	148.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.539.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	320.008.200,00			-	-	-	-	313.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.904.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	97.987.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	217.116.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		192.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	313.272.000,00			-	-	-	-	565.186.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	88.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.592.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		149.816.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**262.711.200,00**						**-**	**1.470.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Lulusan Bersertifikat Kompetensi*	-			80,33 Persen	262.711.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	1.470.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	262.711.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		810.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				20 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**0,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**79.955.000,00**						**-**	**365.770.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	79.955.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	365.770.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	52.943.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		206.770.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3840 Orang	27.011.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		159.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**299.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**0,00**							**299.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**						**-**	**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**						**-**	**174.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	174.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				6 Satuan Permukiman	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		174.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA						**57.070.000,00**							**89.170.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**57.070.000,00**							**89.170.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**57.070.000,00**							**89.170.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**57.070.000,00**						**-**	**89.170.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	35.168.500,00			-	-	-	-	31.670.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.977.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.084.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.670.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.901.500,00			-	-	-	-	57.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.501.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**9.213.884.202,00**							**13.310.294.330,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.213.884.202,00**							**13.310.294.330,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**5.588.842.902,00**							**9.794.594.330,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.933.552.102,00**						**-**	**6.425.270.428,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase realisasi kinerja perangkat daerah*	-			85 Persen	0,00			-	-	-	-	86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketetapan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Tepat Waktu	3.242.225.402,00			-	-	-	-	4.121.486.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	3.242.225.402,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.121.486.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yang bersertifikasi*	-			90 Persen	0,00			-	-	-	-	535.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		535.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			80 Persen	104.681.100,00			-	-	-	-	277.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.427.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.118.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.360.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	58.774.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik daerah perangkat daerah*	-			80 Persen	53.830.000,00			-	-	-	-	512.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	7.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	46.790.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		173.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		248.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	398.306.000,00			-	-	-	-	800.184.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	42.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	393.264.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		790.184.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	134.509.600,00			-	-	-	-	93.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	91.229.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	43.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**460.476.600,00**						**-**	**974.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah kelembagaan PUG di daerah*	-			7 Lembaga	100.479.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	463.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.479.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		113.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				30 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase anggaran Dinas P3AP2KB yang di alokasikan ke pemberdayaan perempuan*	-			15 Persen	359.996.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	511.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				24 Lembaga	199.997.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		179.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				8 orang	159.999.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		331.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**905.644.500,00**						**-**	**849.600.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	-			100 Persen	554.842.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	316.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	503.997.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		76.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				50 orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	50.845.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*persentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan*	-			100 Persen	300.801.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	333.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	100.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	200.001.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		329.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus*	-			100 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				20 orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**42.700.000,00**						**-**	**192.600.000,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak*	-			0,5 Kegiatan	42.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	42.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak*	-			50 Keluarga	0,00			-	-	-	-	92.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**0,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				32 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**109.816.900,00**						**-**	**140.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase anggaran yang di alokasikan untuk program pemenuhan hak anak*	-			10 Persen	0,00			-	-	-	-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase yang memilki forum anak aktif*	-			60 Persen	109.816.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				30 Lembaga	109.816.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**136.652.800,00**						**-**	**1.013.023.902,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap anak*	-			5 Persen	47.974.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	400.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				10 Kegiatan	47.974.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		400.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan*	-			100 Persen	48.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				23 Orang	48.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*	-			80n Persen	40.478.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	462.123.902,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				31 Orang	40.478.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		412.123.902,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.625.041.300,00**							**3.515.700.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**85.051.600,00**						**-**	**523.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai acuan perencanaan*	-			1 Dokumen	29.963.200,00			-	-	-	-	104.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				4 Kegiatan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	29.963.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang melaksanakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk*	-			3 OPD/kelurahan desa	55.088.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	419.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				2 Laporan	55.088.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		409.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**3.148.811.100,00**						**-**	**2.616.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase kelahiran yang tidak di inginkan*	-			24,4 Persen	110.047.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	671.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15 Laporan	110.047.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		391.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				17 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase pelayanan KB pasca salin*	-			70 Persen	85.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	1.071.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				77 Organisasi	85.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		478.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				15 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		593.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya angka prevalensi kontasepsi modern*	-			79 Persen	2.909.152.000,00			-	-	-	-	873.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				40 Orang	2.909.152.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		651.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		157.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				100 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	44.411.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Kampung	44.411.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**391.178.600,00**						**-**	**375.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah peserta kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)*	-			90 Persen	336.128.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	375.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			-				-	104.997.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				20 Orang	175.420.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				77 Orang	55.711.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		80.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				17 Kelompok	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		248.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	55.050.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	55.050.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**15.925.107.134,00**							**83.789.063.754,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.090.377.134,00**							**18.445.781.434,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**11.090.377.134,00**							**18.445.781.434,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.600.127.134,00**						**-**	**16.787.481.434,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.272.796.634,00			-	-	-	-	11.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	9.272.796.634,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	236.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	151.023.000,00			-	-	-	-	837.678.484,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		484.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.611.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20.324.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.378.484,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	114.087.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.915.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	533.251.000,00			-	-	-	-	815.542.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.627.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	494.624.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		770.912.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	643.056.500,00			-	-	-	-	458.260.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	229.616.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		172.260.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	13.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**0,00**						**-**	**683.400.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	683.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		600.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		83.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**180.250.000,00**						**-**	**425.200.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	61.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	151.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		69.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	61.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		61.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	119.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	273.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	119.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		273.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**210.000.000,00**						**-**	**502.200.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	210.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	472.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		442.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**100.000.000,00**						**-**	**47.500.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	47.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.834.730.000,00**							**65.343.282.320,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.834.730.000,00**							**65.343.282.320,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3.153.500.000,00**						**-**	**54.063.655.566,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	1.470.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	17.522.955.566,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1.470.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		17.272.955.566,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	539.000.000,00			-	-	-	-	17.141.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	539.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.959.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		482.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	1.144.500.000,00			-	-	-	-	19.399.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		722.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				90 Ekor	1.144.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.677.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.329.680.000,00**						**-**	**7.515.220.754,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	129.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	2.471.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				5 Ha	49.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		49.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	80.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		1.572.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.200.180.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	5.044.220.754,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	993.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		4.685.220.754,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	206.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		359.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**80.500.000,00**						**-**	**928.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	928.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	80.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		928.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**0,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**271.050.000,00**						**-**	**2.636.406.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	271.050.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	2.636.406.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	271.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		232.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		1.906.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Air Payang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		147.266.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**10.913.424.316,00**							**21.589.605.784,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.913.424.316,00**							**21.589.605.784,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**10.913.424.316,00**							**21.589.605.784,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.207.854.132,00**						**-**	**4.384.802.892,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.054.920.532,00			-	-	-	-	3.124.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.054.920.532,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.124.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.147.200,00			-	-	-	-	235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.002.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.002.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120.143.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	-	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.894.386.400,00			-	-	-	-	530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				12 0	2.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.631.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.807.755.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		498.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.400.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	54.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	46.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**129.397.000,00**						**-**	**920.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	129.397.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	129.397.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.223.139.800,00**						**-**	**5.679.802.892,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	1.223.139.800,00			-	-	-	-	5.679.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3,5 Ha	1.223.139.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		5.279.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**0,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**104.347.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.347.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	76.347.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				2 Orang	28.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**149.170.000,00**						**-**	**225.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.170.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	149.170.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**98.200.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	98.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	98.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**42.261.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	42.261.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				1 Pengaduan	42.261.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**1.959.055.384,00**						**-**	**9.630.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.959.055.384,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	9.630.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	121.675.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	592.708.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-LINGKUNGAN HIDUP	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		2.960.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				6290 Ton	1.244.672.384,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.830.338.839,00**							**7.384.162.427,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.830.338.839,00**							**7.384.162.427,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.830.338.839,00**							**7.384.162.427,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.288.534.839,00**						**-**	**6.371.162.427,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.998.700,00			-	-	-	-	206.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	14.998.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.561.304.539,00			-	-	-	-	4.418.912.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.561.304.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.418.912.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.432.400,00			-	-	-	-	615.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.901.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	59.631.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	70.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		430.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		315.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	493.729.200,00			-	-	-	-	530.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	20.792.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	88.997.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	383.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		435.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.070.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	53.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15.070.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**139.860.000,00**						**-**	**290.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	139.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5 Laporan	139.860.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				6 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**148.920.000,00**						**-**	**152.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	132.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				6 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		112.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	148.920.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	148.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**142.485.000,00**						**-**	**556.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	142.485.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	142.485.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				50 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	441.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				11 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		441.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**110.539.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	110.539.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	110.539.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**6.860.086.326,00**							**11.574.380.223,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.860.086.326,00**							**11.574.380.223,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.860.086.326,00**							**11.574.380.223,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.933.661.226,00**						**-**	**7.097.340.223,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			98 Persen	10.003.600,00			-	-	-	-	66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10.003.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Waktu	3.476.919.026,00			-	-	-	-	4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.476.919.026,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kehadiran Pegawai*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	230.724.600,00			-	-	-	-	444.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95.203.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	128.221.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		366.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			50 Persen	40.114.000,00			-	-	-	-	475.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6.019.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	34.095.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			70 Persen	1.731.930.000,00			-	-	-	-	1.470.060.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.799.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.720.631.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.450.060.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	443.970.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	36.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.160.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**36.277.000,00**						**-**	**232.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa*	-			70 Desa	36.277.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	232.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	36.277.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		122.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				70 Desa	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				70 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**13.867.900,00**						**-**	**481.790.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa*	-			40 Desa	13.867.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	481.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	13.867.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		343.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		32.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		105.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**222.571.100,00**						**-**	**2.013.100.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			70 Desa	222.571.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	2.013.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		42.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				70 Dokumen	15.101.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		107.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				70 Dokumen	77.700.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		258.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		367.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				54 Dokumen	19.997.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		191.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				77 Dokumen	14.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		110.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				70 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				70 Dokumen	15.000.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		102.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	17.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		167.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				2 Desa	10.021.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				77 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**653.709.100,00**						**-**	**1.749.900.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang di fasilitasi dalam peningkatan Kapasitas dan diberdayakan*	-			5 Lembaga	653.709.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	1.749.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	571.530.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		112.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	11.210.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		362.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				10 Dokumen	8.889.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		139.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		145.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				94 Dokumen	49.904.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	6.675.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**17.896.749.961,00**							**62.284.447.234,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.266.685.961,00**							**60.092.447.234,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15.266.685.961,00**							**60.092.447.234,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.889.158.651,00**						**-**	**7.094.225.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	19.926.000,00			-	-	-	-	39.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	19.926.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.478.003.551,00			-	-	-	-	4.956.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.478.003.551,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.956.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			55 Persen	196.740.100,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.025.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.993.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	145.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		383.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			55 Persen	59.931.000,00			-	-	-	-	1.330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		480.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		167.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	24.931.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		294.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			70 Persen	17.980.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	13.380.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	116.578.000,00			-	-	-	-	179.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	98.388.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		144.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	18.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**4.901.047.700,00**						**-**	**10.021.897.600,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten*	-			68 Persen	4.901.047.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	8.703.981.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.344.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				18 Unit	3.545.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.267.721.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				449 Unit	1.356.040.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.092.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Penumpang Angkutan Umum*	-			0 Penumpang	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	0,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Pelaksanaan Uji KIR*	-			0 Persen	0,00			-	-	-	-	606.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		606.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas*	-			1 Dokumen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	186.291.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		142.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		43.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah angkutan umum perdesaan*	-			1 Angkutan	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	125.061.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		125.061.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**6.476.479.610,00**						**-**	**42.976.324.634,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Persentase Pelabuhan yang dibangun dan beroperasi*	-			88 Persen	506.479.610,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	35.006.324.634,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	445.999.610,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		33.456.849.978,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.006.194.856,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				14 Laporan	60.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		543.279.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Pelabuhan Sungai Danau yang dibangun*	-			0 Persen	0,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	5.970.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	5.970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia				1 Unit	5.970.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		5.970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X	**NON URUSAN**						**2.630.064.000,00**							**2.192.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.630.064.000,00**							**2.192.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.630.064.000,00**						**-**	**2.192.000.000,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	132.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			70 Persen	2.630.064.000,00			-	-	-	-	2.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.630.064.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**7.823.579.970,00**							**13.169.355.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.823.579.970,00**							**13.169.355.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**7.621.140.970,00**							**12.269.355.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.694.476.570,00**						**-**	**4.644.200.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			undefined undefined	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Tepat Waktu	3.067.686.009,00			-	-	-	-	2.697.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.067.686.009,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.697.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang bersertifikat*	-			97 Persen	0,00			-	-	-	-	24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terselesaikan*	-			7 Paket	122.051.800,00			-	-	-	-	338.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.242.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.860.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18.824.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	87.125.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			90 Persen	0,00			-	-	-	-	895.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		375.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			85 Persen	456.595.011,00			-	-	-	-	609.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	19.390.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46.191.211,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.013.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		567.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase perangkat barang milik perangkat daerah*	-			90 Persen	48.143.750,00			-	-	-	-	59.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	42.173.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.876.665.400,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah*	-			49481 Orang	1.876.665.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				9 Komunitas	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				70 Rekomendasi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				10 Media	1.876.665.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				10 Konten	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.049.999.000,00**						**-**	**6.925.155.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase domain/sub domain yang aktif*	-			80 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	4.150.155.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.150.155.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi*	-			72 Persen	2.049.999.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	2.775.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	99.999.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				10 Perangkat Daerah	1.949.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**102.215.200,00**							**500.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**102.215.200,00**						**-**	**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD*	-			315 Data	102.215.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				60 %	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				60 %	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				5 Orang	102.215.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				60 %	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**100.223.800,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**100.223.800,00**						**-**	**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengaman informasi dan persandian*	-			46 OPD	100.223.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				5 Perangkat Daerah	100.223.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO						**10.767.841.941,00**							**17.674.930.020,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.364.968.000,00**							**3.588.790.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**1.364.968.000,00**							**3.588.790.000,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**0,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**0,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				13 Unit Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**0,00**						**-**	**78.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	78.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				25 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		78.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**45.135.600,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.135.600,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				20 Unit Usaha	45.135.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**1.060.902.000,00**						**-**	**2.555.790.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	1.060.902.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	2.555.790.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				2 Unit Usaha	910.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		2.159.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2 Unit Usaha	150.022.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		196.290.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**258.930.400,00**						**-**	**430.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	258.930.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				4 Unit Usaha	258.930.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.402.873.941,00**							**14.086.140.020,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.464.924.596,00**							**7.162.000.020,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**0,00**						**-**	**170.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**2.225.017.596,00**						**-**	**3.257.000.020,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	2.225.017.596,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	3.057.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	2.225.017.596,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		3.057.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**1.109.998.000,00**						**-**	**935.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	1.059.998.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	605.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	999.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		405.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**129.909.000,00**						**-**	**2.250.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	129.909.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	129.909.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**0,00**						**-**	**550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				1 UMKM	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**5.937.949.345,00**							**6.924.140.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.714.704.145,00**						**-**	**5.424.711.950,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.002.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.731.374.745,00			-	-	-	-	4.210.111.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.731.374.745,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.210.111.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	176.816.900,00			-	-	-	-	352.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.632.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.047.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.005.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	135.132.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		282.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	590.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	488.542.500,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.003.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55.001.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	430.538.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	315.968.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	88.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	222.528.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**182.933.000,00**						**-**	**849.428.050,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	182.933.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	849.428.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		104.428.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	182.933.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		545.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**20.215.200,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.215.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	20.215.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**20.097.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.097.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	20.097.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		UPTD METROLOGI LEGAL						**102.499.800,00**							**350.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**102.499.800,00**							**350.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**102.499.800,00**							**350.000.000,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**102.499.800,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	102.499.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	350.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				350 Unit	102.499.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		250.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		100.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**6.311.401.102,00**							**11.490.988.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.311.401.102,00**							**11.490.988.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.311.401.102,00**							**11.490.988.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.671.355.602,00**						**-**	**9.200.988.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.862.400,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2.862.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.871.297.602,00			-	-	-	-	5.408.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.871.297.602,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.348.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	93.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.684.700,00			-	-	-	-	444.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.799.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.207.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	36.249.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.692.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		477.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		610.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	585.160.900,00			-	-	-	-	668.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.010.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	85.041.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	490.109.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		593.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.350.000,00			-	-	-	-	860.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	50.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	19.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**187.808.400,00**						**-**	**1.005.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase Peta Potensi Kawasan Investasi yang dipetakan*	-			50 Persen	187.808.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	805.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	155.654.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	32.153.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**291.691.300,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan*	-			100 Persen	291.691.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				4 Dokumen	291.691.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**100.000.000,00**						**-**	**585.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Waktu Proses Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan*	-			1,9 Hari	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	585.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				310 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**50.019.700,00**						**-**	**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	-			12 Laporan	50.019.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				45 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50.019.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**10.526.100,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan*	-			12 Dokumen	10.526.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	10.526.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**7.847.999.124,00**							**27.286.740.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.847.999.124,00**							**27.286.740.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.847.999.124,00**							**27.286.740.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.766.668.024,00**						**-**	**7.401.840.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.286.300,00			-	-	-	-	215.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	24.286.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.158.214.224,00			-	-	-	-	4.719.540.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.158.214.224,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.719.540.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	418.515.900,00			-	-	-	-	497.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	19.058.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	21.696.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.620.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.800.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	365.141.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		408.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	841.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		191.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	755.167.000,00			-	-	-	-	975.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				525 Laporan	2.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	35.367.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 Laporan	717.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		894.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	410.484.600,00			-	-	-	-	154.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	35.404.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	367.080.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**105.911.100,00**						**-**	**7.704.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	47.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	7.624.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			0				0 0	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		131.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	0,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				10 Kegiatan	47.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				30 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		258.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		7.075.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58.411.100,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				0 Organisasi	58.392.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				3 Orang	19.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.765.420.000,00**						**-**	**11.644.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	871.644.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	8.472.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				10 Unit	730.773.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		8.472.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				0 Dokumen	140.870.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	591.754.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	2.802.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	38.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		218.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				130 Orang	553.754.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		2.583.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	283.338.200,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	370.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	189.238.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				0 Pelatda	94.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	18.682.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				0 Laporan	18.682.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			0				0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**210.000.000,00**						**-**	**536.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	210.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	536.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				15 Organisasi	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		181.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		155.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			-				-	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.679.180.622,00**							**408.843.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.599.634.022,00**							**408.843.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.465.795.122,00**							**408.843.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.265.795.122,00**						**-**	**0,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	26.629.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	26.629.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.405.913.722,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.405.913.722,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	93.219.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.058.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	29.161.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	14.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	670.742.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	98.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	560.342.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.290.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	54.220.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	15.070.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**200.000.000,00**						**-**	**408.843.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	408.843.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		121.343.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				50 Perpustakaan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		287.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				8 Perpustakaan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				2 Lokus	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**133.838.900,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**133.838.900,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	133.838.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	133.838.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				9500 Berkas	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				125 Arsip	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				20 Arsip	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				6 Pengguna	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X	**NON URUSAN**						**79.546.600,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**79.546.600,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**79.546.600,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.717.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	37.717.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.829.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	41.829.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						**9.088.031.360,00**							**15.398.210.328,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.088.031.360,00**							**15.398.210.328,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.088.031.360,00**							**15.398.210.328,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.712.976.660,00**						**-**	**8.367.089.617,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.608.460.560,00			-	-	-	-	5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	5.608.460.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	306.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	227.668.900,00			-	-	-	-	682.893.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	43.491.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		119.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.094.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.893.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	178.083.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		480.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	16.428.000,00			-	-	-	-	742.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	16.428.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		195.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	740.603.300,00			-	-	-	-	737.872.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.811.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	729.791.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		695.872.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.815.900,00			-	-	-	-	253.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	95.565.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	12.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**1.210.992.700,00**						**-**	**3.850.100.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil yang dilaksanakan dalam 1 (Satu) tahun*	-			2 kegitan	1.210.992.700,00			-	-	-	-	3.777.900.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.850.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		239.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				2 Unit	1.210.992.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.077.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Tempat Penyelenggaraan Pelelangan Ikan*	-			1 Unit	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-		72.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		72.200.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**1.063.838.000,00**						**-**	**1.519.664.711,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	113.824.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	413.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		216.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	113.824.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		197.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	950.013.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	1.106.664.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		457.864.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	950.013.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		648.800.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**100.224.000,00**						**-**	**1.661.356.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	447.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		447.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	197.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		197.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	100.224.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	1.017.356.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5935.89 Ton	100.224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		308.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		709.356.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPTD BALAI BENIH IKAN						**128.761.600,00**							**410.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**128.761.600,00**							**410.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**128.761.600,00**							**410.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**128.761.600,00**						**-**	**410.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	128.761.600,00			-	-	-	-	410.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		231.230.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	128.761.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		178.770.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		DINAS PARIWISATA						**7.416.356.653,00**							**25.036.631.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.416.356.653,00**							**25.036.631.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**7.416.356.653,00**							**25.036.631.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.300.473.415,00**						**-**	**9.842.231.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			81 Persen	49.782.800,00			-	-	Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	56.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	49.782.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		56.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	4.181.278.115,00			-	-	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.858.531.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.181.278.115,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.858.531.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	169.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		119.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	447.989.500,00			-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	1.289.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.005.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	36.308.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	55.936.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		95.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.410.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	322.140.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		970.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	4.189.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		53.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			75 Persen	64.514.000,00			-	-	-	-	615.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	64.514.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	429.493.000,00			-	-	-	-	645.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	79.693.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	345.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		568.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	127.416.000,00			-	-	-	-	209.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	111.410.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		119.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.150.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.856.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.593.814.188,00**						**-**	**13.224.900.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan*	-			5 Daya Tarik	883.366.080,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Daya Tarik WIsata yang dikembangkan	-	2.876.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	506.877.980,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Daya Tarik WIsata yang dikembangkan		2.678.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				10 Orang	376.488.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Daya Tarik WIsata yang dikembangkan		198.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola*	-			0 Kawasan	0,00			-	-	Meningkatnya Kawasan Pariwisata yang dikelola	-	2.028.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kawasan Pariwisata yang dikelola		1.778.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kawasan Pariwisata yang dikelola		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola*	-			2 Destinasi	710.448.108,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola	-	8.320.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	710.448.108,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola		7.758.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola		185.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola		177.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**419.618.400,00**						**-**	**1.584.500.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi pariwisata*	-			1 Event	419.618.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Promosi Pariwisata	-	1.584.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	97.277.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Promosi Pariwisata		698.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatnya Promosi Pariwisata		93.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	322.341.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Promosi Pariwisata		793.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**0,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	0,00			-	-	Meningkatnya pelaku ekonomi yang dikembangkan	-	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya pelaku ekonomi yang dikembangkan		75.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif														
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya pelaku ekonomi yang dikembangkan		9.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Meningkatnya pelaku ekonomi yang dikembangkan		0,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**102.450.650,00**						**-**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	102.450.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	102.450.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**457.815.500,00**							**794.883.065,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**457.815.500,00**							**794.883.065,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**457.815.500,00**							**794.883.065,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**122.854.100,00**						**-**	**220.883.065,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Sekretariat Darah (LKJIP)*	-			Nilai 70	122.854.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	220.883.065,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	122.854.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		175.883.065,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**334.961.400,00**						**-**	**574.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*persentase capaian kinerja pelaksanaan pembangunan*	-			90 Persen	334.961.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	574.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	184.961.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		319.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	149.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		255.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**599.999.600,00**							**512.120.773,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**599.999.600,00**							**512.120.773,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**599.999.600,00**							**512.120.773,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**599.999.600,00**						**-**	**512.120.773,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	599.999.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	512.120.773,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	99.999.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		181.815.580,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		134.605.193,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		195.700.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**11.083.070.000,00**							**6.136.169.560,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.083.070.000,00**							**6.136.169.560,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.083.070.000,00**							**6.136.169.560,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**11.083.070.000,00**						**-**	**6.136.169.560,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11.083.070.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	6.136.169.560,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				9 Dokumen	6.640.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.312.907.672,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	4.442.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.823.261.888,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**500.377.527,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Tingkat kepuasan OPD terhadap layanan failitasi dan koordinasi hukum*	-			85.5 Persen	500.377.527,00			-	-	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				690 Dokumen	176.136.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.136.560,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN HUKUM						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**450.000.000,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				690 Dokumen	296.081.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		176.136.560,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	139.146.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.240.967,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN HUKUM						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**500.377.527,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Tingkat kepuasan OPD terhadap layanan failitasi dan koordinasi hukum*	-			85.5 Persen	500.377.527,00			-	-	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	210.240.967,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.240.967,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN HUKUM						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**450.000.000,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**450.000.000,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	14.772.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		114.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN HUKUM						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**500.377.527,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Tingkat kepuasan OPD terhadap layanan failitasi dan koordinasi hukum*	-			85.5 Persen	500.377.527,00			-	-	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	114.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJA SAMA						**149.999.800,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**149.999.800,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**149.999.800,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**149.999.800,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	149.999.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	99.998.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	50.001.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN KERJA SAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**351.991.700,00**							**487.096.586,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**351.991.700,00**							**487.096.586,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**351.991.700,00**							**487.096.586,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**287.092.500,00**						**-**	**337.096.586,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah rapat koordinasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan*	-			3 Notulen rapat	172.335.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	231.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	27.583.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				10 Laporan	144.752.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		81.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**64.899.200,00**						**-**	**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	64.899.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD				4 Dokumen	64.899.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**287.092.500,00**						**-**	**337.096.586,00**	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah laporan hasil pemantauan SDA yang disusun*	-			3 Laporan	114.757.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	105.596.586,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	114.757.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		105.596.586,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**819.997.900,00**							**900.125.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**819.997.900,00**							**900.125.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**819.997.900,00**							**900.125.800,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**819.997.900,00**						**-**	**900.125.800,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	819.997.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	900.125.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	319.999.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		346.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	449.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		492.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	49.998.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		62.125.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI						**505.740.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**505.740.400,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**505.740.400,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**505.740.400,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	505.740.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	93.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	62.740.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						**48.367.446.186,00**							**41.199.378.673,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.734.743.071,00**							**25.400.408.673,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.734.743.071,00**							**25.400.408.673,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.734.743.071,00**						**-**	**25.400.408.673,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	41.449.872,00			-	-	-	-	19.014.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	41.449.872,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.014.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.458.354.200,00			-	-	-	-	3.524.196.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	499.864.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		576.324.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	299.980.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		446.578.750,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	495.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	4.162.610.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.001.293.150,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.393.999.299,00			-	-	-	-	3.123.532.750,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	990.913.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		580.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.757.826.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	789.488.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		789.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.021.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		803.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.396.281.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		492.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	437.992.299,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		438.532.750,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.041.684.100,00			-	-	-	-	3.059.050.286,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	49.992.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.165.791.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.182.780.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.825.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.826.270.286,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.230.886.600,00			-	-	-	-	6.216.604.287,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				42 Unit	4.717.530.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.702.680.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.551.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.551.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	962.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		962.124.287,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	7.619.009.000,00			-	-	-	-	8.508.010.950,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.132.154.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.132.154.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	6.486.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.375.856.950,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	949.360.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	500.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	449.110.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X	**NON URUSAN**						**17.632.703.115,00**							**15.798.970.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**17.632.703.115,00**							**15.798.970.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.604.179.915,00			-	-	-	-	14.823.174.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	15.604.179.915,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.823.174.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	124.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		124.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.818.523.200,00			-	-	-	-	851.796.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	166.509.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		166.609.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.652.014.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		685.187.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**472.999.900,00**							**904.576.530,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**472.999.900,00**							**904.576.530,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**472.999.900,00**							**904.576.530,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**472.999.900,00**						**-**	**904.576.530,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	472.999.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	904.576.530,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	199.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		443.009.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	152.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		143.932.990,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	120.000.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		317.634.540,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN HUKUM 2						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.377.527,00**							**500.377.527,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**500.377.527,00**						**-**	**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	500.377.527,00			-	-	-	-	500.377.527,00	BAGIAN HUKUM 2
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				690 Dokumen	176.136.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.136.560,00	BAGIAN HUKUM 2
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	210.240.967,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.240.967,00	BAGIAN HUKUM 2
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	114.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.000.000,00	BAGIAN HUKUM 2
		SEKRETARIAT DPRD						**28.513.294.234,00**							**41.284.694.796,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.513.294.234,00**							**41.284.694.796,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**28.513.294.234,00**							**41.284.694.796,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.275.984.234,00**						**-**	**22.461.335.368,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			88 Persen	182.822.200,00			-	-	-	-	206.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	126.992.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		166.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	55.830.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	7.903.430.642,00			-	-	-	-	7.854.823.136,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	7.835.430.642,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.816.583.136,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	68.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	34.360.000,00			-	-	-	-	176.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	34.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		131.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			65 Persen	1.085.227.800,00			-	-	-	-	2.159.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	75.610.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	40.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	74.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	449.388.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		624.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	445.230.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		865.440.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		129.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			70 Persen	411.530.000,00			-	-	-	-	966.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	40.175.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	237.684.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.671.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		186.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	105.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			-				-	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			85 Persen	2.188.638.600,00			-	-	-	-	3.032.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	397.238.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		387.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.776.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.629.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	802.108.000,00			-	-	-	-	1.082.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	265.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	157.488.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		187.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	49.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	120.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	7.687.602.992,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.782.644.232,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	7.559.012.992,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.453.644.232,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		229.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	128.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Pelayanan Administrasi DPRD*	-			100 Persen	980.264.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	980.264.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**7.237.310.000,00**						**-**	**18.823.359.428,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			80 Persen	1.479.699.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.742.759.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1.479.699.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.742.759.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD*	-			85 Persen	1.073.385.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.580.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				40 Dokumen	624.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		985.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	46.795.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	114.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		185.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	77.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Tindaklanjut Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			40 Persen	1.872.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	4.507.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				48 Laporan	606.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	1.266.670.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.167.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*	-			85 Persen	2.811.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	9.991.739.528,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				72 Dokumen	1.579.160.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.461.899.030,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				72 Dokumen	1.232.096.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.529.840.498,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**8.968.366.251,00**							**10.584.108.283,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.968.366.251,00**							**10.584.108.283,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**8.733.310.251,00**							**9.840.372.889,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.686.576.251,00**						**-**	**6.645.992.051,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			85 %	13.956.000,00			-	-	-	-	16.609.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.347.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	9.609.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.609.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	5.614.687.451,00			-	-	-	-	5.614.687.451,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	5.614.687.451,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.614.687.451,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran*	-			85 %	289.449.600,00			-	-	-	-	347.795.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	22.900.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.005.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	48.748.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	207.795.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		207.795.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Sarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			100 %	302.750.100,00			-	-	-	-	373.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.092.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.626.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	274.030.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		325.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			85 %	465.733.100,00			-	-	-	-	293.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	64.013.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	398.670.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.131.812.500,00**						**-**	**1.590.848.568,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD*	-			74 %	1.023.687.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-	-	1.192.768.460,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	16.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		21.770.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	31.310.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		48.210.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	428.468.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		545.378.960,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	547.409.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		577.409.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah*	-			95 %	59.547.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	125.814.308,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	59.547.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		125.814.308,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Diakomodir*	-			75 %	48.578.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	272.265.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	48.578.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		272.265.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**914.921.500,00**						**-**	**1.603.532.270,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			93 %	210.499.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	395.807.610,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	85.070.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		152.596.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	125.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		243.211.610,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam*	-			93 %	488.892.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	894.876.660,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	142.435.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		179.300.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	100.511.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		173.373.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	141.364.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		295.482.430,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	104.582.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		246.720.430,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			93 %	215.530.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	312.848.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	122.408.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		122.408.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	93.122.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		190.440.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**235.056.000,00**							**743.735.394,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**235.056.000,00**						**-**	**743.735.394,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan*	-			100 %	77.852.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	156.058.994,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	77.852.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		156.058.994,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			100 %	78.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	293.468.270,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	78.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		293.468.270,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah*	-			100 %	78.354.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	294.208.130,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	78.354.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		294.208.130,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**141.082.776.644,00**							**198.858.595.500,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**141.075.571.644,00**							**198.807.095.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**141.075.571.644,00**							**198.807.095.500,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.553.110.243,00**						**-**	**18.457.700.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	46.374.200,00			-	-	-	-	139.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	46.374.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			75 Orang	8.664.033.843,00			-	-	-	-	14.196.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	8.664.033.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.196.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				77 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan sarana administrasi umum perangkat daerah*	-			75 Persen	472.713.700,00			-	-	-	-	1.131.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	34.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	80.390.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	64.536.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	242.788.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		535.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	117.531.000,00			-	-	-	-	998.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		626.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	117.531.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		215.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor*	-			12 Bulan	2.152.100.000,00			-	-	-	-	1.169.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	585.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		214.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.560.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		945.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			1 Tahun	100.357.500,00			-	-	-	-	597.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	100.357.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		172.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**128.783.524.101,00**						**-**	**178.342.335.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	-			2 Dokumen	1.225.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	1.777.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		340.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		709.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		244.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		384.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah*	-			12 ddDokumen	309.978.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	800.001.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	109.997.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		225.945.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	99.986.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		306.155.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	99.994.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		199.901.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu dan sesuai SAP*	-			1 Dokumen	380.422.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	869.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	105.008.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		218.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		179.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				0 Laporan	113.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		101.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	131.138.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	21.702.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0 Dokumen	8.717.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	126.868.123.201,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	174.895.234.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	110.579.887.501,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		161.888.234.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	11.288.235.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.507.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**310.010.700,00**						**-**	**1.159.060.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan petujuk dan teknis*	-			2 Dokumen	310.010.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.159.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	30.019.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		298.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		77.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		68.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	49.991.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		175.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		193.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		41.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	79.994.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		106.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	150.005.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**428.926.600,00**						**-**	**848.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Laporan penerimaan Pajak Daerah*	-			12 Laporan	428.926.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	848.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	109.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				45000 Dokumen	100.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1365 Dokumen	129.957.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	39.027.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**7.205.000,00**							**51.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**7.205.000,00**							**51.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.205.000,00**						**-**	**51.500.000,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			1 Tahun	7.205.000,00			-	-	-	-	51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	7.205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**7.579.436.625,00**							**10.393.671.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.410.455.725,00**							**9.826.071.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.232.571.125,00**							**8.866.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.359.581.425,00**						**-**	**6.564.000.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.176.078.425,00			-	-	-	-	5.930.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.176.078.425,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.930.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	134.193.000,00			-	-	-	-	319.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		93.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8.138.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106.055.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				9 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.310.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	31.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.872.989.700,00**						**-**	**2.302.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	394.870.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				25 Dokumen	149.970.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	244.899.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1.092.233.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	442.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				87 Orang	80.239.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				72 Orang	789.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				6 Dokumen	221.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				35 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	385.886.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	40.902.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	344.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**177.884.600,00**							**960.071.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**177.884.600,00**						**-**	**960.071.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	177.884.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	960.071.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				50 Orang	177.884.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		510.071.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	**NON URUSAN**						**168.980.900,00**							**567.600.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**168.980.900,00**							**567.600.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**168.980.900,00**						**-**	**567.600.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	38.976.900,00			-	-	-	-	82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	38.976.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.074.000,00			-	-	-	-	95.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	33.074.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.930.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.290.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						**5.813.407.000,00**							**7.436.134.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.813.407.000,00**							**7.436.134.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**5.813.407.000,00**							**7.436.134.000,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.089.665.000,00**						**-**	**6.221.184.000,00**	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			80 Persen	34.770.000,00			-	-	-	-	35.692.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	34.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.692.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	3.330.850.960,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	4.725.312.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.330.850.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		4.725.312.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			90 Persen	49.098.000,00			-	-	-	-	103.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	35.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	13.908.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	169.521.500,00			-	-	-	-	438.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	25.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.512.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	22.152.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71 Laporan	109.657.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		361.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			35 Persen	863.297.540,00			-	-	-	-	199.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	585.486.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	36.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	232.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.352.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	548.369.000,00			-	-	-	-	559.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	29.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.988.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.600.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	466.381.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		473.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	93.758.000,00			-	-	-	-	160.380.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	39.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.710.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.880.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45.318.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**723.742.000,00**						**-**	**1.214.950.000,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama*	-			30 Persen	190.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	229.900.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		154.900.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan*	-			75 Persen	391.742.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	639.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	197.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		313.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				2 Dokumen	194.712.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		244.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		11.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	*Persentase Monitoring dan Evaluasi*	-			80 Persen	142.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	345.650.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	142.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		188.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		157.650.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH						**17.390.643.816,00**							**12.216.154.304,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.350.366.816,00**							**12.116.154.304,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**17.350.366.816,00**							**12.116.154.304,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.067.556.216,00**						**-**	**9.566.723.136,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah*	-			100 Persen	118.017.700,00			-	-	-	-	100.111.052,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	118.017.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.111.052,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN*	-			100 Persen	9.377.933.088,00			-	-	-	-	6.939.598.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	9.377.933.088,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.939.598.874,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.511.533.800,00			-	-	-	-	860.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	118.003.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	2.393.530.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	641.125.500,00			-	-	-	-	521.285.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.361.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.404.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.504.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.761.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	440.095.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		436.285.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	1.724.849.528,00			-	-	-	-	569.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	83.722.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				82 Unit	905.361.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				64 Unit	35.904.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	699.861.228,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	251.953.900,00			-	-	-	-	218.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.990.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	235.063.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		201.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	442.142.700,00			-	-	-	-	357.728.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	106.944.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	70.050.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		128.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	64.580.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		174.728.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.528.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.346.776.600,00**						**-**	**1.346.169.570,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	-			100 Persen	931.745.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	910.137.070,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				49 Laporan	173.688.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		220.927.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	199.172.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	69.943.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				47 Laporan	79.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		79.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				10 Laporan	185.852.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		158.407.570,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				9 Kesepakatan	44.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	179.240.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		216.452.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			100 Persen	415.031.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	436.032.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	75.047.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	339.983.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		236.032.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**936.034.000,00**						**-**	**1.203.261.598,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	-			100 Persen	15.595.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	15.595.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas*	-			100 Persen	920.439.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.103.261.598,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				47 perangkat daerah	359.955.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		503.261.598,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				47 perangkat daerah	99.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	160.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**40.277.000,00**							**100.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**40.277.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**40.277.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	40.277.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	40.277.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR						**7.164.635.570,00**							**9.982.474.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**120.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**120.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.164.635.570,00**							**9.862.474.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.164.635.570,00**							**9.862.474.900,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.142.635.570,00**						**-**	**9.085.816.900,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			70 Persen	0,00			-	-	-	-	80.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined*	-			100 Persen undefined undefined	5.833.065.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	5.833.065.970,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	433.008.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	629.564.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	47.982.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		160.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	55.961.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	261.065.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		314.364.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				17 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		15.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			75 Persen	0,00			-	-	-	-	627.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		142.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	758.126.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	944.715.888,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	690.126.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		876.715.888,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			75 Persen	118.435.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	318.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	68.435.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.000.000,00**						**-**	**523.558.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			55 Laporan	22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	523.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**101.100.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa*	-			12 Koordinasi	0,00			-	-	-	-	101.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			80 Persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**102.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	102.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN RANAI						**840.045.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**840.045.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**840.045.000,00**							**465.889.500,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**390.000.000,00**						**-**	**265.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			55 Koordinasi	390.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	265.889.500,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	390.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		265.889.500,00	KELURAHAN RANAI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**450.045.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			4 Koordinasi	450.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	450.045.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	KELURAHAN RANAI
		KELURAHAN BANDARSYAH						**498.750.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**498.750.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**498.750.000,00**							**465.889.500,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**396.000.000,00**						**-**	**265.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			55 Koordinasi	396.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	265.889.500,00	KELURAHAN BANDARSYAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	396.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		265.889.500,00	KELURAHAN BANDARSYAH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**102.750.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			4 Koordinasi	102.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BANDARSYAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	102.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	KELURAHAN BANDARSYAH
		KELURAHAN RANAI DARAT						**367.950.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**367.950.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**367.950.000,00**							**465.889.500,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**265.200.000,00**						**-**	**265.889.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			55 Koordinasi	265.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	265.889.500,00	KELURAHAN RANAI DARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	265.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Darat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		265.889.500,00	KELURAHAN RANAI DARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**102.750.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			4 Koordinasi	102.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN RANAI DARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	102.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Darat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	KELURAHAN RANAI DARAT
		KELURAHAN BATU HITAM						**282.000.000,00**							**468.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**282.000.000,00**							**468.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**282.000.000,00**							**468.889.500,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**282.000.000,00**						**-**	**268.889.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			55 Koordinasi	282.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	268.889.500,00	KELURAHAN BATU HITAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	282.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Batu Hitam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		268.889.500,00	KELURAHAN BATU HITAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			4 Koordinasi	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BATU HITAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Batu Hitam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN BATU HITAM
		KECAMATAN BUNGURAN BARAT						**4.127.622.823,00**							**50.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.127.622.823,00**							**50.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.127.622.823,00**							**50.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.057.936.723,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.342.714.723,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.342.714.723,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	218.386.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.447.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	16.304.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.865.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	171.770.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Binjai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	401.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	364.740.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.295.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	41.655.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	14.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	19.520.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	19.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.356.100,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	21.356.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	21.356.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**6.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**42.330.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	42.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6.330.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
		KELURAHAN SEDANAU						**533.600.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**533.600.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**533.600.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**533.600.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	533.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	533.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN SEDANAU
		KECAMATAN BUNGURAN UTARA						**2.693.714.429,00**							**5.051.373.346,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**120.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**120.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.693.714.429,00**							**4.931.373.346,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.693.714.429,00**							**4.931.373.346,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.673.038.029,00**						**-**	**4.237.510.346,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			61.00 Persen	0,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.139.044.029,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.139.044.029,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			60 Persen	87.096.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	424.510.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.032.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.968.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.018.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		49.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	45.077.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		235.310.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah barang yang diadakan*	-			5 Unit	0,00			-	-	-	-	345.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	355.237.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	440.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.987.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	334.250.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		419.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	91.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	227.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	82.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.660.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.676.400,00**						**-**	**311.770.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			50 Koordinasi	20.676.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	291.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	20.676.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		291.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			50 Persen	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**148.093.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	148.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		148.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**70.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**164.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	164.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
		KECAMATAN PULAU LAUT						**2.690.895.310,00**							**4.962.601.899,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**125.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**125.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**125.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*erlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Persen Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.690.895.310,00**							**4.837.601.899,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**2.690.895.310,00**							**4.837.601.899,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.640.687.310,00**						**-**	**3.920.431.899,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.002.399.510,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.002.399.510,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.910.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	609.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.095.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70.004.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.343.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	14.014.400,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	34.454.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		362.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	454.926.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	352.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.400.200,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	438.526.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.451.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	432.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	20.003.200,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	22.448.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**50.208.000,00**						**-**	**567.170.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			70 Koordinasi	50.208.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	567.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	50.208.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		567.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**190.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	190.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			90 Persen	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**140.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
		KECAMATAN MIDAI						**3.478.353.404,00**							**4.953.745.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**175.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**175.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**175.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.478.353.404,00**							**4.778.745.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.478.353.404,00**							**4.778.745.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.478.353.404,00**						**-**	**4.302.235.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			62.50 %	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.724.043.504,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.132.924.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	2.724.043.504,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.132.924.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 %	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			55 %	185.628.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	281.311.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.993.400,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.965.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	38.286.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	120.384.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		214.311.000,00	KECAMATAN MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 %	483.341.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	543.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59.949.500,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	415.392.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		475.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	265.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	65.340.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		115.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**						**-**	**331.415.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan*	-			50 Koordinasi	0,00			-	-	-	-	331.415.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		331.415.000,00	KECAMATAN MIDAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**45.095.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			80 %	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**80.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
		KELURAHAN SABANG BARAT						**316.700.000,00**							**533.630.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**316.700.000,00**							**533.630.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**316.700.000,00**							**533.630.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**316.700.000,00**						**-**	**533.630.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	316.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	533.630.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	316.700.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		533.630.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
		KECAMATAN SERASAN						**4.095.018.727,00**							**5.721.330.714,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**175.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**175.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**175.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.095.018.727,00**							**5.546.330.714,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.095.018.727,00**							**5.546.330.714,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.971.868.727,00**						**-**	**4.714.980.714,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			64.00 Persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	3.021.705.038,00			-	-	-	-	3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.021.705.038,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			80 Persen	91.360.000,00			-	-	-	-	358.560.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			0				0 0	12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	24.360.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		214.360.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			80 Persen	200.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	593.803.689,00			-	-	-	-	526.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	565.803.689,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		480.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	65.000.000,00			-	-	-	-	297.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	55.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**123.150.000,00**						**-**	**583.150.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			12 Koordinasi	123.150.000,00			-	-	-	-	583.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	123.150.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		583.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**103.200.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	103.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN SERASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
		KELURAHAN SERASAN						**426.640.270,00**							**1.256.213.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**426.640.270,00**							**1.256.213.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**426.640.270,00**							**1.256.213.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**425.858.270,00**						**-**	**426.213.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			undefined undefined	425.858.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	426.213.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	425.858.270,00	Kab. Natuna, Serasan, Serasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		426.213.000,00	KELURAHAN SERASAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**782.000,00**						**-**	**830.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			undefined undefined	782.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	830.000.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	782.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Serasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		830.000.000,00	KELURAHAN SERASAN
		KECAMATAN SUBI						**3.443.658.259,00**							**5.008.786.947,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**175.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**175.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**175.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.443.658.259,00**							**4.833.786.947,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.443.658.259,00**							**4.833.786.947,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.411.666.259,00**						**-**	**4.212.786.947,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			64 Persen	0,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.486.224.859,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.815.387.314,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.486.224.859,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.815.387.314,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	96.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			100 Persen	127.970.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	572.413.633,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.008.500,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		115.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.968.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.026.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	49.968.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		401.213.633,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			70 Persen	0,00			-	-	-	-	350.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	643.300.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	501.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.800.900,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	598.500.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		470.000.000,00	KECAMATAN SUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			80 Persen	154.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	802.986.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	139.970.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		482.986.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	14.200.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUBI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**31.992.000,00**						**-**	**341.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			70 Koordinasi	31.992.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	341.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	31.992.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		341.000.000,00	KECAMATAN SUBI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**160.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA						**2.091.433.352,00**							**2.890.833.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**100.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan keagamaan dikali seratus*	-			100 Persen	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.091.433.352,00**							**2.790.833.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.091.433.352,00**							**2.790.833.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.041.609.352,00**						**-**	**2.630.977.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah realisasi kinerja kegiatan dibagi jumlah target kinerja Kegiatan dikali seratus*	-			70 Persen	0,00			-	-	-	-	2.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	1.598.119.252,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.993.137.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.598.119.252,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.993.137.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana administrasi umum kantor yang disediakan dibagi jumlah sarana administrasi umum kantor yang dibutuhkan dikali seratus*	-			70 Persen	117.246.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	181.140.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	32.913.900,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.990.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.979.900,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.952.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	52.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		108.150.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik PD yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan barang milik PD x 100*	-			74 Persen	0,00			-	-	-	-	8.800.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa sarana penunjang urusan kantor yang tersedia dibagi jumlah sarana penunjang urusan kantor yang dibutuhkan dikali seratus*	-			100 Persen	281.048.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	375.100.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.187.900,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.400.100,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.400.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	243.460.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		337.500.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana kantor dikali seratus*	-			70 Persen	45.195.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	70.600.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	32.995.800,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		53.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.600.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**49.824.000,00**						**-**	**118.632.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi yang dilaksanakan*	-			70 Koordinasi	49.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	118.632.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	49.824.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		118.632.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**17.583.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	-			12 Koordinasi	0,00			-	-	-	-	17.583.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.583.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**10.010.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah koordinasi perda dan perkada yang dilaksanakan dibagi jumlah perda dan perkada dikali seratus*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	10.010.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.010.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**13.631.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang menindaklanjuti pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa x 100*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	13.631.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.631.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH						**2.509.223.440,00**							**3.557.565.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**66.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**66.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**66.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	66.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.509.223.440,00**							**3.491.565.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**2.509.223.440,00**							**3.491.565.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.468.234.680,00**						**-**	**3.377.065.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	0,00			-	-	-	-	14.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			20 Orang/bulan	1.931.146.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.429.965.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	1.931.146.680,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.429.965.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			1 Paket	0,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			12 Paket	91.634.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	201.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.000.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.946.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.997.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	36.690.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-			1 Unit	193.590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	332.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket Unit	193.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan	219.458.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	280.600.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Dokumen Laporan	17.194.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.097.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	189.167.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		260.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			4 Unit	32.405.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	74.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	22.995.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	9.410.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**40.988.760,00**						**-**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			12 Dokumen	40.988.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	40.988.760,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**33.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			4 Lembaga Kemasyarakat	0,00			-	-	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**31.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	-			4 Dokumen	0,00			-	-	-	-	31.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT						**2.708.512.530,00**							**2.402.700.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.676.820.530,00**							**2.359.300.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.676.820.530,00**							**2.359.300.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.676.820.530,00**						**-**	**2.359.300.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.856.823.330,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.438.588.956,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				19 0	1.856.823.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.438.588.956,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	42.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.870.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	83.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.413.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	57.457.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		53.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	143.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	192.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	143.340.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		83.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		19.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		53.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	539.426.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	539.311.044,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.126.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		37.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	501.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		501.811.044,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.360.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	57.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	42.010.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		42.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**21.692.000,00**							**40.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**21.692.000,00**							**40.700.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.692.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	21.692.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	21.692.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**5.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**7.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	7.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**22.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	22.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	X	**NON URUSAN**						**10.000.000,00**							**2.700.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.000.000,00**							**2.700.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.000.000,00**						**-**	**2.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN						**2.209.801.064,00**							**3.775.109.834,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**183.667.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**183.667.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**183.667.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	183.667.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Cemaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		183.667.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.209.801.064,00**							**3.591.442.834,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.209.801.064,00**							**3.591.442.834,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.184.093.064,00**						**-**	**3.396.823.606,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Cemaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.632.762.064,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.949.033.416,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.632.762.064,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.949.033.416,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	102.280.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	398.920.190,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	21.644.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.720.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.986.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	19.011.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	24.931.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	30.707.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		280.000.190,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	189.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	397.611.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	475.302.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.530.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	377.081.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		425.302.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.439.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	319.568.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	46.479.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		179.568.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.960.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**25.708.000,00**						**-**	**139.470.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	25.708.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	139.470.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				70 Laporan	25.708.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		139.470.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**20.149.228,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.149.228,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.028.728,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.120.500,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
		KECAMATAN SERASAN TIMUR						**2.211.153.616,00**							**4.769.135.688,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**155.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**155.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**155.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	155.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.211.153.616,00**							**4.614.135.688,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.211.153.616,00**							**4.614.135.688,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.148.657.616,00**						**-**	**4.213.605.688,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			80.00 Persen	0,00			-	-	-	-	19.950.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.330.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.620.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tepat Waktu	1.590.372.416,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.353.815.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.590.372.416,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.353.815.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			95 Persen	0,00			-	-	-	-	189.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		79.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			84 Persen	72.585.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	488.040.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.991.400,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		83.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	13.800,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	23.580.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		345.040.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah*	-			84 Persen	0,00			-	-	-	-	386.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		136.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	449.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	489.600.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.800.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		42.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	420.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		441.600.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			84 Persen	35.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	287.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	31.100.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		87.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.800.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		140.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**62.496.000,00**						**-**	**263.800.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			70 Koordinasi	62.496.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	263.800.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	62.496.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		263.800.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**33.200.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	33.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**20.800.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	20.800.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.800.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**82.730.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	82.730.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.530.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
		KECAMATAN SUAK MIDAI						**2.066.039.097,00**							**3.668.703.576,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**125.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**125.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**125.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	125.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.066.039.097,00**							**3.543.703.576,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.066.039.097,00**							**3.543.703.576,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.015.589.997,00**						**-**	**3.002.151.576,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.630.634.397,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.630.634.397,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	102.196.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	579.951.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	15.018.800,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		146.200.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.517.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		72.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.049.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	18.647.300,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	42.964.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		257.751.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	254.579.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	421.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.170.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.303.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	232.106.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		389.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	232.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	20.180.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.000.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		52.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**50.449.100,00**						**-**	**391.552.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	50.449.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	391.552.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50.449.100,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		391.552.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI						**2.221.925.923,00**							**3.605.579.124,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**411.922.424,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**411.922.424,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**411.922.424,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	411.922.424,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		411.922.424,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.221.925.923,00**							**3.193.656.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.221.925.923,00**							**3.193.656.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.189.083.623,00**						**-**	**2.654.688.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	27.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.728.594.623,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	-	1.521.588.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.728.594.623,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		1.521.588.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	88.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			75 Persen	96.133.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	-	304.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.620.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.961.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		23.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.632.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		42.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.006.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.014.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		9.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8.999.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		46.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	18.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		84.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		14.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			85 Persen	0,00			-	-	-	-	211.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		166.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran*	-			100 Persen	298.499.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	340.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.980.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.999.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	279.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran*	-			85 Persen	65.855.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	-	162.600.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	58.665.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		43.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.190.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		28.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		51.600.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**32.842.300,00**						**-**	**323.100.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan*	-			70 Kali	32.842.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	-	323.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	32.842.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		323.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**121.800.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	121.800.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.800.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**26.568.700,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	26.568.700,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.568.700,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**67.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	67.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT						**2.235.378.880,00**							**3.795.215.471,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**45.585.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**45.585.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**45.585.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	45.585.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.585.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.235.378.880,00**							**3.749.630.471,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.235.378.880,00**							**3.749.630.471,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.206.203.680,00**						**-**	**3.400.714.471,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	155.956.871,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.602.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		117.354.871,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.774.018.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.055.131.280,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.774.018.180,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.055.131.280,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	102.965.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	129.602.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.963.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	13.210.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.602.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.190.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.152.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	72.450.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		89.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	320.050.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		43.050.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		157.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	301.959.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	490.974.320,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300.300,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.078.600,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		28.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	278.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		462.674.320,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.260.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	89.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	4.050.400,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	23.210.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**29.175.200,00**						**-**	**247.506.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	29.175.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	19.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	29.175.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	228.506.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		228.506.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**52.825.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	52.825.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.825.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**48.585.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	48.585.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.585.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
		KECAMATAN PULAU SELUAN						**1.700.825.664,00**							**2.800.755.503,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**105.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**0,00**						**-**	**105.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.700.825.664,00**							**2.695.755.503,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.700.825.664,00**							**2.695.755.503,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.650.831.664,00**						**-**	**2.382.231.503,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.380.463.964,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.562.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.380.463.964,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.562.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	110.427.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	217.200.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.090.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.512.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.530.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	54.295.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		103.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.516.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.988.700,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	81.528.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		108.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.424.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	188.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	35.444.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.980.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**49.994.000,00**						**-**	**203.524.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	49.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	203.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	49.994.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		203.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
		KECAMATAN PULAU PANJANG						**1.737.703.804,00**							**30.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.737.703.804,00**							**30.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.737.703.804,00**							**30.250.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.655.521.064,00**						**-**	**30.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*80 Persen*	-			undefined undefined	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	30.250.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kecamatan Pulau Panjang		8.750.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kecamatan Pulau Panjang		21.500.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1 Tepat Waktu*	-			undefined undefined	1.455.358.064,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.455.358.064,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			undefined undefined	143.223.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	21.540.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.998.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.995.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	111.690.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.640.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**82.182.740,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*70 Koordinasi*	-			undefined undefined	82.182.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	82.182.740,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*3 Lembaga Masyarakat*	-			undefined undefined	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*12 Laporan*	-			undefined undefined	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*100 Persen*	-			undefined undefined	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang	-	0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kecamatan Pulau Panjang		0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**10.630.616.919,00**							**7.901.539.099,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**10.630.616.919,00**							**7.901.539.099,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**10.630.616.919,00**							**7.901.539.099,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.358.429.638,00**						**-**	**2.893.116.718,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-			91,25 Persen	6.225.600,00			-	-	-	-	42.235.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.225.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.235.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 Persen	3.436.097.807,00			-	-	-	-	2.165.956.118,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.436.097.807,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.165.956.118,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yang bersertifikasi*	-			50 Persen	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran*	-			94 Persen	129.840.000,00			-	-	-	-	141.025.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.125.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.175.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.825.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Barang milik Perangkat Daerah*	-			70 Persen	43.771.619,00			-	-	-	-	97.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	43.771.619,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa dan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran*	-			100 Persen	297.494.612,00			-	-	-	-	345.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	290.994.612,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		329.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	445.000.000,00			-	-	-	-	81.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	38.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.556.000.000,00**						**-**	**2.694.656.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.556.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.694.656.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				51 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	600.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		940.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				33 Orang	956.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.573.325.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		120.331.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				33 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**794.337.881,00**						**-**	**745.711.381,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik*	-			100 Persen	794.337.881,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	-	745.711.381,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Orang	695.711.381,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		695.711.381,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	98.626.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**191.640.400,00**						**-**	**171.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Peningkatan Pembinaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan*	-			100 Persen	191.640.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-	-	171.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				114 Orang	92.172.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	99.468.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**697.880.000,00**						**-**	**284.710.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Penyelenggaraan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			100 Persen	697.880.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	284.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		109.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Orang	697.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**3.032.329.000,00**						**-**	**1.112.345.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			12 Laporan	3.032.329.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.112.345.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	2.005.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		62.045.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				35 Orang	700.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	327.289.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.116.466.375.795,00**							**1.903.318.695.921,00**	



BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah disusun berdasarkan pada asas spesifik, objektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat di pertanggungjawabkan. Indicator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2) Aspek Pelayanan Umum;
3) Aspek Daya Saing Daerah;

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih utama daripada sekedar "keluaran" karena "hasil" (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan dalam berikut:

Tabel 6. 1: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOG RAFI										
1.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	77.66	78.72	79.79	80.85	81.91	82.98	84.04	84.04	Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan dan atau Susenas BPS
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	70.64	70.64	70.97	71.31	71.64	71.87	71.96	71.96	Indeks Kualitas Air ditambah Indeks Kualitas Udara ditambah Indeks Kualitas Lahan dibagi 3
3.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	111.38	110.36	109.35	108.33	107.31	106.29	105.27	105.27	BNPB
4.	Konsumsi listrik per kapita	kWh	680.39	680.39	680.39	680.39	707.40	707.40	707.40	707.40	PLN atau BPS
5.	Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)	Persen	71.00	71.07	71.14	71.20	71.27	71.34	71.41	71.41	SO = ST-MFPA+RDP
6.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	n.a	10.35	10.42	10.48	10.55	10.62	10.69	10.69	Perhitungan aplikasi AKSARA
7.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	15.57	15.21	14.86	14.57	14.17	13.87	13.52	13.52	BPS
8.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	70.00	70.07	70.14	70.20	70.27	70.34	70.41	70.41	PRTLP=JRTLA/JRTS*100
9.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	9.84	12.59	13.42	15.21	17.00	19.79	21.58	21.58	Susenas BPS dan atau Data infrastruktur kementerian PUPR
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASY ARAKAT										
10.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.94	13.95	13.99	14.03	14.06	14.10	14.14	14.14	-

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11.	Indeks Gini	Indeks	0.309	0.309	0.2863	0.2816	0.2770	0.2725	0.2681	0.2681	BPS
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85.88	85.88	86.01	86.01	86.02	86.02	86.02	86.02	-
13.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.528	0.528	0.477	0.453	0.430	0.409	0.388	0.388	-
14.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,50	64,50	64,90	65,30	65,90	66,30	67.00	67.00	-
15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	72.72	74	74.6	75.2	75.8	76.4	77	77	(Akar pangkat tiga Indeks kesehatan x Indeks Pendidikan) x Indeks Pengeluaran
16.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64.00	64.25	64.50	64.55	65.00	65.19	65.19	65.19	-
17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Migas	Persen	-4.29	0.43	0.47	3.22	3.24	3.27	3.29	3.29	Formula dari Perhitungan BPS
18.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tanpa Migas	Persen	-2.93	2.12	2.27	3.76	3.86	3.96	4.06	4.06	Formula dari Perhitungan BPS
19.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	11	11	10.50	10.40	10.30	10.20	10.15	10.15	(Jumlah kasus stunting / Jumlah seluruh balita) x 100%
20.	Prevelensi Stunting	Persen	10.76	15.39	15.04	14.68	14.33	13.97	13.62	13.62	-
21.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Juta Rupiah)	Persen	78.21	79	80	82.2	84.5	86.9	89.5	89.49	Formula dari Perhitungan BPS
22.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.20	9.54	9.68	9.82	9.96	10.11	10.25	10.25	-
23.	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai/Skor	52,56	55,06	57,56	60,06	62,56	65,06	67,56	67,56	? skor literasi siswa : ? siswa (Hasil Asesmen Nasional Kemendikdasmen)
24.	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai/Skor	69,30	70,40	71,50	72,60	73,70	74,80	75,90	75,90	? Skor literasi siswa : ? siswa (Hasil Asesmen Nasional Kemendikdasmen)

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
25.	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai/Skor	46,76	49,66	52,56	55,46	58,36	61,26	64,16	64,16	? skor numerasi siswa SD : ? siswa SD
26.	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai/Skor	59,83	61,33	62,83	64,33	65,83	67,33	68,83	68,83	? skor numerasi siswa SMP : ? siswa SMP
27.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.43	4.28	4.16	4.04	3.92	3.8	3.68	3.68	(Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk) x 100
28.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,10	4,10	3,82	2,99	2,89	2,79	2,69	2,69	Pengukuran dari BPS
29.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.38	74.51	74.71	74.91	75.11	75.31	75.31	75.31	BPS
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
30.	Indeks Infrastruktur	Indeks	69.35	69.35	73.65	74.74	75.80	76.73	77.80	77.80	-
31.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	42.87	43.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	47.00	Hasil Perhitungan Skor Nilai Indeks Inovasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri
32.	Rasio kewirausahaan	Persen	2.46	2.46	2.58	2.71	2.88	2.99	3.14	3.14	-
33.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	Total Penerimaan Pajak dibagi PDRB
34.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0.86	0.86	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.10	-
35.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0.57	0.57	0.58	0.61	0.64	0.67	0.70	0.70	-
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM										
36.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,34	3,39	3,44	3,54	3,64	3,74	3,84	3,84	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)
37.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2.94	3.04	3.13	3.23	3.33	3.43	3.53	3.53	-

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
38.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.61	3.35	3.44	3.52	3.60	3.68	3.77	3.77	-
V.	INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJI B YANG BERKAITAN D ENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PENDIDIKAN										
1.	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	Persen	10.38	11.02	11.66	12.29	12.93	13.57	14.21	14.21	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / Jumlah Penduduk usia 718 tahun yang tidak bersekolah x 100%
2.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	Persen	86.51	89.48	92.45	95.00	97.55	100.00	100.00	100.00	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD / Jumlah penduduk usia 5-6 tahun x 100%
3.	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	Persen	99.38	99.43	99.47	99.52	99.56	99.61	99.66	99.66	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7 - 15 Tahun) x 100%
4.	Iklim Inklusivitas SD	Persen	55.40	57.90	60.40	62.90	65.40	67.90	70.40	70.40	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
5.	Iklim Inklusivitas SMP	Persen	55.39	57.79	60.19	62.59	64.99	67.39	69.79	69.79	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6.	Iklim Keamanan SD	Persen	70.80	71.70	72.60	73.50	74.40	75.30	76.20	76.20	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
7.	Iklim Keamanan SMP	Persen	70.18	71.68	73.18	74.68	76.18	77.68	79.18	79.18	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
8.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	56.89	67.55	68.30	69.05	69.80	70.55	71.30	71.30	Jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 / Jumlah SMP Jumlah guru PAUD x 100%
9.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	27.14	48.06	74.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD Akreditasi x 100%
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KESEHATAN										
1.	Angka Kematian Bayi	Angka	12.49	12.49	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	514.33	412.23	367.38	293.90	220.43	220.43	149.95	149.95	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000
3.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan / Jumlah penduduk) x 100%
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita di kabupaten atau kota) x 100%
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	61.30	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten atau kota) x 100%
6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	61.30	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar) x 100%
7.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0.87	0.84	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	(Jumlah balita gizi buruk / Jumlah balita) x 100%
8.	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten atau kota) x 100%
10.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir) x 100%
11.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	90.81	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten atau kota) x 100%
12.	Persentase ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	90.81	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar / Jumlah ibu Bersalin) x 100%
13.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	96.17	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten atau kota) x 100%
14.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	96.17	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil) x 100%
15.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Persen	80.49	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten atau kota) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	Persen	65.47	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten atau kota) x 100%
17.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Persen	66.28	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten atau kota) x 100%
18.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persen	22.07	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah orang usia 15 sampai dengan 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15 sampai dengan 59 tahun di kabupaten atau kota) x 100%
19.	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	89.36	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita diabetes melitus) x 100%
20.	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	89.36	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kabupaten atau kota) x 100%
21.	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	91.03	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah Penderita hipertensi) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
22.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80.49	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ) x 100%
23.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	66.28	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC) x 100%
24.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten atau kota) x 100%
25.	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	65.47	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah orang dengan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia x 100%
26.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persen	47.90	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar / Jumlah orang warga negara Usia 60 tahun di kabupaten atau kota) x 100%
27.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	47.90	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
28.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0.127	0.127	0.138	0.137	0.136	0.135	0.132	0.132	(Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah Penduduk di kabupaten atau kota) x 100%
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PEKERJAAN UMU M DAN PENATAAN R UANG										
1.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman	Persen	66	69	72	75	78	81	84	84	(Jumlah Rumah tangga Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman / Jumlah Rumah tangga yang belum akses aman) x 100
2.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Persen	88	88.77	89.06	89.58	90.35	90.89	91.27	91.27	Jumlah jiwa layanan yang tersambung ke IPALD
3.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	SK	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung
4.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Badan Usaha	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM
5.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Sistem Jaringan	1	1	1	1	1	1	1	1	Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk
6.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah Kabupaten atau Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
7.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Jiwa	1309	1022	1100	1150	1200	1250	1300	1300	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah
9.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jiwa	62925	1000	1000	1600	1600	1600	1600	1600	Jumlah penerima manfaat air bersih
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Jiwa	72096	800	800	1000	1000	1200	1200	2400	jumlah warga negara yang memperoleh layanan air limbah
11.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jiwa	16	0	16	16	20	24	24	24	jumlah warga yang mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten
12.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	44.45	45.02	45.76	47.22	48.57	50.25	55.34	55.34	(Jumlah jiwa memanfaatkan penyedotan lumpur tinja / Total jumlah jiwa layanan IPLT) x 100
13.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Persen	56.66	57.76	58.32	59.55	60.39	61.63	62.98	62.98	(Jumlah penerima manfaat pelayanan SPALD S akses aman / Total jumlah masyarakat) x 100
14.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Persen	78.45	79.77	80.24	81.44	82.03	82.98	83.57	83.57	(Jumlah penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar / Jumlah penduduk yang belum terakses) x 100
15.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Persen	55	60	63	66	70	73	75	75	Jumlah Rumah tangga yang menggunakan layanan IPLT
16.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	85	87	89	91	93	95	97	97	(Jumlah Rumah tangga yang menggunakan sarana pengangkutan lumpur tinja / Jumlah Rumah tangga yang ada layanan IPLT) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
17.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Persen	80	82	84	86	88	90	92	92	(Jumlah unit pengolahan yang diadakan / Jumlah unit pengolahan yang dibutuhkan) x 100
18.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	SK	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	SK tentang kewenangan jalan Kabupaten
19.	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	251.2	251.2	253.2	255.2	257.2	259.2	261.2	261.2	Panjang jalan yang dibangun
20.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit	86	86	1	1	1	1	1	91	Jumlah jembatan yang di bangun
21.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RISPAM Kabupaten
22.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Perda	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung
23.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Persen	0	87	88	89	90	91	92	92	Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan peruntukan ruang
24.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	67.45	67.98	68.41	69.02	69.87	70.48	71.18	71.18	(Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan layanan IPLT / Jumlah Rumah Tangga dalam layanan IPLT) x 100
25.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persen	76	77	78	79	80	81	82	82	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten x 100
26.	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	52.44	53	54.08	55.16	56.23	57.31	58.39	58.39	(Jalan dalam kondisi mantap / Total jalan yang dibangun) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
27.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Persen	33	50	60	75	100	100	100	100	(Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik / Panjang jaringan irigasi) x 100
28.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	33	50	60	75	100	100	100	100	(Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik / Total panjang jaringan irigasi sekunder) x 100
29.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Persen	84.25	84.69	85.3	85.9	86.1	86.3	86.5	86.5	(Jumlah penduduk yang berakses air bersih x Jumlah penduduk) x 100
30.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	60.7	62.6	65.9	68.2	70.4	73.2	75.6	75.6	(Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan / Jumlah Rumah tangga) x 100
31.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	64	66	66	68	70	72	74	74	(Jumlah Rumah Tangga yang berakses sanitasi / Total Rumah Tangga) x 100
32.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Jiwa	12,434	12,677	12,985	13,385	13,785	14,185	14,585	14,585	Jumlah jiwa yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
33.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga	120	127	137	212	287	362	437	437	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
34.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	3500	4000	4500	6000	7500	8000	10000	10000	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja
35.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Rasio	1:5	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	1:10	1:10	Perbandingan bangunan gedung yang layak dengan kebutuhan gedung

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
36.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	0	1:26	1:25	1:24	1:23	1:22	1:21	1:21	Kepatuhan masyarakat terhadap IMB
37.	Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui
38.	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun BerJalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun BerJalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten
39.	Tersusun dan Ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	JAKSTRAda Kabupaten
40.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	53.24	53.78	54.08	55.16	56.23	57.31	58.39	58.39	Jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan total jalan yang di bangun dikali 100
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	2363	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1800	Penurunan Jumlah RTLH yang dibangun setiap tahun
2.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kawasan	4	4	5	5	5	5	5	5	Jumlah kawasan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU
3.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Kawasan	5	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah kawasan perumahan yang ada PSU dalam kondisi baik
4.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Unit	100	50	50	50	50	50	50	50	Jumlah Rumah Pembangunan Baru dan atau Peningkatan Kualitas

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	0	0	4	4	4	4	4	20	Jumlah Rumah yang layak huni bagi korban bencana yang di adakan dan atau di rehabilitasi
6.	kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten
7.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	30	32	34	36	38	40	42	42	(Luas kawasan kumuh yang di tangani / Total luas kawasan kumuh) x 100
8.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persen	16.9	15.1	14.8	14.5	14.2	14.9	14.6	14.6	(Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun / Kebutuhan Rumah Layak Huni) x 100
9.	Rasio Rumah dan KK	Rasio	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	Perbandingan rumah layak terhadap Jumlah KK
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN U MUM SERTA PE RLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	5	Jumlah Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah
2.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	17	10	12	7	5	4	10	65	Jumlah Orang yang sudah bersertifikasi Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Daerah	0	6	15	20	25	30	96	96	Jumlah Daerah
4.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Kasus	190	240	125	110	95	75	70	905	Jumlah Kasus yang Tertanggani
5.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	17	5	6	8	10	12	14	72	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana
6.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	Jumlah Regu Patroli dikali 3 dalam sehari di Bagi Jumlah Kecamatan
7.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda	7	7	8	8	9	9	10	10	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan
8.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	96	42	18	18	18	18	18	228	Jumlah Personil
9.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Perda	6	6	7	8	9	10	10	10	Jumlah Perda dan Perda yang ditegakan
10.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Orang	3	3	3	5	5	8	10	10	Jumlah Anggota Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	320	240	300	340	400	440	500	2540	Jumlah Balakar
12.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Jenis	33	33	33	33	33	33	33	33	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran
13.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Unit	5	5	5	5	6	7	8	8	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP yang Tersedia
14.	Jumlah Satlinmas yang Terlatihdan Dikukuhkan	Orang	454	454	454	454	454	454	454	454	Jumlah Satlinmas yang Terlatihdan Dikukuhkan
15.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Persen	77,27	77,27	80	85	90	95	100	100	(Jumlah Aparatur yang Bersetifikasi / Jumlah Aparatur) x 100
16.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95	(Jumlah Penanggana Gangguan yang dilaporkan / Jumlah Penangganan Gangguan yang diselesaikan) x 100
17.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	0.60	0.45	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	(Jumlah Penduduk / Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Pelatiahan) x 100
18.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	40	50	60	70	80	90	100	100	(Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana / Jumlah warga terdampak) x 100
19.	Persentase Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95	Jumlah Pelanggaran yang ditanggani dibagi Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan kali 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
20.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana / Jumlah Target) x 100
21.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	60	63	65	67	70	73	75	75	(Jumlah Petugas Bencana / Jumlah keseluruhan aparatur) x 100
22.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Persen	138.33	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Kasus yang ditanggani / Jumlah target Kasus) x 100
23.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Kasus yang ditanggani / Jumlah Target Kasus) x 100
24.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Kasus yang ditanggani / Jumlah Target Kasus) x 100
25.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Persen	70	70	70	75	75	80	80	80	(Jumlah Anggota Satpol PP yang menggikuti Pelatihan / Jumlah Aparatur) x 100
26.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Dokumen KRB / Target) x 100
27.	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Dokumen Renkon / Target) x 100
28.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Dokumen RPB / Target) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
29.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95	(Jumlah Peraturan yang memiliki sangsi / Jumlah perda total perda yang memuat sangsi) x 100
30.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	(Jumlah Warga Negara yang telah mengikuti Pelatihan / Jumlah Warga Negara) x 100
31.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	80	80	100	100	100	100	100	100	(Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda Perkada / Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada) x 100
32.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana / Target) x 100
33.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	52896	53000	53500	54000	54500	55000	55500	378396	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencan / Target) x 100
34.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	(Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Target) x 100
35.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Jumlah Warga terdampak) x 100
36.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan	Persen	150	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana										Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana / Jumlah warga negara yang menjadi target) x 100
37.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan / Jumlah Target) x 100
38.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa	Unit	1	2	1	2	3	3	3	15	Jumlah Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa
39.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Orang	0	18	36	54	54	54	54	270	Jumlah Petugas
40.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Unit	1	2	1	2	3	3	3	15	Jumlah Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan
41.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Jenis	4	1	2	2	2	2	2	15	Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang tersedia
42.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum	SOP	3	3	4	5	6	7	8	8	Jumlah SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
43.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit/ Kejadian	13	13	13	13	13	13	13	13	Total Waktu Tempuh dalam Menit dibagi Total Kasus Kebakaran
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG SOSIAL										
1.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	0	0	0	10	15	20	25	25	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
2.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Keluarga	0	180	90	90	90	90	90	90	Jumlah bimbingan sosial yang diberikan pada keluarga dan masyarakat
3.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Jiwa	1854	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1849	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM
4.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	1	1	0	0	1	0	0	2	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang memiliki Akses Khusus Layanan Kedaruratan
5.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Orang	28	20	20	20	20	20	20	20	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat bantuan Makanan
6.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Orang	0	0	20	20	20	20	20	20	Jumlah Korban Bencana yang Menerima bantuan Paket Sandang
7.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Layanan	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan
8.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Orang	29	31	35	35	35	35	35	35	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9.	Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	14	14	14	14	14	14	14	14	Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan
10.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	0	1	5	5	5	5	5	5	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan
11.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Orang	180	84	84	84	84	84	84	84	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Orang	0	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga
13.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Orang	0	0	0	5	5	5	5	5	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk
14.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	83	0	50	30	30	30	30	30	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu
15.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	180	90	90	90	90	90	90	90	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	Orang	0	0	0	50	50	50	50	50	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter
17.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	0	0	8	5	5	5	5	5	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga
18.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi	Paket	0	0	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi
19.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Paket	0	0	0	10	10	10	10	10	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti
20.	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Panti/Rumah Singgah	0	0	0	1	0	0	0	1	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar
21.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Orang	0	0	0	2	0	0	0	2	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah
22.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Unit	0	0	0	1	0	0	0	1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk
23.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
24.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten atau Kota x 100%
25.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	40	50	50	50	50	50	50	(Jumlah PSKS yang aktif / Jumlah Jenis PSKS) x 100
26.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persen	50.41	50.41	50.95	51.04	51.13	51.22	51.31	51.31	(Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar PPKS / Jumlah PPKS) x 100%
27.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas x 100%
28.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	61,98	61,98	60,49	60,09	59,84	59,73	59,74	59,74	(Jumlah PMKS yag mendapatkan perlidungan dan jaminan sosial / Jumlah PMKS keseluruhan) x 100%
29.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti x 100%
30.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti x 100%
31.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dikalikan 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
32.	Persetase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Warga negara korban bencana Kabupaten atau kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial x 100%
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJI B YANG TIDAK BERKAI TAN DENGAN PELA YANAN DASAR										
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG TENAGA KERJA										
1.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(Jumlah tenaga kerja yang dilatih / Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%
2.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan	0	0	6	6	6	6	6	6	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota
4.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Orang	0	0	0	10	15	20	25	25	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja
5.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Orang	0	0	0	10	15	20	25	25	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi
6.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Orang	0	0	0	10	15	20	25	25	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata
7.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0	1	1	1	1	1	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	0	0	0	5	5	5	5	5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten atau kota
9.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	0	0	0	1	1	1	1	1	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
10.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Orang	499	549	599	649	699	749	799	799	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota
11.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	0	0	0	10	10	10	10	10	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
12.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Orang	305	379	379	379	379	379	379	379	Jumlah Penganggur yang Dilatih
13.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Jenis	2	2	3	3	3	3	3	3	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
14.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan
15.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Perselisihan Kepentingan
16.	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80.33	80.35	80.37	80.39	80.41	80.43	80.45	80.45	(Jumlah lulusan pelatihan bersetifikat kompetensi pada tahun [n] / Jumlah lulusan bersetifikat pelatihan pada tahun [n]) x 100%
17.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah instruktur bersetifikat kompetensi pada tahun [n] / Jumlah instruktur bersetifikat kompetensi pada tahun [n]) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
18.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Persen	0	1	1	1	1	1	1	1	(Jumlah perusahaan yang berselisih / Jumlah perusahaan pada tahun [n]) x 100 %
19.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun [n] / Jumlah LPK yang terdata pada tahun [n]) x 100%
20.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun [n] / Jumlah seluruh LPK pada tahun [n]) x 100%
21.	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	(Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okulasi pada tahun [n] / Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun [n]) x 100%
22.	Persentase Penyerapan Lulusan	Persen	53.33	22.86	33.78	36.49	39.19	41.89	44.59	44.59	(Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun [n] / Jumlah lulusan pada tahun [n]) x 100%
23.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	(Jumlah perjanjian bersama / Jumlah kasus perselisihan) x 100%
24.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	0	3	4	4	4	4	4	4	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
25.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Persen	0	1	2	3	4	5	6	6	(Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah / Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)) x 100%
26.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	3	4	4	4	4	4	4	4	(Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun [n] / Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB) x 100%
27.	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	30	35	37	40	43	45	50	50	(Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor) x 100%
28.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan) x 100%
29.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	Persen	11.04	14	20	30	40	50	60	60	(Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi / Jumlah tenaga kerja) x 100%
30.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	90	90	92	94	96	98	100	100	(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%
31.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	(Jumlah instruktur pada tahun [n] / Jumlah peserta pelatihan pada tahun [n]) x 100%
32.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	90	90	92	94	96	98	100	100	(Penduduk yang bekerja / Angkatan kerja) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani istansi terkait / Jumlah seluruh anak korban kekerasan) x 100%
2.	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD	Persen	0	4	6	7	8	9	10	10	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%
3.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.42	76.73	77.78	78.83	79.89	81.31	82.37	82.37	(Jumlah pemakaian kontrasepsi modern / Jumlah seluruh pemakaian kontrasepsi) x 100%
4.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Nilai	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	Jumlah Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15 sampai dengan 64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir / per 100.000 penduduk perempuan
5.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persen	9.6	9.6	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.14	-
6.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Nilai	34.48	34.80	34.75	34.60	34.55	34.50	34.45	34.45	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO dibagi per 100.000 penduduk perempuan
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	Persen	30.29	30.29	33.89	33.97	34.05	34.13	34.21	34.21	(Jumlah Cadangan Pangan / Jumlah Kebutuhan) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	kkal/kap/hr	2.269	2.269	2100	2100	2100	2100	2100	2100	AKP Ideal yang harus dicapai
3.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Sample	60	60	60	60	68	68	68	68	(Standard deviasi harga komoditi perbulan / Harga rata2 komoditi pertahun) x 100%
4.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	15.56	15.56	16	16	16	16	16	16	Jumlah cadangan pangan yang disalurkan kepada keluarga Rentan Rawan pangan
5.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	CV Rasio	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	(Standard deviasi harga komoditi perbulan / Harga rata2 komoditi pertahun) x 100%
6.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	LPM	10	10	1	1	1	1	1	15	Jumlah Lumbung Pangan
7.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen FSVA yang Dianalisis
8.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Regulasi	0	0	1	1	1	1	1	5	Jumlah Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal
9.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Jiwa	3434	835	835	835	835	835	835	835	Jumlah Jiwa Penduduk Rawan Pangan yang Tertangani
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PERTANAHAN										
1.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen Izin Membuka Tanah
2.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Persen	0	0	4.98	9.96	14.93	19.91	24.89	24.89	luas tanah kosong di kabupaten natuna dibagi dengan luas wilayah daratan di kabupaten natuna dikali 100
4.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	80	82	84	86	88	90	92	92	(Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi / Luas Izin Lokasi yang diterbitkan) x 100
5.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	65	67	70	75	80	85	90	90	(Luas tanah yang diadakan untuk fasum / Luas tanah pemda yang tersedia) x 100
6.	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	SK	1	1	1	1	1	1	1	1	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee
7.	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali Kota	SK	1	1	1	1	1	1	1	1	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati
8.	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1	1	Adanya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal
9.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1	1	Adanya tersedianya Tanah untuk Masyarakat
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG LINGKUNGAN HID UP										
1.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen-dasi	23	23	10	10	10	10	10	53	(Izin Lingkungan PPLH / Jumlah Usulan Permohonan yang Teregistrasi) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	109	109	109	109	109	109	109	109	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan dibagi Usaha atau Kegiatan yang dilakukan Pemeriksaan dikali 100 Persen
3.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	1	1	5	5	5	5	5	5	Pengaduan Masyarakat yang ditangani dibagi Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Tergistrasi dikali 100 Persen
4.	Peningkatan Baku Mutu Air	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	konsentrasi parameter kualitas air i maksimum dikurang konsentrasi parameter kualitas air i dibagi konsentrasi parameter kualitas air i maksimum dibagi konsentrasi parameter kualitas air i yg tercatum dalam baku peruntukan air j
5.	Peningkatan Baku Mutu Udara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Indek Pencemaran NO2 ditambah Indek Pencemaran SO2 dibagi 2
6.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persen	43	43	45	50	55	60	65	65	Luas RTH yang ditetapkan dibagi Luas RTH yang tertangani dikali 100
7.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	35	35	35,50	35,90	36,23	36,70	37	37	Volume Sampah yang ditanggani dibagi Volume Produksi sampah dikali 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Meter Kubik	45.77	45.77	45.77	45.77	45.98	45.98	45.98	45.98	Total Volume Sampah yang dapat ditanggani dibagi total volume timbunan Sampah Kabupaten dikali 100
9.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	Laporan Volume sampah yang dianggkut perhari
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG ADMINISTRASI KE PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	16	20	20	25	30	36	45	45	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
2.	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100
3.	Penerbitan Akta Kematian	Persen	80	85	85	90	95	95	95	95	Jumlah Kematian dibagi Jumlah Akta yang diterbitkan
4.	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	80	80	80	85	85	85	90	90	Jumlah Perceraian dibagi Jumlah Akta yang diterbitkan
5.	Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	80	85	85	85	90	90	95	95	Jumlah Perkawinan dibagi Jumlah Akta yang diterbitkan
6.	Penyajian Data Kependudukan	Persen	80	80	80	85	85	90	90	90	(Jumlah OPD yang telah bekerjasama / Jumlah OPD) x 100
7.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	80	80	81	82	83	84	85	85	(Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun keatas) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	85	86	87	89	90	93	95	95	(Jumlah Anak Usia 0 sampai dengan 17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang sudah Memiliki KIA / Jumlah Anak Usia 0 sampai dengan 17 Tahun) x 100
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN D ESA										
1.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	0	0	2	4	6	8	10	10	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya
2.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Persen	14.81	14.81	18.52	22.22	27.78	31.48	37.04	37.04	(Jumlah Bumdes Berkembang / Jumlah seluruh Bumdes yang ada) x 100%
3.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	1	2	3	4	5	5	Jumlah Desa Mandiri yang dimiliki
4.	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	0	12	20	25	30	35	40	40	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa
5.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	Lembaga	70	70	90	105	120	135	140	140	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang mendapat fasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	Lembaga	0	0	7	12	15	18	18	70	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Diklat
7.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Desa	10	20	30	40	50	60	70	70	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	30	35,71	40	42,86	50	54,28	57,14	57,14	(Jumlah status desa mandiri / Jumlah seluruh status desa) x 100%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PENGENDALIAN P ENDUDUK DAN KELU ARGA BEREN CANA										
1.	Persentase Kebutuhan berKB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	14.45	14.08	14.00	13.98	13.50	13.00	12.40	12.40	(Jumlah kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) / Jumlah kebutuhan ber KB yg terpenuhi) x 100%
2.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2.71	2.58	2.49	2.41	2.35	2.30	2.25	2.25	Jumlah kelahiran hidup laki2 dan perempuan tiap 1000 peduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PERHUBUNGAN										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	0	0	44	63	75	80	85	85	Jumlah bobot dibagi dengan jumlah unsur
2.	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Persen	0	0	0	25	75	100	100	100	(Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan / Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten) x 100
3.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Persen	38	40	48	60	75	93	100	100	(Jumlah pemasangan perlengkapan jalan / Target kebutuhan perlengkapan jalan) x 100
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	0	0	55	60	65	70	75	75	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
5.	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	0	0	0	0	40	60	100	100	(Angkutan umum yang memiliki Uji Kir / Jumlah kendaraan angkutan umum) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	15	16	20	25	30	35	40	40	(Jumlah ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo / Jumlah ASN pengelola TIK) x 100
2.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen	53	53	55	60	65	70	75	75	(Jumlah data statistik sektoral terupdate / Jumlah data statistik sektoral) x 100
3.	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	76.53	76.53	80.61	82.65	84.69	87.76	89.90	89.90	(Jumlah komunitas Masyarakat atau Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten / Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemda) x 100
4.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	10.34	10.34	12	13	14	15	16	16	(Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik) x 100
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	46.30	50	55.56	72.22	83.33	92.59	100	100	(Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD) x 100
6.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	55.27	55.27	60.09	65.21	70.36	74.40	77.04	77.04	(Persentase Aset TIK + Akses Internet) + (BTS/ Tower + OPD tersambung Jaringan Intra) + (Aplikasi + Website)
7.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Persen	48	48	50	55	60	65	70	70	(Jumlah OPD yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar / Jumlah OPD) x 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Persen	35.19	37.04	55.56	72.22	83.33	92.59	100	100	(Jumlah OPD yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo / Jumlah OPD) x 100
9.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan	Persen	91.85	91.85	92.50	93	93.5	94	94.5	94.5	(Jumlah OPD yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan / Jumlah OPD) x 100
10.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	40.74	48.15	55.56	72.22	83.33	92.59	100	100	(Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah) x 100
11.	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	4.55	4.55	5.50	6	6.5	7	7.5	7.5	(Jumlah Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Jumlah sistem elektronik) x 100
12.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Peraturan	1	1	1	1	1	1	1	1	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi EGovernment
13.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Sistem	1	1	1	1	1	1	1	1	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KOPERASI, USAH A KECIL, DAN MENEN GAH										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Persen	1	1	1	1	1	1	1	1	((Nilai Tambah Industri Manufaktur tahun berjalan - Nilai Tambah Industri Manufaktur tahun sebelumnya) / Nilai Tambah Industri Manufaktur tahun sebelumnya) x 100%
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	14.38	15.00	15.63	16.25	16.88	17.50	18.13	18.13	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (volume usaha dan aset) / Jumlah seluruh koperasi) x 100%
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha	Persen	5.54	5.61	5.68	5.74	5.85	5.95	6.01	6.01	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wira usaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100 %
4.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	4.26	6.38	8.51	10.64	12.77	14.89	17.02	17.02	(Jumlah penerbitan izin usah simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan / Jumlah usah simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam) x 100%
5.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	70.00	72.00	75.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00	(Jumlah penerbitan izin kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan / Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan) x 100%
6.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	21.88	22.88	24.03	25.18	26.30	27.42	28.62	28.62	(Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) / Jumlah koperasi yang ada) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.44	0.61	0.73	0.85	0.97	1.22	1.46	1.46	(Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian / Jumlah anggota koperasi yang ada) x 100%
8.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Persen	0.73	0.84	0.90	1.00	1.17	1.34	1.67	1.67	(Jumlah usaha mikro yang bermitra / Jumlah usaha mikro yang ada) x 100%
9.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran	Persen	2.46	2.53	2.60	2.67	2.74	2.81	2.91	2.91	(Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / Jumlah usaha mikro yang belum mandapatkan dukungan pemasaran) x 100%
10.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Persen	11.80	12.14	12.51	13.26	13.63	13.89	14.08	14.08	(Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi / Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk) x 100%
11.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Persen	5.54	5.58	5.61	5.64	5.68	5.74	5.85	5.85	(Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha / Jumlah usah mikro yang ada) x 100%
12.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Persen	80.00	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00	87.00	(Jumlah usaha mikro yang diinput dalam sistem data online (ODS) / Jumlah usaha mikro yang ada) x 100%
13.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1.25	1.88	2.50	3.13	3.75	4.38	5.00	5.00	(Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan / Jumlah koperasi yang ada) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan	Persen	21.25	21.88	22.50	23.13	23.75	24.38	25.00	25.00	(Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan / Jumlah koperasi yang ada) x 100%
15.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	21.25	21.88	22.50	23.13	23.75	24.38	25.00	25.00	(Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan / Jumlah koperasi yang ada) x 100%
16.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	15.63	16.25	16.88	17.50	18.13	18.75	19.38	19.38	(Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha / Jumlah koperasi yang ada) x 100%
17.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	11.25	11.88	12.50	13.13	13.75	14.38	15.00	15.00	(Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / Jumlah koperasi yang ada) x 100%
18.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	14.38	15.00	15.63	16.25	16.88	17.50	18.13	18.13	Jumlah koperasi yang diperikasa dan diawasi / Jumlah koperasi yang ada x 100 %
19.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	33.95	33.95	36.94	41.52	46.92	53.01	60.09	60.09	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru / Jumlah wirausaha yang ada x 100 %
20.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	46.94	48.98	51.02	53.06	55.10	57.14	59.18	59.18	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100 %

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
21.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	3.13	3.75	4.38	5.00	5.63	6.25	6.88	6.88	(Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran / Jumlah koperasi yang ada) x 100%
22.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	2.10	2.17	2.24	2.51	2.84	3.17	3.51	3.51	(Jumlah pertumbuhan wirausaha baru / Jumlah wirausaha yang ada) x 100%
23.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	5.08	6.08	6.75	7.25	7.92	8.58	9.25	9.25	(Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan / Jumlah usaha mikro yang ada) x 100%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PENANAMAN MO DAL										
1.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Promosi	7	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah pameran penanaman modal
2.	Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	11.95	11.95	12.14	12.23	12.44	12.57	12.66	12.66	((Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi) / Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi) x 100%
3.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kali	0	150	200	220	264	317	388	388	Jumlah Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
4.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal dalam satu tahun
5.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumlah laporan realisasi penanaman modal yang dilaporkan ke BKPM (per triwulan)

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	1	1	2	2	2	2	2	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat atau bimbingan di bidang penanaman modal
7.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	Perusahaan	35	40	45	50	55	60	65	65	Pembinaan pelaku usaha (PMDN/PMA) yang dihitung secara akumulasi
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	510	849	850	870	890	910	930	930	Jumlah izin non izin yang diterbitkan DPMPTSP dan jumlah perizinan berusaha yang diterbit oleh lembaga OSS (BKPM) yang diproses penerbitannya didampingi atau diferifikasi oleh DPMPTSP
9.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	0	0	1	0	0	0	0	Jumlah PERDA pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal yang disusun
10.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	33,58	11.97	11.99	12.10	12.38	12.43	12.56	12.56	
11.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	SOP	0	1	0	1	0	0	0	0	Jumlah standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang disusun
12.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Peizinan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	Jumlah dokumen data informasi penanaman modal dalam satu tahun
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KEPEMUDAAN DA N OLAHRAGA										
1.	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah	Event	0	0	2	3	2	3	2	12	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	0	5	3	5	3	5	21	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	11.73	50	50	50	50	50	50	50	(Jumlah pemuda (16 sampai dengan 30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi / Jumlah pemuda (umur 16 sampai dengan 30 tahun) di kabupaten atau kota) x 100%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG STATISTIK										
1.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	7	Adanya Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS
2.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Buku	1	1	1	1	1	1	1	7	Tersedianya buku profil
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KEBUDAYAAN										
1.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	2	0	3	3	3	3	3	3	Jumlah Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya
2.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)	Objek	1	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan
3.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Persen	21	0	5	5	5	5	5	5	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Objek	4	0	12	12	12	12	12	12	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan
5.	Jumlah SDM, Lembaga dan Ppranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	Orang	145	0	20	20	20	20	20	20	Jumlah SDM, Lembaga dan Ppranata yang Dibina Jumlah Tim Pendaftaran Cagar Budaya
6.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Kelompok	1	0	1	1	1	1	1	1	
7.	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	Orang	0	0	3	3	3	3	3	3	Jumlah Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman
8.	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Jenis	470	470	10	10	10	10	10	10	Jumlah Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum
9.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Jenis	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota
10.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	3	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan
11.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	1	2	2	2	1	1	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Jenis	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman
13.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Event	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
14.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)	Item	187	187	10	10	10	10	10	10	Jumlah Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)
15.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Item	470	470	10	10	10	10	10	10	Jumlah pelestarian cagar budaya
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PERPUSTAKAAN										
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	0	75	75	76	77	78	80	80	Metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)
2.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n.a	75	75	76	77	78	80	80	Melalui pengukuran indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KEARSIPAN										
1.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	30	40	60	70	75	80	85	85	-

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	na	0	2,17	8,5	13,17	17,84	22,5	22,5	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	10,5	0	12,5	16,25	22,5	28,75	35	35	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIH AN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG KELAUTAN DAN P ERIKANAN										
1.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Ekor	27.500	20.000	35.000	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	Jumlah Produksi Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau
2.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Kelompok	0	0	5	5	5	5	5	25	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)	Orang	130	130	135	140	145	155	160	160	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)
4.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Rumah Tangga	105	105	10	10	10	10	10	10	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)
5.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber Data: One Data KKP)	Ton	136526.44	136526.44	138481.33	139270.96	141000.23	142218.24	143386.88	143386.88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten atau Kota (Sumber Data: One Data KKP)
6.	Produksi Sektor Perikanan	Ton	136526.44	136526.44	138481.33	139270.96	141000.23	142218.24	143386.88	143386.88	Jumlah Total Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PARIWISATA										
1.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Destinasi	2	2	2	2	2	2	2	2	(Realisasi pertahun / Target setahun) x 100%
2.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Event	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi
3.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Event	0	0	1	1	1	1	1	1	Jumlah partisifasi saat event
4.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	Destinasi	2	2	2	2	2	2	2	2	(Realisasi pertahun / Target setahun) x 100%
5.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	20,275	20,275	25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	29,000	Jumlah Kunjungan Wisata

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6.	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan
7.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Event	1	1	2	2	2	2	2	2	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri
8.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	TDUP	0	0	2	2	2	2	2	2	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten atau Kota
9.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	30	7	150	170	200	220	250	250	Rekapitulasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
10.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	228,742,507,247	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,8	
11.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0.55	0.55	1	2	3	3	3	3	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata / Jumlah PDRB) x 100%
12.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persen	-32	-35	10	12	13	16	17	17	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100 %
13.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Persen	0	0	3	4	5	5	6	6	(Jumlah produk wisata yang dipasarkan / Jumlah produk wisata daerah) x 100%
14.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan	Persen	320	50	60	70	80	80	80	80	(Jumlah peserta pembekalan / Jumlah sasaran) x 100%
15.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	Unit	39	39	39	40	41	42	43	44	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Hari	3	3	3	3	6	7	8	8	Jumlah lama tinggal wisata (hari) / Jumlah Pengunjung
17.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	9	9	10	12	15	16	17	17	(Jumlah kamar terjual x Jumlah kamar tersedian) x 100%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PERTANIAN										
1.	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	Persen	53,3	53,3	55	60	70	80	90	90	(Jumlah bencana yang difasilitasi penanggulangannya / Jumlah bencana sektor pertanian) x 100
2.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	80	82	84	85	87	88	89	89	(Realisasi / Rencana data kebutuhan kelompok) x 100%
3.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi	Persen	5,0	5,5	6,0	7,5	6,5	8,0	7,0	8,0	Luas Lahan yang di Kendalikan / Luas lahan keseluruhan x 100 %
4.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	Persen	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2	2	Jumlah kejadian penyakit atau kasus tahun berjalan [t] di kurangi Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya [t-1] di kali Jumlah kejadian atau kasus penyakit
5.	Persentase Prasarana yang Digunakan	Persen	76,9	76,9	71	72	73	74	75	75	(Jumlah prasarana pertanian yang digunakan / Jumlah prasarana pertanian) x 100%
6.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	129265.76	51706	135729	142516	149641	157123	164980	164980	Jumlah produksi Sektor Pertanian
7.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	5.11	5.11	5.37	5.63	5.92	6.21	6.52	6.52	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun / Luas panen) x 100%
8.	Sarana Pertanian yang Diberikan	Unit	0	0	5	5	5	5	5	25	Jumlah sarana yang diberikan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG PERDAGANGAN										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Persen	80	82	84	85	87	88	89	89	(Jumlah realisasi pupuk dan pestisida / Rencana kebutuhan pupuk dan pestisida) x 100%
2.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Persen	0.82	0.89	0.95	1.05	1.15	1.32	1.48	1.48	(Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten atau kota) x 100%
3.	Persentase Alat–alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	1.37	1.44	1.51	1.57	1.67	1.79	2.00	2.00	(Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten atau kota) x 100%
4.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Persen	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	4.36	4.36	4.36	(Jumlah penerbitan TDG / Jumlah permohonan TDG) x 100%
5.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	0	0	0	0	1.69	3.39	5.08	5.08	(Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku / Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan) x 100%
6.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.02	2.04	2.06	2.08	2.09	3.00	3.02	3.02	(Selisih koefisien harga antar waktu / komoditas bahan pokok pada waktu berjalan) x 100%
7.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	2.24	2.27	2.30	2.34	2.37	2.40	2.44	2.44	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten atau kota) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	7.69	7.69	15.38	15.38	23.08	23.08	(Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten atau kota / Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer) x 100%
9.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah SKA yang terbit kurang dari 1 hari kerja (1x24 jam) / Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumenya telah diterima dengan lengkap) x 100%
10.	Persentase Penerbitan TDG	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah Penerbitan TDG kurang dari 5 hari kerja / Jumlah permohonan penerbitan TDG) x 100%
11.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	13.04	13.04	16.67	16.67	20.83	20.83	25.00	25.00	(Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan dikembangkan / Jumlah seluruh sarana perdagangan yang ada) x 100%
12.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Persen	12	13	14	15	16	17	18	18	(Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan dikembangkan / Jumlah seluruh sarana perdagangan yang ada) x 100%
13.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Persen	74.63	76.12	77.61	79.10	80.60	82.09	83.58	83.58	(Jumlah Izin Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja / Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Persen	13.19	13.25	13.32	13.39	13.45	13.52	13.58	13.58	(Jumlah Izin Toko Swalayan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja / Jumlah permohonan Izin Toko Swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar) x 100%
15.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Persen	0	0	2	3	3	4	5	5	(Jumlah produk unggulan yang dipasarkan / Jumlah produk unggulan daerah) x 100%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Persen	44.17	44.35	44.52	44.70	44.88	45.05	45.23	45.23	(Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten atau kota SIINAS / Total populasi perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry kabupaten atau kota) x 100%
2.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin PerLuasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah izin yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%
3.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah izin yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerLuasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75	76	77	78	79	80	81	81	(Jumlah izin yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%
5.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah realisasi izin yang diterbitkan / Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk) x 100%
6.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Persen	80	81	82	83	84	85	86	86	(Jumlah realisasi izin yang diterbitkan / Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk) x 100%
7.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75	76	77	78	79	80	81	81	(Jumlah realisasi izin yang diterbitkan / Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk) x 100%
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	50	51	52	53	54	55	60	60	(Jumlah realisasi sasaran pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIK / Jumlah total rencana pembangunan industri) x 100%
9.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Persen	22.97	22.97	29.88	36.08	42.28	48.48	54.67	54.67	
10.	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Persen	50	51	52	53	54	55	60	60	Capaian target tahapan penyelesaian RIPIK x 100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Persen	29.82	30.05	30.28	30.50	30.73	30.96	31.19	31.19	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun [n] Jumlah industri kecil dan menengah tahun [n-1]) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun [n-1]) x 100%
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Laporan	1	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah data industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten atau kota dalam SIINAS
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDA NG TRANSMIGRASI										
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya
2.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Permukiman	2	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya
3.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Satuan Permukiman	2	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3.46	3.46	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.50	Pengukuran persepsi masyarakat dengan indikator pengisian kuesioneryang meliputi 3 (Tiga) dimensi yaitu 1. Kontribusi masyarakat 2. Organisasi masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat
2.	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	Persen	36	41	50	53	56	59	60	60	Penghitungan yang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ serta tingkat kematangan UKPBJ

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.	Nilai LAKIP	Nilai	73.48	74.50	75.00	76.15	76.90	77.00	78.05	78.05	Rincian penilaian yang berdasarkan 5(lima) komponen yang dinilai yaitu a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi internal e. capaian kinerja
4.	Nilai LPPD	Nilai	3.3178	3.3200	3.3200	3.3300	3.3400	3.3400	3.3400	3.3400	Hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas : a. Capaian kinerja makro b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
5.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x 100
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	10.34	10.34	12	13	14	15	16	16	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik) x 100
7.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	13	15	15	15	15	15	15	15	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung) x 100
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
1.	Indek Kualitas Perencanaan	Nilai	0	6.3	6.5	7.5	7.9	8.0	8.1	8.1	Penghitungan dari aspek proses isi dan jaminan tindak lanjut, yang masing-masing dibuat indeks dengan menggunakan pembobotan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	31.82	49.55	51.34	53.42	54.75	55.29	56.67	56.67	(Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target / Jumlah seluruh indikator) x 100
5.02	KEUANGAN										
1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	18	19	20	23	25	25	28	28	((Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi / Total belanja APBD) - 1) x 100
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	47	48	50	53	55	57	60	60	((Nilai Absolut dari Total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD) 1) x 100
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4.20	4.20	4.27	4.30	4.34	4.37	4.40	4.42	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10 (sumber BPS)
4.	Indeks Pengelolaan Aset	Persen	55	60	60	60	65	65	70	70	1. Total aset tetap dibagi total aset dengan kondisi rusak ringan / rusak berat dikali 100 2. Total aset dengan kondisi baik dibagi total aset dengan kondisi rusak ringan / rusak berat dikali 100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	70	70	79,125	79,225	79,325	79,455	79,525	79,525	Pengukuran berdasarkan 6 (enam) dimensi (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (2) kualitas anggaran belanja dalam APBD (3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (4) Penyerapan Anggaran (5) Kondisi Keuangan Daerah (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)
6.	Manajemen Aset	Persen	80	80	80	83	85	88	90	90	Ketersediaan daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, proses inventarisasi asset tahunan, nilai asset tercantum dalam laporan anggaran
7.	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Laporan BPK
8.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	66	67	68	71	73	75	79	79	(Nilai Realisasi SiLPA / Total belanja anggaran tahun sebelumnya) x 100
9.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	27	28	28	29	30	33	35	35	(Jumlah Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan / Jumlah APBD) x 100
10.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	67	68	69	70	73	75	78	78	((Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan - Transfer Expenditures) / Jumlah belanja APBD) x 100
11.	Rasio PAD	Persen	7	8	10	15	20	20	20	20	(Jumlah PAD / Jumlah APD Non Migas) x 100
5.03	KEPEGAWAIAN										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	50	50	52	54	56	58	60	60	Bobot penilaian melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin
2.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	75	76	78	80	85	87	90	90	(Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)) x 100
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	8.58	17	15	19	24	29	34	34	(Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)) x 100
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	63.13	65	67	72	77	83	88	88	(Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas / Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA kebawah) x 100
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN										
1.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	Persen	10	10	10	15	20	25	30	30	Jumlah Usulan Rekomendasi dibagi Jumlah Usulan yang di akomodir dikali 100
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSA N PEMERINTAHAN										
6.01	INSPEKTORAT DAERAH										
1.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat Maturitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLIT IK										
1.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Ormas/LSM	21	21	24	29	36	46	59	59	Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten
2.	Jumlah peserta sosialisai wasbang	Orang	250	250	371	371	371	371	371	371	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan
3.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	Jumlah rapat sosialisasi yang dilakukan
4.	Pembinaan Partai Politik	Parpol	9	9	9	9	9	10	10	10	Jumlah partai politik yang mendapat pembinaan
5.	Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	OPD	15	15	15	15	15	15	15	15	Jumlah Dinas / instansi yang bersinergi dalam penanganan konflik sosial

TARGET INDIKATOR PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NATUNA

No	Sasaran		Indikator Layanan	Kondisi Awal	Target						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui	1	Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK	18,87	84	85	86	88	90	92	Dinas Kesehatan
2		2	Pemberian tablet tambah darah/Multiple mikronutrient supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	84,20	85,20	86,20	87,20	88,20	89,20	90,20	Dinas Kesehatan
3		3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	na	80	85	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
4		4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	64,78	68,67	72,80	77,17	81,80	86,71	91,91	Dinas Kesehatan
5		5	Pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan	39,09	70	70	70	71	71	71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Anak Usia 0 - 23 bulan	1	Praktik inisiasi menyusui dini	85,79	86,79	87,79	88,79	89,79	90,79	91,79	Dinas Kesehatan
7		2	Bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	46,83	48,83	50,83	52,83	54,83	56,83	58,83	Dinas Kesehatan
8		3	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI) beragam	89,11	89,21	89,31	89,41	89,51	89,61	89,71	Dinas Kesehatan
9		4	Anak usia 6-23 bulan masih mendapat ASI	89,11	89,21	89,31	89,41	89,51	89,61	89,71	Dinas Kesehatan
10		5	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11		6	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	89,87	89,92	89,96	90	90,05	90,09	90,14	Dinas Kesehatan
12		7	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13		8	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	86,1	88	89	90	91	92	93	Dinas Kesehatan
14		9	Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	78,70	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15		10	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	96,99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Anak Usia 24 - 59 Bulan	1	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
17		2	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	68,39	70,44	72,55	74,73	76,97	79,28	81,66	Dinas Kesehatan
18		3	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19		4	Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	78,70	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
20		5	Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
21		6	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	96,99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Remaja Putri	1	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	96,02	96,05	96,08	96,11	96,14	96,17	96,2	Dinas Kesehatan
23		2	Skrining Anemia Terhadap Remaja Putri	71,4	72,4	73,4	74,4	75,4	76,4	77,4	Dinas Kesehatan
24	Calon Pengantin	1	Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
25		2	Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	87,7	88	88,3	88,6	88,9	89,2	89,5	Dinas Kesehatan
26	Rumah Tangga dan Masyarakat	1	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	63,38	68,47	68,43	68,52	68,88	69,41	70,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
27		2	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	9,84	9,92	9,95	10,1	10,33	10,67	11,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28		3	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29		4	Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh TPK	82,29	90	90	90	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30		5	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA)	94,98	95,05	95,25	95,3	95,35	95,4	95,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31		6	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)	37	42	47	52	57	62	67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



BAB 7
PENUTUP

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna. Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati Natuna dan arah kebijakan tahun 2026 dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2026.

RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. RKPD menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang harus ditaati dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :

1) Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada

RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam Renja Perangkat Daerah.
3) Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
4) Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Natuna tahun 2026 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2026.
5) Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
6) Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
7) Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"**.

Ranai, 4 September 2025
BUPATI NATUNA,

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN



LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA